



Komitmen Tata Kelola yang Menyeluruh

Highly Committed Good
Corporate Governance



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

- | | | | |
|-----|--|-----|---|
| 464 | Ikhtisar Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Highlights | 676 | Permasalahan Hukum/Litigasi
Legal Matters/Litigation |
| 467 | Prinsip Tata Kelola Perusahaan
Principles of Corporate Governance | 678 | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya
Transparency of Financial and Non-Financial Conditions That Have Not Been Disclosed in Other Reports |
| 469 | Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Commitment of Corporate Governance | 681 | Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dengan Penyediaan Dana Besar
Provision of Funds to Related Parties and Large Exposures |
| 471 | Roadmap Penerapan Tata Kelola Perusahaan
GCG Implementation Roadmap | 684 | Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik
Provision of Funds for Social and Political Activities |
| 475 | Struktur Tata Kelola Perusahaan
Principles of Corporate Governance | 685 | ESOP dan MSOP
ESOP and MSOP |
| 480 | Kebijakan Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Policy | 685 | Buy Back Saham dan Obligasi
Shares and Obligation Buy Back |
| 485 | Index Asean CG Scorecard
Asean CG Scorecard Index | 686 | Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Serta Remunerasi Variabel yang Diterima Pegawai
Maximum and Minimum Salary Ratio |
| 503 | Direksi
Board of Directors | 687 | Sanksi Administratif
Administrative Sanction |
| 536 | Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders | 688 | Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku
Code of Ethics and Code of Conduct |
| 552 | Komite Direksi
Board of Directors Committee | 690 | Whistleblowing & Anti Fraud
Whistleblowing & Anti Fraud |
| 565 | Komite Pendukung Direksi
Board of Directors Supporting Committee | 693 | Pedoman Tata Kelola Perusahaan
GCG Guidelines |
| 579 | Dewan Komisaris
Board of Commissioners | 698 | Rencana Strategis Bank
Bank's Strategic Plan |
| 607 | Komite Dibawah Dewan Komisaris
Committee Under the Board of Commissioners | 703 | Akses Informasi Bank
Corporate Information Access |
| 636 | Tata Kelola Remunerasi
Remuneration Governance | 708 | Lembar Persetujuan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) 2016
Approval Sheet Good Corporate Governance (GCG) Report 2016 |
| 640 | Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary | 710 | Laporan GCG Unit Usaha Syariah
GCG Report Shariah Business Unit |
| 645 | Unit Audit Internal
Internal Audit Unit | | |
| 650 | Unit Kerja Kepatuhan
Compliance Unit | | |
| 663 | Anti Money Laundering & Assurance
Anti Money Laundering & Assurance | | |
| 666 | Eksternal Audit
Audit Eksternal | | |
| 669 | Sistem Pengendalian Intern
Internal Control System | | |

IKHTISAR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance Highlights

Perusahaan secara berkelanjutan selalu berupaya menyempurnakan penerapan praktik Good Corporate Governance di semua tingkatan organisasi.

The Bank always enforces sustainably to refine the Good Corporate Governance implementation throughout every organization level.

Ikhtisar Tata Kelola Perusahaan sepanjang tahun 2016 diantaranya adalah sebagai berikut:

Corporate Governance highlights throughout 2016 are as follows :

1. Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Code of Ethics and Code of Conduct

Merupakan komitmen Bank untuk menerapkan standar yang tinggi tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang dapat menggambarkan praktik-praktik bisnis yang sehat serta penerapan prinsip *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik.

The Bank is committed to the highest standard of Code of Ethics and Code of Conduct that reflect healthy business practices. The Bank is also committed to implementing Good Corporate Governance principles.

Bank telah melakukan pembaharuan dan penyempurnaan terhadap ketentuan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang merupakan acuan bagi karyawan, pejabat, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh mitra kerja Bank dalam melaksanakan tugasnya dan tanggung jawab masing-masing. Hal ini bertujuan agar seluruh pihak yang dimaksud bertindak sesuai dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi dalam setiap pekerjaan yang dilakukan.

The Bank has updated and improved the Code of Ethics and Code of Conduct that serve as the guideline for the employees, officers, BOC, BOD, and all business partners in performing their responsibilities. The Codes aim to ensure that all parties demonstrate the highest level of integrity and professionalism in their day-to-day activities.

2. Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Implementation of Anti-Money Laundering (AML) and Combating Financing of Terrorism (CFT)

Bank telah melakukan pengkinian atas Pelaksanaan Program APU dan PPT guna meningkatkan penerapan manajemen risiko dalam mengantisipasi kemungkinan penggunaan Bank sebagai media pencucian uang serta sarana pendanaan terorisme.

The Bank has updated its AML and CFT programs to enhance risk management implementation and anticipate the possibility that the Bank is used for money laundering and terrorism financing.

3. Pengembangan Sistem *Anti Money Laundering*

Anti Money Laundering System

Aplikasi *Anti Money Laundering System* yang baru telah diimplementasikan dan dipergunakan dalam proses *Transaction Monitoring, Case Management, Customer Due Diligent*, dan *Reporting*.

The Bank has developed, launched, and is now using the new Anti-Money Laundering System in *Transaction Monitoring, Case Management, Customer Due Diligent*, and *Reporting* processes.

Ikhtisar Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Highlights

4. Antisipasi Kejahatan *Cyber* Cyber Crime Prevention

Salah satu risiko yang menjadi perhatian serius dari Manajemen pada tahun 2016 adalah meningkatnya risiko kejahatan *cyber*, yang berkaitan erat dengan kebutuhan pasar akan penggunaan internet yang semakin meluas serta kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang. Atas kondisi ini, Bank terus berupaya untuk mengimplementasikan teknologi keamanan sistem agar mampu mengidentifikasi, memonitor dan menangkal setiap potensi risiko kejahatan/serangan *cyber*.

Cyber crime and the increasing risk of cyber crime were of serious concern of the Management in 2016. Cyber risk is closely related with market demands towards the extensive use of Internet as well as the rapidly developing information technology. Considering the situation at hand, the Bank applies system security technology to identify, monitor, and prevent cyber risk/cyber attack.

5. Business Continuity Management Business Continuity Management

Sebagai bagian dari tata kelola penerapan manajemen risiko perusahaan yang mengedepankan prinsip pencegahan, ketahanan dan kemampuan dengan respon yang efektif terhadap potensi risiko yang mengancam Bank, Bank terus-menerus mengembangkan *Business Continuity Management* (BCM) yang komprehensif dalam mengantisipasi risiko operasional yang timbul terkait kondisi ekstrim yang tergolong jarang terjadi namun berdampak besar (*catastrophic event*).

As part of the Bank's risk management and governance that focus on prevention, defense, and the ability to effectively respond risk potentials, the Bank continuously develops comprehensive Business Continuity Management (BCM) that anticipates potential risks relating to extreme and rare events that could bring major impacts (catastrophic events).

6. Compliance Awareness dan Peningkatan Budaya Ketaatan Compliance Awareness and Compliance Culture Nurturing

Bank telah melakukan sosialisasi, pemberian *training*, serta *compliance assessment* dalam upaya meningkatkan pemahaman budaya ketaatan serta *compliance awareness* di seluruh jenjang organisasi.

The Bank has conducted dissemination programs, trainings, and compliance assessment to drive the understanding of compliance culture and compliance awareness across all levels of the organization.

Ikhtisar Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Highlights

7. Pengkinian Kebijakan Perkreditan Bank

Bank's Credit Policy Update

Bank telah melakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan perkreditan diantaranya terkait segmen Global Banking, Community Financial Services (CFS), ketentuan limit industri sebagai *Management Action Trigger (MAT)*, dan *credit underwriting*. Selain itu dilakukan juga pengkinian kebijakan terkait jenis-jenis industri yang harus dihindari dalam pemberian kredit, termasuk di dalamnya, tetapi tidak terbatas pada industri yang tidak ramah lingkungan.

The Bank has updated and improved its credit policies, including policies on Global Banking segment, Community Financial Services (CFS), industry limit as Management Action Trigger (MAT), and credit underwriting. In addition, the Bank also updated its policies based on types of industry to avoid in credit provisioning, including but not limited to industry that brings adverse environmental impacts.

8. Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

Implementation of Integrated Risk Management Policy for Financial Conglomerate

Dalam rangka meningkatkan *Good Corporate Governance* dan penerapan manajemen risiko terintegrasi di Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia secara efektif dan mengacu pada ketentuan yang berlaku, maka Manajemen Bank selaku entitas utama dari Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia memandang perlu untuk menyesuaikan proses manajemen risiko bagi konglomerasi keuangan dengan kompleksitas dan karakteristik usaha Konglomerasi Keuangan dan sedang dalam proses memperbaharui Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia tersebut. Hal ini bertujuan diantaranya agar semakin meningkatkan stabilitas sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan daya saing Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

To improve Good Corporate Governance practices and to effectively implement integrated risk management in Maybank Indonesia Financial Conglomerate according to existing regulations, the Bank's management as the main entity in the Financial Conglomerate believes it is necessary for the Bank to adjust its risk management process to a process suitable for a financial conglomerate – its complexity and business characteristics. The Bank is in the process of improving its Integrated Risk Management Policy in Maybank Indonesia Financial Conglomerate. This initiative aims to, among others, increase financial system stability and sustainable growth that will ultimately uplift the competitiveness of Maybank Indonesia Financial Conglomeration.

9. Penilaian Sendiri 2016 ASEAN Corporate Governance Scorecards (ACGS)

2016 ASEAN Corporate Governance Scorecards (ACGS) Self Assessment

Manajemen Bank terus berusaha menyempurnakan ACGS dengan melanjutkan dari tahun-tahun sebelumnya salah satunya dengan menyelenggarakan 1 (satu) hari pelatihan bagi manajemen senior dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai komponen ACGS dan penerapannya dalam Bank.

The Bank's Management always conducts an effort to refine ACGS by continuing the GCG improvement from previous years i.e. by holding 1 (one) day coaching for Senior Management in order to improve understanding upon ACGS components and its implementation in the Bank.

PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Principles of Corporate Governance



Penerapan tata kelola perusahaan yang baik, konsisten dan berkelanjutan merupakan salah satu pilar untuk memperoleh kepercayaan investor, pemegang saham maupun masyarakat.

The proper, consistent and continuing implementation of Good Corporate Governance is a pillar to secure the trust of investors, shareholders and the general public.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Bank senantiasa patuh pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Memiliki sistem GCG adalah modal penting bagi peningkatan kinerja, kemampuan Bank memenuhi hak semua pemangku kepentingan, dan kepatuhan terhadap peraturan serta etika yang berlaku. Sebab itulah, Bank secara aktif dan konsisten mengawasi penerapan prinsip GCG di setiap kegiatan usaha dan seluruh bagian organisasi.

Terdapat 5 (lima) nilai yang melandasi praktik GCG, yaitu:

“Salah satu faktor yang menentukan kepercayaan investor, pemegang saham, dan pemangku kepentingan secara luas adalah tata kelola usaha yang baik, konsisten, dan berkelanjutan.”

In carrying out its business activities, the Bank consistently complies with the principles of Good Corporate Governance. GCG system is important for the Bank's efforts to enhance its performance, its ability to meet the rights of all stakeholders, and to comply with prevailing regulations and ethical values. Therefore, the Bank carries out active oversight to ensure GCG is implemented throughout all business activities organization-wide.

GCG is founded upon 5 (five) basic tenets:

“One of the things that determine the trust of investors, shareholders, and the stakeholders at large is robust, consistent, and continuous corporate governance practices.”

Prinsip Tata Kelola Perusahaan Principles of Corporate Governance



PRINSIP

Good Corporate Governance

5 PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

• TRANSPARANSI

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang material dan relevan mengenai Bank. Pengungkapan informasi yang jelas, tepat waktu, serta memadai.

• AKUNTABILITAS

Akuntabilitas merepresentasikan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya terlaksana secara efektif. Menetapkan tugas dan tanggung jawab serta penilaian kinerja secara jelas, baik pada tingkatan pengurus Bank maupun elemen organisasi lainnya.

• PERTANGGUNG JAWABAN

Pertanggungjawaban merupakan prinsip yang mengacu pada kesesuaian di dalam pengelolaan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Memastikan bahwa Bank menerapkan prinsip kehati-hatian, taat pada hukum dan peraturan yang berlaku serta melaksanakan pengendalian internal.

• INDEPENDENSI

Independensi atau kemandirian merupakan pengelolaan Bank secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

• KEWAJARAN

Kewajaran merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak setiap individu dan *stakeholder* lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5 PRINCIPLES GOOD CORPORATE GOVERNANCE

• TRANSPARENCY

Transparency is openness in the decision making process and disclosure of relevant and material information of the Bank. Disclosure of information is clear, timely, and sufficient.

• ACCOUNTABILITY

Accountability represents the clarity of function and responsibility within the Bank's organization so that its management is effective. This includes assigned tasks and responsibilities as well as clear performance assessment, both at management and other levels of the organization.

• RESPONSIBILITY

Responsibility is concerned with the consistency of the Bank's management meeting prevailing laws and regulations as well as principles of a healthy bank. This also refers to ensuring that the Bank applies prudence, exercises legal compliance and has internal Control

• INDEPENDENCY

Independency is a condition where the Bank is professionally managed without any conflict of interest or influence/pressure from any parties not in harmony with applicable laws and good banking governance principles.

• FAIRNESS

Fairness refers to the fair and equity of treatment in fulfilling the rights of individuals and stockholders arising from agreements and prevailing laws and regulations.

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Commitment of Corporate Governance

Praktik GCG yang telah dilaksanakan oleh Bank selama ini menguatkan keyakinan Bank bahwa komitmen GCG harus dimiliki oleh seluruh bagian organisasi dan dilaksanakan secara konsisten.

Tak hanya itu, komitmen juga perlu diperlihatkan secara nyata oleh jajaran kepemimpinan Bank. Hal ini telah berlangsung dan tampak dari kepatuhan tinggi Dewan Komisaris dan Direksi dalam menerapkan GCG, antara lain dengan: membentuk komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi, menyusun piagam kerja dewan, dan membuat kebijakan serta prosedur kerja yang jelas.

Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pun mendapat perhatian besar dari pihak manajemen. Sebagai hasilnya, Bank mampu meningkatkan kinerja keuangan maupun non-keuangan, menjaga kepercayaan investor dan pemegang saham, dan meningkatkan keberlanjutan usaha Bank.

Selain kepatuhan pada peraturan dan standar GCG tingkat nasional, sebagai salah satu penyedia jasa keuangan dengan jaringan regional Bank juga berkomitmen mengikuti standar tata kelola tingkat ASEAN dan internasional. Diikuti dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten dan profesional, Bank terus bertumbuh secara optimal dengan daya saing yang terjaga.

Secara nyata, wujud komitmen Bank terhadap tata kelola dan peningkatan kualitas pelaksanaannya dapat dilihat dari keberadaan aspek-aspek berikut ini:

- Visi, Misi dan Nilai Perusahaan yang jelas serta dikaji dan dievaluasi secara berkala oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
- Website Bank yang informatif, antara lain memuat informasi mengenai Bank untuk umum, aktual dan terkini dengan alamat: www.maybank.co.id.
- Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, Direksi dan Komite-komite.
- Pedoman Tata kelola Bank sebagai acuan tata kelola.
- Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sebagai acuan serta penerapan ketentuan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan dan ketentuan tata kelola yang berlaku bagi masing-masing lembaga jasa keuangan.
- Penetapan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank sebagai acuan karyawan, pejabat, Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh mitra kerja Bank dalam berperilaku di lingkungan kerja.

The implementation of GCG over the years affirms the Bank's belief that GCG commitment is vital for the organization and must be consistently carried out.

Moreover, it is important that the Bank's leadership demonstrates that very commitment. At Maybank, this commitment is visible from the strong compliance shown by the Board of Commissioners and Board of Directors in implementing GCG, among others by: establishing committees under the boards; developing and adopting boards' charters; and developing clear policies and work procedures.

Not only at policy level, the management also places much attention on implementation. As the result, the Bank has been able to increase its financial and non-financial performance, maintain investors' trust, and improve business continuity.

Other than the compliance with national GCG standards, as one of the leading financial services providers with a regional network, the Bank is also committed to complying with ASEAN and international standards of governance. With competent and professional human resource, the Bank continues to grow optimally and is consistently competitive.

In practice, the Bank's commitment to corporate governance and its enhancement is evidenced by:

- Vision, Mission and Corporate Values which are clear and assessed regularly by the Board of Commissioners and the Board of Directors.
- The informative Bank Website, which discloses information about the Bank to the public: www.maybank.co.id.
- Manuals for the Board of Commissioners, Board of Directors and Committees
- Bank Corporate Governance Guidelines as a reference for governance
- Integrated Corporate Governance Guidelines as a reference for the implementation of integrated corporate governance for the financial conglomerate, and applied corporate governance provisions for each financial services institution.
- Establishment of a Code of Ethic and Code of Conduct as a reference for employees, officers, the Board of Commissioners, the Board of Directors and all business partners on how to behave in the working environment.

Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Commitment of Corporate Governance

- Kebijakan *Whistle Blowing System* sebagai sarana untuk menjaga integritas Bank serta meningkatkan transparansi dengan diperolehnya laporan dan pengaduan serta saran dan kritik dari pegawai dan *stakeholder* lainnya.
- Kebijakan Benturan Kepentingan, dengan tujuan menciptakan tata laksana pekerjaan yang bebas dari konflik kepentingan.
- Sistem pengendalian internal yang kuat, termasuk fungsi audit internal dan eksternal serta fungsi manajemen risiko dan kepatuhan yang independen dari unit-unit bisnis dan operasional.
- *Compliance Charter* dan *Compliance Management Framework*
- Penetapan struktur, tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas bagi organisasi Bank.
- Program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang jelas dan dapat dilaksanakan.
- Penerapan mekanisme *checks and balances*.
- *Keselarasan penerapan GCG pada Bank dengan ketentuan OJK dan komponen ACGS secara berkelanjutan.*
- Whistle Blowing System and Policy as a means to maintain the integrity of the Bank and increasing transparency by obtaining reports and complaints as well as suggestions and criticisms from employees and other stakeholders.
- Conflict of Interest Policy, with the objective to create a work environment that is free from conflict of interest.
- A strong internal control system, including internal and external audit functions as well as risk and compliance management functions which are independent from the business and operational units.
- Compliance Charter and Compliance Management Framework.
- Establishment of a clear structure, responsibility and accountability across the Bank's organization.
- Programs of social and environment responsibility which are clear and implementable.
- Implementation of checks and balances mechanisms.
- Alignment of GCG implementation with OJK regulation and ACGS components which conducted sustainably.

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Bank percaya bahwa penerapan tata kelola yang terintegrasi, konsisten, dan mengacu pada standar yang tinggi memiliki dampak positif yang signifikan pada kinerja Bank secara keseluruhan. Sebagai organisasi, tata kelola yang baik turut membangun reputasi Bank di mata pemangku kepentingan. Sebagai entitas usaha, implementasi GCG turut menyumbang pada pertumbuhan kinerja melalui penetapan sistem dan alur kerja yang jelas.

Sebab itulah, bagi Bank, penerapan GCG bertujuan tidak hanya mematuhi peraturan, tetapi juga sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan organisasi yang terus menerus. Hal ini dibarengi dengan pengembangan nilai-nilai dan etika Bank dengan pelaksanaan yang senantiasa ditingkatkan.

Tidak hanya membangun reputasi dan kinerja di hadapan pemangku kepentingan di lingkup nasional, pelaksanaan GCG juga mendukung daya saing Bank di tingkat regional. Hal ini penting terutama mengingat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah berjalan. Standar GCG pun perlu dipertahankan agar sejajar dengan perusahaan lain di kawasan Asia Tenggara.

GCG IMPLEMENTATION OBJECTIVES

The Bank believes that integrated and consistent corporate governance that refers to the highest standard of implementation has positive and significant impacts to the Bank's overall performance. As an organization, good corporate governance helps shaping the Bank's reputation among its stakeholders. As a business entity, GCG contributes to performance growth by establishing clearly defined systems and workflow.

Therefore, the purpose of GCG implementation at the Bank goes beyond complying with regulations, but also reflects the Bank's continuous improvement and enhancement efforts. The Bank completes these endeavors by defining values and ethics that it updates from time to time.

Not only building its reputation in front of national stakeholders, GCG also bolsters the Bank's regional competitiveness – a crucial aspect considering that the ASEAN Economic Community (AEC) is currently in effect. GCG standards need to be maintained to make sure the Bank is at par with other Southeast Asian companies.

ROADMAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

GCG Implementation Roadmap

Berangkat dari komitmen menyempurnakan praktik tata kelola secara terus menerus, Bank telah menyusun *roadmap* sebagai panduan bagi langkah-langkah pengembangan saat ini dan mendatang. Pada setiap fase *roadmap*, Bank mengidentifikasi kegiatan konkret yang akan dilakukan di periode tersebut. Dipandu oleh perencanaan yang jelas, langkah-langkah penyempurnaan GCG di Bank berjalan teratur dan terarah. *Roadmap* GCG Bank dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut

From the commitment of continuous GCG improvements, the Bank has developed roadmaps as the guideline for enhancement steps today and in the future. For each phase of the roadmap, the Bank identifies concrete activities to be completed during the period. Guided by clear planning, GCG improvement measures within the Bank have been carried out with clear objectives. The Bank's GCG roadmap from year to year is as follows



2014

- ▶ Menerbitkan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko (PPMR) versi 3.
- ▶ Menerbitkan Ketentuan Penggunaan *Non Retail Scorecard*.
- ▶ Menerbitkan Kerangka Kerja Proses Penilaian Kecukupan Modal Internal (ICAAP) versi 3.
- ▶ Menerbitkan Kebijakan *Stress Testing*.
- ▶ Melakukan penyesuaian atas Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi.
- ▶ Penyempurnaan Kebijakan *Assets & Liabilities Management* dan Komite *Assets & Liabilities Management* (ALCO).
- ▶ Menerbitkan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) Kustodian dalam upaya dan dukungan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme.
- ▶ Menyempurnakan penerapan GCG Bank dengan ASEAN CG *Scorecard*.
- ▶ Melakukan *self assesment* dan pembuatan laporan GCG.
- ▶ Published the 3rd version guidelines/manual for Risk Management Implementation.
- ▶ Issued the user guidelines or manual for Non-Retail Scorecard.
- ▶ Issued the 3rd version framework for ICAAP.
- ▶ Published the Stress Testing policy.
- ▶ Adjusted/ adapted the Reputation Risk Management Policy.
- ▶ Policy for improved Assets & Liabilities Management and Assets & Liabilities Management Committee (ALCO).
- ▶ Published the Know Your Customer (KYC) policy in order to prevent money laundering and financing terrorism.
- ▶ Refined GCG BII implementation with ASEAN CG Scorecard.
- ▶ Issued consumer (customer) protection policy.
- ▶ Conducted self-assessment and produced GCG report.

2015

- ▶ Bank melakukan penyesuaian praktik GCG agar sesuai dengan regulasi terkini dan menjadikan GCG sebagai bagian dari budaya keseharian dalam operasional Bank.
- ▶ Melakukan penyesuaian Kebijakan Kredit sesuai *Credit Policy Framework* dan *Shariah Governance Framework* (Termasuk Kebijakan Pembiayaan Syariah)".
- ▶ Menyempurnakan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
- ▶ Melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme oleh Bank melalui penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dengan menerbitkan ketentuan internal terkait Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) Kustodian.
- ▶ Melakukan penyesuaian ketentuan pemrosesan permohonan Kredit Pemilikan Properti (KPP) dan Kredit Konsumsi Beragun Properti (KKBP).
- ▶ Melakukan penyesuaian Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) terkait Penetapan Kewenangan Pemutus Kredit.
- ▶ Memperbaharui ketentuan mengenai *Assets & Liabilities Management* dan Komite *Assets & Liabilities Management* (ALCO).
- ▶ Menerbitkan kebijakan terkait *assessment* terhadap perusahaan penyedia jasa alih daya.
- ▶ Conducted consistent GCG practices in accordance with current regulations and made GCG as part of the culture in the Bank's daily operations.
- ▶ Aligned Credit Policy with applicable Credit Policy Framework and Shariah Governance Framework (Including Shariah Financing Policy).
- ▶ Refined Risk Management Implementation Guidelines.
- ▶ Exercised efforts and support to prevent and eradicate crimes of money laundering and terrorism financing by the Bank through implementation of KYC Principle by issuing internal provisions related to KYC Principle.
- ▶ Adjusted procedures on Property Ownership Loan and Property-Based Consumer Loan application processing.
- ▶ Adjusted Bank Lending Policy in relation to Credit Approval Authority Establishment.
- ▶ Updated policies on Assets & Liabilities Management and Assets & Liabilities Management Committee (ALCO).
- ▶ Issued assessment policy on outsourcing vendors.
- ▶ Refined policy on Micro Banking Credit Processing Guidelines.
- ▶ Issued Trading Book Limit Policy (TBLP).
- ▶ Adjusted policies of Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).

Roadmap Penerapan Tata Kelola Perusahaan

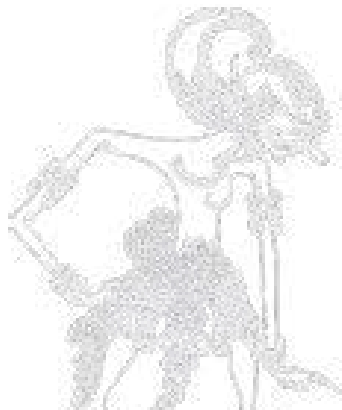
GCG Implementation Roadmap

2015

- ▶ Penyempurnaan kebijakan terkait Pedoman Proses Kredit Produk Micro Banking.
- ▶ Menerbitkan kebijakan terkait *Trading Book Limit Policy* (TBLP).
- ▶ Melakukan penyesuaian ketentuan terkait Kerangka Kerja Proses Penilaian Kecukupan Modal Internal (ICAAP).
- ▶ Melakukan penyesuaian terhadap Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi.
- ▶ Menyempurnakan Kebijakan *Stress Testing*.
- ▶ Menyempurnakan Kebijakan *Risk Control and Self Assessment* (RCSA).
- ▶ Menyempurnakan kebijakan *Incident Management & Data Collection* (IMDC) yang merupakan komponen dari kerangka kerja (*framework*) *Operational Risk Management* (ORM).
- ▶ Menyempurnakan kebijakan *Risk Appetite Statement*.
- ▶ Menyempurnakan kebijakan *Compliance Loan Checklist*.
- ▶ Menyempurnakan kebijakan Penilaian Risiko Operasional untuk membantu *Business Unit* dan *Supporting Unit* (BU/SU) dalam mengelola risiko operasional secara berkualitas dengan waktu proses yang efektif.
- ▶ Menerbitkan aturan mengenai Kerangka Kerja dan Kebijakan Tata Kelola Data (*Data Governance Framework*) sebagai acuan dalam pengelolaan data dan informasi.
- ▶ Menerbitkan ketentuan terkait Kebijakan FATCA.
- ▶ Menyempurnakan Kebijakan Komite Manajemen Risiko.
- ▶ Menerbitkan Kebijakan Perlindungan Konsumen (Nasabah).
- ▶ Menerbitkan kebijakan Pengadaan Sistem Teknologi Informasi dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen proyek dan pengadaan serta pengembangan sistem TI yang ada.
- ▶ Menyempurnakan Kebijakan Risiko Operasional dalam rangka pengkinian tahunan terkait kebijakan risiko operasional.
- ▶ Menerbitkan Kebijakan Penyediaan Dana Besar untuk Non Retail dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian bank dan pengelolaan risiko dalam memberikan penyediaan dana terutama penyediaan dana besar (*Large Exposure*).
- ▶ Made adjustments to Reputation Risk Management Policy.
- ▶ Enhanced Stress Testing Policy.
- ▶ Refined Risk Control and Self-Assessment (RCSA) policy.
- ▶ Enhanced Incident Management and Data Collection (IMDC) policy as a component of the Operational Risk Management framework.
- ▶ Refined Risk Appetite Statement policy.
- ▶ Refined Compliance Loan Checklist policy.
- ▶ Enhanced Operational Risk Assessment policy to help Business Units and Supporting Units (BU/SU) in managing operational risk quality with effective processing time.
- ▶ Issued Data Governance Framework and Policy as a reference in the management of data and information.
- ▶ Issued regulations concerning FATCA Policy.
- ▶ Refined Risk Management Committee Policy.
- ▶ Issued consumer (customer) protection policy.
- ▶ Issued policy on Information Technology System Procurement and Development in order to improve the quality of project management and procurement as well as the development of existing Information Technology System.
- ▶ Refined Operational Risk Policy in order to update operational risk policy annually.
- ▶ Issued Non-Retail Large Exposures Policy in order to implement prudential banking principles and risk management in providing funds, especially large exposures.

Bank melakukan *assesment* secara berkala terhadap kelengkapan dan *update* dari ketentuan internal yang berkaitan dengan GCG agar relevan dan sesuai dengan kondisi organisasi, strategi Perusahaan, dan peraturan yang berlaku.

The Bank conducts regular assessment on the completeness and validity of GCG-related internal rules so as to remain relevant and suitable with conditions of the organization, corporate strategy, and prevailing regulations.



Roadmap Penerapan Tata Kelola Perusahaan GCG Implementation Roadmap

2016

- ▶ Bank semakin meningkatkan penyelarasan praktik Tata Kelola dengan menjadikan Tata Kelola sebagai bagian dan budaya keseharian di dalam operasional Bank.
- ▶ Memperbaharui Piagam Komite Audit.
- ▶ Memperbaharui Piagam Audit Intern.
- ▶ Melakukan langkah-langkah positif yaitu penerapan strategi pemberian Fund Transfer Pricing (FTP) spesial untuk CFS dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) serta penetapan suku bunga untuk kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK), seperti penurunan suku bunga akibat adanya penurunan Bank Indonesia (BI) *rate*, penurunan *rate cap* Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), penurunan maksimum Time Deposit *Rate*, penurunan biaya dana Bank dan perubahan suku bunga acuan BI.
- ▶ Melakukan peninjauan dan pemantauan secara reguler dari berbagai limit berkaitan dengan pengelolaan *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB), Likuiditas, *Portfolio Trading* dan *Fixed Income in Banking Book* untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan mencapai strategi bisnis.
- ▶ Menerapkan strategi Cross Currency Swap (CCS) untuk memperoleh *yield* yang lebih baik.
- ▶ Penerbitan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD), *Subdebt*, Sukuk, dan *Bilateral Multilateral Trading Facility* (MTF) sepanjang tahun 2016 untuk meningkatkan dan memperbaiki struktur pendanaan.
- ▶ Memperbaharui ketentuan mengenai *Assets & Liabilities Management* dan Komite *Assets & Liabilities Management* (ALCO).
- ▶ Memperbaharui ketentuan mengenai Komite Kredit dan Komite Restrukturisasi Kredit.
- ▶ Memperbaharui ketentuan mengenai Komite Pengarah Teknologi Informasi.
- ▶ Memperbaharui ketentuan mengenai Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
- ▶ Memperbaharui Piagam Komite Pemantau Risiko.
- ▶ Memperbaharui Pedoman serta Komite Nominasi dan Remunerasi.
- ▶ Memperbaharui *Term of Reference* mengenai Komite Audit Intern.
- ▶ Memperbaharui *Term of Reference* mengenai Komite Nominasi dan Remunerasi.
- ▶ Memperbaharui ketentuan terkait Personnel Committee.
- ▶ Penyempurnaan ketentuan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku.
- ▶ The Bank promoted greater corporate governance alignment by placing governance as part of the corporate culture and the Bank's day-to-day operations
- ▶ Updated Audit Committee charter
- ▶ Updated Internal Audit charter
- ▶ Took positive steps, i.e. implemented Fund Transfer Pricing (FTP) strategy for CFS and Mortgage Loan (KPR) and determined interest rate on credit and third party funds. The Bank reduced its interest rate following Bank Indonesia's decision to lower the BI rate, rate cap of the Deposit Insurance Corporation (LPS), maximum reduction of Time Deposit Rate, lower cost of fund, and change in BI Rate.
- ▶ Reviewed and regularly monitored various limits with regards to the management of Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB), liquidity, and portfolio of trading and fixed income in banking book to ensure compliance with prevailing regulations and attainment of the Bank's business strategy.
- ▶ Applied Cross Currency Swap (CCS) strategy to generate higher yields
- ▶ Issued Negotiable Certificate of Deposit (NCD), Subdebt, Sukuk, and Bilateral Multilateral Trading Facility (MTF) in 2016 to enhance and improve funding structure
- ▶ Updated policies of Assets & Liabilities Management Assets & Liabilities Management Committee (ALCO).
- ▶ Updated policies of Credit Committee and Credit Restructuring Committee
- ▶ Updated policies of Information Technology Steering Committee.
- ▶ Updated policies of Internal Audit Unit (SKAI).
- ▶ Updated policies of Piagam Komite Pemantau Risiko.
- ▶ Updated Nomination and Remuneration Committee Guideline
- ▶ Updated Term of Reference of Internal Audit Committee.
- ▶ Updated Term of Reference of Nomination and Remuneration Committee.
- ▶ Updated policies of Personnel Committee.

Roadmap Penerapan Tata Kelola Perusahaan

GCG Implementation Roadmap

- ▶ Melakukan pengembangan Aplikasi Safewatch Filtering dan *upgrade* Aplikasi Safewatch agar dapat melakukan *interface* dengan *front-end* sistem (DCIF) dan mengakomodir proses *screening* terhadap *negative list* diantaranya Daftar Teroris, *sanction list* selain OFAC, ataupun *watch list* (antara lain *Internal Watchlist*, *Politically Exposed Person list*) dalam proses penerimaan nasabah baru.
- ▶ Mengembangkan kebijakan Manajemen Risiko Cyber Maybank Indonesia.
- ▶ Mengembangkan portal *e-learning Cyber Risk Awareness* agar dapat memberikan pelatihan untuk menimbulkan kesadaran atas keamanan *cyber* bagi seluruh karyawan.
- ▶ Mengimplementasikan mode blokir pada sistem *Data Loss Prevention* untuk secara efektif mencegah pengiriman informasi milik bank yang bersifat rahasia keluar ke eksternal secara tidak berwenang.
- ▶ Memperbaharui kebijakan dan prosedur *outsourcing* dalam rangka melaksanakan penilaian risiko *cyber (cyber risk assessment)* kepada perusahaan-perusahaan calon Penyedia Jasa IT (*IT Service Providers*) sebagai bagian dari proses seleksi.
- ▶ Menyempurnakan Kebijakan *Risk Appetite Statement*.
- ▶ Pelaksanaan *Enterprise Crisis Simulation Exercise (ECSE)* untuk menguji efektivitas implementasi dari BCP secara korporasi.
- ▶ Implementasi manajemen risiko dilakukan melalui kebijakan yang mengatur tentang jenis-jenis industri yang harus dihindari dalam pemberian kredit, termasuk di dalamnya, tetapi tidak terbatas pada industri yang tidak ramah lingkungan.
- ▶ Memperbaharui ketentuan Komite Manajemen Risiko.
- ▶ Memperbaharui Kebijakan *Trading Book Policy Statement (TBPS)* dan Non TBPS.
- ▶ Penetapan Kebijakan dan Pedoman Rencana Pendanaan Darurat
- ▶ Menyempurnakan Kebijakan Stress Testing.
- ▶ Melakukan penyesuaian ketentuan terkait Proses Penilaian Kecukupan Modal Internal (ICAAP).
- ▶ Memperbaharui Kebijakan Risiko Operasional
- ▶ Memperbaharui Kebijakan *Risk Control and Self Assessment (RCSA)*.
- ▶ Memperbaharui *Standard Operating Procedures (SOP) Incident Management & Data Collection (IMDC)*.
- ▶ Updated Code of Ethics and Code of Conduct
- ▶ Enhanced Safewatch Filtering Application and upgraded Safewatch Application to enable the system's interface with front-end system (DCIF) and accommodated screening process on negative lists, e.g. Terrorist List, sanction list other than OFAC, and watch list (among others Internal Watchlist, Politically Exposed Person list) to support new customer approval process.
- ▶ Updated policy of Maybank Indonesia Cyber Risk Management
- ▶ Developed Cyber Risk Awareness e-learning portal for the Bank to provide training on cyber security awareness to all employees
- ▶ Implemented blocking mode in Data Loss Prevention system to effectively prevent the illegal transfer of the Bank's confidential information to external parties.
- ▶ Updated outsourcing policies and procedures as part of cyber risk assesment process applicable to IT Service Provider candidates during selection
- ▶ Updated Risk Appetite Statement Policy.
- ▶ Carried out Enterprise Crisis Simulation Exercise (ECSE) to test the effectiveness of BCP implementation corporate-wide
- ▶ Implemented risk management through policies that stipulate the types of industries to avoid in credit provisioning, including but not limited to industry that brings adverse environmental impacts
- ▶ Updated policy of Risk Management Committee
- ▶ Updated Trading Book Policy Statement (TBPS) and Non TBPS.
- ▶ Established Policy on Planning Guideline of Contingency Funding
- ▶ Improved Stress Testing policy
- ▶ Adjusted certain rules with respect to Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)
- ▶ Updated Operational Risk Policy
- ▶ Updated Risk Control and Self Assessment (RCSA) Policy
- ▶ Updated the Standard Operating Procedures (SOP) of Incident Management & Data Collection (IMDC).

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Principles of Corporate Governance

Mematuhi peraturan dan persyaratan sistem tata kelola, serta sesuai dengan UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, Bank memiliki 3 (tiga) organ utama untuk menjalankan perusahaan.

Organ pertama dan tertinggi adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS adalah forum bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan dan melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Bank secara keseluruhan. Dalam RUPS, pemegang saham menerima laporan pertanggungjawaban pengelolaan Bank, menunjuk dan menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta melakukan pengambilan keputusan lain yang berada di dalam lingkup wewenangnya.

Dewan Komisaris adalah organ berikutnya dengan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat. Pada prinsipnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha di bawah kepemimpinan Direksi berjalan sesuai peraturan dan tujuan Bank. Sebagai pengawas, Dewan Komisaris juga bertugas mencegah penyalahgunaan wewenang di dalam organisasi. Untuk melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki komite-komite pendukung. Dewan Komisaris Maybank telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Selanjutnya, organ Direksi, memiliki mandate representasi dan manajerial. Direksi menjalankan peran utama dalam keseharian operasional Bank dan bertanggung jawab atas implementasi strategi dan inisiatif Bank baik jangka pendek maupun panjang. Sejalan dengan persyaratan peraturan, Direksi membentuk komite-komite yang membantu pelaksanaan tanggung jawabnya, yaitu Komite Manajemen Risiko, Komite Audit Internal, Komite Assets & Liabilities Management (ALCO), dan Komite Pengarah Teknologi Informasi. Direksi juga telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi untuk membantu proses penerapan kebijakan manajemen risiko serta pengelolaan eksposur risiko yang diambil konglomerat keuangan.

Di luar komite yang dipersyaratkan keberadaannya oleh peraturan, Bank diperbolehkan membentuk komite lain sesuai kebutuhan Bank. Untuk Maybank Indonesia, komite-komite ini dibentuk di bawah Direksi melalui surat keputusan Direksi, yaitu Komite Kredit, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite *Human Capital* dan Personnel Committee.

In compliance with governance system and pursuant to Limited Liability Company Act No. 40 of 2007, the Bank has 3 (three) main organs.

The first and highest organ is the General Meeting of Shareholders (GMS), a forum for shareholders to take decisions and exercise their oversight on the Bank's overall performance. In a GMS, the shareholders receive accountability report on the Bank's management, appoints and approves members of the Board of Commissioners and Directors, and make other decisions according to its scope of authority.

The next organ is the Board of Commissioners that holds oversight and advisory functions. In principle, BOC is responsible to ensure that business activities under the leadership of the Board of Directors are in line with the regulations and the Bank's business objectives. As an oversight unit, BOC is also responsible to prevent misuse of authority in the organization. To implement its responsibilities, the BOC has supporting committees. At Maybank, these committees are Audit Committee, Risk Oversight Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Integrated Governance Committee.

The other organ is Board of Directors, which has representation and managerial mandate. BOD's main role is executing the Bank's daily business affairs and is responsible for the implementation of the Bank's short and long-term strategies and initiatives. In line with regulatory requirements, BOD has established committees to support its duties, namely Risk Management Committee, Internal Audit Committee, Assets & Liabilities Management Committee (ALCO), and IT Steering Committee. The BOD has also established Integrated Risk Management Committee that oversees the implementation of risk management and risk exposure taken by the Bank as part of financial conglomeration.

Apart from the required committees, the Bank may also establish other committees as needed. For Maybank Indonesia, the committees are established under the BOD by virtue of BOD decision letters, namely Credit Committee, Credit Restructuring Committee, Impairment Committee, and Human and Personnel Committee.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Principles of Corporate Governance

Pembagian tanggung jawab dan wewenang setiap komite di bawah kedua dewan serta Dewan Komisaris dan Direksi sendiri dituangkan secara formal dalam dokumen piagam. Piagam menjadi rujukan pelaksanaan kegiatan komite, Dewan Direksi, dan Direksi.

Selanjutnya, pelaksanaan tugas Direksi juga didukung oleh fungsi Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan amat penting dalam memastikan kelancaran komunikasi Bank dengan pemangku kepentingan antara lain melalui berbagai pelaporan Bank kepada regulator dan pengungkapan informasi publik, kepatuhan Bank sebagai perusahaan publik dengan peraturan pasar modal, dan pelaksanaan tata kelola. Peran penting Sekretaris Perusahaan turut meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Di samping berbagai komite, dalam kepengurusan Bank, Direksi juga didukung oleh berbagai unit kerja, yaitu: Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Unit Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Unit kerja General Legal & Counsel, Unit Kerja *Anti Money Laundering & Assurance*, dan Anti Fraud. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ dan/atau unit kerja di Bank penerapan prinsip *checks and balance* serta sistem pengendalian internal yang baik.

Secara keseluruhan, struktur tata kelola dan pelaksanaan tugas setiap bagian dalam struktur tersebut sudah berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar tata kelola yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

The division of responsibilities and authorities between committees under the boards as well as between BOC and BOD are formally outlined in charter documents. The committees, BOC, and BOD refer to the charters for their duty implementation.

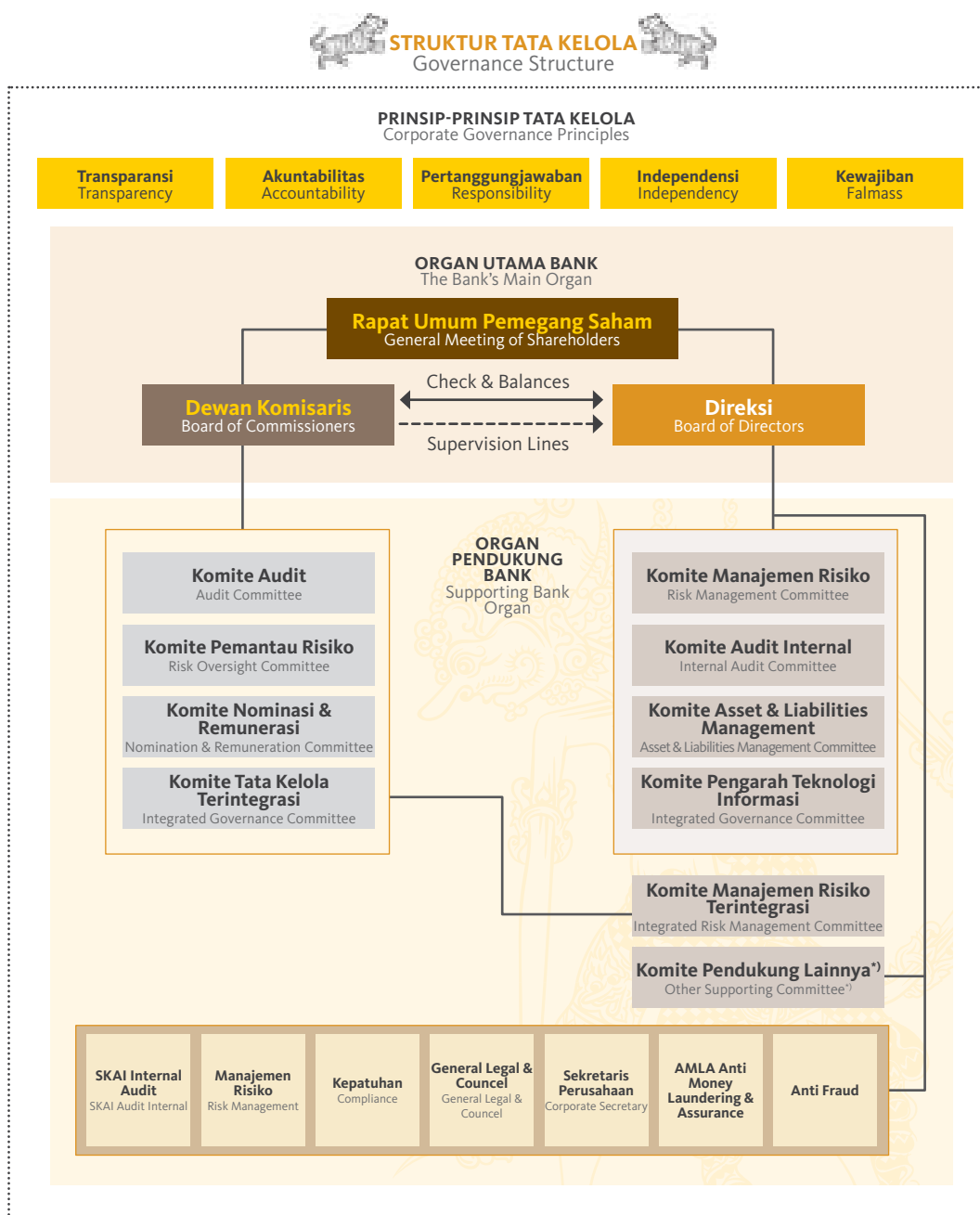
Further, the BOD is also assisted by Corporate Secretary function. Corporate Secretary is vital in ensuring the Bank's smooth communications with stakeholders, among others through reporting to regulators and public information disclosure; the Bank's compliance with capital market regulations as a public company; and governance implementation. The role of Corporate Secretary also enhances the trust of shareholders and stakeholders.

Other than committees, in managing the Bank the BOD by work units, which are: the Internal Audit Unit (SKAI), Risk Management Unit, Compliance Unit, General Legal & Counsel Unit, Anti Money Laundering & Assurance Unit, and Anti Fraud Unit. The clear separation of duties among organs and/or units in the Bank represents the checks and balance principles and rigorous internal control.

Overall, the governance structure and the exercise of responsibilities of all units in the structure are based upon governance fundamental principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

Struktur Tata Kelola Perusahaan Principles of Corporate Governance

Berikut adalah bagan struktur tata kelola Maybank Indonesia dalam rangka menerapkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik:
The following depicts the governance structure of Maybank Indonesia in the implementation of good corporate governance:



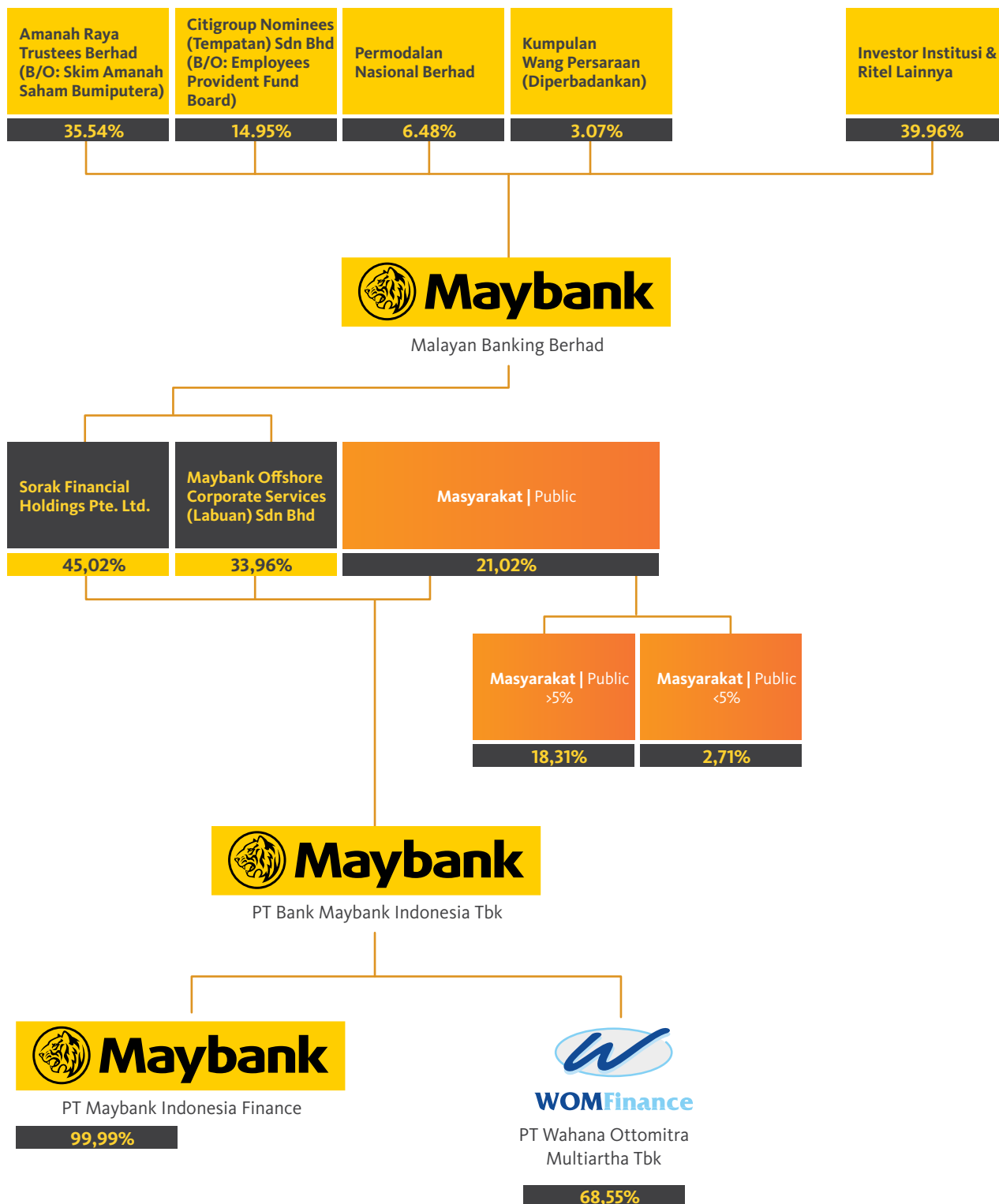
Catatan:

*) Komite Pendukung Lainnya: Komite Kredit, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite Human Capital dan Personnel Committee Reporting Lines Coordinations Lines

*) Other support committees: Credit Committee, Credit Restructuring Committee, Impairment Committee, Human Capital Committee, and Personnel Committee. Reporting Lines Coordinations Lines

Struktur Grup Perusahaan

Corporate Group Structure



Entitas Anak & Entitas Asosiasi

Subsidiaries & Affiliates



Perusahaan Company	Kegiatan Usaha Business Activity	% Kepemilikan % Ownership
Entitas Anak Subsidiaries		
PT Maybank Indonesia Finance	Pembiayaan Financing	99,99%
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	Pembiayaan Financing	68,55%
Entitas Asosiasi Affiliates		
PT Penjamin Kredit Pengusaha Indonesia	Jasa Penjaminan Guarantee Funds Services	9,83%
PT Sarana Sulsel Ventura	Modal Ventura Venture Capital	9,31%
PT Sarana Sulut Ventura	Modal Ventura Venture Capital	7,14%
PT Sarana Jambi Ventura	Modal Ventura Venture Capital	4,49%
PT Sarana Bali Ventura	Modal Ventura Venture Capital	3,44%
PT Sarana Riau Ventura	Modal Ventura Venture Capital	3,39%
PT Sarana Sumsel Ventura	Modal Ventura Venture Capital	2,55%
PT Sarana Kalbar Ventura	Modal Ventura Venture Capital	2,45%
PT Bhakti Sarana Ventura	Modal Ventura Venture Capital	2,41%
PT Sarana Sumut Ventura	Modal Ventura Venture Capital	2,32%
PT Sarana Lampung Ventura	Modal Ventura Venture Capital	1,69%
PT Sarana Sumbar Ventura	Modal Ventura Venture Capital	1,37%
PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	Lembaga Keuangan Non-Bank Non-Bank Financial Institutions	0,94%
PT Bank Capital Indonesia Tbk	Bank	0,20%
PT Aplikanusa Lintasarta	Sistem Jaringan Komunikasi Communication Network System	0,03%

KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance Policy

Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan antara lain dilakukan dengan mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
5. Surat Edaran Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
10. Peraturan Nomor X.K.6 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik-Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012.
11. Kriteria penilaian *Annual Report Award* tahun 2015.
12. *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.
13. *Roadmap* Pedoman Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

Corporate Governance policies are formulated with reference to, among others:

1. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (LLC).
2. Financial Services Authority Regulation No.55/POJK.03/2016 dated 7 Desember 2016 on Good Corporate Governance Implementation in Commercial Banks.
3. Bank Indonesia Circular Letter No. 15/15/DPNP dated 29 April 2013 on Good Corporate Governance Implementation in Commercial Banks.
4. Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 on Good Corporate Governance Implementation in Shariah Commercial Banks and Shariah Business Units.
5. Circular Letter No. 12/13/DPbS dated 30 April 2010 on Good Corporate Governance Implementation in Shariah Commercial Banks and Shariah Business Units.
6. Financial Services Authority Regulation No.18/POJK.03/2014 dated 18 November 2014 on Integrated Governance Implementation for Financial Conglomerations.
7. Financial Services Authority Circular Letter No.15/SEOJK.03/2015 dated 25 May 2015 on Integrated Governance Implementation for Financial Conglomeration.
8. Financial Services Authority Regulation No.6/POJK.03/2015 dated 31 March 2015 on Transparency and Publication of Bank Reports.
9. Financial Services Authority Circular Letter No. 43/SEOJK.03/2016 dated 28 September 2016 on Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports.
10. Regulation No. X.K.6 on Presentation of Annual Report of Issuers or Public Companies-Attachment to Decision of Bapepam LK's Chairman No. Kep-431/BL/2012 dated 1 August 2012.
11. Assessment criteria of Annual Report Awards 2015.
12. *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.
13. *Roadmap* of Indonesia Corporate Governance Guidelines issued by Financial Services Authority.
14. Financial Services Authority Regulation No.21/POJK.04/2015 dated 16 November 2015 on Governance Guidelines Implementation of Public Companies.
15. Financial Services Authority Circular Letter No.32/SEOJK.04/2015 dated 17 November 2015 on Governance Guidelines of Public Companies.
16. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
17. Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.

18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Situs Web Emiten Atau Perusahaan Publik.
20. Anggaran Dasar Perusahaan.

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan antara lain diwujudkan melalui komitmen tata kelola, rencana strategis, visi dan misi, *core value* serta serangkaian kebijakan internal antara lain sebagai berikut:

Komitmen Tata Kelola Perusahaan

Bank berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank. Komitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non-keuangan Bank serta memperoleh kepercayaan investor dan pemegang saham. Komitmen Tata Kelola Perusahaan tersebut antara lain tertanam dalam visi dan misi, *core value*, serta rencana strategis Bank.

Rencana strategis

Pada tahun 2016, Manajemen Bank telah merumuskan fokus strategis yang akan diterapkan untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan ke depan sesuai dengan Visi dan Misi Bank dengan memperhatikan prospek perekonomian dan faktor risiko ke depan serta faktor-faktor penting yang diperkirakan akan mempengaruhi dan menjadi perhatian utama dalam pengembangan bisnis Bank, termasuk faktor kesiapan Bank, baik dari sisi sumber daya maupun infrastruktur dalam mengantisipasi potensi pertumbuhan bisnis dan dengan tetap mengacu kepada perkembangan kondisi perekonomian terkini.

Visi dan Misi Bank

Rencana Strategis Bank disusun berdasarkan Visi Bank yaitu "Untuk menjadi penyedia layanan keuangan terkemuka di Indonesia, yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkomitmen penuh dan inovatif untuk menciptakan nilai dan melayani komunitas" (*To be a leading financial services provider in Indonesia, driven by passionately committed and innovative people, creating value and serving communities*) dan Misi Bank yaitu sebagai "Penyedia jasa keuangan yang humanis (*Humanising Financial Services*), yang senantiasa berada di tengah-tengah komunitas untuk mendukung pertumbuhan usaha nasabah".

18. Financial Services Authority Regulation No.35/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 on the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies.
19. Financial Services Authority Regulation No. 8/POJK.04/2015 dated 25 June 2015 on the Web Sites of Issuers or Public Companies.
20. Articles of Association.

Corporate Governance Policy is realized through governance commitment, strategic planning, vision and mission, core value as well as a series of internal policies, among others as follows:

Corporate Governance Commitment

The Bank is committed to apply good corporate governance at all levels of the organization. Commitment to implement good corporate governance is done in an effort to improve the Bank's financial and non financial performance as well as to obtain trust of the investors and shareholders. The Corporate Governance Commitment is embedded in the vision and mission, core values, and strategic planning of the Bank.

Strategic Planning

Bank's Strategic Planning is developed based on Bank's Vision which is "To be a leading financial services provider in Indonesia, driven by passionately committed and innovative people, creating value and serving communities" and Bank's Mission which is as a "Humanising Financial Services, which is always in the middle of a community to support the growth of the customer's business".

Bank's Vision and Mission

Bank's Strategic Planning is developed based on Bank's Vision which is "To be a leading financial services provider in Indonesia, driven by passionately committed and innovative people, creating value and serving communities" and Bank's Mission which is as a "Humanising Financial Services, which is always in the middle of a community to support the growth of the customer's business".

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Policy

Nilai-nilai Perusahaan (Core Value)

Bank memiliki *Core Value* Perusahaan yang dikenal dengan Tiger yaitu *Teamwork, Integrity, Growth, Excellence & Efficiency*, dan *Relationship Building*.

Secara lebih jelas *Core Value* dijelaskan pada sub Bab Profil Perusahaan.

Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi

Secara garis besar, pedoman Dewan Komisaris dan Direksi memuat perincian tugas dan tanggung jawab, etika kerja, tata cara rapat, dan hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Dibuat dalam dua bahasa, pedoman ini adalah acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan usaha Bank.

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Etika bekerja dan berperilaku, baik dalam lingkungan bank maupun saat berhubungan dengan pemangku kepentingan, dituangkan dalam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku. Untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan terkini, Kode Etik diperbarui setiap tahun. Informasi terperinci mengenai kode etik dijelaskan dalam sub bab Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku.

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Bank telah menerapkan tata kelola terintegrasi sejalan dengan ditetapkan Bank sebagai Entitas Utama dan konglomerat keuangan. Untuk itu, Bank sudah menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, termasuk Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama dan Kerangka Tata Kelola bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko

PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah Entitas Utama dalam konglomerat keuangan Maybank Indonesia. Sebagai entitas keuangan, Maybank Indonesia bertanggung jawab dan berwenang menyusun kebijakan manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Kebijakan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerat keuangan dituangkan ke dalam dokumen formal dan memuat penjelasan manajemen risiko yang komprehensif.

Compliance Charter Dan Compliance Management Framework

Budaya kepatuhan, atau *Compliance Culture*, perlu ditumbuhkan sebagai bagian dari pelaksanaan Fungsi Kepatuhan. Untuk itu, Bank melalui Direksi telah mengambil langkah menyebarluaskan dan menanamkan budaya kepatuhan, yaitu dengan menyusun *Compliance Charter* dan *Compliance Management Framework* sebagai acuan bagi setiap karyawan.

Core Value

The Bank has Core Values, known as Tiger, which are Teamwork, Integrity, Growth, Excellence & Efficiency, and Relationship Building. Core values are more clearly explained in the Company Profile Chapter.

Boards of Commissioners and Directors Guidelines

Overall, the Board of Commissioners and Directors' Manuals contain details of responsibilities, work ethics, meeting arrangements, and relationship between the two boards. Prepared in two languages, the BOC and BOD refer to the manuals in the performance of their responsibilities to achieve the Bank's goals.

Code of Ethics and Code of Conduct

Professional and behavior ethics at the workplace and when interacting with stakeholders are outlined in the Code of Ethics and Code of Conduct documents. To maintain the relevancy of the Bank's policies with current developments, the Code of Ethics is updated annually. Detailed disclosure on Code of Ethics is available under Code of Ethics and Code of Conduct sub-chapter.

Integrated Governance Guidelines

Following the Bank's establishment as the Main Entity in the financial conglomerate, the Bank has started to implement integrated corporate governance. The Bank has developed Integrated Governance Guidelines that includes Governance Frameworks for a Financial Services Institution in the Financial Conglomerate.

Policy of Integrated Risk Management

PT Bank Maybank Indonesia Tbk is the main entity in Maybank Indonesia's financial conglomerate. As a financial institution, Maybank Indonesia is responsible and has the authority to develop integrated risk management policy pursuant to the regulations of the Financial Services Authority. Integrated risk management policy is outlined in a formal document and contains comprehensive explanation on risk management.

Compliance Charter and Compliance Management Framework

Compliance Culture needs to be cultivated as part of Compliance implementation. To that end, the Bank through the Board of Directors has taken measures to disseminate and instill corporate culture, namely by preparing Compliance Charter and Compliance Management Framework for all employees.

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Policy

Shariah Governance Framework

Kepatuhan di bidang perbankan syariah memiliki nilai penting yang sama besarnya dengan kepatuhan Bank secara keseluruhan di bidang perbankan lain. Untuk itu, sejak 2013 Bank telah mengimplementasikan Kerangka Kerja Tata Kelola Syariah (*Shariah Governance Framework*).

Corporate Social Responsibility

Secara konsisten Bank melaksanakan berbagai kegiatan tanggung jawab sosial. Hasil kegiatan dilaporkan secara berkala kepada para pemangku kepentingan dan dapat diakses oleh publik secara luas. Dalam Laporan Tahunan ini, Tanggung Jawab Sosial diuraikan di bawah sub bab terkait.

PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Bank melaksanakan penilaian tata kelola untuk mengukur kemajuan dan mutu praktik GCG selama periode tertentu. Penilaian meliputi 2 (dua) metode, yaitu penilaian mandiri dan penilaian pihak eksternal yang independen. Hasil penilaian diungkapkan Bank secara transparan.

Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan oleh Pihak Eksternal

Salah satu pihak independen yang melaksanakan penilaian pelaksanaan GCG adalah The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD). IICD telah berpengalaman mengevaluasi dan melakukan pemeringkatan perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan memiliki kapitalisasi pasar yang besar.

Pada tahun 2016, Maybank Indonesia berhasil meraih penghargaan sebagai *The Best CG Financial Sector oleh The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)*, 7 November 2016.

Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Bank melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap kecukupan pelaksanaan GCG secara berkala yang dilakukan paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Penilaian sendiri terhadap pelaksanaan GCG dilakukan secara terstruktur yang diintegrasikan serta dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* sebagai suatu proses yang berkesinambungan. Selain penilaian pelaksanaan GCG Bank secara Individu, Bank juga melakukan penilaian pelaksanaan GCG secara konsolidasi terhadap perusahaan anak, yaitu WOM Finance dan Maybank Indonesia Finance.

Shariah Governance Framework

Compliance in shariah banking is equally important to the Bank's overall compliance in other banking segments. Recognizing this, in 2013 the Bank started to implement Shariah Governance Framework.

Corporate Social Responsibility

The Bank consistently carries out various corporate social responsibility activities. Every certain period, the Bank reports the results of its CSR programs to stakeholders; reports are also accessible to the public at large. CSR report is presented under the relevant sub-chapter of this Annual Report.

GCG IMPLEMENTATION ASSESSMENT

The Bank carries out governance assessment to measure the progress and quality of its GCG practices for a certain periode. The assessment is done through 2 (two) methods: self-assessment and external assessment by independent third parties. The Bank discloses transparently results of assessment.

GCG Implementation Assessment by External Parties

IICD, or the Indonesian Institute for Corporate Directorship is one of the independent parties that assess the Bank's GCG quality. IICD has had extensive experience in evaluating and rating public and listed companies on the Indonesia Stock Exchange with large market capitalization.

In 2015, Maybank Indonesia was awarded as The Best CG Financial Sector from The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD), 7 November 2016.

GCG Implementation Self-Assessment

The Bank conducts GCG implementation self-assessments on a regular basis, at least every semester at the end of June and December. GCG implementation self-assessment is conducted in a structured, integrated, and grouped within a governance system that consists 3 (three) governance aspects, namely governance structure, governance process, and governance outcome as a continuous process. In addition to GCG implementation self-assessment, the Bank also conducts GCG implementation assessment as consolidated with subsidiaries WOM Finance and Maybank Indonesia Finance.

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Policy

Hasil Penilaian Sendiri (*self assessment*) Pelaksanaan GCG disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (RBBR). Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG yang disampaikan oleh Bank. Apabila terdapat perbedaan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG Bank yang material, yaitu mengakibatkan hasil Peringkat Faktor GCG yang berbeda dengan hasil penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh Regulator, maka Bank harus melakukan revisi terhadap hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG tersebut.

Selama tahun 2016 tidak terdapat perbedaan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG yang dilakukan oleh Bank dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan oleh Regulator

Selain IICD, pelaksanaan tata kelola Bank juga dinilai oleh pemerintah, yaitu melalui OJK sebagai lembaga yang berwenang atas entitas jasa keuangan di Indonesia. Evaluasi OJK didasarkan pada hasil penilaian sendiri GCG oleh Bank. Tidak tertutup kemungkinan bahwa, berdasarkan evaluasinya, OJK mengidentifikasi Peringkat Faktor GCG yang berbeda dengan hasil penilaian Bank. Dalam hal perbedaan material, Bank akan merevisi hasil penilaian sendirinya.

Hasil penilaian sendiri GCG dan laporan tingkat kesehatan Bank untuk posisi Desember 2016 telah diserahkan oleh Maybank Indonesia kepada OJK. Untuk posisi pada periode tersebut, Bank mendapatkan "Peringkat 2" atau berpredikat "Baik".

Tabel Hasil Penilaian Sendiri GCG

Tahun/Year	2014	2015	2016
Skor Penilaian Sendiri GCG GCG Self Assessment Score	2	2	2

Results of GCG implementation self-assessments are submitted by the Bank to the Financial Services Authority in conjunction with the submission of Risk Based Bank Health Level Assessment Report (RBBR). The Financial Services Authority conducts assessments or evaluations of the results of the selfassessment of GCG implementation submitted by the Bank. Should there be any material differences in the results with the GCG self-assessment, the Bank will have to revise the results of the self-GCG assessment.

During 2016, there were no differences in the results of the GCG implementation self-assessment conducted by the Bank and the Financial Services Authority.

GCG Implementation Assessment by the Regulator

Aside from IICD, the Bank's governance quality is also assessed by the government, i.e. through OJK as Indonesia's competent institution over financial services entities. OJK performs its evaluation based on the Bank's self-assessment. It is always possible that OJK has a dissenting result of evaluation in terms of GCG rating compared to the Bank's result. Where material differences occur, the Bank will adjust its assessment outcome.

The Bank had submitted the result of its GCG assessment and the Bank's risk-based assessment for December 2016 position to OJK. For the said period, the Bank had "Rank 2" or "Good".

Table of GCG Self Assessment Result

Tahun/Year	2014	2015	2016
Skor Penilaian Sendiri GCG GCG Self Assessment Score	2	2	2

INDEX ASEAN CG SCORECARD

Asean CG Scorecard Index

Dalam upaya menerapkan ASEAN CG Scorecard, Bank mengukur praktik-praktik tata kelola dan menyelaraskan praktik penerapan tata kelola dengan ASEAN CG Scorecard melalui *self assessment*.

Berikut *self assessment* yang diselaraskan antara isi Laporan Tahunan Bank 2015 dengan INDEX ASEAN Corporate Governance Scorecard. Format asli mengandung aturan-aturan dan referensi petunjuk. Hasil Indeks berikut kami ringkas, namun sesuai dengan setiap kriteria.

In an effort to implement ASEAN CG Scorecard, the Bank measures governance practices and aligns governance practices with ASEAN CG Scorecard through self-assessments.

The following is the self assessment framework aligned between the contents of Bank 2015 Annual Report with INDEX ASEAN Corporate Governance Scorecard. The original format has the rules and guiding reference. We summarize the following index result based on each criterion.

Index	Deskripsi Description	Ya Yes	Tidak No	Lokasi Informasi Source	Penjelasan dan Referensi Explanation and References	Halaman Page
LEVEL I						
BAGIAN A: HAK - HAK PEMEGANG SAHAM SECTION A: RIGHTS OF SHAREHOLDERS						
A.1 Hak Dasar Pemegang Saham Basic shareholder rights						
A.1.1	Apakah Perseroan membayarkan dividen (interim dan final/tahunan) secara adil dan tepat waktu; yaitu, semua pemegang saham diperlakukan sama dan dibayar dalam waktu 30 hari setelah dividen interim telah dinyatakan dan dividen final telah disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)? Does the company pay (interim and final/annual) dividends in an equitable and timely manner; that is, all shareholders are treated equally and paid within 30 days after being (i) declared for interim dividends and (ii) approved by annual general meeting (AGM) for final dividends?	Ya	Tidak	Pengumuman Dividen/Website Perusahaan/ Laporan Tahunan Dividends announcement		248
A.2 Hak untuk Berpartisipasi dalam Keputusan mengenai Perubahan Perusahaan Yang Fundamental Right to participate in decisions concerning fundamental corporate changes.						
Apakah pemegang saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam hal : Do shareholders have the right to participate in the event:						
A.2.1	Amandemen/perubahan terhadap Anggaran Dasar Perusahaan Amendments /changes to the Articles of Association?	Ya	Tidak		Para pemegang saham berhak untuk berpartisipasi dalam perubahan/amandemen terhadap Anggaran Dasar Perusahaan. Shareholders are entitled to participate in the amendment of the Company's constitution.	538
A.2.2	Otorisasi terkait penerbitan saham tambahan? Authorizations related to the issuance of additional shares?	Ya	Tidak		Pemegang saham memiliki kewenangan dalam penambahan saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Shareholders are entitled to authorize the issuance of additional shares as stipulated in the Articles of Association.	Laporan Tahunan/ Website Perusahaan/ Anggaran Dasar Annual Report/ Company website/ Articles of Association 538
A.2.3	Pengalihan seluruh atau sebagian besar aset, dalam kaitannya penjualan Perseroan? The transfer of all or most of its assets, in relation to sales of the Company?	Ya	Tidak		Hak-hak pemegang saham dalam pengalihan seluruh aset atau aset secara substantial yang mengarah kepada penjualan perusahaan telah diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Shareholders' rights in respect of asset transfers or extraordinary transactions are governed in the Articles of Association of the Company.	538
A.3 Hak untuk Berpartisipasi Secara Efektif Dalam Dan Memberikan Suara Dalam Rapat Pemegang Saham Umum Dan Untuk Diberitahu Tentang Aturan, Termasuk Prosedur Pemungutan Suara, Yang Mengatur Pertemuan Pemegang Saham Umum Right To Participate Effectively In And Vote In General Shareholder Meetings And Should Be Informed Of The Rules, Including Voting Procedures That Govern General Shareholder Meetings.						
A.3.1	Apakah pemegang saham memiliki kesempatan, sesuai agenda, untuk menyetujui keputusan tentang jumlah remunerasi direksi/komisaris? (gaji, tunjangan, manfaat dan emolemen lainnya) Do shareholders have the opportunity, in accordance with agenda, to approve the decision on the amount of remuneration of directors/ commissioners? (salaries, allowances, benefits, and other emolemen)	Ya	Tidak		Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu agenda RUPS yang memerlukan persetujuan pemegang saham. Remuneration for the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shariah Supervisory Board is one of the proposed AGMS agenda for approval by the shareholders.	Pengumuman RUPS/ Anggaran Dasar/ Laporan Tahunan/ Website Perusahaan Announcement of AGM/Articles of Association/ Annual Report/ Company website 547, 548, 549, 550, 551

Index Asean CG Scorecard

Asean CG Scorecard Index

Index	Deskripsi Description	Ya Yes	Tidak No	Lokasi Informasi Source	Penjelasan dan Referensi Explanation and References	Halaman Page
A.3.2	Apakah Perseroan memberikan kesempatan kepada pemegang saham bukan pengendali untuk mengusulkan calon direksi/komisaris? Does the company provide non-controlling shareholders a right to nominate candidates for board of directors/commissioners?			Pengumuman RUPS/ Anggaran Dasar/ Laporan Tahunan/ Website Perusahaan Annual Report/ Company website/ Articles of Association	Pengusulan untuk nominasi merupakan salah satu agenda RUPS yang memerlukan persetujuan pemegang saham dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Suggestion of nomination candidates for Board of Directors and Board of Commissioners is one of the proposed AGMS agenda for approval by the shareholders with regards to NRC recommendation.	547, 548, 549, 550, 551
A.3.3	Apakah perseroan mengatur pemilihan Direksi/Dewan Komisaris secara individual? Does the company allow shareholders to elect directors/commissioners individually?			Berita Acara RUPS/ Pengumuman Hasil Keputusan RUPS/ Anggaran Dasar/ Laporan Tahunan/ Website Perusahaan Minutes of AGM/Result announcement of AGM/Articles of Association/Annual Report/website	Pengusulan untuk nominasi merupakan salah satu agenda RUPS yang memerlukan persetujuan pemegang saham dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, sehingga pemegang saham dapat memilih Direksi/Dewan Komisaris secara individual. Suggestion of nomination candidates for Board of Directors and Board of Commissioners is one of the proposed AGMS agenda for approval by the shareholders with regards to NRC recommendation, so shareholders are allowed to elect directors/commissioners individually.	547, 548, 549, 550, 551
A.3.4	Apakah risalah RUPS memuat deskripsi pemungutan suara (<i>voting</i>) dan prosedur tabulasi suara yang digunakan, dan diumumkan sebelum RUPS? Does the company disclose the voting and vote tabulation procedures used, declaring both before the meeting proceeds?			Berita Acara RUPS/ Laporan Tahunan/ Anggaran Dasar/ Website Perusahaan AGM Minutes/ Annual Report/ Articles of Association/ Company website	Tata cara mengenai pengambilan suara telah diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dalam pelaksanaan setiap Rapat Umum Pemegang Saham, mekanisme pengambilan suara merupakan bagian dari tata tertib rapat yang diinformasikan kepada para pemegang saham di awal rapat. Procedures on voting, whether opened or closed voting, are regulated under the Company's Articles of Association. Voting mechanism is part of the meeting procedures informed to the shareholders at the beginning of any General Meeting of Shareholders.	547, 548, 549, 550, 551
A.3.5	Apakah risalah RUPS mencatat tentang kesempatan yang memungkinkan para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau mengangkat isu-isu? Do the minutes of the most recent AGM record that there was an opportunity allowing for shareholders to ask questions or raise issues?			Berita Acara RUPS/ Ringkasan Risalah Rapat AGM Minutes/ Summary of Minutes	Risalah RUPS mencatat kesempatan bagi pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau mengangkat isu. AGMS Minutes recorded opportunity for shareholder to ask question and raise an issue.	547, 548, 549, 550, 551
A.3.6	Apakah risalah RUPS mencatat tentang pertanyaan-pertanyaan dan jawaban selama RUPS berlangsung? Do the minutes of the most recent AGM record questions and answers?	Ya Yes		Berita Acara RUPS AGM Minutes		n.a
A.3.7	Apakah risalah RUPS memuat keputusan-keputusan hasil RUPS? Did the disclosure of the outcome of the most recent AGM include resolution(s)?	Ya Yes		Berita Acara RUPS AGM Minutes		542-546, 549
A.3.8	Apakah risalah RUPS memuat hasil pemungutan suara (termasuk suara yang setuju, tidak setuju, dan abstain) untuk setiap item agenda? Did the company disclose the voting results including approving, dissenting, and abstaining votes for each agenda item for the most recent AGM?	Ya Yes		Berita Acara RUPS AGM Minutes		542-546
A.3.9	Apakah risalah RUPS mencatat daftar anggota Direksi yang menghadiri RUPS? Did the company disclose the list of board members who attended the most recent AGM?	Ya Yes		Berita Acara RUPS AGM Minutes		547, 548, 549, 550, 551
A.3.10	Apakah Direktur & komisaris utama menghadiri RUPS terbaru? Did the chairman of the board of directors/commissioners attend the most recent AGM?	Ya Yes		Berita Acara RUPS AGM Minutes		542, 549
A.3.11	Apakah Direktur Utama (CEO)/presiden Direktur menghadiri RUPS terbaru? Did the CEO/Managing Director/President attend the most recent AGM?	Ya Yes		Berita Acara RUPS AGM Minutes		542,549

Index Asean CG Scorecard

Asean CG Scorecard Index

Index	Deskripsi Description	Ya Yes	Tidak No	Lokasi Informasi Source	Penjelasan dan Referensi Explanation and References	Halaman Page
A.3.12	Apakah ketua Komite Audit menghadiri RUPS terbaru? Did the chairman of the Audit Committee attend the most recent AGM?	Ya Yes		Berita Acara RUPS AGM Minutes		542
A.3.13	Apakah Perseroan mengatur penyelenggaraan RUPS yang mudah untuk mencapai lokasi? Did the company organise their most recent AGM in an easy to reach location?	Ya Yes		Pemberitahuan RUPS/Website Perusahaan Notice of AGM/ Company website		541
A.3.14	Apakah perusahaan memungkinkan untuk voting in absentia? Does the company allow for voting in absentia?	-		AGM Pengumuman/ Berita Acara RUPS/ Artikel Asosiasi AGM Announcement/ AGM Minutes/ Articles of Association		547, 548, 549, 550, 551
A.3.15	Apakah Perseroan menggunakan metode pemungutan suara dengan jajak pendapat (sebagai lawan dengan cara mengacungkan tangan) untuk semua agenda pada RUPS paling terbaru? Did the company vote by poll (as opposed to by show of hands) for all resolutions at the most recent AGM?	Ya Yes		Berita Acara RUPS AGM Minutes		542-546, 549
A.3.16	Apakah Perseroan mengungkapkan bahwa mereka telah menunjuk pihak independen untuk menghitung dan/atau memvalidasi suara di RUPS? Does the company disclose that it has appointed an independent party (scrutineers/inspectors) to count and/or validate the votes at the AGM?	Ya Yes		Berita Acara RUPS AGM Minutes		542-546, 549
A.3.17	Apakah Perseroan mempublikasikan pada hari kerja berikutnya hasil dari suara yang diambil saat RUPS untuk semua resolusi? Does the company make publicly available by the next working day the result of the votes taken during the most recent AGM for all resolutions?	Yes		Pengumuman Perusahaan/ Website Perusahaan Company announcement/ Company website		540
A.3.18	Apakah Perseroan menyediakan pemberitahuan yang cukup (minimal 21 hari) untuk resolusi khusus? Does the company provide at least 21 days notice for all resolutions?	Yes		Pengumuman Perusahaan/ Artikel Asosiasi/ Laporan Tahunan/ Website Perusahaan. Company announcements/ Articles of Association/Annual Report/Company website.		540
A.3.19	Apakah Perseroan memberikan alasan/penjelasan untuk setiap item agenda/ resolusi dalam Pemberitahuan RUPS/RUPS/edaran dan/atau pernyataan yang menyertainya? Does the company provide the rationale and explanation for each agenda item which requires shareholders' approval in the notice of AGM/circulars and/or the accompanying statement?	Yes		Pengumuman Perusahaan/ Artikel Asosiasi/ Laporan Tahunan/ Website Perusahaan. Company announcements/ Articles of Association/Annual Report/Company website		539-551
A.4 Pasar Untuk Pengendalian Perseroan Harus Diizinkan Untuk Berfungsi Secara Efisien Dan Transparan Markets For Corporate Control Should Be Allowed To Function In An Efficient And Transparent Manner.						
A.4.1	Dalam kasus merger, akuisisi dan/atau pengambilalihan, apakah dewan Direksi/ Komisaris menunjuk pihak independen untuk mengevaluasi kewajaran harga transaksi? In cases of mergers, acquisitions and/or takeovers, does the board of directors/ commissioners of the offeree company appoint an independent party to evaluate the fairness of the transaction price?	-		Merger announcement/ Company Report on the merger		823
A.5 Pelaksanaan Hak-Hak Kepemilikan Oleh Seluruh Pemegang Saham, Termasuk Investor Kelembagaan, Harus Difasilitasi The Exercise Of Ownership Rights By All Shareholders, Including Institutional Investors, Should Be Facilitated.						
A.5.1	Apakah ada kepemilikan saham oleh investor institusi, selain pemegang saham pengendali, yang memiliki lebih besar dari 5%? Is the share ownership by institutional investors, other than controlling shareholders, greater than 5%?	Ya Yes		Laporan Tahunan/ Website Perusahaan Annual Report/ Company website		20, 21

Index Asean CG Scorecard

Asean CG Scorecard Index

Index	Deskripsi Description	Ya Yes	Tidak No	Lokasi Informasi Source	Penjelasan dan Referensi Explanation and References	Halaman Page
BAGIAN B: PERLAKUAN SETARA TERHADAP PEMEGANG SAHAM SECTION B: EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS						
B.1 Hak Suara Dan Kepemilikan Saham Share And Voting Rights						
B.1.1	Apakah saham perusahaan biasa atau umum mempunyai satu suara untuk satu saham? Do the company's ordinary or common shares have one vote for one share?	Ya Yes		Laporan Tahunan/ Website Perusahaan/ Pengumuman Annual Report/ Company website/ announcement		18, 19
B.1.2	Apabila Perseroan memiliki lebih dari satu kelas saham, apakah Perseroan mempublikasikan hak suara yang melekat pada masing-masing kelas saham (misalnya melalui situs yang dimiliki perusahaan/ laporan/Bursa/regulator)? Where the company has more than one class of shares, does the company publicise the voting rights attached to each class of shares (e.g. through the company website/reports/ the stock exchange/ the regulator's website)?	Ya Yes		Laporan Tahunan/ Website Perusahaan/ Pengumuman Annual Report/ Company website/ announcement		18, 19
B.2 Surat Edaran Pemberitahuan RUPS Notice of AGM						
B.2.1	Apakah setiap keputusan RUPS hanya memuat satu topik (tidak ada penggabungan dari beberapa topik ke dalam keputusan yang sama)? Does each resolution in the most recent AGM deal with only one item, i.e., there is no bundling of several items into the same resolution?	Ya Yes		Berita Acara Rapat Laporan Tahunan Notice of AGM		539-551
B.2.2	Apakah Perseroan menterjemahkan pemberitahuan RUPS ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan pada waktu yang sama seperti versi bahasa lokal? Are the company's notices of the most recent AGM/circulars fully translated into English and published on the same date as the local-language version?	Tidak No		Pemberitahuan RUPS Laporan Tahunan Notice of AGM		539-551
Apakah Pemberitahuan RUPS/Edaran memiliki rincian sebagai berikut: Does the notice of AGM/circulars have the following details:						
B.2.3	Apakah profil Direksi Komisaris (setidaknya usia, kualifikasi, tanggal pertama janji, pengalaman, dan jabatan Direktur lain terdaftar Perseroan) termasuk dalam mencari pemilihan/kembali-election? Are the profiles of directors/commissioners (at least age, qualification, date of first appointment, experience, and directorships in other listed companies) in seeking election/reelection included?	Ya Yes		Pemberitahuan RUPS/ Laporan Tahunan Notice of AGM/ Annual Report		100-114
B.2.4	Apakah auditor yang diajukan untuk penunjukan/ pengangkatan diidentifikasi dengan jelas? Are the auditors seeking appointment/re-appointment clearly identified?	Ya Yes		Pemberitahuan RUPS/ Laporan Tahunan Notice of AGM/ Annual Report		666-668
B.2.5	Apakah penjelasan mengenai peraturan dividen tersedia? Has an explanation of the dividend policy been provided?		Penjelasan mengenai Kebijakan Dividen telah tersedia dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2016 dan website Bank. The explanation of Dividend Policy has been provided and is available in the 2016 Annual Report and in the Bank website.	Pemberitahuan RUPS/Laporan Tahunan Notice of AGM		22
B.2.6	Apakah jumlah yang dibayarkan untuk dividen final diungkapkan? Is the amount payable for final dividends disclosed?	Ya Yes		Pemberitahuan RUPS Notice of AGM		248
B.2.7	Apakah surat kuasa dapat diperoleh dengan mudah Were the proxy documents made easily available?	Ya Yes		Pemberitahuan RUPS Notice of AGM		
B.3 Menghindari Insider Trading dan Penyalahgunaan Insider Trading And Abusive Self-Dealing Should Be Prohibited.						
B.3.1	Apakah Perseroan memiliki kebijakan dan/atau aturan yang melarang direksi/ komisaris dan karyawan menyalahgunakan informasi orang dalam? Does the company have policies and/or rules prohibiting directors/commissioners and employees to benefit from knowledge which is not generally available to the market?	Ya Yes				690
B.3.2	Apakah direksi/komisaris wajib melaporkan transaksi mereka dalam saham Perseroan dalam waktu 3 hari kerja? Are the directors and commissioners required to report their dealings in company shares within 3 business days?	Ya Yes				533-605

Index Asean CG Scorecard

Asean CG Scorecard Index

Index	Deskripsi Description	Ya Yes	Tidak No	Lokasi Informasi Source	Penjelasan dan Referensi Explanation and References	Halaman Page
B.4 Transaksi Pihak Berelasi Yang Dilakukan Oleh Dewan Komisaris Dan Direksi Related Party Transactions By Directors And Key Executives.						
B.4.1	Apakah Direksi dan Komisaris mengungkapkan minat mereka dalam transaksi dan benturan kepentingan lain? Are directors and commissioners required to disclose their interest in transactions and any other conflicts of interest?	Ya Yes				249
B.4.2	Apakah Perseroan memiliki kebijakan yang memerlukan komite direksi independen/komisaris untuk meninjau materi/RPTs signifikan untuk menentukan apakah mereka berada dalam kepentingan terbaik Perseroan? Does the company have a policy requiring a committee of independent directors/ commissioners to review material/ significant RPTs to determine whether they are in the best interests of the company and shareholders?	Ya Yes				552-564 607-636
B.4.3	Apakah Perseroan memiliki kebijakan yang mengharuskan anggota dewan (direksi/komisaris) untuk tidak berpartisipasi dalam diskusi dewan pada agenda tertentu ketika mereka bertentangan? Does the company have a policy requiring board members (directors/ commissioners) to abstain from participating in the board discussion on a particular agenda when they are conflicted?	Ya Yes		Laporan Tahunan/ Website Perusahaan/ Pengumuman Annual Report/ Company website/ announcement		480-484
B.4.4	Apakah perusahaan memiliki kebijakan atas pinjaman kepada direksi/komisaris baik melarang praktik ini atau memastikan bahwa mereka sedang dilakukan secara wajar dan dengan harga pasar Does the company have policies on loans to directors and commissioners either forbidding this practice or ensuring that they are being conducted at arm's length basis and at market rates?	Ya Yes				516-517, 589-590
B.5 Melindungi Pemegang Saham Minoritas dari Tindakan Pelanggaran Protecting Minority Shareholders From Abusive Actions						
B.5.1	Apakah ada RPTs yang dapat diklasifikasikan sebagai bantuan keuangan kepada entitas selain sepenuhnya dimiliki anak perusahaan? Were there any RPTs that can be classified as financial assistance to entities other than wholly-owned subsidiary companies?	Tidak No		Laporan Tahunan/ Website Perusahaan/ Pengumuman/ Media Annual Report/ Company website/ announcement/ media		
B.5.2	Apakah Perseroan mengungkapkan bahwa RPTs dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa transaksi tersebut adalah adil dan termasuk dalam kegiatan usaha Perseroan Does the company disclose that RPTs are conducted in such a way to ensure that they are fair and at arms' length?	Ya Yes		Laporan Tahunan/ Website Perusahaan /Pengumuman Annual Report/ Company website/ announcement		249-250
BAGIAN C : PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN SECTION C : ROLE OF STAKEHOLDERS						
C.1 Hak-Hak Pemangku Kepentingan Yang Ditetapkan Oleh Hukum Atau Melalui Perjanjian Bersama Harus Dihormati. The Rights Of Stakeholders That Are Established By Law Or Through Mutual Agreements Are To Be Respected.						
Apakah Perseroan mengungkapkan kebijakan yang : Does the company disclose a policy that :						
C.1.1	Mengatur perlindungan sistematis dari perusahaan keselamatan dan keamanan Nasabah? Stipulates the existence and scope of the company's efforts to address customers' health and safety?	Ya Yes		Laporan Tahunan Annual Report		750-759
C.1.2	Menjelaskan praktik seleksi pemasok/kontraktor? Explains supplier/contractor selection practice?	Ya Yes		Laporan Tahunan Annual Report		683
C.1.3	Menjelaskan upaya sistematis perusahaan untuk memastikan bahwa rantai nilainya ramah lingkungan atau konsisten dengan program pengembangan berkelanjutan perusahaan? Describes the company's efforts to ensure that its value chain is environmentally friendly or is consistent with promoting sustainable development?		Bank memiliki kebijakan untuk memastikan rantai nilainya ramah lingkungan dan konsisten dalam pengembangan berkelanjutan. The Bank has the policy to ensure that its value chain is environmental friendly and consistent in sustainable development.	Laporan Keberlanjutan Corporate Responsibility Report		756
C.1.4	menguraikan upaya sistematis perusahaan dalam berinteraksi dengan masyarakat di mana perusahaan beroperasi? Elaborates the company's efforts to interact with the communities in which they operate?	Ya Yes		Laporan Tahunan Annual Report		753-758

Index Asean CG Scorecard

Asean CG Scorecard Index

Index	Deskripsi Description	Ya Yes	Tidak No	Lokasi Informasi Source	Penjelasan dan Referensi Explanation and References	Halaman Page
C.1.5	Mengarahkan perusahaan terhadap program dan prosedur anti korupsi? Directs the company's anti-corruption programmes and procedures?	Ya Yes		Laporan Tahunan/ Website Perusahaan/ Laporan Keberlanjutan (CSR) Annual Report/ Company website/ Sustainability or Corporate Responsibility Report (CSR)		663
C.1.6	Menjelaskan bagaimana hak kreditur telah dilindungi? Describes how creditors' rights are safeguarded?	Ya Yes				
Apakah Perseroan mengungkapkan kegiatan yang telah dilakukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut di atas? Does The Company Disclose The Activities That It Has Undertaken To Implement The Above Mentioned Policies?						
C.1.7	Kesehatan dan keselamatan Pelanggan Customer health and safety	Ya Yes		Laporan Tahunan Annual Report		
C.1.8	Seleksi dan kriteria Pemasok/kontraktor Supplier/ Contractor selection and criteria	Ya Yes		Laporan Tahunan Annual Report		756
C.1.9	Rantai nilai yang ramah lingkungan Environmentally-friendly value chain	Ya Yes		Laporan Keberlanjutan Corporate Responsibility Report		755
C.1.10	Interaksi dengan komunitas/masyarakat Interaction with the communities	Ya Yes		Laporan Tahunan & Laporan Keberlanjutan Annual Report & Responsibility Report		756, 758
C.1.11	Program dan Prosedur Anti Korupsi Anti-corruption programs and procedures	Ya Yes		Laporan Tahunan Annual Report		574-578, 690-692
C.1.12	Hak Kreditur Creditors' Rights	Ya Yes				
C.1.13	Apakah Perseroan memiliki bagian/Laporan terpisah terkait Tanggung jawab Sosial Perseroan (CSR) maupun laporan keberlanjutan? Does the company have a separate corporate responsibility (CSR) report/section or sustainability report/section?	Ya Yes		Laporan Tahunan & Laporan Keberlanjutan Annual Report & Responsibility Report		750
C.2 Kesempatan Mendapatkan Ganti Rugi Atas Pelanggaran Oleh Perseroan Terhadap Hak Para Pemangku Kepentingan Yang Diatur Oleh Hukum Where Stakeholder Interests Are Protected By Law, Stakeholders Should Have The Opportunity To Obtain Effective Redress For Violation Of Their Rights.						
C.2.1	Apakah Perseroan menyediakan kontak melalui website atau laporan tahunan dimana stakeholder (pelanggan, pemasok, masyarakat umum dan lain-lain) dapat menggunakan untuk menyuarakan keprihatinan mereka dan/atau keluhan kaitannya dengan kemungkinan pelanggaran atas hak-hak mereka? Does the company provide contact details via the company's website or Annual Report which stakeholders (e.g. customers, suppliers, general public etc.) can use to voice their concerns and/or complaints for possible violation of their rights?	Ya Yes		Laporan Tahunan/ Website Perusahaan Annual Report/ Company website		703
C.3 Terdapat Mekanisme Bagi Peningkatan Kinerja, Pengembangan, Dan Partisipasi Karyawan Dalam Perseroan Where Stakeholder Interests Are Protected By Law, Stakeholders Should Have The Opportunity To Obtain Effective Redress For Violation Of Their Rights.						
C.3.1	Apakah Perseroan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan bagi karyawannya? Does the company provide contact details via the company's website or Annual Report which stakeholders (e.g. customers, suppliers, general public etc.) can use to voice their concerns and/or complaints for possible violation of their rights?	Ya Yes		Laporan Tahunan & Laporan Keberlanjutan Annual Report/ Company website		414
C.3.2	Apakah Perseroan menerbitkan catatan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan karyawan? Does the company publish data relating to health, safety and welfare of its employees?	Ya Yes				
C.3.3	Apakah Perseroan memiliki program pelatihan dan pengembangan bagi karyawan? Does the company have training and development programmes for its employees?	Ya Yes		Laporan Tahunan/ Website Perusahaan Annual Report/ Company website		419-420
C.3.4	Apakah Perseroan menerbitkan catatan program pelatihan dan pengembangan bagi karyawan? Does the company publish data on training and development programmes for its employees?	Ya Yes		Laporan Tahunan Annual Report		420-422

Index Asean CG Scorecard

Asean CG Scorecard Index

Index	Deskripsi Description	Ya Yes	Tidak No	Lokasi Informasi Source	Penjelasan dan Referensi Explanation and References	Halaman Page
C.3.5	Apakah Perseroan memiliki kebijakan penghargaan/kompensasi atas kinerja Perseroan yang dihitung tidak hanya berdasarkan ukuran pencapaian angka keuangan dalam jangka pendek? Does the company have a reward/compensation policy that accounts for the performance of the company beyond short-term financial measures?	Ya Yes		Laporan Tahunan Annual Report		423
C.4 Terdapat Kebebasan Bagi Karyawan Perseroan Untuk Mengkomunikasikan Adanya Praktik Pelanggaran Hukum Dan Tindakan Tidak Etis Dalam Perseroan Dan Mendapatkan Perlindungan Atas Tindakannya Stakeholders Including Individual Employee And Their Representative Bodies Should Be Able To Freely Communicate Their Concerns About Illegal Or Unethical Practices To The Board And Their Rights Should Not Be Compromised For Doing This.						
C.4.1	Apakah Perseroan memiliki prosedur pengaduan oleh karyawan mengenai tindakan ilegal (termasuk korupsi) dan perilaku yang tidak etis? Does the company have procedures for complaints by employees concerning illegal (including corruption) and unethical behavior?	Ya Yes		Laporan Tahunan/ Website Perusahaan Annual Report/ Company website		424
C.4.2	Apakah Perseroan memiliki kebijakan atau prosedur untuk melindungi karyawan/ orang yang mengungkapkan perilaku ilegal/tidak etis dari pembalasan? Does the company have a policy or procedures to protect an employee/person who reveals illegal/unethical behavior from retaliation?	Ya Yes				424
BAGIAN D : TRANSPARANSI DAN PENGUNGKAPAN SECTION D : DISCLOSURE AND TRANSPARENCY						
D.1 Transparan Struktur Kepemilikan Transparent ownership structure						
D.1.1	Apakah informasi terkait Kepemilikan saham mengungkapkan identitas pemilik saham, dengan kepemilikan saham 5% atau lebih? Does the information on shareholdings reveal the identity of beneficial owners, holding 5% shareholding or more?			Bank mengungkapkan Struktur Pemegang Saham termasuk identitas pemegang saham pengendali dan pemegang saham yang memiliki 5% saham atau lebih. The Bank disclosed Shareholder Structure including the identity ultimate controlling shareholders and the shareholders with 5% holding or more.	Laporan Tahunan Annual Report	21,22
D.1.2	Apakah Perseroan mengungkapkan kepemilikan saham baik yang langsung dan tidak langsung (jika ada) dari pemegang saham utama dan/atau pemegang saham dalam jumlah besar? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of major and/or substantial shareholders?			Bank mengungkapkan struktur kepemilikan saham dan informasi saham dari pemegang saham utama dan/atau pemegang saham pengendali. The Bank disclosed the share ownership structures and share information of the majority and controlling shareholders.		21-22
D.1.3	Apakah Perseroan mengungkapkan kepemilikan saham para direksi/komisaris baik langsung dan tidak langsung? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of directors/ commissioners?			Bank mengungkapkan kepemilikan saham dari anggota Dewan Komisaris. The Bank disclosed the shareholdings of members of the Board of Commissioners.		248
D.1.4	Apakah Perseroan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung yang dimiliki oleh manajemen senior? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of senior management?	Ya Yes		Laporan Tahunan Annual Report		480-484
D.1.5	Apakah Perseroan mengungkapkan secara detail mengenai kelompok usahanya termasuk anak Perseroan, asosiasi, usaha patungan dan Perseroan tujuan khusus/ kendaraan (SPE) / (SPV)? Does the company disclose details of the parent/ holding company, subsidiaries, associates, joint ventures and special purpose enterprises/ vehicle (SPes)/ (SPVs)			Bank mengungkapkan Struktur Perusahaan termasuk anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi. The Bank disclosed the Group Corporate Structure, including Subsidiaries and Affiliated Companies.		132-133
D.2 Kualitas Laporan Tahunan Quality of Annual Report						
Apakah Laporan Tahunan Perusahaan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: Does the Company's Annual Report disclose the following:						
D.2.1	Risiko - risiko utama Key risks			Bank telah mengungkapkan risiko-risiko utama dalam Annual Report 2016. The Bank has disclosed key risks in Annual Report 2016.		294
D.2.2	Tujuan Perseroan Corporate objectives			Bank telah mengungkapkan tujuan perusahaan dalam Annual Report 2016. The Bank has disclosed its corporate values in Annual Report 2016.	Laporan Tahunan Annual Report	92
D.2.3	Indikator kinerja keuangan Financial performance indicators			Annual Report 2016 telah has disclosed indikator kinerja keuangan. The 2016 Annual Report has disclosed the Financial Performance Indicators.		10-12

Index Asean CG Scorecard

Asean CG Scorecard Index

Index	Deskripsi Description	Ya Yes	Tidak No	Lokasi Informasi Source	Penjelasan dan Referensi Explanation and References	Halaman Page
D.2.4	Indikator kinerja Non-keuangan Non-Financial performance indicators					16
D.2.5	Kebijakan deviden Dividend Policy					22
D.2.6	Rincian kebijakan whistleblower Details of whistle blowing policy	Ya Yes				690-692
D.2.7	Biografi (setidaknya usia, kualifikasi, tanggal pengangkatan pertama, pengalaman yang relevan, dan setiap lain jabatan Direktur terdaftar perusahaan) baik Direktur atau Komisaris Biographical details (at least age, qualifications, date of first appointment, relevant experience and any other directorships of listed companies) of directors/ commissioners	Ya Yes		Laporan Tahunan Annual Report		690
D.2.8	Program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan yang dihadiri oleh masing-masing Direktur/Komisaris Training and/or continuing education programme attended by each director/ commissioner	Ya Yes				100-114
D.2.9	Jumlah rapat yang diadakan dewan direksi/komisaris sepanjang tahun Number of board of directors/ commissioners meetings held during the year	Ya Yes				520-521, 591-593
D.2.10	Rincian kehadiran masing-masing Direktur/Komisaris dari pertemuan yang Diadakan Attendance details of each director/commissioner in respect of meetings held	Ya Yes				520-521, 591-593
D.2.11	Rincian dari remunerasi CEO dan masing-masing anggota Dewan Direksi Komisaris Details of remuneration of the CeO and each member of the board of directors/ commissioners	Ya Yes				520-521, 591-593
Pernyataan Konfirmasi Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Confirmation Statement						
D.2.12	Apakah laporan tahunan memuat pernyataan yang menyatakan kepatuhan perusahaan dengan aturan tata kelola perusahaan dan di mana ada nonkepatuhan, mengidentifikasi dan menjelaskan alasan untuk setiap masalah tersebut? Does the annual report contain a statemet confirming the company's full compliance with the code of corporate governance and where there is non compliance, identify and explain reasons for each such issue?	Ya Yes				650-662
D.3. Pengungkapan Atas Transaksi Hubungan Istimewa Disclosure of related party transactions (RPT)						
D.3.1	Apakah Perseroan mengungkapkan kebijakan yang meliputi peninjauan dan persetujuan atas RPT yang material/signifikan? Does the company disclose its policy covering the review and approval of material/ significant RPTs?	Ya Yes				1040-1041
D.3.2	Apakah Perseroan mengungkapkan nama pihak terkait dan hubungannya untuk setiap RPT yang material/ signifikan? Does the company disclose the name of the related party and relationship for each material/ significant RPT?	Ya Yes		Laporan Tahunan Annual Report		1040-1041
D.3.3	Apakah Perseroan mengungkapkan sifat, pemikiran dan nilai untuk setiap RPT yang material/ signifikan? Does the company disclose the nature and value for each material/ significant RPT?	Ya Yes				1040-1041
D.4 Hubungan Direktur Dalam Saham Perseroan Directors and commissioners dealings in share of the company						
D.4.1	Apakah Perseroan mengungkapkan perdagangan saham perusahaan oleh orang dalam? Does the company disclose trading in the companys shares by insiders?	Ya Yes		Laporan Tahunan Annual Report		n.a
D.5 Keterbukaan Dan Transparansi Tentang Eksternal Auditor External Auditor and Auditor Report						
D.5.1	Apakah biaya audit diungkapkan? Are audit fees disclosed?	Ya Yes				135
D.5.2	Apakah biaya non-audit diungkapkan? Are the non audit fees disclosed?	Ya Yes		Laporan Tahunan Annual Report		135
D.5.3	Apakah biaya non audit melebihi biaya audit? Do the non audit fees exceed the audit fees?	Tidak No				135

Index Asean CG Scorecard

Asean CG Scorecard Index

Index	Deskripsi Description	Ya Yes	Tidak No	Lokasi Informasi Source	Penjelasan dan Referensi Explanation and References	Halaman Page
D.6 Media Komunikasi Yang Digunakan Untuk Penyampaian Informasi Mengenai Perusahaan Medium of Communications						
Apakah Perusahaan Menggunakan Metode Komunikasi sebagai berikut? Does the Company use medium of communication as follows?						
D.6.1	Pelaporan Kuartalan Quarterly Reporting	Ya Yes				
D.6.2	Company website Company website	Ya Yes		Website Perusahaan/ Laporan Tahunan Annual Report/ Company website		148
D.6.3	Penjelasan Analis Analyst briefing	Ya Yes				
D.6.4	Penjelasan Media Media briefings	Ya Yes				
D.7 Penyampaian Informasi Laporan Keuangan Atau Laporan Tahunan Secara Tepat Waktu Timely filing/release of annual or financial reports						
D.7.1	Apakah laporan tahunan/keuangan yang telah diaudit dirilis dalam waktu 120 hari akhir tahun buku? Is the audited annual financial reports released within 120 days from the financial year end?					112
D.7.2	Apakah laporan tahunan/keuangan yang telah diaudit dirilis dalam waktu 90 hari akhir tahun buku? Is the audited annual financial report released within 90 days from the financial year end?			Laporan Publikasi 2015 Bank dirilis tanggal 23 Februari 2016 Announcement		112
D.7.3	Apakah pernyataan kebenaran laporan keuangan ditegaskan oleh direksi dan/ atau petugas yang relevan dari perusahaan? Is the true and fairness/ fair representation of the annual financial statements/ reports affirmed by the board of directors/ commissioners and /or relevant officers of the company?	Ya Yes				112
D.8 Keberadaan Website Perusahaan Dalam Mengungkap Informasi Tentang Perusahaan Ke Public Presence of the Company's Website In Revealing Information About the Company Into Public						
Apakah perusahaan memiliki website yang mengungkapkan informasi terkini mengenai hal hal sebagai berikut : Does the Company have a website that reveals the latest information regarding the following matters:						
D.8.1	Operasi Bisnis Business operations	Ya Yes				
D.8.2	Laporan keuangan / laporan tahunan (terkini dan sebelumnya) Financial statements/reports (current and prior years)	Ya Yes		Company website		
D.8.3	Menyediakan bahan dalam briefing analis dan media Materials provided in briefings to analysts and media	Ya Yes				
D.8.4	Struktur Kepemilikan Saham Shareholding structure	Ya Yes				
D.8.5	Struktur Group perusahaan Group Corporate structure	Ya Yes				
D.8.6	Laporan tahunan yang dapat diunduh Downloadable annual report	Ya Yes				
D.8.7	Pemberitahuan RUPS dan / atau RUPSLB Notice of AGM and/or eGM	Ya Yes		Company website		
D.8.8	Anggaran Dasar Perusahaan Articles of Association	Ya Yes				
D.8.9	Konstitusi Perusahaan (company's by-laws, memorandum dan anggaran dasar) Companies institutions (company's by laws, memorandum and articles of association)	Ya Yes				
D.9 Keberadaan Investor Relations Dalam Perusahaan The existence of Investor Relations Within the Company						
D.9.1	Apakah Perseroan mengungkapkan rincian kontak (misalnya telepon, fax, dan email) dari petugas yang bertanggung jawab untuk investor relations? Does the company disclose the contacts details (e.g. telephone, fax and email) of the officer responsible for investor relations?	Ya Yes		Laporan Tahunan/ Website Annual Report/ website		148
BAGIAN E : TANGGUNG JAWAB DEWAN BAGIAN E : RESPONSIBILITIES OF THE BOARD						
E.1 Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Duties And Responsibilities of the Board of Commissioners						
E.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan tata kelola perusahaan/board charter? Does the Company disclose corporate governance policy/ board charter?			Laporan Tahunan/ Website Annual Report/ website	Bank mengungkapkan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan/ Pedoman Dewan Komisaris/ Direksi pada situs web. The Bank has disclosed the Corporate Governance Policy/Board of Commissioners Policy/Board of Directors Policy on the website.	462
E.1.2	Apakah jenis-jenis keputusan yang memerlukan persetujuan direksi/komisaris diungkapkan? Do the types of decisions that require the approval of the directors/commissioners disclose?	Ya Yes				

Index Asean CG Scorecard

Asean CG Scorecard Index

Index	Deskripsi Description	Ya Yes	Tidak No	Lokasi Informasi Source	Penjelasan dan Referensi Explanation and References	Halaman Page
E.1.3	Apakah peran dan tanggung jawab Dewan Direksi/ Komisaris dinyatakan secara jelas? Do the roles and responsibilities of the Board of Directors/ Commissioners state clearly?			Laporan Tahunan/ Website Annual Report/ website		503, 579
E.1.4	Apakah perseroan memiliki pernyataan visi dan misi yang telah disahkan? Does the Company have a vision and mission statement that was endorsed?					92
E.1.5	Apakah perusahaan pernah meninjau ulang visi dan misi tersebut dalam 5 tahun terakhir? Does the Company ever review its vision and mission in the last 5 years?	Ya Yes		Laporan Tahunan/ Website Annual Report/ website		92
E.1.6	Apakah Direksi melakukan peninjauan ulang strategi korporat tahunan? Does the Board of Directors conduct annual review of corporate strategy?	Ya Yes				
E.2 Aturan Kode Etik Code of Ethics						
E.2.1	Apakah detail dari Kode Etik diungkapkan? Do the details of Code of Ethics be disclosed?	Ya Yes				688
E.2.2	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa semua Direksi/Komisaris, manajemen senior dan karyawan diharuskan untuk mematuhi Kode Etik? Does the Company disclose that all Directors/ Commissioners, senior management and employees are required to comply with the Code of Ethics?	Ya Yes		Laporan Tahunan/ Website Annual Report/ website		688
E.2.3	Apakah perusahaan mengungkapkan bagaimana cara menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap Kode Etik? Does the Company disclose how to implement and monitor the Code of Ethics compliance?	Ya Yes				688
Komposisi Composition						
E.2.4	Apakah jumlah Komisaris Independen setidaknya 50% dari Dewan Komisaris? Does the number of Independent Commissioners at least 50% of the Board of Commissioners?			Laporan Tahunan/ Website Annual Report/ website		581
E.2.5	Apakah Direksi/Komisaris Independen tidak terkait dengan manajemen dan pemegang saham utama? Does the Board of Directors/ Independent Commissioners is not associated with the management and major shareholders?					109-114, 532, 581
E.2.6	Apakah perusahaan memiliki batas jangka waktu sembilan tahun atau kurang untuk para Direksi/ Komisaris Independen? Does the Company have a limited period of nine years or less for the Board of Director/ Independent Commissioners?	Ya Yes				n.a
E.2.7	Apakah perusahaan menetapkan batasan lima jabatan di perusahaan terbuka secara bersamaan bagi masing-masing Direksi/Komisaris? Does the Company set a limit of five positions in the Company open simultaneously for each Board of Directors/ Commissioners?	Ya Yes		Laporan Tahunan/ Website Annual Report/ website		n.a
E.2.8	Apakah perusahaan memiliki Direksi/Komisaris Independen yang bekerja lebih dari lima jabatan pada perusahaan terbuka? Does the Company have a Board of Directors/Independent Commssioners who work more than five positions at the public companies?					582, 514

Index Asean CG Scorecard

Asean CG Scorecard Index

Index	Deskripsi Description	Ya Yes	Tidak No	Lokasi Informasi Source	Penjelasan dan Referensi Explanation and References	Halaman Page
Komite Nominasi Nominating Committee						
E.2.9	Apakah perusahaan memiliki Direktur Eksekutif yang melayani lebih dari dua perusahaan yang terdaftar di luar group perusahaan? Does the Company have the Executive Director serving more than two listed companies outside the Company's group?	Tidak No				n.a
E.2.10	Apakah perusahaan memiliki suatu Komite Nominasi? Does the company have a nominating committee (NC)?	Ya Yes		Laporan Tahunan/ Website Annual Report/ website		620
E.2.11	Apakah Komite Nominasi terdiri atas mayoritas direksi/komisaris independen? Does the NC comprise of a majority of independent directors/ commissioners?		Anggota Dewan Komisaris yang menjadi anggota pada Komite Nominasi, mayoritas atau 50% adalah Komisaris Independen. Members of the Board of Commissioners who serve in the Nomination Committee are majority (50%) Independent Commissioners.			624
E.2.12	Apakah Ketua Komite Nominasi merupakan Direktur/ Komisaris Independen? Is the chairman of the NC an independent director/ commissioner?		Ketua Komite Nominasi adalah Komisaris Independen; Budhi Dyah Sitawati. The Chairman of the Nominating Committee is an Independent Commissioner; Budhi Dyah Sitawati.			520
E.2.13	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/ struktur tatakelola/Piagam Komite Nominasi? Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/ charter of the NC?		Bank mengungkapkan kerangka acuan/tata struktur/piagam Komite Nominasi. The Bank disclosed the reference/ governance and structure/charter of the Nominating Committee.	Laporan Tahunan/ Website Annual Report/ website		520-529
E.2.14	Apakah Komite Nominasi mengadakan rapat minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun? Did the NC meet at least twice during the year?		Komite Nominasi mengadakan rapat paling kurang dua kali dalam setahun. Selama 2016, Komite mengadakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali. The Nominating Committee held meetings at least twice a year. Throughout 2016, the Committee held 9 (nine) meetings.			520-529
Komite Remunerasi Remuneration Committee						
E.2.15	Apakah kehadiran dari anggota Komite Nominasi pada rapat diungkapkan? Does the presence of the NC members at the meeting disclosed?	Ya Yes				523-524
E.2.16	Apakah perusahaan memiliki suatu Komite Remunerasi? Does the company have a Remuneration Committee (RC)?	Ya Yes				620
E.2.17	Apakah Komite Remunerasi terdiri dari mayoritas Komisaris Independen? Does the remuneration Committee comprise of a majority of independent commissioners?		Anggota Dewan Komisaris yang menjadi anggota pada Komite Nominasi, mayoritas atau 50% adalah Komisaris Members of the Board of Commissioners who serve in the Nomination Committee are majority (50%) Independent Commissioners.	Laporan Tahunan/ Website Annual Report/ website		527
E.2.18	Apakah Ketua Komite Remunerasi merupakan Komisaris Independen? Is the chairman of the RC an independent commissioner?		Ketua Komite Remunerasi adalah Komisaris Independen; Budhi Dyah Sitawati. The Chairman of the Remuneration Committee is an Independent Commissioner; Budhi Dyah Sitawati.			527
E.2.19	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/ struktur tatakelola/piagam Komite Remunerasi? Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/ charted of the RC?		Bank mengungkapkan kerangka acuan/tata struktur/piagam Komite Remunerasi. The Bank disclosed the reference/ governance and structure/charter of the Remuneration Committee.			624
E.2.20	Apakah Komite Remunerasi mengadakan rapat minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun? Is the RC held a meeting at least 2 (two) times in one year?		Komite Remunerasi mengadakan rapat paling kurang dua kali dalam setahun. Selama 2016, Komite mengadakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali. The Remuneration Committee held meetings at least twice a year. Throughout 2016, the Committee held 9 (nine) meetings.	Laporan Tahunan/ Website Annual Report/ website		625

Index Asean CG Scorecard

Asean CG Scorecard Index

Index	Deskripsi Description	Ya Yes	Tidak No	Lokasi Informasi Source	Penjelasan dan Referensi Explanation and References	Halaman Page
Komite Audit Audit Committee						
E.2.21	Apakah kehadiran dari anggota Komite Remunerasi pada rapat diungkapkan? Does the presence of the RC members at the meeting disclosed?	Ya Yes				624
E.2.22	Apakah perusahaan mempunyai suatu Komite Audit? Does the company have an audit committee?	Ya Yes				607
E.2.23	Apakah Komite Audit mayoritas terdiri dari Komisaris Independen dan pihak Independen? Does the audit committee majority comprise of independent commissioners and independent parties?				Anggota Komite Audit, seluruhnya merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen. Members of the Audit Committee are all Independent Commissioners and Independent Parties.	608
E.2.24	Apakah Ketua Komite Audit merupakan Komisaris Independen? Is the chairman of the audit committee an independent commissioner?				Ketua dari Komite Audit adalah Komisaris Independen; Achjar Iljas. The Chairman of the Audit Committee is an Independent Commissioner; Achjar Iljas.	608
E.2.25	Apakah Perseroan mengungkapkan kerangka acuan/ struktur tatakelola/Piagam Komite Audit? Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/ charter of the audit committee?	Ya Yes				475,607
E.2.26	Apakah Laporan Tahunan mengungkapkan profil dan kualifikasi dari para anggota Komite Audit? Does the annual report disclose the profile or qualifications of the audit committee members?				Laporan Tahunan 2016 mengungkapkan profil dan kualifikasi anggota Komite Audit. The 2016 Annual Report disclosed the profiles and qualifications of the Audit Committee Members.	612-613
E.2.27	Apakah minimal satu dari Komisaris Independen pada Komite Audit memiliki keahlian dibidang Akuntansi (kualifikasi atau pengalaman dibidang Akuntansi)? Does at least one of the independent commissioners of the audit committee have accounting expertise (accounting qualification or experience)?	Ya Yes				607
E.2.28	Apakah Komite Audit mengadakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam satu tahun? Did the audit committee meet at least (4) four times during the year?	Ya Yes				610
E.2.29	Apakah kehadiran dari anggota Komite Audit pada rapat diungkapkan? Is the attendance of members at audit committee meetings disclosed?	Ya Yes			Laporan Tahunan/ Website Annual Report/ website	610
E.2.30	Apakah Komite Audit memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan rekomendasi terkait dengan penunjukan, penunjukan kembali dan penghentian external auditor? Does the audit committee have primary responsibility for recommendation on the appointment, re-appointment and removal of the external auditor?	Ya Yes				611
E.3 Proses Dewan Komisaris/Kehadiran Rapat Dewan Komisaris The Board of Commissioners Process/Meeting Attendance of the Board of Commissioners						
E.3.1	Apakah Dewan Komisaris menjadwalkan rapat sebelum atau pada awal tahun? Does the Board of Commissioners schedule meeting before or at the beginning of the year?	Ya Yes				592
E.3.2	Apakah Dewan Komisaris mengadakan rapat minimal 6 (enam) kali dalam satu tahun? Does the Board of Commissioners held a meeting at least 6 (six) times in one year?	Ya Yes			Laporan Tahunan/ Website Annual Report/ website	592
E.3.3	Sudahkah masing-masing Komisaris menghadiri minimal 75% dari semua rapat Dewan Direksi yang diadakan dalam satu tahun? Have each commissioner attended a minimum of 75% of all meetings of the Board of Commissioners held in one year?	Ya Yes				593
E.3.4	Apakah perusahaan menetapkan kebijakan minimum quorum 2/3 untuk keputusan Dewan Direksi? Does the Company set a minimum policy 2/3 quorum for the Board of Directors decision?	Ya Yes				520
E.3.5	Apakah Komisaris perusahaan mengadakan rapat secara terpisah setidaknya sekali selama tahun tanpa kehadiran eksekutif? Does the Company's commissioner hold meeting separately at least once during the year without the presence of the executive?	Ya Yes			Laporan Tahunan/ Website Annual Report/ website	592

Index Asean CG Scorecard

Asean CG Scorecard Index

Index	Deskripsi Description	Ya Yes	Tidak No	Lokasi Informasi Source	Penjelasan dan Referensi Explanation and References	Halaman Page
E.3 Proses Dewan Komisaris/Akses Informasi The Board of Commissioners Process /Information Access						
E.3.6	Apakah materi rapat untuk Rapat Dewan Komisaris diberikan kepada dewan setidaknya 5 (lima) hari kerja sebelum Rapat berlangsung? Are the meeting materials of the Board Commissioners Meeting given to the board at least 5 (five) business days before the meeting took place?	Ya Yes				592
E.3.7	Apakah sekretaris perusahaan memegang peranan penting dalam mendukung tugas Dewan Komisaris? Is the Corporate Secretary playing an important role in supporting the duties of the Board of Commissioners?	Ya Yes		Laporan Tahunan/ Website Annual Report/ website		640
E.3.8	Apakah Sekretaris Perusahaan memiliki kecakapan dalam bidang hukum, akuntansi atau bidang kesekretariatan? Does the Corporate Secretary have competency in the field of law, accounting or secretarial field?	Ya Yes				640, 105
E.3 Proses Dewan Komisaris/Penunjukan Dewan Komisaris The Board of Commissioners Process /Appointment of the Board of Commissioners						
E.3.9	Apakah perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih Direktur/Komisaris yang baru? Does the Company disclose the criteria used in selecting the new Director/ Commissioner?	Ya Yes		Laporan Tahunan/ Website Annual Report/ website		514, 597
E.3.10	Apakah perusahaan mengungkapkan proses yang diikuti dalam pengangkatan Direksi/Komisaris yang baru? Does the Company disclose the process followed in the appointment of new Director/ Commissioner?	Ya Yes		Laporan Tahunan/ Website Annual Report/ website		530
E.3.11	Apakah Direksi/Komisaris tunduk kepada pemilihan kembali setidaknya sekali dalam setiap tiga tahun? Are the Directors/Commissioners subject to re-election at least once in every three years?	Ya Yes				513-579
E.3 Proses Dewan Komisaris/Hal-Hal Terkait Remunerasi The Board of Commissioners Process /Remuneration Matters						
E.3.12	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan remunerasi (biaya, tunjangan, natura dan honorarium lainnya) (seperti penggunaan jangka pendek dan jangka panjang insentif dan ukuran kinerja) untuk Direksi Eksekutif dan CEO? Does the company disclose its remuneration (Fees, allowance, benefit in kind and other emoluments) policy (i.e. the use of short term and long term incentives and performance measures) for its executive directors and CEO?	Ya Yes		Laporan Tahunan/ Website Annual Report/ website		516-517
E.3.13	Apakah ada pengungkapan mengenai struktur biaya untuk non-eksekutif Direktur/ Komisaris? Is there disclosure of the fee structure for non executive directors/ commissioners?	Ya Yes				518
E.3.14	Apakah para pemegang saham atau Dewan Komisaris menyetujui remunerasi terhadap Direksi dan/atau eksekutif senior? Do the shresholders and the board of directors approve the remuneration of the executive directors and/or the senior executives?	Ya Yes				544
E.3.15	Apakah Direksi/Komisaris Non-Eksekutif Independen menerima pilihan, kinerja saham atau bonus? Do independent non executive directors/ commissioners receive options, performance shares or bonuses?	Tidak		Laporan Tahunan/ Website Annual Report/ website		n.a
E.3 Board Proseses/Internal Audit Board Proseses/Internal Audit						
E.3.16	Apakah perseroan memiliki fungsi audit internal yang terpisah? Does the company have a separate internal audit function?	Ya Yes				645-649
E.3.17	Adalah Ketua audit internal diidentifikasi atau, jika outsourcing, adalah terkait dengan nama dari eksternal perusahaan diungkapkan? Is the head of internal audit identified or if outsourced is the name of th external firm disclosed?	Ya Yes		Laporan Tahunan/ Website Annual Report/ website		645
E.3.18	Apakah pengangkatan dan pemberhentian internal auditor memerlukan persetujuan Komite Audit? Does the appointment and removal of the internal auditor require the approval of the audit committee?	Tidak No				n.a

Index Asean CG Scorecard

Asean CG Scorecard Index

Index	Deskripsi Description	Ya Yes	Tidak No	Lokasi Informasi Source	Penjelasan dan Referensi Explanation and References	Halaman Page
E.3 Board Processes/Risk Oversight Board Processes/Risk Oversight						
E.3.19	Apakah perseroan mengungkapkan prosedur pengendalian internal/sistem manajemen risiko yang dimiliki? Does the company disclose the internal control procedures/ risk management systems it has in place?	Ya Yes				669-670
E.3.20	Apakah Laporan Tahunan mengungkapkan bahwa Direksi/ Dewan Komisaris telah melakukan review terhadap pengendalian utama (termasuk pengendalian operasional, keuangan, dan kepatuhan) dan sistem manajemen risiko perusahaan? Does the annual report disclose that the board of directors/commissioners has conducted a review of the companys material controls (including operational, finance and compliance controls) and risk management systems?	Ya Yes		Laporan Tahunan/ Website Annual Report/ website		673-675
E.3.21	Apakah perseroan mengungkapkan bagaimana risiko utama dikelola? Does the company disclose how key risks are managed?	Ya Yes				305-413
E.3.22	Apakah Laporan Tahunan berisi pernyataan dari Dewan Direksi/Komisaris atau Komite Audit mengenai kecukupan dari pengendalian internal perusahaan/ sistem manajemen risiko? Does the Annual Report contain a statement of the Board of Directors/ Commissioners or the Audit Committee concerning the adequacy of the internal control/ risk management system?	Tidak No		Laporan Tahunan/ Website Annual Report/ website		302-308, 673-675
E.4 Komposisi & Struktur Dewan Board Structure & Composition						
E.4.1	Apakah peran Presiden Komisaris dan CEO dijabat oleh orang yang berbeda? Is the President Commissioner and CEO roles held by different people?	Ya Yes				580
E.4.2	Apakah Presiden Komisaris merupakan Komisaris Independen? Whether the President Commissioner is Independent Commissioner?	Tidak No				n.a
E.4.3	Apakah Presiden komisaris pernah menjabat sebagai CEO perusahaan dalam tiga tahun terakhir? Did the President Commissioner serve as CEO of the Company in the past three years?	Tidak No		Laporan Tahunan/ Website Annual Report/ website		n.a
E.4.4	Apakah peran dan tanggung jawab Presiden Komisaris diungkapkan? Do the roles and responsibilities of the President Commissioners disclose?	Ya Yes				581-582
E.4.5	Apakah setidaknya satu Komisaris memiliki pengalaman kerja didalam sektor utama dimana perusahaan saat ini beroperasi? Have at least one commissioner had experience working in key sectors where the Company currently operates?	Ya Yes				579
E.4.6	Apakah perusahaan mengungkapkan suatu kebijakan keragaman Dewan Direksi/Komisaris? Does the Company disclose a diversity policy of the Board of Directors/ Commissioners?		Bank telah mengungkapkan Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi. The Bank has disclosed the Board of Commissioners and Board of Directors Diversity policy.	Laporan Tahunan/ Website Annual Report/ website		605-606
E.5 Kinerja Dewan Komisaris Performance of The Board of Commissioners						
E.5.1	Apakah perusahaan memiliki program-program orientasi untuk Direksi/Komisaris yang baru? Does the Company have orientation programs for new Directors/Commissioners?	Ya Yes				643
E.5.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mendorong Direksi/Komisaris untuk menghadiri/ mengikuti program pendidikan profesional yang berkelanjutan? Does the Company have a policy that encourages Directors/Commissioners to attend/ participate in continuing professional education program?	Ya Yes		Laporan Tahunan/ Website Annual Report/ website		100-108, 109-114
E.5.3	Apakah perusahaan mengungkapkan bagaimana Dewan Direksi/Komisaris merencanakan suksesi CEO/ Managing Direktor/Presiden dan manajemen kunci? Does the Company disclose how the Board of Directors/ Commissioners plan for succession of CEO/ Managing Director/President and key management?	Ya Yes		Laporan Tahunan/ Website Annual Report/ website		530-531
E.5.4	Apakah Dewan Direksi/Komisaris melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap CEO/Managing Direktor/Presiden? Does the Board of Directors/ Commissioners conduct annual performance appraisal againts CEO/Managing Director/President?	Ya Yes				514-515, 588-589

Index Asean CG Scorecard

Asean CG Scorecard Index

Index	Deskripsi Description	Ya Yes	Tidak No	Lokasi Informasi Source	Penjelasan dan Referensi Explanation and References	Halaman Page
Penilaian Dewan Komisaris dan Direksi/Penilaian Komite The Board of Directors/Commissioners Appraisal/ Committee Appraisal						
E.5.5	Apakah penilaian kinerja tahunan Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris? Is the annual performance appraisal of Directors performed by the Board of Commissioners?	Tidak No				n.a
E.5.6	Apakah perseroan mengungkapkan proses yang diikuti dalam melakukan penilaian Dewan Komisaris? Does the Company disclose the process followed in the appraisal of the Board of Commissioners?	Ya Yes				588-589
E.5.7	Apakah perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam penilaian Dewan Komisaris? Does the Company disclose the criteria used in the appraisal of the Board of Commissioners?	Ya Yes		Annual Report/ website		587-589
E.5.8	Apakah penilaian kinerja tahunan dilakukan secara individu terhadap Dewan Komisaris? Is the annual performance appraisal performed individually against the Board of Commissioners?	Ya Yes				589
E.5.9	Apakah perseroan mengungkapkan proses yang diikuti dalam melakukan penilaian Direktur? Does the Company disclose the process followed in the appraisal of the Director?	Ya Yes				514-515
E.5.10	Apakah perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam penilaian Direktur? Does the Company disclose the criteria used in the appraisal of the Director?	Ya Yes				515
E.5.11	Apakah penilaian kinerja tahunan dilakukan oleh Komite-komite Direksi? Is the annual performance appraisal performed by the Committees of the Board of Directors?	Tidak No		Annual Report/ website		n.a
BONUS						
TERKAIT DENGAN BAGIAN E DAN BAGIAN A RELATED WITH PART E AND PART A						
LEVEL II						
A. Hak Pemegang Saham A. Rights of Shareholders						
A.1	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dalam dan memberikan suara dalam rapat pemegang saham umum dan untuk diberitahu tentang aturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham. Right to participate effectively in and vote in general shareholders meetings and should be informed of the rules, including voting procedures that govern general shareholders meeting.	Ya Yes		Laporan Tahunan Annual Report		539
A.1.1 (B)	Apakah perusahaan memungkinkan untuk menggunakan media elektronik yang sudah diberi pengamanan untuk voting in absentia dalam rapat umum pemegang saham? Does the company allow the use of secure electronic voting in absentia at the general meetings of shareholders?	-				n.a
B. Perlakuan Setara Terhadap Pemegang Saham Equitable Treatment of Shareholders						
B.1 Surat Pemberitahuan RUPS Notice of AGM						
B.1.1 (B)	Apakah Perusahaan menerbitkan surat pemberitahuan RUPS (beserta edaran mengenai rincian agenda acara dan penjelasannya), seperti yang disampaikan kepada Bursa, selambatnya 28 hari sebelum tanggal rapat diselenggarakan? Does the company release its notice of AGM (with detailed agendas and explanatory circulars) as announced to the exchange, at least 28 days before the date of the meeting?	Tidak No		Laporan Tahunan Annual Report		n.a
B.2 Menghindari Insider trading dan penyalahgunaan Insider trading and abusive self dealing should be prohibited						
B.2.1 (B)	Apakah Perusahaan memiliki kebijakan yang mengharuskan Direksi/Komisaris dan Manajemen Kunci, untuk memberi tahu Dewan atau delegasinya paling tidak 1 hari sebelum melakukan transaksi saham perusahaan Does the company have a policy, requiring directors/ commissioners and key officers to notify the board or its delegate at least 1 (one) day before they deal in the company shares?	-				n.a

Index Asean CG Scorecard

Asean CG Scorecard Index

Index	Deskripsi Description	Ya Yes	Tidak No	Lokasi Informasi Source	Penjelasan dan Referensi Explanation and References	Halaman Page
D. Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency						
D.1 Kualitas Laporan Tahunan Quality of Annual Report						
D.1.1 (B)	Apakah perusahaan mengungkapkan identitas penasihat/konsultan untuk komite remunerasi/kompensasi yang ditunjuk oleh dewan dan apakah mereka independen atau mereka telah menyatakan benturan kepentingan? Does the company disclose the identity of advisers/ consultants to the remuneration compensation committee appointed by the board and whether they are deemed independent or they have declared any conflicts of interest?	Tidak No				n.a
E. Tanggung Jawab Kepada Dewan Responsibilities of the Board						
E.1 Kompetensi Dewan dan Keberagamannya Board Competencies and Diversity						
E.1.1 (B)	Apakah perusahaan memiliki paling tidak satu direktur/komisaris independen wanita? Does the company have at least one female independent director/ commissioner?	Ya Yes		Laporan Tahunan Annual Report		520-579
E.2 Komite Nominasi Nominating Committee						
E.2.1 (B)	Apakah Komite Nominasi seluruhnya merupakan direktur/komisaris independen? Does the Nominating Committee comprise entirely of independent directors/ commissioners?	Tidak No		Laporan Tahunan Annual Report		n.a
LEVEL II						
E.3 Penunjukan dan pemilihan kembali Dewan Board Appointments and Re-Election						
E.3.1 (B)	Apakah Perusahaan memperhatikan profil Dewan dalam mempertimbangkan pencalonan anggota Dewan (seperti, mengidentifikasi keahlian profesinya dan karakter pribadi yang ditunjukkan saat menjabat; mengidentifikasi kekurangan dalam hal keahlian dan karakternya; serta mencari calon untuk mengisi kesenjangan yang mungkin ada tersebut)? Does the company compile a board profile when considering candidates to the board (i.e., identify the professional skills and personal characteristics present on the current board; identify the missing skills and characteristics; and nominate individuals who could fill possible gaps)?	Ya Yes				597-598
E.3.2 (B)	Apakah Perusahaan menggunakan jasa profesional atau sumber eksternal lainnya (seperti database khusus direktur) dalam mencari calon anggota dewan komisaris/direksi? Does the company use professional search firms or other external sources of candidates (such as director databases) when searching for candidates to the board of directors/ commissioners?	Tidak No		Laporan Tahunan Annual Report		n.a
E.4 Komposisi dan Struktur Dewan Board Structure & Composition						
E.4.1 (B)	Apakah Perusahaan membatasi lima posisi dalam keanggotaan Dewan untuk perusahaan terbuka, termasuk anak perusahaannya yang belum berstatus perusahaan terbuka. Has the company set a limit of five board seats in PLCs including its unlisted subsidiaries?	Ya Yes		Laporan Tahunan Annual Report		603
E.5 Penilaian Dewan Board Appraisal						
E.5.1 (B)	Apakah Perusahaan menunjuk pihak konsultan eksternal untuk melakukan penilaian bagi Dewan, paling tidak sekali dalam tiga tahun? Does the company appoint an external consultant to facilitate the board assessment at least once every three years?	Tidak No		Laporan Tahunan Annual Report		n.a
E.6 Pengawasan Risiko Risk Oversight						
E.6.1 (B)	Apakah Laporan Tahunan memuat pernyataan dari BOC/BOD atau Komite Audit mengenai kesiapan sistem pengendalian internal/manajemen risiko yang tersedia di Perusahaan? Does the Annual Report contain a statement from the board of directors/ commissioners or Audit Committee commenting on the adequacy of the company's internal controls/risk management systems?	Ya Yes		Laporan Tahunan Annual Report		302-308, 673-675
LEVEL II						
A Hak Pemegang Saham Rights of Shareholders						
A.1 Hak Dasar Pemegang Saham Basic Shareholders Rights						
A.1.1 (P)	Apakah perusahaan lalai atau tidak mampu memberikan kesetaraan perlakuan dalam proses pembelian kembali saham bagi seluruh pemegang saham? Did the company fail or neglect to offer equal treatment for share repurchases to all shareholders?	Tidak No				n.a

Index Asean CG Scorecard

Asean CG Scorecard Index

Index	Deskripsi Description	Ya Yes	Tidak No	Lokasi Informasi Source	Penjelasan dan Referensi Explanation and References	Halaman Page
A.2 Pemegang saham, termasuk institusi pemegang saham, diizinkan untuk saling berkonsultasi perihal hak dasar pemegang saham mereka seperti tertuang dalam Anggaran Dasar, dan dapat menolaknya atas dasar menghindari penyalahgunaan. Shareholders, including institutional shareholders, should be allowed to consult with each other on issues concerning their basic shareholder rights as defined in the Principles, subject to exceptions to prevent abuse						
A.2.1 (P)	Apakah terdapat bukti adanya pembatasan bagi pemegang saham untuk saling berkomunikasi atau berkonsultasi Is there any evidence of barriers that prevent shareholders from communicating or consulting with other shareholders?	Tidak	No			
A.3 Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan untuk diberitahu tentang aturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham						
A.3.1 (P)	Apakah Perusahaan mencantumkan agenda tambahan terkait pemberitahuan yang belum disampaikan tersebut di rapat-rapat umum pemegang saham terakhir?	Tidak	No			n.a
A.4 Struktur dan aturan permodalan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh kewenangan yang tidak proporsional terhadap kepemilikan sahamnya, harus diungkapkan.						
Apakah Perusahaan tidak dapat mengungkapkan tentang keberadaan: Whether the Company can not disclose about the existence of						
A.4.1 (P)	Perjanjian dengan Pemegang Saham Shareholders agreement?	-				n.a
A.4.2 (P)	Voting cap? Voting cap?	-				n.a
A.4.3 (P)	Multiple voting rights? Multiple voting rights?	-				n.a
A.5 Struktur dan aturan permodalan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh kewenangan yang tidak proporsional terhadap kepemilikan sahamnya, harus diungkapkan. Capital structures and arrangements that enable certain shareholders to obtain a degree of control disproportionate to their equity ownership should be disclosed.						
A.5.1 (P)	Apakah piramid struktur kepemilikan dan/atau struktur kepemilikan silang jelas tersampaikan? Is a pyramid ownership structure and or cross holding structure apparent?	Ya	Yes	Laporan Tahunan Annual Report		126-127
LEVEL II						
B. Perlakuan Setara Terhadap Pemegang Saham Equitable Treatment of Shareholders						
B.1 Insider trading dan penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi harus dilarang. Insider trading and abusive self dealing should be prohibited						
B.1.1 (P)	Apakah terdapat pengenaan sanksi terhadap insider trading yang melibatkan Direksi/Komisaris, manajemen dan karyawan dalam tiga tahun terakhir? Has there been any conviction of insider trading involving directors/ commissioners, management and employees in the past three years?	Tidak	No	Laporan Tahunan Annual Report		n.a
B.2	Melindungi pemegang saham minoritas dari penyalahgunaan kebijakan Protecting minority shareholders from abusive actions	Ya	Yes			539
B.2.1 (P)	Apakah dalam tiga tahun terakhir terdapat kasus yang menyalahi hukum, peraturan dan regulasi, terkait transaksi material dengan pihak berelasi? Has there been any cases of non compliance with the laws, rules and regulations pertaining to significant or material related party transactions in the past three years?	Tidak	No	Laporan Tahunan Annual Report		n.a
C. Peran Pemangku Kepentingan Role of Stakeholders						
C.1 Hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui perjanjian bersama harus dihormati. The rights of stakeholders that are established by law or through mutual agreements are to be respected.						
C.1.1 (P)	Apakah pernah terjadi pelanggaran hukum, terkait perburuhan/tenaga kerja/ nasabah/ketidak mampuan melunasi kewajiban/perdagangan/persaingan/ lingkungan hidup? Has there been any violation of any laws pertaining to labour/ employment/ consumer/ insolvency/commercial/ competition or environmental issues?	Tidak	No	Laporan Tahunan Annual Report		
C.2 Pada saat pemangku kepentingan turut berpartisipasi dalam proses tata kelola perusahaan, mereka harus memiliki akses pada informasi yang relevan, memadai dan dapat dipertanggungjawabkan kapanpun tanpa dibatasi waktu. Where stakeholders participate in the corporate governance process, they should have accessed to relevant, efficient and reliable information on a timely and regular basis.						
C.2.1 (P)	Apakah Perusahaan pernah terkena sanksi oleh regulator karena tidak mampu menerbitkan pengumuman atas peristiwa penting yang material karena keterbatasan waktu. Has the company faced any sanctions by regulators for failure to make announcements within the requisite time period for material events?	Tidak	No	Laporan Tahunan Annual Report		

Index Asean CG Scorecard

Asean CG Scorecard Index

Index	Deskripsi Description	Ya Yes	Tidak No	Lokasi Informasi Source	Penjelasan dan Referensi Explanation and References	Halaman Page
D. Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency						
D.1 Sanksi dari regulator terhadap laporan keuangan Sanctions from regulator on financial report						
D.1.1 (P)	Apakah Perusahaan mendapatkan "Pernyataan bersyarat" dari auditor laporan keuangan eksternal? Did the company receive a 'qualified opinion' in its external audit report?	Tidak No		Laporan Tahunan Annual Report		n.a
D.1.2 (P)	Apakah Perusahaan mendapatkan "Pernyataan tidak setuju" dari auditor laporan keuangan eksternal? Did the company receive a 'adverse opinion' in its external audit report?	Tidak No		Laporan Tahunan Annual Report		n.a
D.1.3 (P)	Apakah Perusahaan mendapatkan "Pernyataan penolakan" dari auditor laporan keuangan eksternal? Did the company receive a 'disclaimer opinion' in its external audit report?	Tidak No		Laporan Tahunan Annual Report		n.a
D.1.4 (P)	Apakah di tahun-tahun lalu Perusahaan pernah merevisi laporan keuangannya karena alasan selain perubahan dalam kebijakan akuntansi? Has the company in the past year revised its financial statements for reasons other than changes in accounting policies?	Tidak No				n.a
E. Tanggung Jawab Dewan Responsibilities of the Board						
E.1 Kepatuhan terhadap peraturan, regulasi dan hukum yang diterapkan Compliance with listing rules, regulations and applicable laws						
E.1.1 (P)	Di luar peraturan pengungkapan, apakah terdapat bukti bahwa di tahun terakhir ini Perusahaan tidak mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku? Is there any evidence that the company has not complied with any listing rules and regulations over the past year apart from disclosure rules?	Tidak No				n.a
E.1.2 (P)	Apakah pernah terjadi dimana Direksi/Komisaris yang telah mengundurkan diri mengungkapkan suatu masalah terkait tata kelola? Have there been any instances where non-executive directors/ commissioner have resigned and raised any issues of governance related concern?	Tidak No				n.a
E.1.3 (P)	Apakah pernah terjadi skandal perusahaan besar yang khususnya diakibatkan oleh lemahnya pengawasan Direksi/Komisaris? Have there been major corporate scandals that point to weak board of directors/ commissioners oversight?	Tidak No				n.a
E.2 Dewan A Board A						
E.2.1 (P)	Apakah Perusahaan memiliki Direksi/Komisaris Independen yang telah menjabat lebih dari 9 tahun? Does the company have any independent directors/ commissioners who have served for more than nine years?	Tidak No		Laporan Tahunan Annual Report		n.a
E.2.2 (P)	Apakah Perusahaan tidak mampu memberikan pembenaran dan mengumpulkan persetujuan para pemegang saham dalam mempertahankan periode menjabat Direktur/Komisaris Independen lebih dari 9 tahun? Did the company fail to provide justification and obtain shareholder approval for retaining the independent director/ commissioner beyond nine years?	Ya Yes		Laporan Tahunan Annual Report		513-514
E.2.3 (P)	Apakah Perusahaan tidak dapat mengungkapkan tanggal penunjukkan pertama kali dari masing-masing Direktur/Komisaris Independen? Did the company fail to disclose the date of first appointment of each independent director/ commissioner?	Tidak No		Laporan Tahunan Annual Report		n.a
E.2.4 (P)	Apakah Perusahaan tidak dapat mengungkapkan identitas dari para Direktur/ Komisaris Independen? Did the company fail to disclose the identity of the independent director/ commissioners?	Tidak No		Laporan Tahunan Annual Report		n.a
E.3 Audit Eksternal External Audit						
E.3.1 (P)	Apakah terdapat Direktur atau Senior Manajemen yang pernah bekerja di kantor auditor eksternal yang saat ini bekerja sama? (dalam 2 tahun terakhir) Is any of the director or senior management a former employee or partner of the current external auditor (in the past 2 years?)	Tidak No		Laporan Tahunan Annual Report		n.a

DIREKSI

Board of Directors

Menurut UU PT nomor 40 tahun 2007, Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi diangkat oleh RUPS yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pengurusan Bank dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya melalui RUPS. Direksi bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik di Bank. Keberlangsungan usaha Bank untuk jangka panjang, pencapaian tingkat kinerja yang sesuai dengan target usaha, serta pengelolaan prinsip kehati-hatian Bank demi kepentingan para *stakeholder* secara keseluruhan juga menjadi bagian dari tanggung jawab Direksi.

Direksi memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan Anggaran Dasar yang merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang selalu dikinikan secara berkala.

Pelaksanaan pengangkatan Direksi mengikuti tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar serta sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang yang berlaku. Pengangkatan anggota Direksi dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus *Fit and Proper test* Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Direksi

Tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Direksi antara lain sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko Bank secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian bank dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank.

Pursuant to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, the board of directors shall constitute a company's organ authorized and fully responsible for the Company's management for the Company's interest, in accordance with the Company's purposes and objectives and to represent the Company, inside and outside the court of law pursuant to the provisions of the articles of associations and the prevailing laws and regulations.

The Board of Directors, appointed by the GMS, shall be fully responsible for the implementation of the Bank's administration and shall account for the performance of its duties through the GMS. The Board of Directors shall be responsible for the development and management of the Bank's good corporate governance. The Bank's long-term business sustainability, achievement of performance level in accordance with business targets, and its management of the principles of prudence for overall interest of the stakeholders shall also be part of the Board of Directors' responsibilities.

The Board of Directors has distinctive authorities and responsibilities pursuant to the Articles of Association that refer to the Law on Limited Liability Company, regulations of Bank Indonesia and/or the Financial Services Authority, as well as Work Guidelines and Code of Conducts of the Board of Directors, which are regularly updated.

The implementation of the Board of Directors' appointment shall follow the procedures for nomination, appointment, replacement and dismissal of members as provided for in the Articles of Association and in accordance with the requirements and provisions stipulated by regulations of Bank Indonesia and/or the Financial Services Authority as well as the prevailing Laws. The appointment of members of the Board of Directors shall be declared as effective upon being declared as successfully passing the Fit and Proper test by Bank Indonesia and/or the Financial Services Authority.

Duties and responsibilities of Members of the Board of Directors

Duties and responsibilities of Members of the Board of Directors shall be, among other things, as follows:

1. The Board of Directors shall be fully responsible in performing its duties in developing the Bank's business and managing its risks in a professional manner by putting forward the principles of prudence and principles of good corporate governance in every business activity of the Bank at all levels or ranks of the Bank's organization.

Direksi

Board of Directors

2. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan Bank sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank serta senantiasa berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.
 3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
 4. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Bank, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
 5. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
 6. Direksi berhak mewakili Bank di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Bank dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank.
 7. Direksi menyusun strategi usaha sesuai dengan visi dan misi Bank sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank Tahunan serta bertanggung jawab mengawasi realisasi pelaksanaannya secara berkala.
 8. Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang juga memuat Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum dimulainya tahun buku yang baru sesuai ketentuan yang berlaku.
 9. Direksi menyusun dan menetapkan struktur Organisasi Bank beserta uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta memastikan pengelolaan sumberdaya Bank secara optimal.
 10. Direksi mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang ketenagakerjaan menggunakan media yang mudah diakses, menetapkan remunerasi sesuai dengan kondisi dan kemampuan Bank serta lingkungan *peers group* Bank, dan menciptakan jenjang karir yang baik kepada karyawan.
 11. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa:
 - Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. The Board of Directors shall perform its duties and responsibilities in managing the Bank in accordance with its authorities as regulated in the Bank's Articles of Association and shall always be guided by the prevailing laws and regulations in Indonesia.
 3. All members of the Board of Directors must perform their duties and responsibilities by acting in good faith, in a responsible and prudent manner.
 4. In performing its duties and responsibilities in the administration of the Bank, the Board of Directors must hold Annual GMS and Other GMS as provided for in the laws and regulations and the Articles of Association.
 5. The Board of Directors shall account for its performance of duties and responsibilities to the shareholders through the GMS.
 6. The Board of Directors shall be entitled to represent the Bank inside and outside the courts of law in respect of all matters and in all events, to bind the Bank with other parties and to undertake all actions, both regarding management and ownership, however with limitations, as provided for in the Bank's Articles of Association.
 7. The Board of Directors shall formulate business strategies in accordance with the Bank's vision and mission as determined in the Bank's Annual Business Plan and shall be responsible for regular supervision of the realization of its implementation.
 8. The Board of Directors shall submit an Annual Work Plan which shall also contain the Annual Budget to the Board of Commissioners for approval, prior to the commencement of the upcoming financial year in accordance with the applicable provisions.
 9. The Board of Directors shall formulate and determine the Bank's Organizational structure along with descriptions of jobs, authorities and responsibilities and shall ensure the Bank's optimum management of resources.
 10. The Board of Directors shall disclose the Bank's strategic policies on manpower by using accessible media, determine remuneration in accordance with the Bank's condition and ability as well as the Bank's peers group, and create good career path for the employees
 11. All members of the Board of Directors are jointly and responsible for the Bank's loss due to a mistake or negligence of a member of the Board of Directors in performing his/her duties, unless it is proven that:
 - Such loss is not due to his/her mistake or negligence.

Direksi Board of Directors

- Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
 - Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
 - Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
12. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi maka dibentuk komite-komite tingkat Direksi, yang juga dipersyaratkan oleh ketentuan regulator terkait untuk mendukung tugas dan tanggung jawab Direksi, antara lain Komite Manajemen Risiko, Komite Audit Internal, Komite Assets & Liabilities Managemet (ALCO), Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi. Selain komite-komite yang dipersyaratkan oleh ketentuan regulator tersebut, Bank juga memiliki komite-komite pendukung lainnya yang turut membantu tugas Direksi sesuai dengan kebutuhan bisnis Bank, antara lain Komite Kredit, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite *Human Capital* dan Personnel Committee. Komite-komite tersebut dibentuk berdasarkan keputusan Direksi dengan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing diatur dalam ketentuan internal dari setiap Komite. Direksi melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku. Informasi lengkap mengenai komite-komite ini dipaparkan pada bagian Komite-Komite Tingkat Direksi.
13. Direksi juga membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) serta Satuan Kerja Kepatuhan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
14. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan yang Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
15. Dalam rangka pengendalian umum sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit internal Bank, Direksi memiliki tanggung jawab menciptakan struktur pengendalian intern, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan
- He/she has performed the administration by acting in good faith, in a responsible and prudent manner for the interest of and in accordance with the Bank's purpose and objectives.
 - He/she does not have any conflict of interest, either directly or indirectly, in the administrative action causing said loss.
 - He/she has taken measures to prevent the occurrence or continuance of said loss.
12. In the context of supporting the effectiveness of the Board of Directors' performance of duties and responsibilities, committees at the level of the Board of Directors are established, which is also a requirement by the regulatory provision to support the Board of Directors' duties and responsibilities, which include the Risk Management Committee, Internal Audit Committee, Assets & Liabilities Management Committee (ALCO), Information Technology Steering Committee and Integrated Risk Management Committee. In addition to these committees required by said regulatory provision, the Bank also has other supporting committees to support the performance of the Board of Directors' duties in accordance with the Bank's business needs, including the Credit Committee, the Credit Restructuring Committee, Impairment Committee, Human Capital Committee and Personnel Committee. These Committees are established based on the decision of the Board of Directors and their respective duties and responsibilities are regulated in the internal provisions of each Committee. The Board of Directors evaluates the performance of these committees at the end of every financial year. Complete information on these committees is set out in Committees at the Level of the Board of Directors section.
13. The Board of Directors has also established Internal Audit Work Units (SKAI), Risk Management Work Unit (SKMR) and Compliance Work Unit to support its performance of duties and responsibilities.
14. In performing its duties and responsibilities the Board of Directors does not employ any individual advisor and/or professional consultancy service except for projects with specific nature, which are based on a clear contract covering the scope of work, responsibilities, term of work, and expenses, as well as Independent consultants qualified for specific projects.
15. In the context of general control as determined by the Bank's Internal Auditing Function Implementation Standard, the Board of Directors has the responsibility to create internal control structure, ensure the performance of internal auditing function at each management level and follow up on audit findings in

Direksi

Board of Directors

audit sesuai dengan kebijakan ataupun pengarahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

16. Direksi bertugas dan bertanggung jawab untuk menindaklanjuti dengan baik temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
17. Direksi menerapkan Tata Tertib Kerja serta Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang berlaku di Bank termasuk ketentuan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengikat dan wajib ditaati.
18. Direksi memastikan ketepatan dan kualitas serta akurasi laporan dan data keuangan yang disajikan untuk keperluan internal maupun eksternal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
19. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Bank sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
20. Direksi bertanggung jawab atas setiap informasi yang menyangkut Bank yang disampaikan kepada publik oleh Sekretaris Perusahaan.
21. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan program-program tanggung jawab sosial Bank.

accordance with the policies and directions of the Board of Commissioners.

16. The Board of Directors has duties and responsibilities to follow-up on audit findings and recommendations from the Bank's internal audit work unit, external auditor, supervision results from Bank Indonesia, the Financial Services Authority and/or supervision result from other authorities.
17. The Board of Directors implements Work Procedures and Code of Ethics as well as Guidelines of Conducts applicable in the Bank including provisions concerning the handling of conflict of interests which are binding and mandatory.
18. The Board of Directors ensures the precision and quality as well as accuracy of reports and financial data presented for internal and external purposes, in accordance with the applicable provisions.
19. The Board of Directors must provide all information on the Bank as required by the Board of Commissioners to perform their duties.
20. The Board of Directors is responsible for all information on the Bank disclosed to the public by the Corporate Secretary.
21. The Board of Directors has duties and responsibilities in implementing the Bank's social responsibility programs.

Tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi

Presiden Direktur

Tugas dan akuntabilitas utama Presiden Direktur adalah sebagai berikut:

Duties and responsibilities of each member of the Board of Directors

President Director

Main duties and accountabilities of the President Director are as follows:

Akuntabilitas Utama Principal Accountabilities	
Akuntabilitas Accountability	Tindakan Pendukung Supporting Actions
Merumuskan strategi pertumbuhan operasional MBI (yaitu, jangka pendek, jangka menengah & jangka panjang) untuk mendukung visi dan misi Maybank Group dan untuk penyalarsan dengan tujuan bisnis internasional. Formulate MBI operations growth strategy (ie. short, medium & long term) to support Maybank Group's vision, mission and in alignment with international business objectives	<ul style="list-style-type: none"> · Membuat strategi dan mengidentifikasi peluang pasar dan bisnis baru · Mengembangkan strategi pertumbuhan dan inovasi (termasuk keseluruhan rencana dan berbagai prakarsa) · Mengusulkan strategi untuk memperoleh persetujuan · Strategize and identify new markets and business opportunities · Develop growth and innovation strategy (includes overall plan and various initiatives) · Recommends strategy for approval

Direksi
Board of Directors

Akuntabilitas Utama Principal Accountabilities	
Akuntabilitas Accountability	Tindakan Pendukung Supporting Actions
Memfasilitasi Inovasi dan Strategi Persaingan Bagi Operasional MBI terkait dengan lingkungan perbankan di Indonesia Facilitate Innovation and Competitive Strategy For MBI Operations vis a vis banking environment in Indonesia	Memfasilitasi dan membantu dalam perancangan dan pengembangan Kerangka Kerja, Program dan rencana untuk mendukung inovasi dan strategi persaingan tersebut. Facilitate and assist in the design and development of Framework, Programs and plans to support the innovation and competitive strategy
Mengidentifikasi, mengembangkan dan mewujudkan potensi penuh karyawan (khususnya dengan jabatan senior) dan memastikan jaringan karyawan berbakat (<i>talent pipeline</i>) yang kuat untuk posisi yang sangat penting bagi misi Identify, develop and realize the full potential of employees (especially senior positions) and ensure a strong talent pipeline for the mission critical positions	Berkolaborasi dengan Group Human Capital untuk memastikan daya tarik, identifikasi, konfirmasi dan retensi karyawan berbakat untuk menjalankan strategi bisnis Internasional Collaborates with Group Human Capital to ensure the attraction, identification, confirmation, and retention of talent to meet International's business strategy
Menempatkan Operasional MBI sebagai bisnis bersaing di pasar mereka masing-masing untuk menarik dan mempertahankan karyawan berbakat terbaik Position MBI Operations as a competitive business in their respective markets to attract and retain top talents	· Berkolaborasi dengan Group Human Capital untuk memastikan praktik manajemen karyawan berbakat yang tepat (misalnya rekrutmen, manajemen kinerja, imbalan dan pengakuan, dll.) sesuai dengan strategi perbankan internasional dan pasar setempat Collaborates with Group Human Capital to ensure the appropriate talent management practices (eg. recruitment, performance management, reward and recognition, etc.) are aligned to the international bkg strategy and local market

Direktur Keuangan

Tugas dan akuntabilitas utama Direktur Keuangan adalah sebagai berikut:

Director of Finance

Main duties and accountabilities of the Director of Finance are as follows:

Akuntabilitas Utama Principal Accountabilities	
Akuntabilitas Accountability	Tindakan Pendukung Supporting Actions
<ul style="list-style-type: none"> · Memastikan strategi Keuangan sesuai dengan visi dan misi MBI · Membentuk dan memelihara hubungan positif dengan bank-bank, analis investasi, dan lembaga keuangan lainnya · Mempersiapkan laporan keuangan organisasi secara akurat, misalnya laporan laba rugi, neraca, laporan keuangan manajemen, dan laporan dan pengajuan yang berdasarkan peraturan · Berkontribusi terhadap perencanaan strategis dan pengambilan keputusan di tingkat eksekutif atas untuk mengembangkan dan menerapkan strategi keuangan di seluruh organisasi yang sesuai dengan visi organisasi dan sasaran bisnis jangka panjang saat ini. · Ensuring Financial strategies are consistent with MBI vision and mission. · Establish and maintain positive relationships with banks, investment analysts, and other financial institutions · Accurate preparation of the organization's financial reports, such as profit and loss accounts, balance sheet, management financial reports, and regulatory reports and filings · Contribute to strategic planning and decision-making at the top executive level to develop and implement an organization-wide financial strategy that aligns with the organization's vision and its current and long-term business objectives. 	

Direksi

Board of Directors

Direktur Community Financial Services (CFS)

Tugas dan akuntabilitas utama Direktur CFS adalah sebagai berikut:

Director of Community Financial Services (CFS)

Main duties and accountabilities of the CFS Director are as follows:

Akuntabilitas Utama | Principal Accountabilities

Akuntabilitas | Accountability

Tindakan Pendukung | Supporting Actions

- Merencanakan, menyelenggarakan, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan CFS
- Memastikan bahwa target bisnis dapat tercapai dan dapat dikelola sehingga mencegah kerugian bagi bank
- Memastikan proses persetujuan kredit bersifat responsif terhadap kebutuhan nasabah dan penghapusan kredit dan pengeluaran penagihan diminimalkan
- Mengembangkan produk baru dan juga meningkatkan kinerja bisnis
- Bekerja sama dengan lembaga eksternal sebagai upaya untuk meningkatkan peran MBI dalam mengembangkan produk baru serta untuk memperluas target penyaluran kredit
- Mengembangkan rencana strategis untuk menjalin hubungan dengan sasaran pasar atau klien baru dan juga mengidentifikasi produk yang harus didorong secara agresif ke pasar, karena potensinya untuk menghasilkan pendapatan tambahan yang besar
- Memberikan pengawasan terhadap anak perusahaan
- Mengembangkan dan mengawasi anggaran tahunan, termasuk namun tidak terbatas pada penyusunan anggaran pengeluaran dan modal, perencanaan, perluasan cabang, pengendalian biaya, sasaran pendapatan dan produktivitas dan pelaksanaan operasional.
- Mengembangkan pembentukan citra organisasi untuk mendukung pemasaran.
- Mengembangkan jalur untuk memastikan penetrasi pasar dan pertumbuhan bisnis.
- Mewakili organisasi dalam kesempatan publik dan dalam berinteraksi dengan para pihak eksternal
- Memastikan strategi perusahaan sesuai dan sejalan dengan peraturan perusahaan
- Mengembangkan tenaga penjualan yang kompeten, kreatif, aktif dan fleksibel untuk mendukung pertumbuhan bisnis,
- Mengembangkan dan mengoptimalkan kemajuan dan transformasi cabang.
- Memastikan pengembangan CFS untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih canggih bagi nasabah.
- Mencapai tingkat optimal produktivitas, memastikan bahwa bisnis menikmati manfaat dari biaya yang serendah mungkin dan secara hemat, efisien dan efektif.
- Mendefinisikan proposisi nilai kepada pasar, nasabah, dan industri termasuk strategi platform layanan dan produk untuk jalur distribusi.
- Plan, organize, direct and control CFS activities
- Ensure that business target is achievable and manageable thus preventing Banks from being loss
- Ensures credit approval process is responsive to customer needs and credit losses and collection expenses are minimized
- Developing new products and also increase business performances
- Cooperate with those external institutions as an attempt to improve the role of MBI in developing new products as well as to expand target of credit distribution
- Develops a strategic plan for establishing relationships with target new markets or clients and also identifies the products that should aggressively be pushed to the market, due to their potential to generate meaningful additional revenue
- Provide supervision to subsidiaries
- Develops and oversees the annual budget, including but not limited to expense and capital budgeting, planning, branch expansion, cost controls, revenue and productivity objectives, and operational execution.
- Develop organization's branding image to support marketing.
- Develop channel to ensure market penetration and business growth.
- Represent the organization at public occasions and in interactions with external parties
- Ensuring company's strategies are consistent and in line with the corporate regulations.
- Developing competent, resourceful, hands-on, and flexible sales forces to support business growth.
- Develop and optimize the branches progress and transformation.
- Ensure the development of CFS to provide better and more sophisticated service to the customers.
- Achieve optimum levels of productivity, ensuring that the business benefits from the lowest possible cost and best value.
- Define the value proposition to the market, customers and industry including service, product platform strategies for the distribution channel.

Direksi Board of Directors

Direktur Perbankan Global

Tugas dan akuntabilitas utama Direktur Global Banking adalah sebagai berikut:

Director of Global Banking

Main duties and accountabilities of the Director of Global Banking are as follows:

Akuntabilitas Utama | Principal Accountabilities

Akuntabilitas | Accountability

- Memastikan bahwa target bisnis dapat tercapai dan dapat dikelola sehingga mencegah kerugian bagi Bank
- Memastikan proses persetujuan kredit bersifat responsif terhadap kebutuhan nasabah dan penghapusan kredit dan pengeluaran penagihan diminimalkan.
- Mengembangkan produk baru untuk divisi Corporate, Transaction Banking dan Global Markets/Treasury
- Bekerja sama dengan lembaga eksternal sebagai upaya untuk meningkatkan peran MBI dalam mengembangkan perbankan serta untuk memperluas target penyaluran kredit ke divisi Corporate, Transaction Banking dan Global Markets/Treasury
- Mengembangkan rencana strategis untuk menjalin hubungan dengan sasaran pasar atau klien baru dan juga mengidentifikasi produk yang harus didorong secara agresif ke pasar, karena potensinya untuk menghasilkan pendapatan tambahan yang besar
- Berkontribusi dan mengawasi pemberian nasihat dan rekomendasi investasi terkait semua pasar utama
- Memanfaatkan jejaring dan membangun kemitraan dengan lembaga keuangan global (bank koresponden, dll.) dan meningkatkan potensi profitabilitas
- Memastikan arus informasi dan riset pasar yang konsisten dan berkualitas (khususnya terkait dengan korporasi & investasi
- Ensure that business target is achievable and manageable thus preventing Banks from being loss
- Ensures credit approval process is responsive to customer needs and credit losses and collection expenses are minimized.
- Developing new Corporate, Transaction Banking and Global Markets/Treasury products
- Cooperate with those external institutions as an attempt to improve the role of MBI in developing banking as well as to expand target of Credit distribution to Corporate, Transaction Banking and Global Markets/Treasury
- Develops a strategic plan for establishing relationships with target new markets or clients and also identifies the products that should aggressively be pushed to the market, due to their potential to generate meaningful additional revenue
- Contributes and oversees the provision of investment advice and recommendations in relation to all major markets
- Leverage network and build partnership with global financial institution (correspondent bank, etc) and increase up potential profitability
- Ensures the consistent and quality flow of market information and research (especially related to corporate & investment as well

Tindakan Pendukung | Supporting Actions

Direktur Hukum dan Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan

Tugas dan akuntabilitas utama Direktur Hukum dan Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Director of Legal, Compliance & Corporate Secretary

Main duties and accountabilities of the Director of Legal, Compliance & Corporate Secretary are as follows:

Akuntabilitas Utama | Principal Accountabilities

Akuntabilitas | Accountability

- Berkontribusi terhadap perencanaan strategis dan pengambilan keputusan di tingkat eksekutif atas untuk mengembangkan dan menerapkan strategi operasional dan bisnis di seluruh organisasi yang sesuai dengan kebijakan internal dan peraturan eksternal/pemerintah
- Mengukur dan mengevaluasi langkah pengamanan aset perusahaan.
- Mengelola dan mengembangkan proses yang andal untuk memastikan bahwa Bank memiliki kemampuan yang memadai untuk mencegah pencucian uang dan memperlakukan transaksi mencurigakan dengan sebagaimana mestinya sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan.
- Contribute to strategic planning and decision-making at the top executive level to develop and implement an organization-wide operational and business strategy that comply with the internal policies and external/government regulations
- Measures and evaluates the safeguarding of company assets.
- Manage and develop the reliable process to ensure that Bank have sufficient capability to prevent money laundering and treat suspicious transaction appropriately as required by regulations

Tindakan Pendukung | Supporting Actions

Direksi

Board of Directors

Direktur Human Capital

Tugas dan akuntabilitas utama Direktur Human Capital adalah sebagai berikut:

Director of Human Capital

Main duties and accountabilities of the Director of Human Capital are as follows:

Akuntabilitas Utama Principal Accountabilities		
Akuntabilitas Accountability	Tindakan Pendukung Supporting Actions	Keluaran/Hasil Kerja Outcome/ deliverables
<ul style="list-style-type: none"> Penasihat Strategis: Menjadi penasihat strategis bagi bisnis dari sudut pandang manajemen sumber daya manusia. Strategic Advisor: To be the strategic advisor to the business from human resources management perspective. 	<ul style="list-style-type: none"> Membangun hubungan kerja yang kuat dengan Presiden Direktur dan Direksi untuk bekerja sebagai penasihat utama dalam organisasi Memberikan informasi tentang human capital terkait potensi isu kinerja bisnis. Membangun strategi Human Capital yang kokoh untuk mendukung Bank dalam mencapai tujuan dan aspirasinya. Senantiasa memberikan informasi terkini kepada Direksi tentang setiap isu yang mungkin berkembang di tengah staf. Memahami kekuatan & kelemahan organisasi, persaingan pasar, peluang dan menyesuaikan strategi saat kondisi berubah Develop strong working relationship with President Director and the Directors to serve as a key advisor in the organization. Providing human capital information regarding potential business performance issues. Develop robust Human Capital strategy to support the Bank in achieving its goals and aspirations. Keep the Board of Directors abreast of any issues that may be developing within the staff. Understand organization's strengths & weaknesses, market competitiveness, opportunities and adapt strategy for changing conditions. 	<ul style="list-style-type: none"> Strategi Human Capital yang sesuai dengan perkembangan bisnis dan pasar/industri. Diselesaikannya isu sumber daya manusia guna memastikan bisnis berjalan lancar. Meningkatnya indeks keterlibatan karyawan. Human Capital strategy that aligns with development of business and market/ industry. Resolved human resources issues in order to ensure business is run smoothly. Increased employee engagement index.
<ul style="list-style-type: none"> <i>Talent Architect:</i> Memastikan bahwa orang yang tepat memegang jabatan yang tepat. Talent Architect: Ensuring that the right people are in the right positions. 	<ul style="list-style-type: none"> Memperoleh karyawan berbakat secara strategis untuk menemukan karyawan berbakat yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Memusatkan perhatian pada pengembangan karyawan yang didorong oleh manajemen karyawan berbakat, jenjang karier dan kerangka kerja pengembangan. Memastikan efektivitas manajemen suksesi karyawan dan eksekutif senior. Acquire talent strategically to find the right talent for the right job. Focus on employee development driven by talent management, career path and development framework. Ensure succession management of employee and senior executive is effective. 	<ul style="list-style-type: none"> Karyawan berbakat yang siap dan kompeten untuk menjalankan prakarsa Bank dalam mencapai sasarannya. Rencana suksesi unggulan yang memungkinkan transisi yang mulus. Ready and competent talents to carry out the Bank's initiatives in achieving its goals. Excellent succession plan that enables smooth transition.

Direksi Board of Directors

Akuntabilitas Utama | Principal Accountabilities

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> · Pemimpin Fungsi HR: Memastikan bahwa semua sistem, kebijakan dan program utama HR berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan kebutuhan strategis bisnis Leader of the HR Function: Ensuring that all the major HR systems, policies, and programs are run efficiently, effectively, and in alignment with the strategic needs of the business. | <ul style="list-style-type: none"> · Mendorong dan mengembangkan prakarsa dalam strategi Human Capital untuk remunerasi karyawan, pengembangan dan retensi karyawan bakat, perolehan dan pengadaan karyawan berbakat. · Memastikan bahwa semua kegiatan dan program terkait sumber daya manusia diterapkan sesuai dengan strategi Bank. · Mengawasi dan memantau kesesuaian strategi HR pada anak perusahaan. · Drive and develop initiatives in Human Capital strategy on employee remuneration, talent development and retention, talent acquisition and sourcing. · Ensure that all activities and programs related to human resources are implemented in accordance with the Bank's strategy. · Supervise and monitor alignment of HR strategy in subsidiaries. | <ul style="list-style-type: none"> · Diberlakukannya sistem, kebijakan, dan program HR di seluruh Bank dan anak perusahaannya. · Perbaikan terus-menerus indeks keterlibatan nasabah internal yang mengindikasikan tingkat layanan Human Capital kepada nasabahnya. · Enforced HR systems, policies, and programs throughout the Bank and its subsidiaries. · Continuously improved internal customer engagement index that indicates Human Capital service level to its customers. |
| <ul style="list-style-type: none"> · Penghubung Dewan Komisaris: Menangani semua kegiatan di mana Direktur Human Capital perlu berinteraksi secara langsung atau tidak langsung dengan Dewan Komisaris dalam pembahasan terkait gaji, nominasi dan pengembangan eksekutif. · Liaison to the Board of Commissioners: Deals with all the activities in which the Director, Human Capital needs to interact directly or indirectly with the Board of Commissioners in discussions regarding executive pay, nomination, and development. | <ul style="list-style-type: none"> · Merumuskan dan mengusulkan strategi/rencana tentang gaji, nominasi dan pengembangan eksekutif untuk memperoleh rekomendasi dari Komite Nominasi & Remunerasi sebelum disetujui oleh Dewan Komisaris. Formulate and propose strategy/ plan on executive pay, nomination, and development to get recommendation from Remuneration & Nomination Committee prior to endorsement from the Board of Commissioners. | <ul style="list-style-type: none"> · Strategi remunerasi yang bersaing untuk para eksekutif. · Rencana pengembangan yang konstruktif untuk menutup kesenjangan kompetensi para eksekutif sesuai dengan kebutuhan dan sasaran Bank. · Competitive remuneration strategy for executives. · Constructive development plan to close competency gaps of executives in alignment to the Bank's needs and objectives. |

Direksi

Board of Directors

Akuntabilitas Utama | Principal Accountabilities

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> · juara utama pembentukan citra pemberi kerja Key champion to employer branding | <ul style="list-style-type: none"> · Mewakili organisasi dalam interaksi dengan pihak eksternal (misalnya organisasi lain, asosiasi industri, serikat karyawan, badan pemerintah, otoritas hubungan tenaga kerja, media, lembaga swadaya masyarakat) guna melindungi kepentingan dan reputasi organisasi. · Menetapkan strategi untuk memajukan proposisi nilai pemberi kerja di mata masyarakat. · Represent the organization in interactions with external parties (e.g. other organizations, industry associations, employee unions, government agencies, labor relations authorities, media, not-for-profit organizations) in order to protect the organization's interests and reputation. · Set strategy to promote employer value proposition to public. | <ul style="list-style-type: none"> · Membawa Bank menjadi Pemberi Kerja <i>Top of Mind</i> (yang pertama kali diingat). · Indeks reputasi yang bersaing dengan Bank atau perusahaan terbaik lainnya. · Bring the Bank as the Top of Mind Employers. · Competitive reputation index with other top Banks or companies. |
| <ul style="list-style-type: none"> · Memberikan kepemimpinan tim dengan menciptakan lingkungan yang mendukung dan membina pembelajaran dan komunikasi Provide team leadership by creating an environment that supports and nurtures learning and communication. | <ul style="list-style-type: none"> · Memotivasi, mengembangkan dan mengelola tim Human Capital untuk memastikan kapasitas intelektual dioptimalkan dan efisiensi bisnis dipastikan. · Berkolaborasi dengan Maybank Group (GHC) dan anak perusahaannya untuk memastikan penyesuaian dan arus informasi yang lancar · Mendorong prakarsa berbagi pengetahuan dan pengembangan keterampilan. · Berkolaborasi dengan laporan langsung untuk menetapkan sasaran kinerja yang berarti. · Melatih dan membina karyawan berbakat untuk meningkatkan tingkat kontribusi kerja. · Motivate, develop and manage Human Capital team to ensure intellectual capacity is optimized and business efficiency is ensured. · Collaborate with Maybank Group (GHC) and its subsidiaries to ensure smooth alignment and information flow · Promote knowledge sharing and skills development initiatives. · Collaborate with direct reports to set meaningful performance objectives. · Coach and mentor talents to increase level of work contribution. | <ul style="list-style-type: none"> · Tim yang kompak dalam melaksanakan prakarsa/prioritas Human Capital. · Suksesi/karyawan berbakat yang siap menjadi pemimpin di Human Capital yang akan meningkatkan kinerja Human Capital dan hasil kerja bagi Bank. · Cohesive team to deliver Human Capital initiatives/ priorities. · Prepared successions/ talents to be leaders in Human Capital that will improve Human Capital performance and deliverable to the Bank. |

Direktur IT & Operations

Tugas dan akuntabilitas utama Direktur IT & Operations adalah sebagai berikut:

Director of IT & Operations

Main duties and accountabilities of the Director of IT & Operations are as follows:

Akuntabilitas Utama | Principal Accountabilities

Akuntabilitas | Accountability

Tindakan Pendukung | Supporting Actions

- Layanan perbankan operasional diberikan dengan standar tinggi untuk memastikan keunggulan operasional
- Memberikan layanan berkualitas tinggi kepada nasabah secara terus menerus dan konsisten
- Efisiensi, efektivitas dan kualitas operasional dari waktu ke waktu dan mengusulkan tindakan perbaikan agar berhasil mengatasi perubahan kebutuhan bisnis dan nasabah
- Memastikan penggunaan sumber daya yang tepat dengan menerapkan rencana rekayasa ulang proses dan perampingan prosedur arus kerja/operasional dalam unit.
- Memastikan infrastruktur TI yang andal tersedia dalam kinerja konsisten.

Direksi Board of Directors

Akuntabilitas Utama | Principal Accountabilities

Akuntabilitas | Accountability

- Operational banking services are provided with high standard to assure operational excellence
- High quality level of service to customer continuously and in consistent manner
- Efficiency, effectiveness and quality of the operations from time to time and proposes actions for improvement to cope up with the changing business or customer needs
- Ensures proper resources utilization by implementing plans on process re-engineering and streamlining of workflow/ operating procedures of the unit
- Ensure reliable IT infrastructure is provided in consistent performance.

Tindakan Pendukung | Supporting Actions

Direktur Risk Management

Tugas dan akuntabilitas utama Direktur Risk Management adalah sebagai berikut:

Director of Risk Management

Main duties and accountabilities of the Director of Risk Management are as follows:

Akuntabilitas Utama | Principal Accountabilities

Akuntabilitas | Accountability

- Mengetahui perkembangan terkini tentang metodologi dan alat manajemen risiko kredit.
- Memberikan nasihat dan saran kepada manajemen tentang isu dan temuan terkait risiko, dan memberikan rekomendasi tentang langkah perbaikan yang tepat.
- Menjalin hubungan dengan divisi Legal, Compliance dan Internal Audit terkait perubahan persyaratan berdasarkan peraturan yang memengaruhi risiko perbankan sebagaimana diperlukan.
- Berkontribusi terhadap perencanaan strategis dan pengambilan keputusan di tingkat eksekutif atas untuk mengembangkan dan menerapkan strategi operasional dan bisnis dengan tingkat risiko yang sehat yang sesuai dengan kebijakan internal dan peraturan eksternal/pemerintah
- Keeps abreast of latest developments on credit risk management methodologies and tools.
- Provides counsel and advice to management regarding risk related issues and findings, and recommends appropriate corrective measures.
- Liases with Legal, Compliance and Internal Audit on changes in regulatory requirements impacting banking risk as necessary.
- Contribute to strategic planning and decision-making at the top executive level to develop and implement risk-sound operational and business strategy that comply with the internal policies and external/government regulations

Tindakan Pendukung | Supporting Actions

Direktur Independen

Bank telah memiliki seorang Direktur Independen yaitu Dhien Tjahajani, yang diangkat berdasarkan hasil Keputusan RUPS tanggal 24 April 2015. Keberadaan Direktur Independen untuk memenuhi Peraturan Bursa Efek Indonesia No.1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Independent Director

The Bank's Independent Director, Dhien Tjahajani, was appointed by virtue of GMS Resolution on 24 April 2015. The position of Independent Director is to comply with Regulation of the Indonesia Stock Exchange No. 1-A concerning the Listing of Shares and Non-Share Equity Securities Issued by a Listed Company.

Masa Jabatan Direktur Independen

Masa jabatan Dhien Tjahajani sebagai Direktur Independen mengikuti masa jabatannya sebagai Direktur Bank yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2017 dan paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut.

Term of office of an Independent Director

The term of office of Dhien Tjahajani as an Independent Director follows her term of office as the Bank's Director, namely until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2017 and for a maximum of 2 (two) consecutive periods.

Dalam hal terjadi kekosongan posisi Direktur Independen, maka Bank harus mengisi posisi yang kosong tersebut paling lambat dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya atau dalam waktu 6 (enam) bulan sejak kekosongan tersebut terjadi.

In the event that the position of Independent Director becomes vacant, the Bank must fill such vacancy by no later than the next General Meeting of Shareholders or within a period of 6 (six) months as from the vacancy.

Direksi

Board of Directors

Kriteria Direktur Independen

Seorang Direktur Independen wajib:

- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pengendali Maybank Indonesia, paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen.
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi Bank.
- Tidak bekerja rangkap sebagai anggota Direksi pada perusahaan lain.
- Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Bank selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur.
- Ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Pedoman/Piagam (Charter) Direksi

Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang disebut dengan *Board of Director Manual* (BOD Manual) sebagai pedoman dan referensi dalam menjalankan tugas-tugas Direksi. BOD Manual tersebut ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang menginformasikan antara lain mengenai:

- Struktur Tata Kelola.
- Pengangkatan dan Pengunduran Diri Direksi.
- Tugas dan Kewajiban Direksi.
- Rapat-Rapat Direksi.
- Penyediaan Informasi ke Direksi.
- Penilaian Tahunan Direksi.
- Benturan Kepentingan Dan Transaksi Pihak Terkait.
- Program Pelatihan dan Induksi

Ketentuan yang diatur dalam BOD Manual tidak menggantikan hukum atau persyaratan peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

BOD Manual tersebut mencerminkan praktik terbaik yang harus dilakukan oleh Direksi dan bagaimana Direksi secara khusus mematuhi ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk memastikan bahwa BOD Manual tetap relevan sebagai Pedoman Direksi dalam melaksanakan tugasnya, maka BOD Manual diperbaharui secara periodik mengikuti perubahan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penilaian Kinerja Direksi

Pelaksanaan Penilaian

Bank menggunakan pendekatan Balanced Scorecard dalam melaksanakan strategi dan memonitor kinerja Perusahaan.

Independent Director Criteria

An Independent Director must:

- Not have any affiliation with the controller of Maybank Indonesia, at least for 6 (six) months prior to the appointment as an Independent Director.
- Not have any affiliation with the Bank's Board of Commissioners or the Board of Directors.
- Not work concurrently as a member of a Board of Directors of other companies.
- Not be an Insider in an institution or Capital Market Supporting Profession whose service is employed by the Bank for 6 (six) months prior to the appointment as a Director.
- Be appointed by the Board of Commissioners.

Guidelines/Charter of the Board of Directors

The Board of Directors has Guidelines and Procedures for the Board of Directors known as the Board of Directors Manual (BOD Manual) as guidelines and reference in performing the duties of the Board of Directors. The BOD Manual is written in Indonesian language and English language, which provides information on:

- Governance Structure.
- Appointment and Resignation of the Board of Directors.
- Duties and Obligations of the Board of Directors.
- Meetings of the Board of Directors.
- Provision of Information to the Board of Directors.
- Annual Assessment of the Board of Directors.
- Conflict of Interests and Related Party Transaction.
- Training and Induction Programs

Provisions regulated in the BOD Manual shall not replace the law or other requirements and regulations applicable in Indonesia.

The BOD Manual reflects best practices to be performed by the Board of Directors and how they particularly have to comply with the provisions and regulations related to their duties and responsibilities.

In order to ensure the BOD Manual's relevance as the Board of Directors' Guidelines in performing their duties, it will be updated periodically, following any changes in prevailing laws and regulations.

Performance Assessment of Board of Directors

Assessment Implementation

The Bank uses Balanced Scorecard in the performance strategy implementation and monitoring. This is in line

Direksi Board of Directors

Hal ini sejalan dengan kebijaksanaan perusahaan yang menilai prestasi dan memberikan penghargaan berdasarkan kinerja. Sasaran strategis dikonversikan menjadi Key Performance Indicator (KPI) yang disepakati bersama oleh jajaran Direksi dan diturunkan sampai jajaran yang paling bawah sehingga seluruh jajaran membuat dan melaksanakan rencana kerja yang selaras dengan strategi dan saling mendukung untuk mencapai target kinerja Bank.

Tindak Lanjut Penilaian

KPI yang sudah dibahas oleh Direksi diajukan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk dievaluasi dan didiskusikan, sebelum diajukan kepada Dewan Komisaris untuk pembahasan lebih lanjut dan persetujuan. KPI Direksi untuk tahun 2016 telah disetujui oleh rapat Dewan Komisaris dan perkembangan kinerja Perusahaan dipantau secara berkala melalui laporan kinerja keuangan dan bisnis yang dipaparkan oleh Presiden Komisaris, Direktur Keuangan dan Direktur Bisnis dalam Rapat Dewan Komisaris.

Aspek Penilaian

KPI yang digunakan untuk penilaian kinerja Direksi pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

with the policy of Company performance-based reward and recognition. The strategic objectives are translated into Key Performance Indicators (KPI) agreed to by all members of the Board of Directors and deployed across all levels in order to ensure that the strategy remains focused and carried out effectively to achieve the Bank's performance targets.

Remuneration

Follow Up on Assessment Result

The KPI discussed by the Board of Directors is then submitted to RNC for further evaluation and discussion and subsequently proposed to the Board of Commissioners for discussion and approval. The 2016 KPI of the BOD was approved by a meeting of the Board of Commissioners. The development of the Company's performance is monitored on a regular basis through financial and business performance reports presented by the President Commissioner, Finance Director and Business Director in Board of Commissioners meetings.

Assessment Aspects

The following are the KPIs used for Board of Directors' performance assessment in 2016:

Aspek Aspect	Indikator Indicators
Kinerja Keuangan Financial Performance/	Pengukuran kinerja keuangan dan pertumbuhan portfolio bisnis Bank, yang meliputi pencapaian laba dan pendapatan Bank, perkreditan, pertumbuhan dana murah (CASA), rasio produktivitas dan pengelolaan biaya Bank dalam rangka peningkatan efisiensi. Measurement of the Bank's financial performance and business portfolio growth, including profit and income growth, credit, CASA growth, productivity ratio and cost management to improve the Bank's efficiency.
Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction	Pengukuran kepuasan pelanggan, yang meliputi skor promotor atas produk Bank, indeks engagement pelanggan, pertumbuhan jumlah pelanggan dan transaksi, serta pemenuhan Service Level Agreement (SLA). Measurement of customer satisfaction, including promoter score for Bank's product, customer engagement index, customer acquisition and transaction growth, and fulfillment of Service Level Agreement (SLA).
Tata Kelola & Kepatuhan Compliance & Governance	Komitmen Bank atas tata kelola dan kepatuhan terhadap Regulator diukur melalui rating dan jumlah temuan audit, skor tata kelola Perusahaan, LDR, dan kualitas aset. The Bank's commitment in Good Corporate Governance and compliance to Regulators measured through audit rating and findings, Corporate Governance's score, LDR, and asset quality.
Perbaikan Proses Process Improvement	Perbaikan proses berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja keuangan, produktivitas Bank, maupun kepuasan pelanggan, termasuk proyek transformasi Bank. Continuous process improvement to boost financial performance, Bank's productivity, and customer satisfaction, including the Bank's transformation projects.
Pengelolaan Sumber Daya Manusia People Management	Keberhasilan inisiatif pengelolaan sumber daya manusia yang diukur melalui indeks engagement karyawan, perencanaan suksesi, dan tingkat retensi talent. Measurement of successful people management initiatives through employee engagement index, succession plan, and talent retention.

Dari keseluruhan aspek pengukuran kinerja, porsi aspek keuangan hanya mencakup 25% dari total KPI. Hal ini juga menunjukkan bahwa aspek lainnya mendapatkan porsi yang penting. | From these performance measurement aspects, portion of financial aspects is 25% from total KPI, where it indicates that the other aspects are considered to have significant portion.

Direksi

Board of Directors

Remunerasi

Kebijakan Remunerasi Direksi

Kebijakan pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Direksi mengacu kepada keputusan dari Pemegang Saham sebagaimana ditetapkan dalam RUPS. Berdasarkan Hasil Keputusan RUPS Tahunan 2016, RUPS Tahunan telah menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2016, dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Dalam pelaksanaan penilaian kinerja Direksi baik secara keseluruhan, Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Dalam pelaksanaan penilaian kinerja Direksi baik secara keseluruhan, Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan melakukan evaluasi dan merekomendasikan *Balance Scorecard* dari Direksi dan Manajemen Eksekutif kepada Dewan Komisaris dan tinjauan kinerja secara keseluruhan berdasarkan *Balanced Scorecard* dari Dewan Komisaris, Direksi, dan Manajemen Eksekutif yang telah disetujui.

Besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2016.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi mendapat sejumlah paket remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*) sesuai dengan ketentuan Bank dan bentuk remunerasi lainnya serta fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

Ketentuan tentang besarnya gaji/honorarium atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut diserahkan kepada Dewan Komisaris dan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

Remunerasi Direksi direkomendasikan dan diusulkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan formulasi remunerasi yang mengacu kepada kebijakan internal Bank, peraturan eksternal yang berlaku, *industry comparison* serta fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing anggota Direksi serta yang besarnya diberikan sesuai kinerja Bank.

Remuneration

Policy on the Board of Directors' Remuneration

The policy on provision of remuneration and other facilities for the Board of Directors shall refer to the resolution of the Shareholders as determined in the GMS. Based on the 2016 Annual GMS Resolution, it has approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary and/or other allowances for members of the Board of Directors for financial year 2016, with due observance of proposals and recommendations from the Company's Remuneration and Nomination Committee. In conducting overall performance assessment of Board of Directors, Nomination & Remuneration Committee conducts evaluation and recommends Balance Scorecards from Board of Directors and Executive Management to Board of Commissioners and overall performance review based on Balance Scorecards from Board of Commissioners, Board of Directors, and Executive Management which have been approved.

The amount of salary and/or other allowances for members of the Board of Directors intended will be set out in the Annual Report for financial year 2016.

In performing their duties and responsibilities, the Board of Directors receives a number of remuneration package in the form of money, including salary and other fixed income, which includes benefits in accordance with the Bank's provisions and other forms of remuneration as well as other facilities in kind/in cash, namely other non-fixed income including allowance for housing, transportation and other facilities, which may or may not be owned.

Procedures for the Determination of Board of Directors' Remuneration

Provision on the amount of salary/honorarium or remuneration and/or allowances for members of the Board of Directors is determined by the GMS with due observance of the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee. These recommendations from the Nomination and Remuneration Committee are provided to the Board of Commissioners and conveyed in the GMS for approval.

Remuneration of the Board of Directors is recommended and proposed by the Nomination and Remuneration Committee based on the formulation of remuneration referring to the Bank's internal policy, applicable external regulations, industry comparison as well as functions and responsibilities of each member of the Board of Directors, the amount of which is determined based on the Bank's performance.

Direksi Board of Directors

Gambaran ringkas Prosedur Penetapan Remunerasi Anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Below is a brief overview of the Procedures for Determination of Board of Directors Members' Remuneration:

Prosedur Penetapan Remunerasi Anggota Direksi

Procedures for the Determination of Board of Directors Members' Remuneration



Besar Remunerasi Direksi

Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal.

The Amount of Board of Directors' Remuneration

Package of remuneration and facilities received by the Board of Directors includes the Remuneration structure and details of nominal value

Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dalam 1 (satu) tahun:

Remuneration package is grouped based on the level of income received by the Board of Directors in 1 (one) year:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Type of Remuneration and Facility	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun Dewan Direksi Amount Received By Board of Directors					
	2016		2015		2014	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura Salary, bonus, routine allowance, tantiem, and other facilities in cash						
- Gaji, bonus, tunjangan rutin & tunjangan lainnya Salary, bonus, routine allowance and other facilities	8	52,989	10	46,511	10	43,407
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang Other facilities in kind (housing, medical insurance, etc.) which:	8	7,838	10	4,060	10	2,893
a. dapat dimiliki can be owned;						
b. tidak dapat dimiliki cannot be owned						
Total		60,827		50,571		46,300

Direksi

Board of Directors

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun *) Amount of Remuneration per Person in 1 (one) Year *)	Jumlah Direksi Number of the Board of Directors Members		
	2016	2015	2014
Di atas Rp2 miliar Above Rp2 billion	8	8	9
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar Above Rp1 billion up to Rp2 billion	0	0	1
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Above Rp500 million up to Rp1 billion	0	2	0
Rp500 juta ke bawah Below Rp500 million	0	0	0

Keterangan: *) yang diterima secara tunai | Note: *) received in cash

Jumlah Direksi yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Number of Board of Directors and total amount of variable remuneration in 1 (one) year are as follow:

Remunerasi yang Bersifat Variabel Total Amount of Variable Remuneration	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun 2016 Amount Received in 1 (one) Year 2016	
	Direksi Board of Directors	
	Orang	Juta Rp
Total	8	22,034

Kebijakan Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka, Peraturan Bank Indonesia terkait GCG dan Anggaran Dasar Bank.

Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.

Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan/atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh Presiden Direktur atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi lainnya atau atas permintaan dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Direksi wajib pula mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Direksi harus menjadwalkan Rapat Direksi maupun rapat yang diadakan bersama dengan Dewan Komisaris tersebut untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Presiden Direktur atau salah seorang anggota Direksi atau oleh Sekretaris Perusahaan atau oleh Kepala Unit Kerja Corporate Secretary.

Policy on Board of Directors' Meeting

Policy on Board of Directors Meeting as provided for in POJK Number 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, Regulation of Bank Indonesia on GCG and the Bank's Articles of Association.

Board of Directors' meetings may be held if attended by the majority members of the Board of Directors.

Board of Directors' meeting must be held regularly at least 1 (one) time each month and/or may be held at any time deemed necessary by the President Director or by one or more member(s) of the Board of Directors or at the request of one or more member(s) of the Board of Commissioners or at the written request of 1 (one) or more shareholder(s) jointly representing 1/10 (one-tenth) of the total number of shares with valid voting rights.

The Board of Directors must also hold a Meeting with the Board of Commissioners regularly, at least 1 (one) time every 4 (four) months.

The Board of Directors must schedule the Board of Directors' Meetings and the meetings with the Board of Commissioners for the upcoming year prior to the end of the financial year.

Summons for the Board of Directors' Meeting must be made by the President Director or one of the Board of Directors members or by the Corporate Secretary or by the Head of Corporate Secretary Work Unit.

Direksi Board of Directors

Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan kepada setiap anggota Direksi dan harus dilakukan secara tertulis dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat tercatat atau dengan jasa kurir, atau dengan telex atau telefax atau dengan menggunakan sarana elektronik paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat Direksi diadakan, atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Presiden Direktur. Pemanggilan Rapat Direksi yang diadakan bersama dengan Dewan Komisaris harus pula disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan dan persyaratan yang sama. Pemanggilan Rapat harus mencantumkan mata acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

Bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan hadir dalam Rapat, yang mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi wajib dipimpin oleh salah seorang Direktur yang dipilih oleh para anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Direksi. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Frekuensi Rapat

Selama tahun 2016, Direksi telah menyelenggarakan 46 (empat puluh enam) kali rapat Direksi. Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dilakukan untuk beberapa agenda khusus rapat yang terdapat dalam Rapat Dewan Komisaris.

Summons for the Board of Directors' Meeting must be served on every member of the Board of Directors and must be made in writing with sufficient receipt, or by registered post or by courier, or by telex or telefax or by using electronic means by no later than 5 (five) calendar days prior to the Board of Directors' Meeting, or such other period as determined by the President Director. Summons for the Board of Directors' Meeting with the Board of Commissioners must also be served on each member of the Board of Commissioners on the same provisions and requirements. Summons for the Meeting must set out the agenda, date, time and venue of the Meeting.

Materials for the Meeting must be delivered to participants by no later than 5 (five) days prior to the meeting. In the event of a meeting held outside of the prepared scheduled, materials for the meeting must be delivered to the participants by no later than prior to the meeting.

The Board of Directors' meeting must be convened at the domicile of the Company or at the place of business activities of the Company. In the event that all members of the Board of Directors are present or are represented, said prior summons will not be required and the Board of Directors' meeting will be entitled to adopt valid and binding resolutions.

The Meeting of the Board of Directors shall be chaired by the President Director, in the event that the President Director is absent or is unable to attend, of which impediment no evidence to third parties shall be required, the Meeting of the Board of Directors must be chaired by a member of the Board of Directors elected by members of the Board of Directors present and or represented at the Meeting of the Board of Directors. A member of the Board of Directors may only be represented at the Meeting of the Board of Directors by another member of the Board of Directors by virtue of a power of attorney.

Resolutions of the meeting shall be set out on the minutes of meeting, signed by members of the Board of Commissioners and the Board of Directors attending and delivered to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Frequency of Meeting

During 2016, the Board of Directors held 46 (forty-six) meetings of the Board of Directors. Joint Meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners was held for several special agenda of meetings addressed in the Board of Commissioners' Meeting.

Direksi

Board of Directors

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Rapat Direksi adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.

Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat.

Setiap anggota Direksi yang hadir berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan 1 (satu) suara tambahan bagi setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam satu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Bank menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.

Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik serta tidak pernah ada perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Direksi.

Mechanism of Adoption of Resolutions

The Board of Directors' Meeting shall be valid and entitled to adopt binding resolutions if more than ½ (one-half) of the incumbent members of the Board of Directors are present or are represented at the meeting.

The resolutions of the meeting of the Board of Directors must be adopted through deliberation to reach consensus. In the event of no deliberation to reach consensus, the adoption of resolutions must be based on affirmative votes of more than ½ (one-half) of the incumbent members of the Board of Directors.

Each member of the Board of Directors present shall be entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for every other member of the Board of Directors represented by him/her.

Every member of the Board of Directors who personally in any way either directly or indirectly has an interest in a transaction, contract or proposed contract, in which the Bank is a party, must declare the nature of the interest in a the Board of Directors' Meeting and shall not be entitled to join the voting concerning matters related to such transaction or contract, unless otherwise determined by the Board of Directors' Meeting.

Results of the meeting of the Board of Directors have been set out in minutes of meeting and are well documented. There were no dissenting opinions in the meetings of the Board of Directors.

Data Kehadiran Rapat Direksi 2016 | Attendance of BOD Meetings 2016

NO	DATE	TZ	GMR	TN	JW	DT	HS	EB	IF	NOTE
1	6-Jan-16	x	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	TZ on Leave, DT on leave
2	11-Jan-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
3	26-Jan-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
4	1-Feb-16	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	✓	EB on leave, TN on leave
5	10-Feb-16	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	TN on leave, JW on leave
6	15-Feb-16	✓	x	✓	x	x	✓		✓****)	GMR on leave, JW on leave, DT on leave
7	22-Feb-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
8	29-Feb-16	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	JW on leave
9	7-Mar-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
10	14-Mar-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
11	21-Mar-16	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	GMR on leave
12	28-Mar-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	EB on leave
13	30-Mar-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	EB on leave
14	4-Apr-16	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	DT on leave, HS outside meeting, EB on leave
15	11-Apr-16	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	GMR on leave
16	18-Apr-16	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	TN on leave
17	26-Apr-16	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	DT on leave

Direksi
Board of Directors

Data Kehadiran Rapat Direksi 2016 | Attendance of BOD Meetings 2016

NO	DATE	TZ	GMR	TN	JW	DT	HS	EB	IF	NOTE
18	2-May-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
19	9-May-16	✓	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	GMR on leave & JW business trip
20	16-May-16	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	JW business trip; DT on leave
21	23-May-16	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	GMR on leave
22	31-May-16	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	GMR & IF on leave
23	6-Jun-16	✓	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	GMR on leave, JW business trip
24	14-Jun-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
25	20-Jun-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
26	27-Jun-16	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	DT on leave
27	18-Jul-16	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	x	TN & IF on leave
28	26-Jul-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	IF on leave
29	1-Aug-16	x	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	TZ,GMR, DT on leave
30	8-Aug-16	x	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	TZ, JW, DT on leave
31	15-Aug-16	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	TN Meeting at BI
32	22-Aug-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
33	31-Aug-16	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	JW business Trip
34	5-Sep-16	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	JW business Trip
35	13-Sep-16	✓	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	DT & GMR on leave
36	19-Sep-16	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	✓	DT& EB Meeting at Bank Indonesia
37	26-Sep-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
38	3-Oct-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
39	10-Oct-16	✓	✓	✓	✓	✓	xx	✓	✓	HS gardening leave
40	17-Oct-16	✓	✓	x	✓	✓	xx	✓	✓	TN meeting at KL, HS gardening leave
41	24-Oct-16	✓	✓	x	✓	✓	xx	✓	✓	TN On leave, HS gardening leave
42	1-Nov-16	✓	✓	x	✓	x	xx	✓	✓	TN On leave, DT Business Trip, HS gardening leave
43	14-Nov-16	x	✓	✓	✓	x	xx	✓	✓	TZ Business Trip, DT Business Trip, HS gardening leave
44	21-Nov-16	x	x	✓	✓	✓	xx	✓	✓	TZ Business Trip, GMR on leave, HS gardening leave
45	28-Nov-16	x	✓	✓	✓	✓	xx	✓	x	TZ business Trip, IF Business Trip,HS gardening leave
46	5-Dec-16	✓	✓	✓	✓	x	xx	✓	✓	DT meeting, HS gardening leave
TOTAL		46	46	46	46	46	46	46	46	
ATTEND		40	36	38	37	33	37	41	42	
ABSENT		6	10	8	9	13	9	5	4	
Percentage		87%	78%	83%	80%	72%	80%	89%	91%	

Note :

TZ : Taswin Zakaria	✓	: Attendance
TN : Thilagavathy Nadason	x	: Absent
GMR : Ghazali Moh Rasad	✓****)	: Teleconference/Conference call
JW : Jenny Wiriyanto	xx	: Gardening Leave
DT : Dhien Tjahajani		
HS : Henkys Sulistyono		
EB : Eri Budiono		
IF : Irvandi Ferizal		

Direksi Board of Directors

Berikut adalah meeting bersama antara BOC dan BOD selama tahun 2016:

Data Kehadiran Direksi dalam Rapat Dewan Komisaris 2016 | Attendance of BOD Members in BOC Meetings 2016

NO	DATE	BOC						INVITEE									NOTE	
		TSM	DAFA	SL	UJ	BDS	AI	TZ	GMR	TN	JW	DT	HS	EB	IF	DF		MRM
1	22-Jan-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	
2	23-Feb-16	✓***)	✗	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓***)	Special BOC Meeting, DAFA absent
3	26-Feb-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	
4	28-Mar-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	-	✓	EB on leave
5	22-Apr-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
6	26-Apr-16	✓***)	✓***)	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓***)	Special BOC Meeting
7	30-May-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
8	24-Jun-16	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	DAFA absent
9	25-Jul-16	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	SL absent
10	28-Jul-16	✓***)	✗	✓***)	✓***)	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	Special BOC Meeting
11	23-Sep-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
12	21-Oct-16	✓***)	✓***)	✓***)	✓	✓	✓	✓***)	-	✓	-	✓***)	-	-	-	-	-	Special BOC Meeting
13	31-Oct-16	✓	✓	✓	✓***)	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗✗	✓	✓	✓	-	TN on leave, DT Business Trip, HS Gardening leave
14	28-Nov-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗✗	✓	✓	✓	-	JW business trip, DT business trip
TOTAL		14	14	14	14	14	14											
ATTEND		14	11	13	14	14	14											
ABSENT		0	3	1	0	0	0											
Percentage		100%	79%	93%	100%	100%	100%											

Note :

TSM : Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin	✓ : Attendance
DAFA : Datuk Abdul Farid bin Alias	✗ : Absent
SL : Spencer Lee Tien Chye	✓***) : Teleconference/Conference call
UJ : Umar Juoro	***) : Only specific agenda
BDS : Budhi Dyah Sitawati	****) : Effectively Resign
AI : Achjar Iljas	- : no invitee
TZ : Taswin Zakaria	✗✗ : Gardening Leave
TN : Thilagavathy Nadason	
GMR : Ghazali Moh Rasad	
JW : Jenny Wiriyanto	
DT : Dhien Tjahajani	
HS : Henkys Sulistyono	
EB : Eri Budiono	
MRM : Mohamed Rafique Merican	
DF : Datuk Feisal	
MRM : Mohammed Rafique Merican	

Direksi
Board of Directors

Berikut adalah agenda meeting BOD selama tahun 2016:

Agenda BOD Meeting 2016

No	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Dewan Direksi Agenda of the Board of Directors Meetings
1	6 Januari 2016	No.001/DIR/01.2016, 6 Januari 2016 1. Notulen Rapat 7 dan 15 Desember 2015 2. CASA dan Likuiditas (CASA and Liquidity Update) 3. Project Network II 4. Lain-lain
2	11 Januari 2016	No.002/DIR/01.2016, 11 Januari 2016 1. Notulen Rapat 6 Januari 2015 2. Audit Adjustment EY 31 Dec 2015 3. CASA dan Likuiditas (CASA and Liquidity Update) 4. Syariah Banking Government of Indonesia Sukuk Issuance 5. Perubahan Umur Manfaat Hardware dan Software 6. Rebranding 7. Forex Loss at branch 8. Lain-lain
3	26 Januari 2016	No.003/DIR/01.2016, 26 Januari 2016 1. Notulen Rapat 11 Januari 2015 2. Persetujuan biaya Rutin SS3 untuk rental dan service charge 2016 3. CASA dan Likuiditas (CASA and Liquidity Update) 4. Update Mikro Banking 5. Sewa cabang 6. Cost Allocation 2016 in Management Reporting 7. Lain-lain
4	1 Februari 2016	No.004/DIR/02.2016, 1 Februari 2016 1. Notulen Rapat 26 Januari 2015 2. CASA dan Likuiditas (CASA and Liquidity Update) 3. PIA 2016 4. Visitor Handling 5. Structured Product Activity 6. Lain-lain
5	10 Februari 2016	No.005/DIR/02.2016, 10 Februari 2016 1. Notulen Rapat 1 Februari 2016 2. Proposal Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II oleh WOM Finance 3. CASA and Liquidity Update 4. Capital Monitoring Report FY15 5. Renovasi Cabang, Perpanjangan Sewa dan Sales Incentive Program untuk semester 2 2015. 6. Bali Marathon 2016 7. Lain-lain
6	15 Februari 2016	No.006/DIR/02.2016, 15 Februari 2016 1. Notulen Rapat 10 Februari 2016 2. CASA and Liquidity Update 3. Bunga atas mortgage 4. Final Audit Adjustment EY 31 Dec 2015 5. Maybank Indonesia Finance a. persetujuan atas pengunduran diri Lani Darmawan b. persetujuan penerbitan obligasi penawaran umum berkelanjutan (PUB) I tahap 2 6. SCMP Update Status for FY 2015 7. Sales Service Summit (SSM) dan Awarding Night 8. Lain-lain

Direksi

Board of Directors

Agenda BOD Meeting 2016

No	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Dewan Direksi Agenda of the Board of Directors Meetings
7	22 Februari 2016	No.007/DIR/02.2016, 22 Februari 2016 1. Notulen Rapat 15 Februari 2016 2. CASA and Liquidity Update 3. Internal Audit Committee (IAC) – Term of Reference 4. Investigation Result – Anti Fraud 5. Lain-lain
8	29 Februari 2016	No.008/DIR/02.2016, 29 Februari 2016 1. Notulen Rapat 22 Februari 2016 2. High-Impact Entrepreneur Menthorship Program 3. CASA and Liquidity Update & TD Counter Rate Proposal 4. Credit Card 2016 Usage Strategy 5. Update Proyek Mumbai 6. Lain-lain
9	7 Maret 2016	No.009/DIR/03.2016, 7 Maret 2016 1. Notulen Rapat 29 Februari 2016 2. CASA and Liquidity Update 3. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 4. Presentasi Regional Director 5. Credit Card 2016 Usage Strategy 6. IAC Terms of Reference 7. Maybank Group Award Night 2016 8. Structured Product Activity 9. Lain-lain a. Rencana Penempatan Board Productivity Index di Lantai 16 b. Maybank Productivity League c. Cabang Mauritius
10	14 Maret 2016	No.010/DIR/03.2016, 14 Maret 2016 1. Notulen Rapat 29 Februari dan 7 Maret 2016 2. CASA and Liquidity Update 3. Update on Capital Allocation FY16”, for information 4. Business Case : MPN Gen 2 – Billing Generator & Bulk Tax Payment 5. Lain-lain a. Penggunaan Laba Bersih FY2015 b. Persiapan Group EXCO Meeting
11	21 Maret 2016	No.011/DIR/03.2016, 21 Maret 2016 1. Notulen Rapat 14 Maret 2016 2. CASA and Liquidity Update 3. Renovasi KCP Kali Besar 4. a. Project Penggunaan Data Dukcapil b. Update kasus KCP Cileungsi 5. Hasil Asset Revaluation 2016 6. Lain-lain a. Maybank Productivity League b. Flexible working arrangement
12	28 Maret 2016	No.012/DIR/03.2016, 28 Maret 2016 1. Management letter 2. Tanggapan surat OJK perihal Pemberian Maksimum Suku Bunga Dana
13	30 Maret 2016	No.013/DIR/03.2016, 30 Maret 2016 1. Notulen Rapat 21 Maret 2016 2. CASA and Liquidity Update 3. Bali Marathon 2016 4. Lain-lain

Direksi
Board of Directors

Agenda BOD Meeting 2016

No	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Dewan Direksi Agenda of the Board of Directors Meetings
14	4-Apr-16	No.014/DIR/04.2016, 4 April 2016 1. Notulen Rapat 28 dan 30 Maret 2016 2. CASA and Liquidity Update 3. Update Capital Allocation 4. Rebranding Update 5. Lain-lain
15	11-Apr-16	No.015/DIR/04.2016, 11 April 2016 1. Notulen Rapat 4 April 2016 2. CASA and Liquidity Update 3. Rebranding Update 4. Recabling KC Diponegoro Medan 5. Lain-lain a. Transaksi benturan kepentingan b. Update Cileungsi c. Prudential (<i>Update</i> kerjasama) d. Bali Marathon
16	18-Apr-16	No.016/DIR/04.2016, 18 April 2016 1. Notulen Rapat 11 April 2016 2. CASA and Liquidity Update 3. RUPS Tahunan Maybank Indonesia Finance 4. Update Mumbai 5. Program OJK - BNN: Kampanye Anti Narkoba 6. Prepaid Card 7. mPOS 8. Prudential (<i>Update</i> kerjasama) 9. Risk Profile 10. Branch Scorecard 11. Update Cileungsi 12. Lain-lain - BPJS
17	26-Apr-16	No.017/DIR/04.2016, 26 April 2016 1. Notulen Rapat 18 April 2016 2. CASA and Liquidity Update 3. Project Network II (Subdebt and Sukuk Issuance) 4. SCMP Update Status for Q1 2016 5. KUR TKI 6. Penyelesaian Fungsi Operation, Service & Bisnis di Cabang 7. KCP Kali Besar 8. KCP Bendungan Hilir 9. Rolling Forecast 1 (RF1) 10. Lain-lain
18	2-May-16	No.018/DIR/05.2016, 2 Mei 2016 1. Notulen Rapat 18 April 2016 2. CASA and Liquidity Update 3. Open CoA untuk Beban Gaji 4. Credit Insurance Scheme 5. Bali Marathon 6. Lain-lain
19	9-May-16	No.019/DIR/05.2016, 9 Mei 2016 1. Notulen Rapat 2 Mei 2016 2. CASA and Liquidity Update 3. Integrated Capital Management Framework 4. Capital Monitoring Report 1Q16 5. Lain-lain

Direksi

Board of Directors

Agenda BOD Meeting 2016

No	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Dewan Direksi Agenda of the Board of Directors Meetings
20	16-May-16	No.020/DIR/05.2016, 16 Mei 2016 1. Notulen Rapat Direksi tanggal 9 Mei 2016 2. CASA and Liquidity Update 3. Update on Clearing Rejection Issue 4. Lain-lain
21	23-May-16	No.021/DIR/05.2016, 23 Mei 2016 1. Notulen Rapat Direksi Tanggal 16 Mei 2016 2. CASA and Liquidity Update 3. Prudential Case Update 4. Security Service: Business Strategy 5. Security Service: Penambahan Orang 6. Hasil Customer Survey on Rebranding 7. Ops. & CD Alignment Organization Structure 8. Cash Count Check 9. Lain-Lain
22	31-May-16	No.022/DIR/05.2016, 31 Mei 2016 1. Notulen Rapat Direksi Tanggal 23 Mei 2016 2. CASA and Liquidity Update 3. Self Funded Capital 4. Capital Position and Capital Allocation – RF1 5. Penjualan Idle Asset Bulusaraung Makassar 6. SCMP 7. Mekanisme validasi exchange rate di aplikasi Front End (DBDS) 8. Finger Print 9. BFX Transformation 10. RF1 dan Revisi RBB 11. Others
23	6-Jun-16	No.023/DIR/06.2016, 6 Juni 2016 1. Notulen Rapat Direksi Tanggal 31 Mei 2016 2. CASA and Liquidity Update 3. Action Plan for Mauritius 4. Mekanisme validasi exchange rate di aplikasi Front End (DBDS) 5. Finger Print 6. Hasil Customer Survey on Rebranding 7. Lain-lain
24	14-Jun-16	No.024/DIR/06.2016,14 Juni 2016 1. Notulen Rapat Direksi Tanggal 6 Juni 2016 2. CASA and Liquidity Update 3. Kick off Meeting with the BOD of MBI 4. Branch Rental Extension and Relocation 5. Lain-lain
25	20-Jun-16	No.025/DIR/06.2016, 20 Juni 2016 1. Notulen Rapat Direksi Tanggal 14 Juni 2016 2. Funding and Liquidity Update and Back Test Result: Increment in NII FY2016 Forecast vs Actual (Jan – May 2016) 3. Kredit Konsumsi Beragun Properti (KKBP) d/h Maxima 4. Laporan Perkembangan Perkara Hukum 5. Integration WOM Call Center to Maybank Customer Care 6. Blocking Debit GL Functions for Branch Users 7. RAC Adjustment: Distributor Financing (Cooperation with 3rd Party Bank) 8. Persetujuan Kredit Distributor Financing 9. Thematic Review - Insiden Kerugian Risiko Operasional

Direksi
Board of Directors

Agenda BOD Meeting 2016

No	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Dewan Direksi Agenda of the Board of Directors Meetings
26	27-Jun-16	No.026/DIR/06.2016, 27 Juni 2016 1. Notulen Rapat Direksi Tanggal 20 Juni 2016 2. CASA & Liquidity Update: - Maybank Gift 2016 Continuation Proposal - Framework for Liquidity Optimalization 3. Preliminary EY Findings and Adjustments, June 30, 2016 4. E-Wallet Business Case 5. Fraud Identification atas Transaksi Kartu Kredit dan Debit 6. Reksadana Harvestindo Istimewa
27	18-Jul-16	No.027/DIR/07.2016, 18 Juli 2016 1. Notulen Rapat Direksi Tanggal 27 Juni 2016 2. CASA & Liquidity Update: - FTP NCDs - FTP Liquidity Optimalization Program Utilization Update 3. Renovasi KCP Kali Besar, Jakarta 4. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah
28	26-Jul-16	No.028/DIR/07.2016, 26 Juli 2016 1. Notulen Rapat Direksi Tanggal 18 Juli 2016 2. Tax Amnesty 3. Micro Banking Plan 4. Penjualan Saham Visa yang Dimiliki oleh MBI
29	1-Aug-16	No.029/DIR/08.2016, 1 Agustus 2016 1. Notulen Rapat Direksi Tanggal 26 Juli 2016 2. CASA & Liquidity Update 3. SCMP Update Status for H1 2016 4. Operational Cars Usage 5. Bali Marathon Update 6. SIP
30	8-Aug-16	No.030/DIR/08.2016, 8 Agustus 2016 1. Notulen Rapat Direksi Tanggal 1 Agustus 2016 2. CASA & Liquidity Update 3. Capital Monitoring Report 2Q16 4. Fraud Cases in the Branches 5. Bali Marathon Update
31	15-Aug-16	No.031/DIR/08.2016, 15 Agustus 2016 1. Notulen Rapat Direksi Tanggal 8 Agustus 2016 2. CASA & Liquidity Update - FTP Strategy for Funding TD to drive further lower bankwide COF - Special FTP for KUR Retail 3. Unit Usaha Syariah: New Opening & Relocation KCS 2016 4. 2017 Calendar & Rebranding Update 5. BOD Reach-Out
32	22-Aug-16	No.032/DIR/08.2016, 22 Agustus 2016 1. Notulen Rapat Direksi Tanggal 15 Agustus 2016 2. CASA & Liquidity Update - FTP Strategy for Lending and Funding 3. Foreign Account Tax Compliance Act (FACTA) Reporting Update 4. Establishment of Maybank Mumbai Branch Transfer of Business/Assets from MBI Mumbai 5. Sales Incentives Program Review 6. Primary Dealership

Direksi

Board of Directors

Agenda BOD Meeting 2016

No	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Dewan Direksi Agenda of the Board of Directors Meetings
33	31 Agustus 2016	<p>No.033/DIR/08.2016, 31 Agustus 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen Rapat Direksi Tanggal 22 Agustus 2016 2. CASA & Liquidity Update <ul style="list-style-type: none"> - Marketable Securities Issued in the LFR computation - NII Simulation on Lower Loan Rates by 25 bps till year end 3. Millenial Mobile Application & Transaction Module 4. Penjualan Idle Asset Bulusaraung - Makassar (Lanjutan) 5. Renovasi KCP Kali Besar, Jakarta 6. Diskusi mengenai Tax Amnesty
34	5-Sep-16	<p>No.034/DIR/09.2016, 5 September 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen Rapat Direksi Tanggal 31 Agustus 2016 2. CASA & Liquidity Update <ul style="list-style-type: none"> - Marketable Securities Issued in the GWM computation 3. Maybank Finance Bonds Issuance (PUB/3rd Tranche) 4. Work From Home Assessment 5. MBI FY2016 Target Landing
35	13-Sep-16	<p>No.035/DIR/09.2016, 13 September 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen Rapat Direksi Tanggal 5 September 2016 2. CASA & Liquidity Update <ul style="list-style-type: none"> - Negotiable Certificate of Deposit (NCD) V Bank Maybank Indonesia Year 2016 3. Tax Audit Update 4. Tax Amnesty 5. SCMP – Outsourcing Cost Analysis 6. Sistim Layanan Informasi Keuangan (SLIK) 7. Regulation Update: PBI No.18/16/PBI/2016 8. Simplified Decision Making 9. Sales Incentives Program Review Update
36	19-Sep-16	<p>No.036/DIR/09.2016, 19 September 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen Rapat Direksi Tanggal 13 September 2016 2. CASA & Liquidity Update <ul style="list-style-type: none"> - Program PW: Aspire 3. Amendment of Previous BOD Decision from Purchase Second Hand to Purchase New Car 4. Fraud case update in branch 5. Group Inclusiveness & Diversity Agenda
37	26-Sep-16	<p>No.037/DIR/09.2016, 26 September 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen Rapat Direksi tanggal 19 September 2016 2. CASA and Liquidity Update <ul style="list-style-type: none"> - FTP Strategy post BI 7-day Reverse Repo Rate cut - Special FTP Program for CFS: Anti Attrition and Take Ove - Special FTP USD for BFI Finance 3. Kick Off Interim Audit 31 Dec 2016 4. Blanket Approval NPL AYDA Mortgage
38	3-Oct-16	<p>No.038/DIR/10.2016, 03 Oktober 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen Rapat Direksi tanggal 26 September 2016 2. CASA and Liquidity Update <ul style="list-style-type: none"> - FTP Framework for RPSIA (Restricted Profit Sharing Investment Account) 3. Maybank Bali Marathon 2016 Review for the Board of Directors 4. System Enhancement Proposal: RET-AD & DBDS 5. Tax Amnesty Progress Update

Direksi
Board of Directors

Agenda BOD Meeting 2016

No	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Dewan Direksi Agenda of the Board of Directors Meetings
39	10-Oct-16	<p>No.039/DIR/10.2016, 10 Oktober 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen Rapat Direksi tanggal 03 Oktober 2016 2. Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2017 3. CASA and Liquidity Update <ul style="list-style-type: none"> - CASA Base Rate Re-Pricing Proposal - AFS Strategic Investment 4. Persetujuan Penjualan Idle Asset di Makassar 5. Penutupan Cabang Mauritius
40	17-Oct-16	<p>No.040/DIR/10.2016, 17 Oktober 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen Rapat Direksi tanggal 10 Oktober 2016 2. CASA and Liquidity Update <ul style="list-style-type: none"> - FTP Framework for RPSIA - Review of Liquidity Premium for Term Loan & Mortgage Floating Rate 3. Risk Profile Bank Maybank Indonesia & Consolidation 4. Prudential Case 5. 2017 International Assignment Plan 6. 2016 Attrition 7. Isu Ketenagakerjaan 8. Update case in branch 9. Pekerjaan Jasa Konsultan & Perijinan KCP Darmo, Surabaya 2015 – 2016 10. Management Presentation to Bank Negara Malaysia (BNM)
41	24-Oct-16	<p>No.041/DIR/10.2016, 24 Oktober 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen Rapat Direksi tanggal 17 Oktober 2016 2. CASA and Liquidity update <ul style="list-style-type: none"> - Review Liquidity Premium for Term Loan & Mortgage Floating Rate 3. Updates on Project Network II: 2nd Tranche Issuance of Subordinated Debt (“Subdebt”) and Sukuk Mudharabah (“Sukuk”) 2016. 4. Mortgage Proposal: Special Program with Selected Developer 5. KCP Kalimalang & KCP Madiun Cases Update, and Sales Incentives Program Review Update 6. Holding Statement
42	1-Nov-16	<p>No.042/DIR/11.2016, 1 Nopember 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen Rapat Direksi tanggal 24 Oktober 2016 2. CASA and Liquidity update <ul style="list-style-type: none"> - Maybank Free Ride 2016 - Proposal Fixed Income Limit Increase: <ul style="list-style-type: none"> - IDR HTM Position Limit - IDR sub Limit Quasi Sovereign Bonds 3. IFRS9 Implementation Project
43	14-Nov-16	<p>No.043/DIR/11.2016, 14 Nopember 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen Rapat Direksi tanggal 24 Oktober 2016 2. Notulen Rapat Direksi tanggal 1 Nopember 2016 3. CASA and Liquidity <ul style="list-style-type: none"> - VR Investment - Maybank Free Ride 2016 4. Proyek SCMP: Relokasi Area Kerja Divisi CFS Risk Management 5. Capital Monitoring Report 3Q16 6. Capital Planning and Allocation 7. Insurance Renewal 2016–2017 (Money, PAR, Vehicle, Public Liability & Contractors All Risks) 8. Rencana Bisnis Bank (Bank Business Plan) 2017-2019

Direksi

Board of Directors

Agenda BOD Meeting 2016

No	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Dewan Direksi Agenda of the Board of Directors Meetings
44	21-Nov-16	No.044/DIR/11.2016, 21 Nopember 2016 <ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen Rapat Direksi tanggal 14 Nopember 2016 2. CASA and Liquidity update <ul style="list-style-type: none"> - FX Structural Position 3. AML/CFT Policy Revision 4. Tanggapan MBI atas Hasil Pemeriksaan BNM 5. Rencana Keamanan – Aksi Demo 25 Nopember 2016 6. 2016 Enterprise Crisis Simulation Exercise (2016 ECSE) 7. Investment Committee Charter 8. Severance Benefit Liabilities through DPLK 9. POJK Remunerasi
45	28-Nov-16	No.045/DIR/11.2016, 28 Nopember 2016 <ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen Rapat Direksi tanggal 21 Nopember 2016 2. CASA and Liquidity update <ul style="list-style-type: none"> - Liquidity Repricing Gap 3. Overstated of Revaluation Gain regarding with overseas ATM withdrawals 4. EDP Evaluation and TLC (transitioning leaders to CEO) & GILD (Global Institute for Leadership Development) Nomination for 2017 5. Rental Fee & Service Charges 2017 6. Sosialisasi Medical Insurance 7. Update on SCMP Result YTD Oct'16 & Outsourcing Other by Job Function 8. Amendment of Previous BOD Decision from Purchase Second Hand to Purchase New Car
46	5 Des 2016	No.046/DIR/12.2016, 5 Desember 2016 <ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen Rapat Direksi tanggal 28 Nopember 2016 2. CASA and Liquidity update <ul style="list-style-type: none"> - FTP Strategy Review 3. Sales Summit 2017 4. Penyelidikan dan Perencanaan Perbaikan Struktur Bangunan - KCI Batam 5. Q3 SIP 6. Mauritius Branch Closure 7. Laporan Tahunan

Kebijakan Suksesi Direksi

Melalui sebuah Komite Nominasi dan Remunerasi, komite ini mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap nominasi dan rencana suksesi Bank untuk memastikan pertumbuhan dan kesinambungan Bank. Komite akan mengkaji secara reguler Direksi dan eksekutif Bank dari berbagai segi seperti sumber daya, rencana nominasi suksesi, aktivitas pengembangan dan juga kinerja mereka. Komite bertanggung jawab untuk memonitor apakah Bank dapat memenuhi kinerjanya untuk mencapai tujuan dalam hal menjaga keberagaman karyawan.

Kebijakan suksesi Direksi juga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada Pedoman Komite dan Remunerasi Bank.

Policy on Succession of the Board of Directors

The Nomination and Remuneration Committee reviews and provides recommendations to the Board of Commissioners concerning the Bank's nomination and succession plan to ensure its growth and sustainability. The Committee will review regularly the Bank's Board of Directors and executives from various perspectives such as resources, planned nomination and succession, development activities as well as their performance. The Committee is responsible for monitoring whether or not the Bank is able to perform to achieve the goals in terms of maintaining the employee diversity.

The Policy on Succession of the Board of Directors is also implemented in accordance with the provisions stipulated in the Bank's Guidelines for Committees and Remuneration.

Direksi Board of Directors

Adapun, rencana suksesi dan pengelolaan *talent* tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Mengkaji proses pengelolaan *Talent*, diantaranya termasuk membangun rencana suksesi dan pengembangan bagi anggota Direksi dan juga proyek-proyek besar lainnya yang berkenaan dengan *Human Capital* dan/atau inisiatif untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
 - Memonitor dan memberikan masukan kepada Direksi sehubungan dengan Kerangka Pengembangan Kepemimpinan, rencana suksesi dan pengembangan bagi Direksi untuk memastikan kelanjutan dari rencana suksesi.
 - Memberikan rekomendasi dan memastikan anggota Dewan Komisaris, Direksi, anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah agar mendapatkan pengembangan yang sesuai dan berkelanjutan serta mengetahui perkembangan terbaru di industri.
 - Mengawasi kebijakan pengembangan perusahaan untuk memastikannya sejalan dengan sasaran dan strategi keseluruhan *Human Capital*.

Rangkap Jabatan Direksi

Per 31 Desember 2016, Direksi telah mengungkapkan rangkap jabatan yang dimiliki dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani dan tidak ada Direksi yang memiliki rangkap jabatan diluar dari yang diperbolehkan dalam POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Berdasarkan POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum:

- (1) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- (2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.

As for the succession plan and talent management, they include:

- Reviewing talent management process, including the planning for succession and development of the Board of Directors' members as well as other significant projects concerning Human Capital and/or initiatives to support the implementation of Good Corporate Governance principles.
 - Monitoring and providing input for the Board of Directors in terms of Leadership Development Framework, succession and development plan for the Board of Directors to ensure the continuation of the succession plan.
 - Providing recommendations and ensuring that members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, independent members, Committees of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Council obtain appropriate and sustainable development and are informed about the latest development in the industry.
 - Supervising the policy on company's development to ensure its consistency with Human Capital's overall objectives and strategies.

Concurrent positions of the Board of Directors

As of 31 December 2016, the Board of Directors has disclosed any concurrent position in a Statement Letter they signed and there was no Director with concurrent positions outside those allowed in the Regulation of the FSA concerning Implementation of Good Governance for Commercial Banks.

Pursuant to Regulation of the FSA Number 55/POJK.03/2016 concerning Implementation of Good Governance for Commercial Banks:

- (1) Members of the Board of Directors shall be prohibited from having concurrent positions as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners or Executive Official at other banks, companies and/or institutions.
- (2) Excluded from concurrent position as intended in paragraph (1) shall be in the event the Director responsible for supervising the Bank's participation in a subsidiary, performs functional duties as a member of the Board of Commissioners at another non-bank subsidiary controlled by the Bank, insofar as the same does not cause the Director concerned to neglect the performance of his/her duties and responsibilities as a member of the Bank's Board of Directors.

Direksi

Board of Directors

(3) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.

Pernyataan Independensi Direksi

Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Pernyataan Independensi Anggota Direksi merupakan wujud transparansi yang dinyatakan oleh Anggota Direksi dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Anggota Direksi serta diperbaharui setiap semester. Surat Pernyataan Anggota Direksi tersebut telah dikaji dan didokumentasikan dengan baik oleh Bank.

Transparansi Hubungan Keluarga Direksi

Seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi Lainnya dan/atau dengan Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen:

(3) Members of the Board of Directors shall be prohibited from jointly or severally holding more than 25% (twenty-five percent) of shares of paid-up capital at another company.

Statement of Independence of the Board of Directors

All members of the Board of Directors have no financial relationship, administrative relationship, share ownership relations, and/or familial relationship up to the second degree either vertical or horizontal, including parent-in-law, child-in-law and siblings-in-law, with any member of the Board of Commissioners, fellow member of the Board of Directors and/or the Controlling Shareholder or relationship with the Bank which might influence his/her ability to act independently.

Statement of Independence of the Board of Directors' Members constitutes a form of transparency that they declared in a Statement Letter signed by each of them and that is updated every semester. Said Statement Letter of the Board of Directors' Members have been reviewed and well-documented by the Bank.

Transparency of the Board of Directors' Familial Relationship

All members of the Board of Directors have no familial relationship up to the second degree either vertical or horizontal, including parent-in-law, child-in-law and siblings-in-law, with any member of the Board of Commissioners, fellow member of the Board of Directors and/or the Controlling Shareholder or relationship with the Bank which might influence his/her ability to act independently:

No	Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga Dengan Familial Relationship With					
			Dewan Komisaris The Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
			Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
1	Taswin Zakaria	Presiden Direktur President Director	-	✓	-	✓	-	✓
2	Thilagavathy Nadason	Direktur Director	-	✓	-	✓	-	✓
3	Ghazali Bin Mohd Rasad	Direktur Director	-	✓	-	✓	-	✓
4	Jenny Wiriyanto	Direktur Director	-	✓	-	✓	-	✓
5	Dhien Tjahajani	Direktur Director	-	✓	-	✓	-	✓
6	Henky Sulisty*)	Direktur Director	-	✓	-	✓	-	✓
7	Eri Budiono	Direktur Director	-	✓	-	✓	-	✓
8	Irvandi Ferizal	Direktur Director	-	✓	-	✓	-	✓

*) Pengunduran dirinya telah efektif per 31 Desember 2016 | His resignation is effective as of 31 December 2016

Direksi Board of Directors

Transparansi Hubungan Keuangan Direksi

Seluruh anggota Direksi Bank tidak saling memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi Lainnya dan/atau dengan Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Transparency of the Board of Directors' Financial Relationship

All members of the Board of Directors have no financial relationship with any member of the Board of Commissioners, fellow member of the Board of Directors and/or the Controlling Shareholder or relationship with the Bank which might influence his/her ability to act independently.

No	Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship With					
			Dewan Komisaris The Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
			Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
1	Taswin Zakaria	Presiden Direktur President Director	-	✓	-	✓	-	✓
2	Thilagavathy Nadason	Direktur Director	-	✓	-	✓	-	✓
3	Ghazali Bin Mohd Rasad	Direktur Director	-	✓	-	✓	-	✓
4	Jenny Wiriyanto	Direktur Director	-	✓	-	✓	-	✓
5	Dhien Tjahajani	Direktur Director	-	✓	-	✓	-	✓
6	Henky Sulisty*)	Direktur Director	-	✓	-	✓	-	✓
7	Eri Budiono	Direktur Director	-	✓	-	✓	-	✓
8	Irvandi Ferizal	Direktur Director	-	✓	-	✓	-	✓

*) Pengunduran dirinya telah efektif per 31 Desember 2016 | His resignation is effective as of 31 December 2016

Transparansi Kepemilikan Saham Direksi

- Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu Perusahaan Lain.

Transparency of the Board of Directors' Share Ownership

- Members of the Board of Directors either jointly or severally hold no more than 25% (twenty-five percent) of shares of paid-up capital at another Company.

No	Nama Name	Maybank Indonesia	Perusahaan Lainnya Other Companies	Bank Lain Other Banks	Pemegang Saham Lainnya Other Shareholders
1	Taswin Zakaria	Tidak ada Nil	Ada Yes	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil
2	Thilagavathy Nadason	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil
3	Ghazali Bin Mohd Rasad	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil
4	Jenny Wiriyanto	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil
5	Dhien Tjahajani	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil
6	Henky Sulisty*)	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil
7	Eri Budiono	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil
8	Irvandi Ferizal	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil

*) Pengunduran dirinya telah efektif per 31 Desember 2016 | His resignation is effective as of 31 December 2016

Adapun salah satu anggota Direksi, yaitu Thilagavathy Nadason memiliki saham dalam portofolio yang bersangkutan dengan kepemilikannya sangat kecil dan

One member of the Board of Directors, namely Thilagavathy Nadason, has shares in portfolio related to her insignificant ownership and it is less than 5% at another bank or another

Direksi

Board of Directors

kurang dari 5% pada bank lain atau perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Sementara, Taswin Zakaria memiliki kepemilikan saham sebesar 5% pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam negeri. Hal tersebut sudah diungkapkan di dalam tabel di atas yang mana telah sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 55/POJK.03/2016.

company domiciled at home country and overseas. While Taswin Zakaria has a 5% share ownership at another company domiciled overseas. This has been disclosed in the above table, which has been in accordance with the provision of Regulation of the FSA Number 55/POJK.03/2016.

Daftar Pelatihan BOD selama tahun 2016

List of BOD Trainig in 2016

Name	Directorate	Training Name	Start Date	End Date	Penyelenggara (MBI = Maybank Indonesia)
Taswin Zakaria	President Director	Teamwork And Team Building BOD	01-06-2016	03-06-2016	MBI
	President Director	Workshop Pelatihan BOD Culture Program	21-10-2016	21-10-2016	MBI
	President Director	Strategic Leadership Program	13-11-2016	18-11-2016	Oxford, London
Ghazali Bin Mohd Rasad	Operations & IT Directorate	Performance NBC & CSS Jakarta 1	23-02-2016	23-02-2016	MBI
	Operations & IT Directorate	Tiger's Camp Div It	08-04-2016	10-04-2016	MBI
	Operations & IT Directorate	Strategy Direktorat Operasional & IT 2016	08-05-2016	10-05-2016	MBI
	Operations & IT Directorate	Workshop Branch Procedures	09-06-2016	10-06-2016	MBI
	Operations & IT Directorate	Bank Tech Asia Conference	24-08-16	24-08-16	Bank Tech Asia, Sheraton Jakarta
	Operations & IT Directorate	Workshop Pelatihan BOD Culture Program	21-10-2016	21-10-2016	MBI
	Operations & IT Directorate	Workshop Pelatihan Culture Program BOD 1 Group 1	09-12-2016	10-12-2016	MBI
Thilagavathy Nadason	Finance Directorate	Performance Bonus & Salary Increase 2016	22-03-2016	22-03-2016	MBI
	Finance Directorate	Workshop Kebijakan Icap	21-05-2016	21-05-2016	BSMR, Hotel Atlet Century Park
	Finance Directorate	Teamwork And Team Building Bod	01-06-2016	03-06-2016	MBI
	Finance Directorate	Workshop Branch Procedures	09-06-2016	10-06-2016	MBI
	Finance Directorate	Training Psak	25-08-2016	25-08-2016	MBI
	Finance Directorate	Fitch Ratings Global Banking Conference	06-10-2016	06-10-2016	MBI
	Finance Directorate	Workshop Pelatihan Bod Culture Program	21-10-2016	21-10-2016	MBI
Jenny Wiryanto	Business Banking Directorate	Workshop Community Financial Service	12-04-2016	12-04-2016	MBI
	Business Banking Directorate	Tiger's Camp Dir Business Banking	22-04-2016	24-04-2016	MBI
	Business Banking Directorate	Asean Global Leadership Program	08-15-16	13-15-16	SRW, Berkeley USA
	Business Banking Directorate	Teamwork And Team Building Bod	01-06-2016	03-06-2016	MBI
	Business Banking Directorate	Workshop Community Financial Service	19-07-2016	19-07-2016	MBI
	Business Banking Directorate	Workshop Pelatihan Bod Culture Program	21-10-2016	21-10-2016	MBI

Direksi
Board of Directors

Name	Directorate	Training Name	Start Date	End Date	Penyelenggara (MBI = Maybank Indonesia)
Dhien Tjahajani	Legal, Compliance & Corp Secry Dir	Konglomerasi Jasa Keuangan Di Indonesia	13-01-2016	14-01-2016	MBI
	Legal, Compliance & Corp Secry Dir	One Day Coaching Asean Corp Governance	06-04-2016	06-04-2016	MBI
	Legal, Compliance & Corp Secry Dir	Keanggotaan Icca	13-04-2016	13-04-2016	MBI
	Legal, Compliance & Corp Secry Dir	Tiger Camp Dir Compliance	29-04-2016	01-05-2016	MBI
	Legal, Compliance & Corp Secry Dir	Teamwork And Team Building Bod	01-06-2016	03-06-2016	MBI
	Legal, Compliance & Corp Secry Dir	Seminar Sehari: Manajemen Anti Fraud Perusahaan 2016 Di Tengah Kelemahan Ekonomi	01-06-2016	01-06-2016	LPPI, Le Meridien Hotel Jakarta
	Legal, Compliance & Corp Secry Dir	Grc In Capital Market	20-07-2016	20-07-2016	MBI
	Legal, Compliance & Corp Secry Dir	Counter Terrorism Financing Summit	08-08-2016	11-08-2016	AUSTRAC, Nusa Dua Bali
	Legal, Compliance & Corp Secry Dir	Corporate Governance Leadership Program	24-08-2016	26-08-2016	IICD, Jogjakarta
	Legal, Compliance & Corp Secry Dir	Workshop Dan Uji Sertifikasi Kepatuhan	15-09-2016	17-09-2016	MBI
	Legal, Compliance & Corp Secry Dir	Workshop Pelatihan Bod Culture Program	21-10-2016	21-10-2016	MBI
Legal, Compliance & Corp Secry Dir	Regional Legal Competence Workshop	31-10-2016	01-11-2016	Maybank Group Legal Council, Menara Maybank Malaysia	
Eri Budiono	Global Banking Directorate	Gb Workshop 2016 Strategy	21-01-2016	21-01-2016	MBI
	Global Banking Directorate	Teamwork And Team Building Bod	01-06-2016	03-06-2016	MBI
	Global Banking Directorate	Workshop Pelatihan Bod Culture Program	21-10-2016	21-10-2016	MBI
Irvandi Ferizal	Human Capital Directorate	Performance Bonus & Salary Increase 2016	22-03-2016	22-03-2016	MBI
	Human Capital Directorate	Teamwork And Team Building Bod	01-06-2016	03-06-2016	MBI
	Human Capital Directorate	Indonesia Banking Hc Conference	13-10-2016	13-10-2016	MBI
	Human Capital Directorate	Workshop Pelatihan Bod Culture Program	21-10-2016	21-10-2016	MBI
	Human Capital Directorate	Implementing Strtgy Driving Performance	07-11-2016	11-11-2016	MBI
Henky Sulisty	Risk Management	Mentoring by Exco Member	2016	2016	Maybank Group
		Teamwork and team building BOD	01 - 06 - 2016	03 - 06 - 2016	MBI
		TIGER Camp Dir Risk Management	27 - 05 - 2016	30 - 05 - 2016	MBI
		Training PSAK	25 - 08 - 2016	25 - 08 - 2016	MBI
		Workshop Branch Procedures	09 - 06 - 2016	11 - 06 - 2016	MBI
		Performance Bonus & Salary Increase	22 - 03 - 2016	22 - 03 - 2016	MBI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan Organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.

RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan. Adapun, RUPS lainnya juga dikenal dengan nama RUPS Luar Biasa (RUPSLB).

Mengacu kepada POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, dalam pelaksanaan RUPS, terdapat beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Terbuka wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS tersebut, Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan perubahan mata acara yang dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
- b. Perusahaan Terbuka wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham kepada Direksi atau Dewan Komisaris, pengumuman RUPS selain harus memuat i) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; ii) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; iii) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan iv) tanggal pemanggilan RUPS, juga harus memuat informasi bahwa Perusahaan Terbuka menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham. Pengumuman RUPS bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek dilakukan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek; dan situs web Perusahaan Terbuka, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. Bukti pengumuman RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS, disertai salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is an organ of a Public Company with authorities that are not conferred to the Board of Commissioners/BOC and Board of Directors/BOD as stipulated by Limited Liability Law and/or Articles of Association of a Public Company.

GMS consists of an Annual GMS and other GMS. Annual GMS must be organized no later than 6 (six) months after the closing of a financial year while the other GMS, or the Extraordinary GMS (EGMS) can be convened at any time depending on the company's needs.

Pursuant to OJK Regulation Number 32/POJK.04/2014 on the Plan and Implementation of GMS in a Public Company, the GMS is organized following certain stages as follows:

- a. A public company must first inform OJK about the meeting's agenda no later than 5 (five) working days prior to announcing the GMS regardless of the date of the GMS Announcement. In the event that there are changes to the meeting agenda, the company must inform those changes to OJK at the latest at the notice of GMS.
- b. Regardless of the date of notice, a public company must announce the GMS to shareholders no later than 14 (fourteen) days prior to GMS notice.
- c. In the event that a GMS is held upon request of shareholders to the BOD or the BOC, GMS announcement must contain:
 - i) Terms of eligibility for shareholders to attend GMS;
 - ii) Terms of eligibility for shareholders to propose meeting agenda;
 - iii) Date of GMS; and
 - iv) Date of GMS Notice as well as
 - v) Statement that a public company is holding a GMS upon the request of the shareholders.

For a listed public company, GMS announcement must be made in at least 1(one) national daily newspaper published in Indonesian, IDX website, and the company's website in Indonesian and in other foreign language – at minimum in English. Proof of GMS announcement must be submitted to OJK no later than 2 (two) working days after the GMS announcement with the copy of GMS request attached.

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

- d. Perusahaan Terbuka wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat dalam Bursa Efek, pemanggilan kepada pemegang saham paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek; dan situs web Perusahaan Terbuka, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud di atas, wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.
- e. Bahan mata acara rapat bagi pemegang saham wajib disediakan oleh Perusahaan Terbuka sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara rapat tersebut dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka.
- f. Perusahaan Terbuka wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perusahaan Terbuka wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sesuai ketentuan yang mana telah dilakukan sebelumnya.
- g. Setelah pelaksanaan RUPS, Perusahaan Terbuka wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan sebagaimana dimaksud tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris. Adapun, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
- h. Ringkasan risalah RUPS bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional
 - b. Situs web Bursa Efek
 - c. Situs web Perusahaan Terbuka, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
 - d. Pengumuman ringkasan risalah RUPS tersebut wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
- d. Irrespective of the date of GMS notice and date, a public company must publish meeting notice to shareholders no later than 21 (twenty) one days prior to the date of GMS. For a listed public company, GMS announcement must be made in at least 1(one) national daily newspaper published in Indonesian, IDX website, and the company's website in Indonesian and in other foreign language – at minimum in English. Proof of GMS announcement must be submitted to OJK no later than 2 (two) working days after the GMS announcement.
- e. A public company must provide meeting agenda for the shareholders. Meeting agenda is to be made available since the date of GMS notice until the date of GMS. Meeting agenda can be provided in hard-copy form and/or electronic copy accessible or downloadable from the company's website.
- f. In the event that information in GMS notice is changed, a public company must revise its notice. Changes to the date and/or meeting agenda will require the company to re-announce the GMS following applicable procedures.
- g. After GMS is concluded a public company must prepare GMS minutes of meeting and its summary, signed by meeting chair and at least 1 (one) shareholder appointed from and by GMS participants. The signatures are not required should the minutes of meeting is prepared as a deed by a notary. The minutes must be submitted to OJK no later than 30 (thirty) days after the GMS.
- h. For a listed public company, GMS minutes must be announced to the public at least through:
 - a. 1 (one) national daily newspaper published in Indonesian
 - b. IDX website
 - c. The company's website website in Indonesian and in other foreign language – at minimum in English
 - d. Announcement of GMS minutes to the public must be carried out no later than 2 (two) days since the GMS.

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Wewenang RUPS

Berdasarkan UU PT No.40 tahun 2007, berikut adalah wewenang RUPS:

- a. Memutuskan penyetoran saham dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya, misalnya dalam bentuk benda tidak bergerak
- b. Menyetujui dapat tidaknya pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya.
- c. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan
- d. Menyetujui penambahan modal perseroan
- e. Memutuskan pengurangan modal perseroan
- f. Menyetujui rencana kerja yang diajukan oleh Direksi.
- g. Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan.
- h. Mengatur tata cara pengambilan deviden yang telah dimasukkan ke cadangan khusus.
- i. Memutuskan tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan waktu berdirinya, dan pembubaran perseroan.
- j. Memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direksi dalam hal Direksi terdiri atas 2 anggota Direksi atau lebih.
- k. Mengangkat anggota Direksi
- l. Memutuskan ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.
- m. Memutuskan tentang kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan dalam hal Direksi lebih dari 1 orang
- n. Menyetujui untuk mengalihkan kekayaan Perseroan, atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak
- o. Menyetujui dapat atau tidaknya Direksi mengajukan permohonan pailit atas Perseroan kepada Pengadilan Niaga.
- p. Memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
- q. Mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- r. Mengangkat anggota Dewan Komisaris.
- s. Menetapkan ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan komisaris.

Authority of the GMS

Pursuant to Limited Liability Law No. 40 of 2007, the GMS has the following powers:

- a. Decide stock issuance in monetary and/or other forms, e.g. fixed assets.
- b. Decide whether shareholders and other creditors that have outstanding receivables may use their right to bill to compensate their obligation of paying the price of stocks they have acquired.
- c. Approve stock buyback
- d. Approve increase of capital
- e. Decide on reducing capital
- f. Approve work plan proposed by the company's board of directors
- g. Decide on the use of earnings including the amount of provisioning
- h. Stipulate procedures to withdraw dividend allocated into special reserves
- i. Decide on consolidation, merger, acquisition, or divestment; request for bankruptcy; extension of company, and disbandment of the company
- j. Decide the distribution of management roles and authorities of the board of directors in the event that the BOD consists of 2 or more directors
- k. Appoint members of the BOD
- l. Stipulate the amount of salaries and benefits of the BOD
- m. Decide on the BOD's authority to represent the company in the event that the BOD consists of more than 1 director
- n. Approve the transfer of or the pledging of company's assets as collateral that constitute more than 50% of the company's net assets in a single or more transactions that are and are not related
- o. Decide on whether BOD may request for bankruptcy to the Commercial Court
- p. Discharge any member of the BOD at any time and to state the reasons of dismissal
- q. Revoke or confirm the decision of temporary dismissal of a member of the BOD decided by the BOC
- r. Appoint members of the BOC
- s. Stipulate the amount of salaries and honorarium and benefits for members of the BOC

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

- t. Memutuskan dapat atau tidaknya Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- u. Mengangkat komisaris independen
- v. Memutuskan tentang pengambilalihan saham oleh badan hukum berbentuk Perseroan.
- w. Memutuskan tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan Perseroan.
- x. Memutuskan tentang pembubaran Perseroan.

Hak dan Wewenang Pemegang Saham Dalam RUPS

Pemegang saham memiliki hak atas saham yang dimilikinya sehingga hak pemegang saham terlindungi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.

Dalam RUPS, pemegang saham berhak menghadiri, mengemukakan pendapat dan mengeluarkan hak suara dalam proses pengambilan keputusan serta memperoleh keterangan yang berkaitan dengan mata acara Rapat.

Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Adapun, keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Penyelenggaraan RUPS Selama Tahun 2016

RUPS Tahunan (RUPST) tanggal 22 April 2016

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya RUPST PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Perseroan") pada Hari Jumat tanggal 22 April 2016, berikut adalah tahapan RUPST tersebut:

Penyampaian Bukti Iklan

Pemberitahuan rencana RUPS

7 Maret 2016

Pemberitahuan rencana RUPS telah disampaikan kepada:

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Bank
- OJK Pasar Modal
- Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui Surat Nomor S.2016.077 / DIR COMPLIANCE

- t. Decide on whether the BOC may perform the company's management in certain situation and for a certain period
- u. Appoint Independent Commissioner
- v. Stipulate the takeover of stocks by a juristic person incorporated as Limited Liability Company
- w. Decide on the consolidation, merger, acquisition, or divestment of the company
- x. Decide on the disbandment of the company

Rights and Authorities of Shareholders in GMS

The shareholders reserve the rights over the shares they own, ensuring that the rights of shareholders are protected and can be exercised according to laws and regulations and the Bank's Articles of Association.

Shareholders have the right to attend a GMS, express opinion, and to cast vote in decision-making process and to obtain information relating to meeting agenda.

In GMS, shareholders may request for information about the company from the BOD and/or BOC as long as the information are relevant to the meeting agenda and are not contradictory to the company's interests.

GMS may not take any decisions over other agenda items, unless all shareholders are present and/or present by proxies in the GMS and approve the addition to meeting agenda. Decisions on additional meeting agenda must be unanimous.

RUPS Execution in 2016

Annual GMS (GMST) on 22 April 2016

With regards to PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("the Bank") AGMS on Friday, 22 April 2016, the Bank has completed the following activities and stages:

Proof of Publication

GMS Notification

On 7 March 2016, the GMS notification was submitted to

- Financial Services Authority (OJK) for Banking Supervision
- OJK for the Capital Market
- Indonesia Stock Exchange by virtue of letter Number S.2016.077 /DIR COMPLIANCE

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Pemberitahuan

16 Maret 2016

Pemberitahuan RUPS kepada para pemegang saham dilakukan melalui iklan pada surat kabar harian Investor Daily, juga pada laman (website) Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta laman (website) BEI.

Bukti pemasangan iklan Pemberitahuan RUPS Tahunan telah disampaikan pada tanggal 16 Maret 2016 kepada:

- OJK Pengawas Bank
- OJK Pasar Modal
- BEI melalui Surat Nomor S.2016.077 /DIR COMPLIANCE

Pemanggilan

31 Maret 2016

Pemanggilan Rapat RUPS telah dilakukan melalui iklan pada surat kabar harian Investor Daily, serta pada website Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta website BEI. Penjelasan atas mata acara Rapat, daftar riwayat hidup dari calon Direktur dan Komisaris yang akan diangkat kembali, serta profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik juga telah ditayangkan pada website Perseroan tersebut

Bukti Pemasangan iklan panggilan RUPS telah disampaikan pada tanggal 1 April 2016 kepada:

- OJK Pengawas Bank
- OJK Pasar Modal
- BEI melalui Surat Nomor S.2016. 112 /DIR COMPLIANCE tanggal 1 April 2016

Pelaksanaan RUPS

Pelaksanaan RUPS pada:
Hari/Tanggal: Jumat tanggal 22 April 2016.

Waktu: Pukul 14.10 - 15.30 WIB.

Tempat: Function Hall, Sentral Senayan III lantai 28. Jl. Asia Afrika No.8, Jakarta 10270.

Penyampaian Hasil

Hasil Keputusan (berupa cover note)

Ringkasan Risalah RUPS dilaporkan kepada:

- OJK Pengawas Bank
- OJK Pasar Modal
- BEI

melalui Surat Nomor S.2016.084/DIR FIN tanggal 26 April 2016 dan S.2016.079/DIR FIN tanggal 26 April 2016.

Ringkasan tersebut juga ditayangkan pada website Perseroan dan website BEI.

Risalah Rapat

Risalah Rapat telah disampaikan kepada OJK Pasar Modal pada tanggal 19 Mei 2016 melalui Surat Nomor S.2016.197/ DIR COMPLIANCE.

Announcement

16 March 2016

GMS announcement to shareholders was published in the advertisement section of Investor Daily newspaper as well as the Bank's website in Indonesian and in English, and IDX website.

Proof of announcement publication of the AGMS was submitted on 16 March 2016 to:

- OJK) for Banking Supervision
- OJK for the Capital Market
- Indonesia Stock Exchange by virtue of Letter S.2016.077 / DIR COMPLIANCE

Notice

31 March 2016

GMS notice was published in the advertisement section of Investor Daily newspaper as well as the Bank's website in Indonesian and in English, and IDX website. The Bank's website included information on meeting agenda, brief curriculum vitae of the candidates for BOD and BOC re-appointment, profile of Public Accountant and Public Accountant Firm.

Proof of announcement publication of the AGMS was submitted on 1 April 2016 to:

- OJK for Banking Supervision
- OJK for the Capital Market
- Indonesia Stock Exchange by virtue of Letter S.2016. 112 / DIR COMPLIANCE dated 1 April 2016

GMS

GMS was held on: Day/Date: Friday, 22 April 2016

Time: 14.10 - 15.30 WIB.

Venue: Function Hall, Sentral Senayan III, 28th fl. Jl. Asia Afrika No.8, Jakarta 10270.

Outcome Report

Resolutions (cover note)

GMS Meeting Minutes Summary was submitted to:

- OJK for Banking Supervision
 - OJK for the Capital Market
 - Indonesia Stock Exchange
- by virtue of letter Number S.2016.084/DIR FIN dated 26 April 2016 and S.2016.079/DIR FIN dated 26 April 2016.

GMS Meeting Minutes Summary was also uploaded to the Bank's and IDX's websites.

Meeting Minutes

GMS Meeting Minutes was submitted to OJK for the Capital Market on 19 May 2016 by virtue of letter Number S.2016.197/ DIR COMPLIANCE.

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

Kehadiran Rapat

RUPST tanggal 22 April 2016 dihadiri oleh :

Direksi

1. Taswin Zakaria, Presiden Direktur
2. Thilagavathy Nadason, Direktur
3. Ghazali Mohd Rasad, Direktur
4. Jenny Wiriyanto, Direktur
5. Dhien Tjahajani, Direktur Independen /Corp. Secretary
6. Henky Sulisty, Direktur
7. Eri Budiono, Direktur
8. Irvandi Ferizal, Direktur

Dewan Komisaris

1. Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor, Presiden Komisaris
2. Datuk Abdul Farid bin Alias, Komisaris
3. Spencer Lee Tien Chye, Komisaris
4. Umar Juoro, Komisaris Independen
5. Budhi Dyah Sitawati, Komisaris Independen
6. Achjar Iljas, Komisaris Independen

Pemegang Saham (30-03-2016)

1. 53.507.142.247 saham (78,98%) dari total 67.746.840.730 saham

Dewan Pengawas Syariah

1. Dr. M. Anwar Ibrahim MA, Ketua
2. Prof.Drs.H. Muh. Nahar Nahrawi SH MM sebagai Anggota
3. 3. Dr. Abdul Jabar Majid MA sebagai Anggota

Anggota Komite

1. Agus Kretarto – Sekretaris Eksekutif Komite Pemantau Risiko (RoC)
2. Nina Diyanti Anwar – Sekretaris Eksekutif Komite Audit

Rapat dipimpin oleh Tan Sri Dato Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor, Presiden Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 28 Maret 2016.

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015;

Meeting Attendance

The AGMS on April 22, 2016 was attended by:

Board of Directors

1. Taswin Zakaria, President Director
2. Thilagavathy Nadason, Director
3. Ghazali Mohd Rasad, Director
4. Jenny Wiriyanto, Director
5. Dhien Tjahajani, Independent Director /Corp. Secretary
6. Henky Sulisty, Director
7. Eri Budiono, Director
8. Irvandi Ferizal, Director

Board of Commissioner

1. Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor, President Commissioner
2. Datuk Abdul Farid bin Alias, Commissioner
3. Spencer Lee Tien Chye, Commissioner
4. Umar Juoro, Independent Commissioner
5. Budhi Dyah Sitawati, Independent Commissioner
6. Achjar Iljas, Independent Commissioner

Shareholdes (30-03-2016)

53,507,142,247 shares (78.98%) of the total 67,746,840,730 shares

Shariah Supervisory Board

1. Dr. M. Anwar Ibrahim MA, Chairperson
2. Prof.Drs.H. Muh. Nahar Nahrawi SH MM, Member
3. Dr. Abdul Jabar Majid MA, Member

Committee Members

1. Agus Kretarto – Executive Secretary of the Risk Oversight Committee (RoC)
2. Nina Diyanti Anwar – Executive Secretary of the Audit Committee

The Meeting was chaired by Tan Sri Dato Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor, President Commissioner, appointed by virtue of Board of Commissioners' Meeting Resolution on 28 March 2016.

Meeting Agenda:

1. Approval for Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2015 and ratification of the Balance Sheet and Profit & Loss Statement for the financial year ended December 31, 2015;
2. Determination of utilization of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2015;

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2016 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan publik serta persyaratan lainnya;
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan;
5. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan :
 - a. Gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan;
 - b. Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Pengawas Syariah;
6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan;
7. Pembagian tugas dan wewenang diantara Anggota Direksi Perseroan

Jalannya Rapat :

- Dalam Rapat disampaikan tentang pokok-pokok tata tertib rapat, cara mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat serta mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat. Tata Tertib Rapat selengkapnya (sebagaimana juga telah ditayangkan pada website Perseroan www.maybank.co.id sejak 31 Maret 2016) juga telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat.
- Setiap selesai menyampaikan pembahasan pada setiap mata acara Rapat, maka Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham/kuasanya untuk mengajukan pertanyaan/menyatakan pendapat.
- Terdapat 1 (satu) orang Pemegang Saham dengan kepemilikan 565.883 saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat yaitu pada Mata Acara Kedua, dan pada Mata Acara Keempat.

The Meeting Procedures:

- The Meeting procedures (“Procedures”), including procedure to ask questions or to express opinion and decision-making mechanism in the Meeting have been conveyed in the Meeting. Details of the Procedures have been distributed to the shareholders before entering the Meeting room.
- After discussion on the each of the agenda Meeting, the Chairman gave opportunity to the shareholders/proxies to ask question or express their opinion.
- In this session, there is one shareholder with ownership of 565,883 shares asked question and/or express his opinion in the Second and Fourth Agenda

Hasil Keputusan RUPS Tahun 2016

Keputusan Rapat Mata Acara Pertama:

Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan :

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Hasil Keputusan RUPS Tahun 2016

Resolution of the First Agenda:

The resolution is made based on deliberation to reach consensus, and no shareholder gave non-affirmative or abstain/blank votes. Thus 100 % of the shares attending/represented in the Meeting have decided:

1. To accept and approve Report on the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2015.

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

Hasil Keputusan RUPS Tahun 2016

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba/Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) **sesuai dengan laporan No.RPC294/PSS/2016 tanggal 23 Februari 2016** dengan opini audit, laporan keuangan konsolidasian disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hasil Keputusan RUPS Tahun 2016

2. To approve and endorse the Consolidated Balance Sheet and Income Statements for the year ended December 31, 2015 which has been audited by Public Accountant Firm "Purwantono, Sungkoro & Surja" (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) according to the report No.RPC294/PSS/2016 dated February 23, 2016 with audit opinion that the consolidated financial statements are presented fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Bank Maybank Indonesia Tbk and its subsidiaries as of December 31 2015, and financial performance and its consolidated cash flows for the years then ended, in accordance with financial Accounting Standards in Indonesia.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada tahun buku 2015 atas tindakan pengawasan dan kepengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku 2015 tersebut; sepanjang tindakan pengawasan dan pengurusannya dimaksud tercermin dalam buku dan catatan Perseroan sepanjang tahun buku 2015, serta tidak melanggar praktek perbankan yang sehat (*prudent banking*) dan tidak pula termasuk dalam kategori tindak pidana.

3. To grant *acquit et de charge* to the Board of Commissioners and the Board of Directors who are on board during financial year 2015 concerning their acts of supervision and management which were conducted during the fiscal year 2015; as long as such acts are reflected in the books and records of the Company for the year 2015, and do not violate prudential banking practice and are not included in criminal acts category.

Keputusan Rapat Mata Acara Kedua:

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada 1 (satu) orang pemegang saham sebesar 565.883 saham yang menyatakan tidak setuju, tidak ada yang abstain dan sisanya menyatakan setuju. Dengan demikian sebanyak 53.506.576.364 saham atau 99,99% saham memutuskan untuk:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2015 sebesar Rp1.139.070.235.158,- untuk digunakan dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Sebesar 5% atau Rp56.953.511.758,- (lima puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) diusulkan untuk digunakan sebagai "Dana Cadangan Umum", guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas dan pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. Sisanya sebesar 95% atau Rp1.082.116.723.400,- (satu trilyun delapan puluh dua milyar seratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dimasukkan sebagai "Laba Ditahan" Perseroan.

Resolution of the Second Agenda:

The resolution is made based on verbal voting, and there was 1 (one) shareholder who owns 565,883 shares gave non-affirmative votes, there was no blank or abstain votes while the remaining approved the proposal. Thus there are 53,506,576,364 share or 99.99 % of the shares attending/ represented in the Meeting have approved:

1. The utilization of the Company's Net Profit in the amount of Rp1,139,070,235,158 (one trillion one hundred thirty nine billion seventy million two hundred thirty five thousand and one hundred fifty eight rupiah), with details as follows:
 - a) 5% or in the amount of Rp56,953,511,758 (fifty six billion nine hundred fifty three million five hundred eleven thousand and seven hundred fifty eight rupiah) proposes to be used as "General Reserve Fund" to comply with the requirement as stated in the Article 70 paragraph 1 of the Company Law and Article 25 of the Company's Articles of Association;
 - b) The remaining 95% or in the amount of Rp1.082.116.723.400 (One trillion eighty two billion one hundred sixteen million seven hundred twenty three and four hundred rupiah) will be booked as the Company's "Retained Earnings".

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Hasil Keputusan RUPS Tahun 2016	Hasil Keputusan RUPS Tahun 2016
<p>2. Guna mendukung perkembangan usaha, Perseroan tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham dari laba bersih tahun buku 2015 ini.</p> <p>Keputusan Rapat Mata Acara Ketiga: Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir menyetujui untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menunjuk Kantor Akuntan Publik " Purwanto, Sungkoro & Surja" (<i>a member firm of Ernst & Young Global Limited</i>) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2016; Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud; Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 	<p>2. In order to support future business growth, the Company does not distribute dividend to the shareholders from the said Net Profit.</p> <p>Resolution of the Third Agenda: The resolution is made based on deliberation to reach consensus, and no shareholder gave non-affirmative or abstain/blank votes. Thus 100% of the shares attending/represented in the Meeting have approved:</p> <ol style="list-style-type: none"> the appointment of Public Accounting Firms "Purwanto, Sungkoro & Surja" (<i>a member firm of Ernst & Young Global Limited</i>) to audit the Company's Financial Report for the year 2016; the granting of authority to Board of Commissioners to determine the honorarium for the Public Accounting Firm as well as other requirements in connection the intended appointment of Public Accounting Firm; the granting of power and to authorize the Board of Commissioners and Board of Directors to conduct any necessary action related to the appointment of the Public Accountant Firm in accordance to prevailing regulations.
<p>Keputusan Rapat Mata Acara Keempat: Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada 1 (satu) orang pemegang saham sebesar 565.883 saham yang menyatakan tidak setuju, tidak ada pemegang saham yang abstain dan sisanya menyatakan setuju. Dengan demikian sebanyak 53.506.576.364 saham atau 99,99% saham menyatakan setuju untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melimpahkan wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Besarnya honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2016. 	<p>Resolution of the Fourth Agenda: The resolution is made based on verbal voting, and there was 1 (one) shareholder who own 565,883 shares gave the non-affirmative votes, there was no blank or abstain votes while the remaining approved the proposal. Thus there are 53,506,576,364 shares or 99.99 % of the shares attending/represented in the Meeting have approved:</p> <ul style="list-style-type: none"> The granting of power and authority to the Board of Commissioners with prior approval from the Controlling Shareholders of the Company to determine the honorarium and/or other allowances for the Board of Commissioners for the year 2016, with due observance to the proposal and recommendation of the Remuneration and Nomination Committee of the Company. The amount of such honorarium and/or allowances shall be disclosed in the Annual Report year 2016.
<p>Keputusan Rapat Mata Acara Kelima: Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir menyetujui untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan besarnya bonus/tantiem Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015 sebesar Rp.22.587.685.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dimana pelaksanaan pembagian termasuk penetapan besarnya tantiem masing-masing anggota Direksi, dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. 	<p>Resolution of the Fifth Agenda: The resolution is made based on deliberation to reach consensus, and no shareholder gave non-affirmative or abstain/blank votes. Thus 100% of the shares attending/represented in the Meeting has approved:</p> <ol style="list-style-type: none"> An amount of tantieme for financial year 2015 for the Board of Directors in the amount of Rp.22,587,685,000 (twenty two billion five hundred eighty seven million six hundred eighty five thousand rupiah), where the distribution and the determination of the amount of tantieme for each member of the Board of Directors, shall be conducted by taking into account the recommendations of the Company's Remuneration and Nomination Committee;

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

Hasil Keputusan RUPS Tahun 2016

- Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota **Direksi** untuk tahun buku 2016, dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2016.
- Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota **Dewan Pengawas Syariah** untuk tahun buku 2016, dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Besarnya honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2016.

Keputusan Rapat Mata Acara Keenam:

Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir menyetujui untuk :

- Memberhentikan dengan hormat anggota **Direksi** yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu **Saudara Ghazali bin Mohd Rasad**;
- Memberhentikan dengan hormat **anggota Dewan Komisaris** Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu **Datuk Abdul Farid Bin Alias** selaku Komisaris dan **Saudara Achjar Iljas** selaku Komisaris Independen,
- Mengangkat kembali **Datuk Abdul Farid bin Alias** sebagai Komisaris untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019**;
- Mengangkat kembali **Saudara Achjar Iljas** sebagai Komisaris Independen, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019**. Saudara **Achjar Iljas** telah memberikan pernyataan bahwa dirinya tetap independen sebagaimana dimaksud dalam persyaratan menjadi Komisaris Independen pada Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014;
- Mengangkat kembali **Saudara Ghazali bin Mohd Rasad** sebagai Direktur, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2017**;

Hasil Keputusan RUPS Tahun 2016

- the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salaries and/or other allowances for the members of the Board of Directors for the year 2016, with due observance to the proposals and recommendations of Remuneration and Nomination Committee of the Company. The amount of such honorarium and/or allowances shall be disclosed in the Annual Report year 2016;
- the granting authority to the Board of Commissioners to determine the amount of honorarium and/or allowances for the members of the Syariah Supervisory Board for the year 2016, with due observance to the proposals and recommendations of the Company's Remuneration and Nomination Committee. The amount of such honorarium and/or allowances shall be disclosed in the Annual Report year 2016.

Resolution of the Sixth Agenda:

The resolution is made based on deliberation to reach consensus, and no shareholder gave non-affirmative or abstain/blank votes. Thus 100 % of the shares attending/represented in the Meeting have approved:

- the dismissal with honor the members of the Board of Directors due to the ending of his term of office as of the closing of this Meeting, namely Mr. Ghazali bi Mohd. Rasad;
- the dismissal with honor the members of the Board of Commissioners due to the ending of their term of office, as of the closing of this Meeting, namely Datuk Abdul Farid Bin Alias as Commissioners and Mr. Achjar Iljas as Independent Commissioner;
- the re-appointment of Datuk Abdul Farid bin Alias as Commissioner; for the term of office commencing as from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2019;
- the re-appointment of Mr. Achjar Iljas as Independent Commissioner for the term of office commencing as from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2019. Mr. Achjar Iljas has given a statement that he will be independent as defined in the requirements to become an Independent Commissioner on Article 25 of the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014;
- the re-appointment of Mr. Ghazali bin Mohd Rasad as Director; for the term of office commencing as from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2017;

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

Hasil Keputusan RUPS Tahun 2016

6. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

1. Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor sebagai Presiden Komisaris
2. Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai Komisaris
3. Spencer Lee Tien Chye sebagai Komisaris
4. Umar Juoro sebagai Komisaris Independen
5. Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen
6. Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen

Direksi:

1. Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur
2. Thilagavathy Nadason sebagai Direktur
3. Ghazali bin Mohd Rasad sebagai Direktur
4. Jenny Wiriyanto sebagai Direktur
5. Dhien Tjahajani sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Corporate Secretary dan Direktur Independen
6. Henky Sulistyو sebagai Direktur
7. Eri Budiono sebagai Direktur
8. Irvandi Ferizal sebagai Direktur

7. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan /atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan/mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang, dan karenanya berhak pula untuk mengajukan permohonan surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya; singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Rapat Mata Acara Ketujuh:

Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan bahwa :

"Pembagian tugas dan wewenang diantara Direksi untuk tahun buku 2016 ditetapkan oleh Direksi sendiri melalui Keputusan Direksi".

Hasil Keputusan RUPS Tahun 2016

6. the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as of the closing of this Meeting shall be as follows:

Board of Commissioners:

1. Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor as President Commissioner
2. Datuk Abdul Farid Bin Alias as Commissioner
3. Spencer Lee Tien Chye as Commissioner
4. Umar Juoro as Independent Commissioner
5. Budhi Dyah Sitawati as Independent Commissioner
6. Achjar Iljas as Independent Commissioner

Board of Directors

1. Taswin Zakaria as President Director
2. Thilagavathy Nadason as Director
3. Ghazali bin Mohd Rasad as Director
4. Jenny Wiriyanto as Director
5. Dhien Tjahajani as Director in Charge of Compliance Function, Corporate Secretary and Independent Director
6. Henky Sulistyو as Director
7. Eri Budiono as Director
8. Irvandi Ferizal as Director

7. The delegation of the authority and power to the Board of Directors to restate and/or to reemphasize in a Notary deed (including to revise and/or to add) the said change of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, and to delegate the authority and power to the Board of Directors with a substitution right to the Notary to submit the registration to obtain notification receipt/to request approval from the authorized institutions, and therefore also have a right to submit request for letters and other documents; in short, to take every necessary actions as stipulated in the Articles of Association and the prevailing regulations

Resolution of the Seventh Agenda:

The resolution is made based on deliberation to reach consensus, and no shareholder gave non-affirmative or abstain/blank votes. Thus 100 % of the shares attending/represented in the Meeting has approved:

"That the distribution of duties and authorities among the members of the Board of Directors for the financial year 2016 will be determined by the Board of Directors themselves through Board of Director's Resolution".

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

RUPS Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 23 Desember 2016

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya RUPSLB PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Perseroan") pada Hari Jumat tanggal 23 Desember 2016, berikut adalah tahapan RUPSLB tersebut:

Extraordinary GMS (EGMS) on 23 December 2016

With regards to PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("the Bank") EGMS on Friday, 23 December 2016, the Bank has completed the following activities and stages:

<p>Pemberitahuan rencana RUPS</p> <p>9 November 2016</p> <p>Pemberitahuan rencana RUPS telah disampaikan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Bank - OJK Pasar Modal - Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui Surat Nomor S.2016.448/DIR COMPLIANCE 	<p>GMS Notification</p> <p>On 9 November 2016, the GMS notification was submitted to</p> <ul style="list-style-type: none"> - Financial Services Authority (OJK) for Banking Supervision - OJK for the Capital Market - Indonesia Stock Exchange <p>by virtue of Letter Number S.2016.448/DIR COMPLIANCE</p>
<p>Penyampaian Bukti Iklan</p> <p>Pemberitahuan rencana RUPS</p> <p>Pemberitahuan RUPS kepada para pemegang saham dilakukan melalui iklan pada surat kabar harian Investor Daily, juga pada laman (website) Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta laman (website) BEI.</p> <p>Bukti pemasangan iklan Pemberitahuan RUPS Tahunan telah disampaikan pada tanggal 16 November 2016 kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OJK Pengawas Bank - OJK Pasar Modal - BEI melalui Surat Nomor. S.2016.61 / DIR OPS & IT 	<p>Proof of Publication</p> <p>GMS Notification</p> <p>GMS announcement to shareholders was published in the advertisement section of Investor Daily newspaper as well as the Bank's website in Indonesian and in English, and IDX website.</p> <p>Proof of announcement publication of the AGMS was submitted on 16 November 2016 to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OJK for Banking Supervision - OJK for the Capital Market - Indonesia Stock Exchange by virtue of Letter Number S.2016.61 / DIR OPS & IT
<p>Pemanggilan</p> <p>Pemanggilan Rapat RUPS telah dilakukan melalui iklan pada surat kabar harian Investor Daily, serta pada website Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta website BEI.</p> <p>Bukti Pemasangan iklan panggilan RUPS telah disampaikan pada tanggal 2 Desember 2016 kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OJK Pengawas Bank - OJK Pasar Modal - BEI melalui Surat Nomor. S.2016.494/DIR COMPLIANCE 	<p>Notice</p> <p>GMS notice was published in the advertisement section of Investor Daily newspaper as well as the Bank's website in Indonesian and in English, and IDX website.</p> <p>Proof of announcement publication of the AGMS was submitted on 2 December 2016 kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OJK for Banking Supervision - OJK for the Capital Market - Indonesia Stock Exchange <p>by virtue of Letter Number S.2016.494/DIR COMPLIANCE</p>
<p>Pelaksanaan RUPS</p> <p>Pelaksanaan RUPS pada: Hari/Tanggal: Jumat tanggal 23 Desember 2016.</p> <p>Waktu: Pukul 10.05 - 10.19 WIB.</p> <p>Tempat: Function Hall, Sentral Senayan III lantai 28. Jl. Asia Afrika No.8, Jakarta 10270.</p>	<p>GMS</p> <p>GMS was held on: Day/Date: Friday, 23 December 2016.</p> <p>Time: Pukul 10.05 - 10.19 WIB.</p> <p>Venue: Function Hall, Sentral Senayan III lantai 28. Jl. Asia Afrika No.8, Jakarta 10270.</p>

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Penyampaian Hasil	Outcome Report
Hasil Keputusan (berupa cover note)	Announcement
<p>Ringkasan Risalah RUPS dilaporkan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OJK Pengawas Bank - OJK Pasar Modal - BEI <p>melalui Surat Nomor S.2016.076/DIR OPS & IT tanggal 28 Desember 2016 dan Nomor S.2016.081 /DIR OPS & IT tanggal 28 Desember 2016</p> <p>Ringkasan tersebut juga ditayangkan pada website Perseroan dan website BEI.</p>	<p>GMS Meeting Minutes Summary was submitted to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OJK for Banking Supervision - OJK for the Capital Market - Indonesia Stock Exchange <p>by virtue of letter Number S.2016.076/DIR OPS & IT dated 28 December 2016 and Number S.2016.081 /DIR OPS & IT dated 28 December 2016</p> <p>GMS Meeting Minutes Summary was also uploaded to the Bank's and IDX's websites</p>
Risalah Rapat	Notice
<p>Risalah Rapat telah disampaikan kepada OJK Pasar Modal pada tanggal 19 Mei 2016 melalui Surat Nomor S.2017.020/DIR COMPLIANCE tanggal 19 Januari 2017</p>	<p>GMS Meeting Minutes was submitted to OJK for the Capital Market on 19 January 2016 by virtue of letter Number S.2017.020/DIR COMPLIANCE dated 19 January 2017</p>
Kehadiran Rapat	Meeting Attendance
<p>Rapat dihadiri oleh:</p> <p>Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Taswin Zakaria, Presiden Direktur 2. Ghazali Mohd Rasad, Direktur 3. Thilagavathy Nadason, Direktur 4. Dhien Tjahajani, Direktur Independen /Corp. Secretary 5. Irvandi Ferizal, Direktur <p>Dewan Komisaris</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor, Presiden Komisaris 2. Budhi Dyah Sitawati, Komisaris Independen <p>Pemegang Saham (30-03-2016)</p> <p>53.514.830.577 saham (78,99%) dari total 67.746.840.730 saham</p> <p>Dewan Pengawas Syariah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. M. Anwar Ibrahim MA, Ketua <p>Anggota Komite</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agus Kretarto – Pihak Independen, Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan merangkap Sekretaris Eksekutif Komite Pemantau Risiko (RoC) 2. Nina Diyanti Anwar – Pihak Independen, Anggota Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan merangkap Sekretaris Eksekutif Komite Audit <p>Pemenuhan Prosedur Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Rapat telah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat bernomor S.2016.448/DIR COMPLIANCE tertanggal 9 November 2016; 	<p>Meeting was attended by:</p> <p>Board of Directors</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Taswin Zakaria, President Director 2. Ghazali Mohd Rasad, Director 3. Thilagavathy Nadason, Director 4. Dhien Tjahajani, Independent Director /Corp. Secretary 5. Irvandi Ferizal, Director <p>Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor, President Commissioner 2. Budhi Dyah Sitawati, Independent Commissioner <p>Shareholders (30-03-2016)</p> <p>53,514,830,577 shares (78.99%) of the total 67,746,840,730 shares</p> <p>Shariah Supervisory Board</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. M. Anwar Ibrahim MA, Chairman <p>Committee Members</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agus Kretarto, Independent Party, Member of the Audit Committee, the Risk Oversight Committee, and Executive Secretary of the Risk Oversight Committee 2. Nina Diyanti Anwar, Independent Party, Member of the Risk Oversight Committee, the Audit Committee, and Executive Secretary of the Audit Committee <p>Compliance with Legal Procedures:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The plan of the Meeting had been submitted to the Indonesia Financial Services Authority by a letter No. S.2016.448/DIR COMPLIANCE dated November 9, 2016;

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

2. Pengumuman kepada Pemegang Saham telah diiklankan pada surat kabar "Investor Daily" pada tanggal 16 November 2016 serta ditayangkan pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan (www.maybank.co.id) pada tanggal yang sama;
3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham juga telah diiklankan pada surat kabar "Investor Daily" pada tanggal 1 Desember 2016 serta ditayangkan pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan (www.maybank.co.id) pada tanggal yang sama. Penjelasan atas mata acara Rapat juga telah ditayangkan pada situs web Perseroan tersebut.

Rapat dipimpin oleh Tan Sri Dato Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor, Presiden Komisaris ("Pimpinan Rapat") yang ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris tanggal 25 Nopember 2016.

Mata Acara Tunggal Rapat:

Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan

Jalannya Rapat :

- Dalam Rapat disampaikan tentang pokok-pokok tata tertib Rapat, cara mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat serta mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat. Tata Tertib Rapat juga telah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat.
- Selesai menyampaikan pembahasan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham/kuasanya untuk mengajukan pertanyaan/menyatakan pendapat. Pada sesi ini tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/menyatakan pendapat.

Keputusan Rapat :

Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan :

1. Menerima dan mengesahkan pengunduran diri saudara Henky Sulistyو selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 31 Desember 2016. Perseroan menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas pemikiran, kerja keras serta jasa beliau untuk kemajuan Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Saudara Henky Sulistyو akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan masa jabatan beliau tersebut.

2. The announcement of the Meeting was published on daily newspaper "Investor Daily" on November 16, 2016 and on the website of the Indonesia Stock Exchange and the Company's website (www.maybank.co.id) at the same date;
3. The invitation had been announced on daily newspaper "Investor Daily" on December 01, 2016 and on the website of the Indonesia Stock Exchange and the Company's website (www.maybank.co.id) at the same date. The explanation of the agenda of the Meeting had been published on the Company's website

The Meeting was chaired by Tan Sri Dato Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor, the President Commissioner ("Chairman") appointed based on the decision of the Board of Commissioners on November 25, 2016.

Sole Agenda of the Meeting:

The change in the composition of the Board of Directors of the Company

Meeting Procedures:

- MC read key Meeting procedures including the procedure for asking questions, expressing opinion, and decision-making mechanism in the Meeting. Detail of Meeting Procedures had been distributed to the shareholders before they enter the Meeting room.
- Having discussed, the sole agenda of the Meeting, the Chairman invited shareholders/proxies to ask question and/or express opinion. In this session, there were no shareholders asked questions or expressed opinions.

Resolution:

The resolutions were made based on deliberation to reach consensus, and no shareholder objected or declined to vote. Thus 100% of the shares attending/represented in the Meeting has decided:

1. To accept and approve the resignation of Mr. Henky Sulistyو as the Company's Director effective at December 31, 2016. The Company hereby conveyed gratitude on his contributions, hard work and services to the improvement of the Company. Whereas the granting of *acquit et de charge* to Mr. Henky Sulistyو's services will be determined in the Annual General Meeting of Shareholders related to his tenure;

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

2. Menetapkan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2016, susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

1. Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor sebagai Presiden Komisaris
2. Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai Komisaris
3. Spencer Lee Tien Chye sebagai Komisaris
4. Umar Juoro sebagai Komisaris Independen
5. Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen
6. Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen

Direksi:

1. Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur
2. Thilagavathy Nadason sebagai Direktur
3. Ghazali bin Mohd Rasad sebagai Direktur
4. Jenny Wiriyanto sebagai Direktur
5. Dhien Tjahajani sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Corporate Secretary dan Direktur Independen
6. Eri Budiono sebagai Direktur
7. Irvandi Ferizal sebagai Direktur

Dewan Pengawas Syariah

1. Dr. M. Anwar Ibrahim MA, Ketua
2. Prof.Drs.H. Muh. Nahar Nahrawi SH MM sebagai Anggota
3. Dr. Abdul Jabar Majid MA sebagai Anggota

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris (bilamana perlu), memberitahukan atau mendaftarkan ke instansi yang berwenang sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dimaksud, termasuk mengadakan penegasan bilamana diperlukan. Singkatnya berhak melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan perubahan susunan Direksi tersebut.

Tata Tertib RUPS

Korum Kehadiran Rapat :

Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 Undang-undang No. 40 Th. 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 26 ayat 1 Peraturan OJK No 32 Th 2014.

2. To determine the composition of the Company's Board of Commissioners, Board of Directors, and the Sharia Supervisory Board for December 31, 2016 as follows:

Board of Commissioners:

1. Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor sebagai Presiden Komisaris
2. Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai Komisaris
3. Spencer Lee Tien Chye sebagai Komisaris
4. Umar Juoro sebagai Komisaris Independen
5. Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen
6. Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen

Board of Directors:

1. Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur
2. Thilagavathy Nadason sebagai Direktur
3. Ghazali bin Mohd Rasad sebagai Direktur
4. Jenny Wiriyanto sebagai Direktur
5. Dhien Tjahajani sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Corporate Secretary dan Direktur Independen
6. Eri Budiono sebagai Direktur
7. Irvandi Ferizal sebagai Direktur

Sharia Supervisory Board

1. Dr. M. Anwar Ibrahim MA, Ketua
2. Prof.Drs.H. Muh. Nahar Nahrawi SH MM sebagai Anggota
3. Dr. Abdul Jabar Majid MA sebagai Anggota

3. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company with substitution right to state in the separate Deed before Public Notary (if necessary) and to notify/register to the relevant authorities with regard to the aforesaid changes of the composition of the Company's Board of Directors, including, its reaffirmation if necessary. In short, it has all the authority to perform any necessary actions with regard to the changes of the composition of the Company's Board of Directors.

GMS Rules of Procedures

Meeting Quorum

GMS commences provided that it is attended by more than 1/2 (half) of the total outstanding shares with legitimate voting rights pursuant to Article 12 paragraph 1.a of the Bank's Articles of Association; Article 86 paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies; and Article 26 paragraph 1 of the OJK Regulation No. 32 of 2014.

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

Keputusan Rapat :

- a. Berdasarkan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka untuk keputusan Rapat diambil dengan **pemungutan suara** berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat.

Tata Cara Pemungutan Suara :

- a. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan.
- b. Pemegang Saham yang tidak setuju atau suara blanko, dipersilakan untuk mengisi **Formulir Pemungutan Suara** yang telah dibagikan. Petugas rapat akan mengumpulkan **Formulir Pemungutan Suara** yang telah diisi oleh Pemegang Saham atau Kuasanya dengan mencantumkan mata acara Rapat, nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan jumlah suara tidak setuju atau blanko. Selanjutnya petugas rapat akan menyerahkannya kepada Notaris untuk dihitung.
- c. Berdasarkan pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap dan dihitung sebagai suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

Meeting Resolutions

- a. Pursuant to Article 12 paragraph 8 of the Bank's Articles of Association all meeting decisions are made based on deliberation to reach consensus.
- b. When consensus is not reached, meeting decisions are made based on **voting**. Decision is reached when affirmative votes count for more than 1/2 (half) of the legitimate votes cast in the meeting.

Voting Procedure

- a. Voting is conducted verbally.
- b. Shareholders with non-affirmative votes or abstain are to complete a **Voting Form** distributed to meeting participants. Meeting committee collects the forms completed by the shareholders or their proxies stating the agenda item, name of shareholders, and amount of shares or represented, and total non-affirmative or abstain votes. The meeting committee will give the forms to the Notary to count.
- c. Pursuant to Article 12 paragraph 7 of the Bank's Articles of Association, abstain or illegitimate votes will be considered and counted as the same votes with the majority of votes from the shareholders who exercise their voting rights in the GMS.

KOMITE DIREKSI

Board of Directors Committee

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Bank Maybank Indonesia memiliki komite yang dibentuk oleh Direksi dalam rangka mengelola potensi risiko yang mungkin timbul secara efektif.

Dasar Pembentukan Komite Manajemen Risiko

Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE.2016.023B/DIR RISK MGMT perihal Komite Manajemen Risiko, struktur dan keanggotaan, tugas dan wewenang serta mekanisme rapat Komite dibentuk dan merupakan pembaharuan dari surat edaran yang telah ada sebelumnya.

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Berdasarkan SE.2016.023B/DIR RISK MGMT - Komite Manajemen Risiko

Pursuant to SE.2016.023B/DIR RISK MGMT – Risk Management Committee

No	Jabatan Position	Keterangan Note
Anggota Member		
1	Ketua Chairman	Presiden Direktur President Director
2	Wakil Ketua/Anggota Deputy/Member	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director
3	Anggota Member	Direktur Keuangan Finance Director
4	Anggota Member	Direktur Global Banking Global Banking Director
5	Anggota Member	Direktur Community Financial Services (CFS) Community Financial Services (CFS) Director
6	Anggota Member	Direktur Hukum dan Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan Legal and Compliance Director, Corporate Secretary
7	Anggota Member	Direktur Operasional & TI Operations & TI Director
8	Anggota Member	Direktur Human Capital Human Capital Director
Undangan Tetap Permanent Invitees		
1	Kepala Audit Internal (SKAI) Head of SKAI	
2	Kepala Divisi Enterprise, Risk Capital & Risk Infrastructure Head of Enterprise, Risk Capital & Risk Infrastructure Division	
3	Country Credit Officer	
4	Kepala Divisi Non Retail Credit Quality Assurance, Policy & Portfolio Head of Non Retail Credit Quality Assurance, Policy & Portfolio Division	
5	Kepala Divisi Retail Credit Policy & Portfolio Head of Retail Credit Policy & Portfolio	
6	Kepala Divisi Operational Risk & Business Continuity Head of Operational Risk & Business Continuity	
7	Kepala Divisi Traded and Non Traded Risk Head of Traded and Non Traded Risk	
Undangan Tidak Tetap Non-Permanent Invitees		
1	Pihak internal Maybank Indonesia lain jika diperlukan Other Maybank Indonesia internals when needed	
Sekretariat Secretariat		
1	Kepala Divisi Enterprise, Risk Capital & Risk Infrastructure Head of Enterprise, Risk Capital & Risk Infrastructure	

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Maybank Indonesia has a committee under the Board of Directors established to effectively manage risk potentials.

Basis of Establishment

Circular Number SE.2016.023B/DIR RISK MGMT concerning Risk Management Committee including structure and membership, responsibilities and authority, and meeting mechanism. The initial circular has been updated.

Risk Management Committee Structure and Membership

Komite Direksi Board of Directors Committee

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab utama Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko Bank dan anak perusahaan, termasuk strategi kerangka kerja, metodologi, system dan tools pengelolaan risiko termasuk rencana – rencana kontinjensi dan memastikan penerapannya yang meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi dan risiko kepatuhan.

Selain itu, Komite Manajemen Risiko juga melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis terhadap inisiatif bisnis dan proyek bisnis utama dan memastikan hal tersebut mendapatkan dukungan yang diperlukan dari seluruh Unit terkait di Bank Maybank Indonesia agar sejalan dengan tujuan perusahaan.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Manajemen Risiko

Selama tahun 2016 telah diadakan Rapat Komite Manajemen Risiko sebanyak 12 (dua belas) kali dengan agenda sebagai berikut:

- a. **Agenda Rutin Bulanan : Enterprise Risk Dashboard & Portfolio Dashboard**
- b. **Agenda Rutin 3 Bulanan : diantaranya** Risk Profile & Risk Appetite Statement (RAS)
- c. **Agenda Rutin 6 Bulanan :** Pelaporan RBBR & Laporan KPMM Sesuai Profil Risiko (OJK)
- d. **Agenda Review Berkala atas Kebijakan Manajemen Risiko : diantaranya** Non Trading Book Policy Statement & 2016 Trading Book Policy Statement
- e. **Kebijakan Perkreditan : diantaranya** Annual Review Kebijakan Perkreditan Bank (KBP) & Merging Neo SME & RSME PDAs (Level 2b) & Annual Review
- f. **Pengembangan Internal Model :** Annual Validation of Non Retail Scorecard & Retail IRB Model
- g. **Stress Test : diantaranya** Group Stress Test (GST) #19 & FSAP Stress Test Result
- h. **Pengajuan terkait Produk**

Duties and Responsibilities

The primary duties and responsibilities of Risk Management Committee are to provide recommendation and/or approval of policies, strategies, and guidance of Bank Risk Management implementation and also subsidiaries, including framework strategy, methodology, risk management system and tools including contingencies plans and to ensure its implementation which consists of credit risk, operational risk, market risk, liquidity risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, and compliance risk.

It also to conduct monitoring and provide strategic directions upon Bank's initiatives and main business projects and to ensure it obtain required support from all bankwide units to align with Bank's objectives.

Meeting Frequency and Attendance Data

RMC convened 12 (twelve) meetings in 2016 with the following agendas:

- a. **Monthly Agenda Items:** Enterprise Risk Dashboard & Portfolio Dashboard
- b. **Quarterly agenda : e.g** Risk Profile & Risk Appetite Statement (RAS)
- c. **Semester agenda :** RBBR Report & CAR report by risk profile (OJK)
- d. **Periodic review agenda on risk management policy : e.g** Non Trading Book Policy Statement & 2016 Trading Book Policy Statement
- e. **Lending policy : e.g** Annual Review Bank's Lending Policy (KBP) & Merging Neo SME & RSME PDAs (Level 2b) & Annual Review
- f. **Internal Model Development :** Annual Validation of Non Retail Scorecard & Retail IRB Model
- g. **Stress Test :** Group Stress Test (GST) #19 & FSAP Stress Test Result
- h. **Product-Related Proposals**

Komite Direksi

Board of Directors Committee

ASSETS & LIABILITIES MANAGEMENT COMMITTEE (ALCO) DAN ASSETS & LIABILITIES MANAGEMENT (ALM)

ALCO adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Direksi (BOD). Penyempurnaan fungsi dan tanggung jawab ALCO telah dilakukan melalui Surat Edaran No.SE.2016.016/PRES DIR tanggal 09 Nopember 2016 tentang *Assets & Liabilities Management* dan *Assets & Liabilities Management Committee* (ALCO).

Assets & Liabilities Management (ALM) adalah penerapan manajemen keuangan dan risiko dalam pengelolaan posisi neraca Bank (*on* dan *off balance sheet*) untuk memperoleh profil *risk/reward* yang paling optimum sehingga dapat meningkatkan *shareholder value*.

Fokus area *Assets & Liabilities Management* (ALM) adalah manajemen risiko suku bunga, risiko likuiditas, pengelolaan modal dan eksposur mata uang.

Komposisi keanggotaan ALCO adalah :

Ketua	: Presiden Direktur
Wakil Ketua	: Kepala Unit Kerja, <i>Global Markets and Corporate Treasury</i>
Anggota	: - Direktur Manajemen Risiko - Direktur <i>Global Banking</i> - Direktur <i>Community Financial Services</i> - Direktur Keuangan - Direktur Operasional & IT

Undangun Tetap :

- Direktur Hukum & Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan
- Direktur *Human Capital*
- Kepala Unit Kerja *Economic Research*
- Kepala Unit Kerja *GM Cross Markets Trading*
- Kepala Unit Kerja *Corporate Treasury Liquidity Management*
- Kepala Unit Kerja *Global Market Rates*
- Kepala Unit Kerja *Traded and Non Traded Risk*
- Kepala Unit Kerja *Business Units (Global Banking, Community Financial Services)*
- Kepala Unit Kerja *Syariah Banking*
- Kepala Unit Kerja *Liabilities*
- Kepala Unit Kerja *Financial Planning, Performance Management and Reporting*
- Perusahaan Anak

ASSETS & LIABILITIES MANAGEMENT COMMITTEE (ALCO) AND ASSETS & LIABILITIES MANAGEMENT (ALM)

A committee under the Board of Directors (BOD), ALCO's function and responsibilities had been refined by virtue of Circular Letter No.SE.2016.016/PRES DIR dated 09 November 2016 on *Assets & Liabilities Management* and *Assets & Liabilities Management Committee* (ALCO).

Assets & Liabilities Management (ALM) is financial and risk management implementation to manage the Bank's on and off balance sheet positions, aiming to achieve optimal risk/reward profile and therefore increases shareholder value.

ALM has the following areas of focus such as management of interest risk, liquidity risk, capital management and currency exposure.

ALCO Membership:

Chair	: President Director
Deputy	: Global Markets and Corporate Treasury Unit Head
Member	: - Risk Management Director - Global Banking Director - Community Financial Services Director - Finance Director - Operations and IT Director

Permanent Invitees:

- Legal & Compliance Director, Corporate Secretary
- Human Capital Director
- Economic Research Head
- GM Cross Markets Trading Head
- Corporate Treasury Liquidity Management Head
- Global Market Rates Head
- Traded and Non Traded Risk Head
- Heads of respective Business Units (Global Banking, Community Financial Services)
- Shariah Banking Head
- Liabilities Head
- Financial Planning, Performance Management, and Reporting Head
- Subsidiaries

Komite Direksi Board of Directors Committee

Undangan Tidak Tetap: - Unit kerja selain yang telah disebutkan di atas untuk keperluan diskusi mengenai hal yang spesifik (apabila dipandang perlu).

Sekretaris : Kepala Unit Kerja Corporate Finance & Capital Management

ALCO memiliki tanggung jawab utama sebagai berikut: Memberikan arah strategis dari ALM dan memastikan tindak lanjut taktis untuk menciptakan struktur *balance sheet* yang terus berkembang dan memaksimalkan profitabilitas Bank untuk mencapai tujuan kinerja di dalam parameter-parameter risiko yang ditentukan melalui pengelolaan aset dan liabilitas.

Pada tahun 2016, ALCO melakukan pertemuan sebanyak 11 kali, dengan agenda diantaranya sebagai berikut:

- Memberikan persetujuan untuk proposal Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), *Base Lending Rate* (BLR), dan proposal suku bunga Kredit dan Deposit, dan lain-lain.
- Analisa atas rasio, *gap*, dan eksposur likuiditas
- *Early warning indicators*
- Perkembangan produk pesaing dan tingkat suku bunganya
- *Update* dari portofolio surat berharga
- Analisa sensitivitas suku bunga dan dana pihak ketiga
- *Update* posisi keuangan anak perusahaan
- Analisa atas perubahan komposisi neraca termasuk diantaranya rasio *return on capital* dan *net interest income*.

Selain itu, untuk mendukung keputusan strategis dan menjaga eksposur pada tingkatan yang dapat diterima oleh Bank, telah dilakukan peninjauan dan pemantauan secara reguler dari berbagai limit berkaitan dengan pengelolaan *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB), Likuiditas, *Portfolio Trading* dan *Fixed Income in Banking Book* untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan mencapai strategi bisnis. Bilamana dibutuhkan, pemantauan limit juga telah diterapkan terhadap perusahaan anak dan cabang luar negeri.

Non-Permanent invitees: work units other than specified above may be invited to discuss specific issues when necessary

Secretary : Head of Corporate Finance & Capital Management

ALCO has main responsibilities as follow: To provide strategic ALM direction and ensure the availability of tactical follow-up measures to create progressive balance sheet structure and to maximize Bank profitability in order to achieve performance targets within the identified risk parameters through management of assets and liabilities.

In 2016, ALCO held 11 meetings with following agendas among others:

- Approve Base Lending Rate (BLR) and proposed lending and deposit interest rates, and others
- Analysis of ratios, gaps, and Liquidity exposure
- Early warning indicators
- Developments of competitors' products and their interest rates
- Marketable securities portfolio update
- Interest rate sensitivity and third party fund analysis
- Subsidiaries financial position update
- Balance sheet composition changes analyses e.g return on capital and net interest income ratios.

In addition, to support strategic decisions and maintain exposure at an acceptable limit, limits related to Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB), liquidity, trading portfolio, and fixed income in banking book were continually reviewed and monitored to ensure their compliance with regulatory requirements and to attainment of business strategies. When necessary, limit monitoring may also be applied to overseas subsidiaries and branch offices.

Komite Direksi

Board of Directors Committee

KOMITE AUDIT INTERNAL (INTERNAL AUDIT COMMITTEE)

Tujuan Pembentukan IAC:

- Memastikan bahwa Manajemen telah menanggapi semua temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh audit internal, audit eksternal dan regulator.
- Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi telah ditindaklanjuti tepat waktu dan efektif.
- Memastikan efektivitas dari tindaklanjut yang dilakukan oleh unit kerja atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor.
- Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komite Audit.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Internal

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Internal diatur di dalam Term of Reference (ToR) yang disahkan tanggal 5 Mei 2012 dan telah direvisi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu per 29 April 2014, 9 April 2015, dan 7 Maret 2016.

Kebijakan Rapat IAC

- IAC akan mengadakan rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali sebulan.
- Jika Ketua berhalangan hadir, maka Direktur Manajemen Risiko akan memimpin rapat.

Kuorum Rapat IAC

Ketentuan mengenai Kuorum adalah:

- Kehadiran lima (5) anggota harus membentuk kuorum yang diperlukan untuk rapat, namun demikian dua (2) dari lima (5) anggota harus direktur.
- Keanggotaan secara otomatis berlaku bagi pemegang jabatan pejabat sementara (*Acting Head*).

INTERNAL AUDIT COMMITTEE

Purpose of IAC:

- Ensure follow-up on audit findings and audit recommendations from internal audit, external audit, and regulators by the management
- Ensure effective and timely follow-up on audit findings and recommendations
- Ensure effectiveness of follow-up on auditors' recommendations carried out by work units
- Perform other tasks from Audit Committee

IAC Guidelines and Procedures

IAC Guidelines and Procedures are stipulated in the Term of Reference (ToR) ratified on 5 May 2012. Since its initial adoption, ToR has been revised 3 (three) times: 29 April 2014, 9 April 2015, and 7 March 2016.

IAC Meeting Policy

- IAC holds IAC meeting at least 1 (one) time every month
- Where IAC chairman is absent, the Risk Management Director presides the meeting.

IAC Meeting Quorum

Quorum stipulations:

- Meeting quorum is minimum 5 (five) members attending; 2 (two) out of the five attending members are directors.
- Membership automatically applies to acting head.

Komite Direksi Board of Directors Committee

Program Kerja IAC dan realisasinya di tahun 2016:

No	Program Kerja Work program	Realisasi Performance
1	Rapat bulanan Monthly meeting	9 (sembilan) kali 9 (nine) meetings
2	Membahas laporan audit dari auditor internal Discussion on internal auditor report	Pada setiap rapat IAC Every IAC meeting
3	Menindaklanjuti dan memantau status tindak lanjut pada rekomendasi yang dibuat oleh auditor intern, auditor eksternal, dan regulator. Monitor status of follow-up actions on recommendations from internal auditor, external auditor, and regulators	Setiap ada pengkinian atas status tindak lanjut Monitor update on follow-up status
4	Mengikuti rapat Komite Audit sebagai perwakilan Manajemen Attending Audit Committee meeting representing the management	Sesuai dengan rapat Komite Audit yang dilakukan sepanjang tahun 2016 Attendance in accordance with Audit Committee meeting in 2016

IAC Work program and realization in 2016:

Rapat IAC tahun 2016

Selama tahun 2016, telah diselenggarakan rapat Komite Audit Internal sebanyak 9 (sembilan) kali dengan cakupan agenda sebagai berikut:

- Laporan audit dari auditor internal yang diterbitkan bulan October 2015 – October 2016
- Status *update* untuk temuan audit
- Rencana tindak lanjut yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan tanggal penyelesaian akan diajukan ke IAC untuk mendapatkan persetujuan atas perubahan tanggal penyelesaian tersebut. Persetujuan perubahan tanggal penyelesaian adalah berdasarkan pertimbangan dari anggota IAC.
- Update* dari bisnis unit tentang tindak lanjut atas rekomendasi SKAI.

IAC Meeting 2016

During 2016, there were 9 (nine) Internal Audit Committee meetings held with following agendas:

- Audit report from internal auditors issued from October 2015 – October 2016
- Audit findings status update
- Follow-up plans that were not completed within deadline were submitted to IAC for approval of deadline change. Approval was made based on IAC's discretion.
- Update from business units concerning their follow-ups of SKAI's recommendations.

Komite Direksi

Board of Directors Committee

IT STEERING COMMITTEE

Latar Belakang

Merujuk pada POJK Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum dan SE BI No. 9/30/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, bahwa Bank wajib memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT Steering Committee) dan komite tersebut wajib memiliki IT Steering Committee Charter.

Wewenang dan Tanggung Jawab

Wewenang dan tanggung jawab IT Steering Committee adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi yang mencakup:

- a) Rencana Strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam memberikan rekomendasi, *IT Steering Committee* memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas serta hal-hal sebagai berikut:
 - Rencana pelaksanaan (*road-map*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank. *Road map* terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state*.
 - Sumber daya yang dibutuhkan.
 - Keuntungan / manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
- b) Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank.
- c) Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI. IT Steering Committee juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank) misalnya pergantian *core banking application*, *server production* dan topologi jaringan.
- d) Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati dalam *Service Level Agreement*. IT Steering Committee melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.
- e) Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
- f) Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI dan investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.

IT STEERING COMMITTEE

Background

Referring to the Financial Services Authority (OJK) regulation No. 38/POJK.03/2016 concerning the Application of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks and Bank Indonesia Circular Letter No. 9/30/DPNP concerning Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks, the Bank must establish an IT Steering Committee and that the committee must have an IT Steering Committee Charter.

Authorities and Responsibilities

The authorities and responsibilities of IT Steering Committee are to recommend to the BOD regarding the following:

- a) IT Strategic Plan in line with the Bank business activity strategic plan. In providing recommendations, IT Steering Committee takes into account several factors such as efficiency, effectiveness, as well as the following matters:
 - Road-map implementation plan to meet IT requirements which supports the Bank's business strategy. Roadmap consists of a current state, future state, and also measures to achieve the goals in the future.
 - Required resources.
 - Benefits acquired during the implementation of the plan.
- b) Formulation of IT main policies and procedures, such as IT security policy and risk management related to the IT usage in the Bank.
- c) The relevancy of IT's approved projects with IT Strategic Plan. IT Steering Committee also establishes the priority status of critical IT projects (significantly impacting the Bank's operational activities), such as the replacement of core banking application, server production, and networks topology.
- d) The relevancy of IT project implementation with the planned project in the Service Level Agreement. IT Steering Committee provides recommendations with the results of analysis based on main IT projects thus enabling the BOD to make efficient decisions.
- e) The relevancy of IT with the management information system requirements supporting the Bank's business activity management.
- f) The effectiveness of risk-minimizing measures on the Bank's investment in IT sectors which contributes to achieve the Bank's business objectives.

Komite Direksi Board of Directors Committee

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> g) Pemantauan atas kinerja TI, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas & efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI. h) Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja TI. Komite dapat memfasilitasi hubungan antara kedua satuan kerja tersebut. i) Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI maka IT Steering Committee harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait. j) Melakukan evaluasi dan persetujuan untuk pelaksanaan proyek-proyek TI yang membutuhkan investasi lebih besar dari 1 Milyar rupiah. | <ul style="list-style-type: none"> g) IT performance monitoring and improvement efforts such as detecting the obsolescence of IT and measuring the effectiveness and efficiency of IT security policy's implementation. h) IT issues settlement efforts which cannot be settled by the users and IT units. Committee can facilitate the relation between both working units. i) The adequacy and allocation of the Bank's resources. In the event of inadequate resources and the Bank intends to procure other parties' services for IT development, IT Steering Committee must ensure that the Bank has the related policies and procedures. j) Evaluating and giving approval for IT project implementation that requires more than 1 Billion Rupiah of investment. |
|---|--|

Susunan Keanggotaan & Undangan Tetap

Susunan Keanggotaan & Undangan Tetap *IT Steering Committee* adalah:

- a) Anggota *IT Steering Committee* dan yang mempunyai hak suara
 - 1) Presiden Director – Chairman
 - 2) Operation & IT Director – Co Chairman
 - 3) Risk Management Director
 - 4) Finance Director
 - 5) Global Banking Director
 - 6) Community Financial Services Director
 - 7) Information Technology Head

- a) Undangan Tetap dalam *IT Steering Committee*
 - 1) Legal & Compliance, Corporate Secretary Director
 - 2) Human Capital Director
 - 3) Chief of SKAI
 - 4) IT Development Head
 - 5) IT Project Management Head
 - 6) Infrastructure & Operations Head
 - 7) Information Security & Governance Head
 - 8) IT Risk Management Head

Selain undangan tetap, *IT Steering Committee* dapat mengundang pejabat yang terkait dengan pokok bahasan yang akan disampaikan dalam rapat.

Untuk memenuhi kuorum maka setiap pelaksanaan rapat paling sedikit dihadiri oleh 5 orang dari anggota *IT Steering Committee* dan dalam kondisi anggota tidak bisa hadir dapat didelegasikan kepada pejabat penggantinya.

Memberships Structure & Regular Attendees

IT Steering Committee's Memberships Structure & Regular Attendees are as follows:

- a) *IT Steering Committee's* Members and have a vote
 - 1) President Director – Chairman
 - 2) Operation & IT Director – Co Chairman
 - 3) Risk Management Director
 - 4) Finance Director
 - 5) Global Banking Director
 - 6) Community Financial Services Director
 - 7) Information Technology Head

- b) Regular Attendees in *IT Steering Committee*
 - 1) Legal & Compliance, Corporate Secretary Director
 - 2) Human Capital Director
 - 3) Chief of SKAI
 - 4) IT Development Head
 - 5) IT Project Management Head
 - 6) Infrastructure & Operations Head
 - 7) Information Security & Governance Head
 - 8) IT Risk Management Head

In addition to the regular attendees, *IT Steering Committee* can invite other officers related to the matters to be discussed in the meeting.

To meet the quorum, the implementation of every *IT Steering Committee's* meeting must be attended by at least 5 members of *IT Steering Committee*, and in the event of members' absence, a substitute can be delegated.

Komite Direksi

Board of Directors Committee

Selama tahun 2016, diselenggarakan Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi (ITSC) sebanyak 6 (enam) kali.

During 2016, there were 6 (six) ITSC meetings held with following agendas:

Ringkasan Agenda Rapat ITSC Selama Tahun 2016

Summary of ITSC Meeting Agenda in 2016

No	Tanggal Date	Agenda
1	1 Februari 2016	<ul style="list-style-type: none"> a. Tinjauan Risalah Rapat ITSC November 2015 & <i>Matters Arising</i> b. <i>ITSC Approval</i> c. <i>Other Information</i> d. <i>IT Projects update</i>
2	7 Maret 2016	<ul style="list-style-type: none"> a. Tinjauan Risalah Rapat ITSC Februari 2016 & <i>Matters Arising</i> b. <i>ITSC Approval</i> c. <i>Other Information</i> d. <i>IT Projects update</i>
3	28 Juli 2016	<ul style="list-style-type: none"> a. Tinjauan Risalah Rapat ITSC Maret 2016, Materi ITSC yang dipresentasikan dalam BOD 26 April 2016 / BOD 2 Mei 2016 / HCC 10 Mei 2016 & <i>Matters Arising</i> b. <i>ITSC Approval</i> c. <i>Other Information</i> d. <i>IT Projects update</i>
4	6 September 2016	<ul style="list-style-type: none"> a. Tinjauan Risalah Rapat ITSC Juli 2016 & <i>Matters Arising</i> b. <i>ITSC Approval</i> c. <i>Other Information</i> d. <i>IT Projects update</i>
5	11 Oktober 2016	<ul style="list-style-type: none"> a. Tinjauan Risalah Rapat ITSC September 2016, Materi ITSC yang dipresentasikan dalam BOD 8 Aug 2016 / BOD 5 Sep 2016 & <i>Matters Arising</i> b. <i>ITSC Approval</i> c. <i>Other Information</i> d. <i>IT Projects update</i>
6	8 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none"> a. Tinjauan Risalah Rapat ITSC Oktober 2016 & <i>Matters Arising</i> b. <i>ITSC Approval</i> c. <i>Other Information</i> d. <i>IT Projects update</i>

Komite Direksi Board of Directors Committee

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Latar Belakang

Merujuk kepada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Di dalam ketentuannya, OJK mengharuskan Pemegang Saham Pengendali (PSP) untuk menunjuk salah satu entitas yang berada dalam konglomerasi keuangan sebagai Entitas Utama berdasarkan aset terbesar dan/atau penerapan manajemen risiko yang baik.

Dalam hal ini, Malayan Banking Berhad (MBB) sebagai PSP telah menunjuk Maybank Indonesia sebagai Entitas Utama yang wajib melakukan koordinasi dan memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia diantara perusahaan terelasi (*sister companies*) dan perusahaan anak (*subsidiaries*).

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Maybank Indonesia sebagai Entitas Utama membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

Adapun, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dibentuk dengan tujuan untuk merekomendasikan kerangka atau kebijakan yang terintegrasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengelola, dan mengendalikan seluruh faktor risiko yang signifikan ke Dewan Komisaris Maybank Indonesia sebagai Entitas Utama dalam rangka evaluasi dan persetujuan.

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Nama Name	Jabatan pada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Position in the Integrated Risk Management Committee	Keahlian Expertise	Keterangan Note
Henky Sulistyio (HS)	Ketua merangkap Anggota Chair and Member	Direktur Manajemen Risiko Maybank Indonesia Maybank Indonesia Risk Management Director	Mengundurkan diri efektif 31 Desember 2016 Resigned effective 31 December 2016
Taswin Zakaria (TZ)	Anggota Member	Presiden Direktur Maybank Indonesia Maybank Indonesia President Director	Taswin Zakaria ditunjuk sebagai Ketua IRMC menggantikan Henky Sulistyio Taswin Zakaria appointed as Chairman of IRMC replacing Henky Sulistyio
Aria Putera Ismail (AP)	Anggota Member	Presiden Direktur MSI MSI President Director	
Wilianto Ie (WI)	Anggota Member	Presiden Direktur MKE MKE President Director	

INTEGRATED RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Background

Pursuant to OJK Regulation Number 17/POJK.03/2014 on the Implementation of Integrated Risk Management Committee in Financial Conglomeration, OJK requires controlling shareholders to appoint an entity within the financial conglomeration as the Main Entity based on the volume of assets and/or quality of risk management.

The Malayan Banking Berhad (MBB) as the controlling shareholders has appointed Maybank Indonesia as the Main Entity with the mandate to coordinate and ensure that integrated risk management is implemented in Maybank Indonesia financial conglomeration, i.e. between sister companies and subsidiaries.

In accordance with the regulation, Maybank Indonesia as the Main Entity has established an Integrated Risk Management Committee.

The Integrated Risk Management Committee (IRMC) is formed with the purpose to recommend integrated framework or policy to identify, measure, monitor, manage, and control all significant risks to the Board of Commissioners of Maybank Indonesia as the Main Entity for evaluation and approval.

Membership of the Integrated Risk Management Committee

Komite Direksi

Board of Directors Committee

Nama Name	Jabatan pada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Position in the Integrated Risk Management Committee	Keahlian Expertise	Keterangan Note
Denny Rizal Thaher (DR)	Anggota Member	Presiden Direktur MAM MAM President Director	
Alexander (AX)	Anggota Member	Presiden Direktur MIF MIF President Director	
Djaja S. Sutandar (DS)	Anggota Member	Presiden Direktur WOM WOM President Director	
Eri Budiono (EB)	Alt. Presiden Direktur Maybank Indonesia Alt. Maybank Indonesia President Director	Direktur Global Banking Global Banking Director	
Baiq Nadea Dzurriatin (BN)	Alt. Presiden Direktur MSI Alt. MSI President Director	Direktur Kepatuhan Compliance Director	
Azrul Latief (AL)	Alt. Presiden Direktur MKE Alt. MKE President Director	Chief Financial Officer Chief Financial Officer	
Like Kaawoan (LK)	Alt. Presiden Direktur MAM Alt. MAM President Director	Direktur Operasional Operations Director	
Anton Sutjipto (AS)	Alt. Presiden Direktur MIF Alt. MIF President Director	Direktur Operasional MIF MIF Operations Director	
Esther Nova (EN) / Njauw Vido Onadi (VO)	Alt. Presiden Direktur WOM Alt. WOM President Director	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director	EN Mengundurkan Diri efektif Agustus 2016 digantikan dengan Bp. VO EN resigned effective as of August 2016, replaced by Mr. VO
Yosef Senobua (YS)	Anggota Member	Enterprise Risk Capital & Risk Infrastructure – Maybank Indonesia Enterprise Risk Capital & Risk Infrastructure – Maybank Indonesia	
Ita Sitasari (IS)	Anggota Member	Manajemen Risiko MSI MSI Risk Management	
Deny Satria (DN)	Anggota Member	Manajemen Risiko MKE MKE Risk Management	
Yuriko Wunas (YW)	Anggota Member	Manajemen Risiko MAM MAM Risk Management	
Arthur Oktavianus (AO)	Anggota Member	Manajemen Risiko MIF MIF Risk Management	
Eko Komarullah (EK) / Herwin	Anggota Member	Manajemen Risiko WOM WOM Risk Management	EK Mengundurkan Diri efektif Oktober 2016 digantikan dengan Bp. Herwin EK resigned effective as of October 2016 replaced by Mr. Herwin

Komite Direksi Board of Directors Committee

Terdapat 2 anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang mengundurkan diri pada tahun 2016 yaitu Bp. Henky Sulisty (Ketua) dan Bp. Eko Komarullah (Anggota).

In 2016, two IRMC members resigned, namely Mr. Henky Sulisty (Chair) and Mr. Eko Komarullah (Member).

Daftar dan Data Kehadiran Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi di tahun 2016 mengadakan rapat sebanyak 4 kali yaitu di bulan Januari, April, Juli dan Oktober 2016.

IRMC list and data of attendance

In 2016 the Integrated Risk Management Committee organized 4 meetings in January, April, July, and October 2016.

Agenda Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Selama Tahun 2016

IRMC 2016 Meeting Agenda

Tanggal / Waktu Date/Time	28 Januari January 2016 / 15.00 – 18.00 wib
Pembahasan Discussion items	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Profil Risiko Terintegrasi Integrated risk profile 2. Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi Report of Integrated Capital Adequacy Ratio (CAR) 3. Update Produk Baru - <i>Reverse Repo</i> MKE New Product Update - Reverse Repo MKE 4. <i>Integrated Enterprise Risk Dashboard</i> (ERD)
Tanggal / Waktu Date/Time	27 April 2016 / 09.00 – 12.00 wib
Pembahasan Discussion items	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Integrated Enterprise Risk Dashboard</i> (ERD) <i>Integrated Enterprise Risk Dashboard</i> (ERD) 2. <i>Integrated Capital Management Framework</i> & Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi <i>Integrated Capital Management Framework</i> & Report of Integrated Capital Adequacy Ratio (CAR) 3. <i>Integrated Risk Appetite Statement</i> (RAS) 4. IRMC <i>plan in 2016</i>
Tanggal / Waktu Date/Time	19 Juli July 2016 / 09.00 – 12.00 wib
Pembahasan Discussion items	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Profil Risiko Terintegrasi Integrated risk profile 2. Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi Report of Integrated Capital Adequacy Ratio (CAR) 3. <i>Integrated Enterprise Risk Dashboard</i> (ERD) 4. Update Produk Baru - <i>Mudharabah Muqayyadah</i> New Product Update - Mudharabah Muqayyadah 5. Update Produk Baru - <i>Syariah Hedging Product</i> New Product Update - Syariah Hedging Product
Tanggal / Waktu Date/Time	25 Oktober October 2016 / 14.00 – 17.00 wib
Pembahasan Discussion items	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Integrated Enterprise Risk Dashboard</i> (ERD) <i>Integrated Enterprise Risk Dashboard</i> (ERD) 2. Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi Report of Integrated Capital Adequacy Ratio (CAR) 3. Review tahunan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan SOP Profil Risiko Terintegrasi Annual review – integrated risk management policy and integrated risk profile SOP

Komite Direksi

Board of Directors Committee

Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi:

- Mengkaji dan merekomendasikan Manajemen Risiko Terintegrasi (strategi, kerangka kerja/kebijakan, *risk tolerance*, dan *risk appetite*) untuk persetujuan Dewan Komisaris.
- Mengkaji, menyempurnakan, dan melakukan penilaian atas kecukupan kerangka kerja/kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam proses pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan risiko serta sejauh mana LJK beroperasi secara efektif.

Tugas Khusus Komite Manajemen Risiko Terintegrasi:

- Mengkaji laporan berkala mengenai eksposur risiko, komposisi portofolio risiko, dan aktivitas manajemen risiko dalam laporan ERD (*Enterprise Risk Dashboard*) dari masing-masing LJK.
- Mengkaji dampak risiko pada kecukupan modal, profitabilitas, dan kualitas aset dibawah kondisi skenario stress, dan merekomendasikan tindakan lebih lanjut kepada Dewan Komisaris.
- Mengkaji dan merekomendasikan langkah-langkah strategis yang timbul dari ketentuan regulator yang berdampak pada implementasi manajemen risiko terintegrasi untuk bahan evaluasi Dewan Komisaris.
- Mengkaji dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah risiko yang menjadi perhatian otoritas berwenang.
- Mengkaji dan menilai kecukupan proses manajemen risiko terintegrasi dan langkah-langkah mitigasi.
- Memberikan pengawasan dan arahan strategis untuk masalah risiko yang signifikan (termasuk namun tidak terbatas pada risiko signifikan karena adanya produk baru) dan inisiatif serta memastikan LJK menerima dukungan dan prioritas yang diperlukan di Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia yang sejalan dengan tujuan Grup Maybank.
- Melaksanakan tanggung jawab lainnya seperti perbaikan atas pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana yang didelegasikan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama dari waktu ke waktu.

IRMC authority and responsibilities

- Review and recommend integrated risk management (strategy, framework/policy, risk tolerance, and risk appetite) to the Board of Commissioners for approval.
- Review, refine, and assess the adequacy of integrated risk management framework/policy in identifying, measuring, monitoring, risk reporting as well as the operational effectiveness of financial services institutions.

IRCM special tasks:

- Review periodic reports on risk exposure, risk portfolio composition, and risk management activities detailed in the ERD (*Enterprise Risk Dashboard*) report of each financial services institution.
- Review risk impacts on capital adequacy, profitability, and asset quality under stress scenario condition, and providing recommendations of further actions to Board of Commissioners
- Review and recommend strategic measures arising from regulatory requirements impacting the implementation of integrated risk management to be evaluated by the Board of Commissioners.
- Review and recommend improvement steps to address the risks monitored by competent authorities.
- Review and assess the adequacy of integrated risk management process and mitigation steps.
- Monitor and provide strategic directives on significant risks (including but not limited to significant risks arising from new products) and initiatives and ensuring financial services institutions receive necessary support and priorities by Maybank Indonesia Financial Conglomeration in line with Maybank Group's goals.
- Carry out other responsibilities such as integrated risk management improvements as delegated by the Board of Commissioners of the Main Entity from time to time.

KOMITE PENDUKUNG DIREKSI

Board of Directors Supporting Committee

KOMITE KREDIT

Dalam rangka menunjang proses pemberian kredit dan produk program dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dimana penerapan *four-eyes principles* bersifat wajib maka dibentuk Komite Kredit (KK).

Adapun, tujuan dari dibentuknya Komite Kredit adalah sebagai berikut:

- Proposal Pinjaman (baik baru, penambahan, maupun perpanjangan).
- Purchase/Sale Marketable Securities* (khusus KK1 dan KK2)
- Memo persetujuan lainnya (perubahan atas struktur pinjaman; jumlah pinjaman; jangka waktu; *term & condition*; agunan/jaminan; *pricing*; dan lain-lain.).
- Interbank Limit* (khusus KK 1 dan KK 2).
- Adjustment* atas hasil internal *rating*.
- Post Approval Monitoring*.
- Hal lainnya yang diminta oleh Komite Kredit.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE.2016.001/DIR RISK MGMT tentang Komite Kredit tanggal 1 Februari 2016 seperti yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 22 Januari 2016, struktur dan keanggotaan Komite Kredit adalah sebagai berikut:

CREDIT COMMITTEE

Credit Committee (CC) is established to support credit provisioning process and programs' products with due regards to the mandatory prudential four-eye principles.

The purpose of establishing Credit Committee is as follows:

- Loan proposal (new, addition, and renewal).
- Purchase/Sale Marketable Securities* (CC1 and CC2)
- Other approval memo (changes to loan structure; loan amount; time period; term & condition; collateral; pricing; others.).
- Interbank Limit* (CC 1 and CC 2).
- Adjustments to internal rating.
- Post Approval Monitoring*.
- Other matters requested by the Credit Committee

Pursuant to Circular SE.2016.001/DIR RISK MGMT on Credit Committee dated 1 February 2016 and approved by Board of Commissioners on 22 January 2016, the Credit Committee has the following structure and membership:

Struktur Structure	Komite Kredit (KK) 1 Credit Committee (CC) 1	Komite Kredit (KK) 2 Credit Committee (CC) 2	Komite Kredit (KK) 3 Credit Committee (CC) 3
Ketua Chairperson	Presiden Direktur President Director	Direktur Risk Management	Country Credit Officer
Alternate Ketua Alternate Chairperson	Direktur Risk Management Risk Management Director	Country Credit Officer	Head, Credit Evaluation
Anggota Members	- Presiden Direktur President Director - Direktur Bisnis 1 ¹⁾²⁾ Business Director 1 ¹⁾²⁾ - Direktur Bisnis 2 ¹⁾³⁾ Business Director 2 ¹⁾³⁾ - Direktur Risk Management Risk Management Director - Country Credit Officer Country Credit Officer - Head, <i>related</i> LOB Head, <i>related</i> LOB	- Direktur Bisnis 1 ¹⁾ Business Director 1 ¹⁾ - Direktur Bisnis 2 ¹⁾ Business Director 2 ¹⁾ - Direktur Risk Management Risk Management Director - Country Credit Officer Country Credit Officer - Head, <i>related</i> LOB Head, <i>related</i> LOB	- Direktur Bisnis 2 Business Director 2 - Head, <i>related</i> LOB Head, <i>related</i> LOB - Country Credit Officer Country Credit Officer - Head, Credit Evaluation Head, Credit Evaluation - Head, BBQM & Credit Policy/ Head, BBQM & Quality Assurance Head, BBQM & Credit Policy/Head, BBQM & Quality Assurance

Komite Pendukung Direksi

Board of Directors Supporting Committee

Struktur Structure	Komite Kredit (KK) 1 Credit Committee (CC) 1	Komite Kredit (KK) 2 Credit Committee (CC) 2	Komite Kredit (KK) 3 Credit Committee (CC) 3
Kuorum Rapat Meeting Quorum	Ketua + 2 Direktur Bisnis Chairperson + 2 business directors	Ketua + 2 Direktur Bisnis Chairperson + 2 business directors	Untuk limit Rp > 50-100 miliar: Ketua + Direktur Bisnis 2 + Head, BBQM & Credit Policy/ Head, BBQM & Quality Assurance
Undangan Tetap Permanent Invitees	Perwakilan unit bisnis 1 tingkat di bawah Direktur Business unit representatives, 1 level below the Director		Rp > 50-100 billion: Chairperson + 2 business directors + Head, BBQM & Credit Policy/ Head, BBQM & Quality Assurance
			Untuk limit Rp > 25-50 miliar: Ketua + Head, BBQM & Credit Policy/ Head, BBQM & Quality Assurance + Head, Commercial Banking/ Head, SME Banking
			Rp > 25-50 billion: Chairperson + Head, BBQM & Credit Policy/ Head, BBQM & Quality Assurance + Head, Commercial Banking/ Head, SME Banking
Undangan Tidak Tetap Non-Permanent Invitees	Sesuai kebutuhan komite As required by Committee		

¹ Memiliki limit kewenangan individu dalam Komite Kredit

² Direktur Bisnis 1 saat ini adalah Direktur yang membawahi Global Banking

³ Direktur Bisnis 2 saat ini adalah Direktur yang membawahi SME, Business Banking & Retail Banking

¹ Having individual limit authority in Credit Committee

² Business Director 1 at present is the Director supervising Global Banking

³ Business Director 1 at present is the Director supervising Global Banking

Tugas dan Tanggung Jawab

- Komite menyetujui atau menolak permohonan kredit.
- Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b) baik Global Banking maupun Business Banking, Kebijakan Kredit Tingkat 3 baik Global Banking maupun Business Banking, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.
- Berkoordinasi dengan Asset & Liability Committee dalam aspek pendanaan perkreditan.

Total Rapat Komite Kredit selama tahun 2016 adalah 101 rapat yang terdiri dari 50 rapat Komite Kredit 1 & 2 serta 50 rapat Komite Kredit 3.

Duties and Responsibilities

- CC may approve or reject credit application
- CC must abide by and complies with all regulations on Bank Credit Policy (KPB), Level 2 Credit Policy (2a and 2b) for Global and Business Banking, Level 3 Credit Policy for Global Banking and Business Banking, circular (SE), and prevailing BI/OJK and government regulations.
- CC coordinates with the Asset & Liability Committee in credit financing.

In total, Credit Committee organized 101 meetings in 2016, consisting of 50 CC 1 & 2 meetings and 50 CC 3 meetings.

Komite Pendukung Direksi Board of Directors Supporting Committee

KOMITE RESTRUKTURISASI KREDIT

Dalam rangka menunjang proses penyelamatan dan penyelesaian kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan *four-eyes principles*, maka Bank perlu menetapkan Wewenang Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit. Hal ini juga merupakan rekomendasi dari Komisi Pemantau Risiko dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris pada tanggal 24 Juni 2016 dan 25 Juli 2016.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE.2016.017/DIR RISK MGMT tentang Wewenang Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit tanggal 1 Agustus 2016, berikut adalah Struktur dan Keanggotaan Komite Restrukturisasi Kredit:

CREDIT RESTRUCTURING COMMITTEE

To support the process of credit recovery and settlement with due observance to the four-eye principle, the Banks needs to establish the Authority for Credit Recovery and Settlement. This was also the recommendation of the Risk Oversight Committee approved by the BOC on 24 June 2016 and 25 July 2016.

Pursuant to Circular Letter Number SE.2016.017/DIR RISK MGMT concerning the Authority of Credit Recovery and Settlement dated 1 August 2016, the Credit Restructuring Committee (CRC) has the following structure and membership:

Struktur Structure	Komite Restrukturisasi Kredit (KRK) 1 CRC 1	Komite Restrukturisasi Kredit (KRK) 2 CRC 2
Ketua Chairman	Presiden Direktur President Director	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director
Alternate Ketua Alternate Chairman	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director	Country Credit Officer Country Credit Officer
Anggota Members	Presiden Direktur President Director Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director Direktur Bisnis 1 ¹⁾ Business Director 1 ¹⁾ Direktur Bisnis 2 ²⁾ Business Director 2 ²⁾ Direktur Keuangan (CFO) Finance Director (CFO) Country Credit Officer Country Credit Officer Head, <i>related LOB</i> /Head, CFS Asset Quality Head, <i>related LOB</i> /Head, CFS Asset Quality Management/ Head, GB Remedial Management/ Head, GB Remedial	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director Direktur Bisnis 1 Business Director 1 Direktur Bisnis 2 Business Director 2 Direktur Keuangan (CFO) Finance Director (CFO) Country Credit Officer Country Credit Officer Head, <i>related LOB</i> /Head, CFS Asset Quality Management/ Head, GB Remedial Quality Management/ Head, GB Remedial
Kuorum Rapat Meeting Quorum	Ketua + 2 Direktur Bisnis Chairperson + 2 business directors	Ketua + 2 Direktur Bisnis Chairperson + 2 business directors
Undangan Tetap Permanent Invitees	Perwakilan unit bisnis 1 tingkat di bawah Direktur Business unit representatives, 1 level below the Director	
Undangan Tidak Tetap Non-Permanent Invitees	Sesuai kebutuhan komite As required by the committee	
¹⁾ Direktur Bisnis 1 saat ini adalah Direktur yang membawahi Global Banking ²⁾ Direktur Bisnis 2 saat ini adalah Direktur yang membawahi SME, Business Banking & Retail Banking ¹⁾ Business Director 1 at present is the Director supervising Global Banking ²⁾ Business Director 2 at present is the Director supervising SME, Business Banking & Retail Banking		

Komite Pendukung Direksi

Board of Directors Supporting Committee

Tujuan

Melakukan evaluasi serta memberikan keputusan atas agenda di bawah ini:

- Restrukturisasi pinjaman dalam rangka penyelamatan kredit (mulai kolektibilitas 2).
- Pengambilalihan atau penyerahan Aset/Jaminan (*asset settlement*/AYDA).
- Penjualan/Transfer Kredit, Surat Berharga dan AYDA (*asset disposal*).
- Hapus Buku dan Hapus Tagih.
- Melakukan *update* terhadap debitur yang ditangani oleh tim Remedial maupun debitur yang masuk dalam program restrukturisasi kredit.
- Memo persetujuan lainnya (perubahan atas struktur pinjaman; jumlah pinjaman; jangka waktu; *terms & conditions*; agunan/jaminan; *pricing*; dll.).

Tugas dan Tanggung Jawab

- Komite menyetujui atau menolak permohonan penyelesaian serta penyelamatan kredit / surat berharga bermasalah.
- Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 baik Global Banking maupun Business Banking, Kebijakan Kredit Tingkat 3 baik Global Banking maupun Business Banking, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.

Total Rapat Komite Restrukturisasi Kredit selama tahun 2016 adalah 52 rapat yang terdiri dari 41 rapat Komite Restrukturisasi Kredit 1 & 2 serta 11 rapat Komite Restrukturisasi Kredit 3.

Purpose

Evaluate and take decisions pertaining the following matters:

- Restructuring of non-performing loans (starting from collectability 2)
- Asset takeover or asset settlement (AYDA)
- Credit sales/transfer, securities, and AYDA (*asset disposal*).
- Write-off in ledger and in account receivables
- Update debtors handled by Remedial team and debtors in credit restructuring program
- Other approval memo (changes to credit structure; amount; tenor; terms & conditions; collateral; pricing; etc.)

Roles and Responsibilities

- Give decisions on recovery and settlement of non-performing credit and securities
- Comply with and follow all abide by all regulations on Bank Credit Policy (KPB), Level 2 Credit Policy for Global and Business Banking, Level 3 Credit Policy for Global Banking and Business Banking, circular (SE), and prevailing BI/OJK and government regulations.

In total, CRC organized 52 meetings in 2016, consisting of 41 CRC 1 & 2 meetings and 1 CRC 3 meetings.

Komite Pendukung Direksi Board of Directors Supporting Committee

IMPAIRMENT COMMITTEE (KOMITE PENURUNAN NILAI)

Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan proses *monitoring* atas portofolio kredit diberikan dan surat berharga yang mengalami penurunan nilai dan pengaruhnya terhadap laporan laba rugi Bank setiap periodenya, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu komite tersendiri untuk membahas secara detail Implikasi keuangan dari akun-akun tersebut. Definisi dan kriteria kredit dan surat berharga yang mengalami penurunan nilai adalah mengacu pada definisi dan kriteria yang ditetapkan dalam Kebijakan dan Manual Akuntansi PSAK 50 & 55 (Revisi 2006) – Kredit diberikan Bank Umum Non Syariah dan Kebijakan dan Manual Akuntansi PSAK 50 & 55 (Revisi 2006) – Surat Berharga Bank Umum Non Syariah atau kebijakan penggantinya. Komite Penurunan Nilai ini pembentukannya telah mendapatkan persetujuan direksi melalui rapat direksi tanggal 21 Januari 2015.

Tujuan

Tujuan pembentukan Komite Penurunan Nilai adalah untuk menentukan implikasi keuangan dari penurunan nilai (*impairment*) atas kredit diberikan dan surat berharga yang signifikan, termasuk didalamnya proses mitigasinya.

Struktur dan Keanggotaan Komite Penurunan Nilai:

IMPAIRMENT COMMITTEE

Background

To improve the monitoring process of credit portfolios and impaired securities, and its impact on the Bank's financial report in each period, the Bank's considers it necessary to establish a committee dedicated to discuss in details the financial implication led by these accounts. The definition and criteria for credits and securities with impairment refer to those established in Accounting Policies and Procedure PSAK 50 Financial Instrument: Presentation and Disclosure (Revised 2006) and PSAK 55 Financial Instrument: Recognition and Measurement (Revised 2006). The establishment of Impairment Committee was approved by the Board of Directors in the meeting on 21 January 2015.

Purpose of Establishment

The purpose of this committee is to determine the financial implications of significant credits and securities impairments, including the mitigation process.

Structure and Membership of Impairment Committee

Anggota Member	
Ketua Chairman	Direktur Keuangan Financial Director
Anggota - Bisnis Unit Member - Business Unit	<u>Global Banking</u> Direktur Perbankan Global Global Banking Director <i>Head, Client Coverage</i> <i>Head, Business, Planning and Performance Management</i>
	<u>Community Financial Services</u> Direktur Community Financial Services Community Financial Services Director Head, Business Banking Quality Management Head, Quality Assurance & Special Asset Management Head, Retail Banking Head, Business Intelligence and Analytic
Anggota – Risk Management Member – Risk Management	Direktur, Risk Management Head, Credit Review Management Head, Retail Credit Policy and Portfolio Management Head, Market and Liquidity Risk Management
Anggota – Finance Member – Finance	Head, Finance and Accounting Head, Financial Planning, Performance Management & Reporting
Anggota Tetap Per Tiga Bulanan	
Anggota Bisnis Unit	Head, Global Market
Anggota Risk Management	Head, Market and Liquidity Risk Management
Sekretariat	
Sekretariat	Finance Operation, Head

Komite Pendukung Direksi

Board of Directors Supporting Committee

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Penurunan Nilai

- Setiap akun debitur yang diajukan penurunan nilai akan didiskusikan secara detail antara risk dan bisnis unit, dan perbedaan pendapat yang ada akan didiskusikan bersama dalam rapat komite ini.
- Setiap keputusan yang dibuat dalam rapat komite harus dirangkum dan ditandatangani oleh Ketua Komite.
- Setiap keputusan yang dimasukkan dalam risalah rapat harus ditindaklanjuti oleh setiap unit kerja terkait
- Berdasarkan hasil diskusi, Ketua Komite akan memastikan bahwa cadangan penurunan nilai dibentuk berdasarkan PSAK 55.

Proses Rapat Komite Penurunan Nilai

- Rapat akan diadakan setiap bulan, paling lambat 1 minggu sebelum akhir bulan.
- Dalam hal anggota komite tidak hadir, maka anggota terkait diperbolehkan menunjuk perwakilan masing-masing dengan persetujuan dari Ketua Komite.
- Keputusan dapat diambil jika dihadiri oleh Ketua Komite, dan minimal 1 anggota dari masing-masing anggota bisnis unit setiap segment, anggota Risk Management dan anggota Finance.
- Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka Ketua Komite akan digantikan oleh Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi untuk memimpin rapat.

Selama tahun 2016, diselenggarakan rapat Komite Penurunan Nilai sebanyak 11 (sebelas) kali.

Agenda Rapat

Agenda bulanan:

1. Estimasi beban CKPN bulan sebelumnya dan realisasinya
2. Estimasi penurunan nilai kredit diberikan:
 - Perbankan Ritel
 - Perbankan Bisnis
 - Perbankan Global

Agenda 3-bulanan:

1. Estimasi beban CKPN bulan sebelumnya dan realisasinya
2. Estimasi penurunan nilai kredit diberikan:
 - Perbankan Ritel
 - Perbankan Bisnis
 - Perbankan Global
3. Estimasi penurunan nilai surat berharga

Tanggung Jawab Sekretariat

- Membuat dan mengirimkan undangan rapat serta menyusun agenda rapat
- Menyiapkan bahan-bahan rapat
- Mendokumentasikan hasil rapat dalam risalah rapat, mendistribusikan dan mengadministrasikan risalah rapat

Impairment Committee Roles and Responsibilities

- Every debtor's account proposed to be impaired shall be discussed in details between risk and business units; any different opinion will be discussed together in the committee meeting.
- Every decision made in the committee meeting must be summarized and signed by the Chairman of the Committee.
- Every decision recorded in Minutes of Meeting must be followed up by every related working unit.
- In regard to the result of the discussion, the Chairman will ensure that the allowance for impairment has been provided according in accordance to PSAK 55.

Committee Meeting Process

- Meetings will be held every month, 1 week before the end of the month at the latest.
- In the absence of a committee member, a substitute can be delegated with the approval of the Chairman.
- Decisions can be made if the meeting is attended by the Chairman and 1 member from every business unit of every segment, Risk Management member and Finance member.
- In the absence of the Chairman, Head of Finance and Accounting Unit will be appointed to lead the meeting.

Impairment Committee Meetings in 2016

Meeting Agenda

Monthly Agenda:

1. Loan-loss provisioning estimation and realization of the month before.
2. Credit impairment estimation:
 - Retail Banking,
 - Business Banking,
 - Global Banking.

Quarterly Agenda:

1. Loan-loss provisioning estimation and realization of the month before,
2. Credit impairment estimation:
 - Retail Banking,
 - Business Banking,
 - Global Banking.
3. Securities impairment estimation.

Secretariat Responsibilities

- Preparing and distributing meeting invitations and preparing meeting agenda.
- Preparing meeting materials.
- Documenting Minutes of Meeting to be distributed and administered.

Komite Pendukung Direksi Board of Directors Supporting Committee

HUMAN CAPITAL COMMITTEE

Latar Belakang

MBI telah melakukan perubahan kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkesinambungan yang merupakan rangkaian kebijakan integral dalam upaya mendukung transformasi Bank dalam mencapai aspirasi di tahun 2020. Kemudian, sebagai upaya untuk mendorong terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik melalui suatu mekanisme pengendalian dan implementasi kebijakan strategis di bidang organisasi, *compensation* dan *benefit*, dan *Talent Management* dibutuhkan fungsi *supervisory/advisory* untuk memberikan arahan-arahan strategis dan pengambilan keputusan-keputusan penting dalam hal tersebut serta kebijakan baru menuju pemberdayaan SDM di MBI dan pokok persoalan kunci di bidang SDM yang memiliki implikasi risiko keuangan dan/atau reputasi organisasi.

Dengan menimbang hal-hal tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.2015.001/PRES DIR tanggal 5 Februari 2015, dibentuk Komite Human Capital.

Tujuan Pembentukan

1. Membentuk Komite Human Capital yang bertujuan untuk membantu Direksi dalam memberikan arahan strategis di bidang SDM di MBI maupun anak perusahaan, antara lain pada bidang:
 - a) Kebijakan umum tentang ketenagakerjaan
 - b) Kompensasi & benefit karyawan (kenaikan gaji, bonus, program retensi, benefit, dan lainnya)
 - c) Manajemen Penilaian Kinerja
 - d) Manajemen *Talent* (Identifikasi *talent*, perencanaan suksesi, program pengembangan *talent*)
 - e) Framework dan rencana program pelatihan dan pengembangan karyawan
 - f) Struktur organisasi dan jenjang kepangkatan
 - g) Pengembangan iklim kerja yang baik
 - h) Pengembangan budaya perusahaan
 - i) Pengembangan hubungan karyawan & perseroan
 - j) Penunjukan dan pemberhentian Pejabat Eksekutif termasuk tindakan yang akan diambil sehubungan dengan adanya tindakan indisipliner serta pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Eksekutif
 - k) Penyelarasan kebijakan dan sinergi SDM dengan anak perusahaan
2. Anggota Komite Human Capital adalah seluruh anggota Direksi.

HUMAN CAPITAL COMMITTEE

Background

MBI has established sustainable changes to Human Capital policies as an integral part of the organization's policies in order to support the Bank's transformation to achieve its aspiration by the year of 2020. Moreover, as an effort to encourage the implementation of good corporate governance with control mechanism and the implementation of strategic policies, compensation and benefit, and Talent Management, a supervisory/advisory is required to provide strategic directives and important decision-making on Human Capital matters, as well as new policies related to MBI's Human Capital empowerment, and other core issues in Human Capital which may affect the organization's financial risk and/or reputation risk.

Considering these matters, Human Capital Committee was established by virtue of Decision Letter of Board of Directors No. SK.2015.001/PRES DIR, 5 February 2015.

Purpose of Establishment

1. The purpose of establishing Human Capital Committee is to facilitate the Board of Directors in providing strategic directives concerning MBI and subsidiary companies' Human Capital matters, among others:
 - a) General employment policies,
 - b) The employees' compensation and benefit (pay raise, bonus, retention program, benefit, etc.),
 - c) Performance Assessment Management,
 - d) Talent Management (talent identification, succession planning, talent development program),
 - e) Employees' training and development program's framework and arrangement,
 - f) Organizational structure and position levels,
 - g) A positive work climate enhancement,
 - h) Corporate culture development,
 - i) Employee relations development,
 - j) The appointment and termination of an Executive Officer, which will be executed in the event of indiscipline and misconduct.
 - k) The alignment of Human Capital policies and synergy with subsidiary companies.
2. Members of Human Capital Committee are all members of the Board of Directors.

Komite Pendukung Direksi

Board of Directors Supporting Committee

Susunan Komite Human Capital

- Presiden Direktur sebagai Ketua merangkap Anggota
- Direktur Human Capital sebagai Anggota
- Direktur Retail Banking sebagai Anggota
- Direktur Global Banking sebagai Anggota
- Direktur Business Banking sebagai Anggota
- Direktur Finance sebagai Anggota
- Direktur Operations & IT sebagai Anggota
- Direktur Risk Management sebagai Anggota
- Direktur Legal, Compliance & Sekretaris Perusahaan sebagai Anggota
- Eksekutif Human Capital MBI sebagai Sekretaris/Notulis

Tugas dan tanggung jawab Komite Human Capital

- Menyediakan arahan tingkat tinggi dengan mempertimbangkan kebijakan *Human Capital* yang strategis dan arahan untuk mempengaruhi kegiatan organisasi bank dan sumber daya manusia di dalamnya.
- Membuat keputusan bagi Pejabat Eksekutif dan mengatur program pengembangan untuk Pejabat Eksekutif serta Pegawai *talent*
- Menyediakan arahan dan membuat keputusan strategis atas kebijakan berkaitan dengan Human Capital.

Data Rapat Komite Human Capital Selama Tahun 2016

Selama tahun 2016, diselenggarakan Rapat Komite Human Capital sebanyak 12 (dua belas) kali dengan ringkasan agenda sebagai berikut:

No	Tanggal Date	Agenda
1	11 Januari 2016	1. 2016 MPP 2. Pacman Project
2	25 Januari 2016	1. Manpower Planning & Organization Structure 2. Pacman Project 3. Collective Labour Agreement 4. Performance Bonus & Salary Increase 5. Employee award Night 6. Other : Tiger Camp , MCP Succession Plan
3	10 Februari 2016	1. Agenda & Matters Arising 2. Outsourcing : - General Services - OB & Massanger
4	22 Februari 2016	1. Agenda & Matters Arising 2. Performance Distribution Curve 3. Performance Calibration Band F and above 4. Other : Promotion band F and above

Structure and Membership of Human Capital Committee

- President Director as Chairman and Member
- Human Capital Director as Member
- Retail Banking Director as Member
- Global Banking Director as Member
- Business Banking Director as Member
- Finance Director as Member
- Operations & IT Director as Member
- Risk Management Director as Member
- Legal & Compliance Director and Corporate Secretary Director as Member
- MBI's Human Capital Executive as Secretary

Human Capital Committee Roles and Responsibilities

- Providing high level directives by taking into account Human Capital's strategic policies and directives to improve the Bank's organizational activities and its Human Capital.
- Making decisions for Executive Officers and arranging a development program for Executive Officers and talented employees.
- Providing directives and making strategic decisions for policies concerning Human Capital.

Human Capital Committee Meetings During 2016

During 2016, there were 12 (twelve) Human Capital Meetings held with following agenda summary:

Komite Pendukung Direksi

Board of Directors Supporting Committee

No	Tanggal Date	Agenda
5	14 Maret 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agenda & Matters Arising 2. Bonus & Merit Increase 3. PIP – New Scheme 4. 2016 Learning Plan 5. Next generation leaders Program 6. BOD Succession planning 7. Other : matters arising
6	05 April 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opening agenda 2. JEC Charter 3. Promotion & Retention 4. BOD Succession planning 5. Other : pergantian sekretaris HCC
7	10 Mei 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agenda & Matters Arising 2. Retention 3. CESOS & CRSU 4. Job Evaluation & Promotion 5. HC System Migration
8	07 Juni 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. RD Company Car 2. PSAK 24 3. Outsourcing 4. Attrition 5. Funding salesfoce by Segment 6. Pacman & United Update
9	09 Agustus 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asuransi kesehatan 2. JEC 1 3. Appeal JEC2 Result – Shariah 4. Renovasi Wisma Kodel & Break Out Area Lt 16 5. Outsourcing Update 6. Attrition Update 7. Other : <ul style="list-style-type: none"> - RD Company car - New PTKP Implementation - Mid Year Review update
10	13 September 2016 (HCC Khusus)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi EVP
11	11 Oktober 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan anggota komite DPLK dana pesangon 2. Employee engagement survey (EES) 3. Country talent review 4. Renovasi wisma kodel 5. Promotion Band F2 Keatas 6. Employee Loan
12	14 November 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Promotion Oktober 2016 2. Job Evaluation 1

Komite Pendukung Direksi

Board of Directors Supporting Committee

PERSONNEL COMMITTEE

Latar Belakang

Personnel Committee adalah komite yang dibentuk guna melakukan *review* dan memberikan rekomendasi terkait pemberian sanksi, yang berhubungan dengan pelanggaran/kesalahan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai pemberian Sanksi dan/atau *fraud* dan/atau pelanggaran/ kesalahan lainnya yang belum diatur atau dibutuhkan analisa dari beberapa pandangan ahli (narasumber) kepada karyawan pada semua tingkatan dan/atau jabatan.

Rekomendasi *Personnel Committee* bersifat *collective collegial* yang mengikat dan harus dijalankan dengan penuh amanat oleh Unit Kerja terkait.

Pembentukan Personnel Committee ini mengacu pada :

- 1) Perjanjian Kerja Bersama PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
- 2) Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
- 3) Surat Edaran Direksi No.SE.2016.006/PRES DIR tanggal 28 Maret 2016 perihal Kebijakan dan Prosedur Penerapan Strategi Anti *Fraud*.
- 4) Surat Edaran Direksi No.SE.2015.003/DIR HC tanggal 27 Pebruari 2015 perihal Mengenal Karyawan Anda/ *Know Your Employee*.
- 5) Surat Edaran Direksi No.SE.2013.004/DIR COMPLIANCE tanggal 24 Juli 2013 perihal Kewajiban Menyampaikan Informasi Adanya Indikasi Pelanggaran (*Whistleblowing*).
- 6) Surat Edaran Direksi No.SE.2007.002/Director6 tanggal 01 Februari 2007 Perihal Standar Operating Prosedur (SOP) Pemberian Sanksi.

Tugas dan Tanggung Jawab

- Melakukan analisa/ *review* terhadap rencana pemberian sanksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran atau *Fraud*, didasarkan atas salah satunya hasil laporan Investigasi oleh Unit Kerja Anti Fraud atau SKAI.
- Memberikan rekomendasi kepada unit kerja terkait, berupa jenis sanksi yang akan dikenakan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran.
- Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi yang telah disampaikan.
- Menyampaikan laporan hasil *monitoring* dan evaluasi, kepada *Board of Director* (BOD) secara periodik.

PERSONNEL COMMITTEE

Background

Personnel Committee is established to review and provide recommendations on sanctions imposed on violations/ breaches sanctions imposed on employees across levels and/or position as stipulated under rules on s and/or fraud and/or violations/other breaches that are not yet specified or requiring expert (resource persons) analysis.

Recommendations from the Personnel Committee are collective collegial recommendations that are binding and must be implemented by relevant working units.

The establishment of Personnel Committee refers to:

- 1) Collective Labor Agreement of PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
- 2) Code of Ethics and Code of Conduct of PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
- 3) BOD Circular No.SE.2016.006/PRES DIR dated 28 March 2016 on Procedures to Develop Anti-Fraud Policy and Strategy
- 4) BOD Circular No.SE.2015.003/DIR HC dated 27 February 2015 on Know Your Employee
- 5) BOD Circular No.SE.2013.004/DIR COMPLIANCE dated 24 July 2013 on the Obligation to Report Indicated Violations (Whistleblowing)
- 6) BOD Circular No.SE.2007.002/Director6 dated 1 February 2007 on Standard Operating Procedure (SOP) on the Imposition of Sanctions.

Committee Roles and Responsibilities

- Analyze/review proposed sanctions on an employee committing a violation or fraud based on, among others, investigation report from Anti-Fraud Unit or SKAI.
- Recommend the types of sanctions imposed on an employee committing a violation to the relevant work unit.
- Monitor and evaluate the follow-up of recommendations.
- Submit periodical monitoring and evaluation report to the BOD.

Komite Pendukung Direksi Board of Directors Supporting Committee

- Melakukan pengkajian secara kuartal terkait pelanggaran dan pemberian sanksi yang dikenakan kepada karyawan selama periode tertentu.

Kewenangan

- Dalam memberikan rekomendasi jenis sanksi, Personnel Committee wajib tetap merujuk kepada :
 - Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
 - Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - PBI No. 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan SE BI No.15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang APU dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi Bank Umum;
 - SE BI No.13/28/DPNP tanggal 09 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum;
 - Perjanjian Kerja Bersama PT Bank Maybank Indonesia, Tbk;
 - Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku PT Bank Maybank Indonesia, Tbk;
 - Surat Edaran Direksi No.SE.2007.002/DIR6 tanggal 01 Februari 2007 Perihal Standar Operating Prosedur (SOP) Pemberian Sanksi;
 - Surat Edaran Direksi No.SE.2016.006/PRESDIR tanggal 28 Maret 2016 perihal Kebijakan dan Prosedur Penerapan Strategi Anti *Fraud*;
 - Ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Personnel Committee dapat memberikan teguran baik kepada unit kerja terkait atau Human Capital – Employee Relations & Health Safety yang tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, dan mencantumkan teguran tersebut dalam laporan hasil *monitoring* dan evaluasi yang akan disampaikan kepada BOD.

Komposisi Komite

- Komposisi Komite adalah sebagai berikut :
 - Ketua : Direktur Human Capital
 - Sekretaris : Head of Employee Relations & Health Safety
 - Anggota Tetap : Employee Relations, Head of Business Human Capital, Business Human Capital terkait, dimana kasus karyawan terjadi. Pimpinan Unit Kerja terkait, dimana kasus karyawan terjadi.

- Review on quarterly basis violations and sanctions imposed on employees during a certain period.

Authority

- In recommending types of sanctions, the Personnel Committee complies with:
 - Banking Law No. 10 of 1998
 - Labor Law No. 13 of 2003
 - PBI No. 14/27/PBI/2012 dated 28 December 2012 and SEBI No.15/21/DPNP dated 14 June 2013 on the Implementation of Anti-Money Laundering (AML) and Countering Financing for Terrorism (CFT) in Commercial Banks;
 - SE BI No.13/28/DPNP dated 09 December 2011 on the Implementation of Anti-Fraud Strategy in Commercial Banks;
 - Collective Labor Agreement of PT Bank Maybank Indonesia, Tbk;
 - Code of Ethics and Code of Conduct of PT Bank Maybank Indonesia, Tbk;
 - BOD Circular No.SE.2007.002/Director6 dated 1 February 2007 on Standard Operating Procedure (SOP) on the Imposition of Sanctions;
 - BOD Circular No.SE.2016.006/PRESDIR dated 28 March 2016 on Procedures to Develop Anti-Fraud Policy and Strategy;
 - Other prevailing laws and regulations.
- Personnel Committee may reprimand relevant work units or the Human Capital – Employee Relations & Health Safety that fail to follow-up the Committee's recommendations and to state the reprimand in the monitoring and evaluation report to BOD.

Committee's Membership

- The Committee consists of:
 - Chairperson: Human Capital Director
 - Secretary: Head of Employee Relations & Health Safety
 - Permanent Member: Employee Relations, Head of Business Human Capital Relevant Business Human Capital where breach occurs Leader(s) of relevant work units where breach

Komite Pendukung Direksi

Board of Directors Supporting Committee

- Narasumber dan/ atau undangan:
 - Unit Kerja Anti Fraud;
 - Unit Kerja Operation Risk & Business Continuity;
 - Unit Kerja General Legal Counsel;
 - Unit Kerja Compliance Monitoring & Training;
 - Unit Kerja Anti Money Laundering & Assurance;
 - Unit Kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
- Resource persons/Invitees:
 - Anti Fraud Unit;
 - Operation Risk & Business Continuity Unit;
 - General Legal Counsel Unit;
 - Compliance Monitoring & Training Unit;
 - Anti Money Laundering & Assurance Unit;
 - Internal Audit Unit (SKAI).

Tugas dan Tanggung Jawab:

Ketua:

- Memimpin rapat komite.
- Menentukan narasumber yang akan diikutsertakan dalam rapat komite.
- Memberikan arahan pembahasan dan mendorong munculnya ide melalui *brainstorming* kepada anggota dan narasumber yang diundang sebelum membuat keputusan rekomendasi.
- Mendorong dan mengarahkan keputusan dan/ atau rekomendasi *collective collegial* dalam menetapkan jenis sanksi yang akan direkomendasikan dengan menekankan kepentingan dan dampak dari pelanggaran yang terjadi.
- Bersama seluruh peserta rapat, menandatangani risalah rapat.
- Bersama sekretaris, menandatangani rekomendasi yang ditetapkan.
- Menyampaikan rekomendasi yang dikeluarkan Personel Committee kepada Unit Kerja Human Capital - Employee Relations & Health Safety dengan tembusan Board of Director (BOD).
- Memberikan teguran baik kepada unit kerja terkait maupun Human Capital – Employee Relations & Health Safety yang tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, dan mencantumkan teguran itu dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi yang akan disampaikan kepada BOD.
- Bersama Sekretaris:
 - o Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan putusan yang telah disampaikan kepada BOD.
 - o Menandatangani dan menyampaikan laporan hasil *monitoring* dan evaluasi kepada BOD.
- Menyelenggarakan pertemuan komite apabila terdapat permasalahan yang mendesak dan harus didiskusikan serta diputuskan oleh komite.

Roles and Responsibilities:

Chairman:

- Lead committee meetings.
- Decide invitees/resource persons in committee meetings.
- Guide meeting discussion and idea brainstorming of members and resource persons before deliberating the recommendations.
- Encourage and direct collective collegial decision and/or recommendations on types of sanctions by emphasizing on the interests and impacts of breach.
- Sign the Minutes of Meeting (MOM) together with all meeting attendants.
- Sign meeting recommendations together with the secretary.
- Convey the recommendations of the Personnel Committee to Human Capital - Employee Relations & Health Safety with copy to the BOD.
- Reprimand relevant work units or the Human Capital – Employee Relations & Health Safety that fail to follow-up the Committee's recommendations and to state the reprimand in the monitoring and evaluation report to BOD.
- Together with the Secretary:
 - o Monitor and evaluate follow-up on decisions as reported to the BOD.
 - o Sign and submit monitoring and evaluation report to the BOD.
- Convene a committee meeting for urgent issues that require immediate discussion and deliberation by the committee.

Komite Pendukung Direksi Board of Directors Supporting Committee

Sekretaris:

- Mengatur kalender kegiatan untuk pertemuan komite.
- Menyampaikan undangan rapat kepada semua peserta rapat komite, menjelaskan mengenai jadwal rapat meliputi tanggal, waktu, tempat, dan tujuan dari rapat komite yang diadakan.
- Undangan tersebut harus disampaikan kepada anggota komite dan narasumber yang diundang paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pertemuan berlangsung, kecuali untuk masalah mendesak yang diminta oleh Ketua.
- Mencatat resolusi rapat dalam risalah rapat, yang harus meliputi agenda, catatan penting diskusi, semua rekomendasi yang disampaikan, analisa dan pendapat dari semua anggota dan narasumber yang diundang.
- Bersama Ketua, menandatangani rekomendasi yang ditetapkan.
- Bersama seluruh peserta rapat, menandatangani risalah rapat.
- Bersama Ketua:
 - o Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan sanksi hasil putusan Personnel Committee kepada BHC terkait sanksi yang harus dilaksanakan oleh unit kerja bersangkutan.
 - o Menandatangani laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada BOD.

Anggota:

- Wajib hadir dan berpartisipasi aktif dalam rapat.
- Memberikan paparan, fakta, opini, referensi yang relevan dan pemahaman terhadap kasus yang dibahas dan dimintakan pendapatnya.
- Menganalisa dan memberikan pendapat dengan menekankan kepentingan dan dampak dari pelanggaran yang terjadi, serta merekomendasikan jenis hukuman/sanksi yang akan diberikan.
- Dapat mengajukan pertemuan melalui Ketua atau Sekretaris apabila ada permasalahan mendesak yang harus didiskusikan dan diputuskan oleh komite.
- Melakukan kontrol terhadap pelaksanaan hasil putusan yang diputuskan di Personnel Committee.
- Bersama seluruh peserta rapat, menandatangani risalah rapat

Secretary

- Arrange and schedule committee meeting
- Distribute meeting invitations to all attendants, informing the date, time, location, and purpose of meeting.
- The invitation must be circulated to each member and invitees at least 5 (five) working days before the date of the meeting with the exception of urgent matters informed by the Chairperson.
- Record all meeting resolutions in the MOM. MOM contains details of agenda items, important discussion points, recommendations, analysis, and opinions from all members and invitees.
- Sign the recommendations of the meeting together with the Chairperson.
- Sign the MOM together with all meeting attendants.
- Together with the Chairperson:
 - o Monitor and evaluate sanction imposition in relevant BHC pursuant to Personnel Committee decisions
 - o Sign the monitoring and evaluation report to be submitted to BOD.

Members:

- Attend and take active participation in the meeting.
- Provide explanation, facts, opinions, references, and insights relevant to the case.
- Analyze and provide his/her opinion with emphasis on the interests and impacts of violation and recommend the types of sanctions.
- Propose for a meeting through the Chairperson or Secretary in the event of urgent matters requiring the committee's discussion and deliberation.
- Perform control over the implementation of decisions of Personnel Committee.
- Sign the MOM together with all meeting attendants

Komite Pendukung Direksi

Board of Directors Supporting Committee

Narasumber yang diundang:

- Wajib hadir dan berpartisipasi aktif dalam rapat sesuai dengan undangan.
- Memberikan paparan, fakta, opini, referensi dan pemahaman terhadap kasus yang sedang dibahas.
- Menganalisa dan memberikan pendapat dengan menekankan kepentingan dan dampak dari pelanggaran yang terjadi.
- Tidak memberikan keputusan dalam merekomendasikan jenis pemberian sanksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran.
- Bersama seluruh peserta rapat, menandatangani risalah rapat.

Pelaksanaan Pemberian Sanksi

- Pelaksanaan pemberian sanksi atau tindakan lainnya yang diputuskan di Personnel Committee, selambat-lambatnya harus sudah dilaksanakan 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan Personnel Committee yang dituangkan di dalam MoM ditandatangani.
- Business Human Capital terkait wajib segera mengkoordinir Pimpinan Unit Kerja untuk melaksanakan sanksi berdasarkan hasil putusan Personnel Committee terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran, terkait sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja, Business Human Capital wajib segera berkoordinir dengan Human Capital – Employee Relation & Health Safety terhadap implementasinya.

Selama tahun 2016, terdapat penyelenggaraan Rapat Personnel Committee sebanyak 4 (empat) kali.

Resource persons:

- Attend and take active participation in the meeting to which he/she is invited.
- Provide explanation, facts, opinions, references, and insights relevant to the case.
- Analyze and provide his/her opinion with emphasis on the interests and impacts of violation.
- Refrain from deliberating and recommending types of sanctions to an employee committing a breach.
- Sign the MOM together with all meeting attendants.

Imposition of Sanctions

- Sanction or other measures decided by the Personnel Committee shall be executed no later than 7 (seven) working days after the decision is recorded in the MOM and signed.
- Relevant Business Human Capital must coordinate with Leader(s) of Work Units to execute the sanction pursuant to the decision of the Personnel Committee on employees committing a breach. In the event of Employment Termination, Relevant Business Human Capital must coordinate immediately with Capital – Employee Relation & Health Safety for its implementation.

In 2016, the Personnel Committee organized 4 (four) meetings.

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dewan Komisaris juga turut serta dalam melakukan pemantauan atas efektivitas implementasi tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank.

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan dibantu oleh 4 (empat) komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Anggota Dewan Komisaris diangkat melalui RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris beranggotakan para profesional yang berpengalaman dalam industri perbankan. Dewan Komisaris berkomitmen untuk melaksanakan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip etika dan moral secara bersungguh-sungguh.

Komposisi Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum adalah Bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi serta paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di Indonesia.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 22 April 2016, susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Nama Name	Jabatan Position	Kewarganegaraan Citizenship	Domisili Domiciled in
Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	Presiden Komisaris President Commissioner	Malaysia	Kuala Lumpur, Malaysia
Datuk Abdul Farid Bin Alias	Komisaris Commissioner	Malaysia	Kuala Lumpur, Malaysia
Spencer Lee Tien Chye	Komisaris Commissioner	Malaysia	Singapore
Umar Juoro	Komisaris Independen Independent Commissioner	Indonesia	Jakarta, Indonesia
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen Independent Commissioner	Indonesia	Jakarta, Indonesia
Achjar Iljas	Komisaris Independen Independent Commissioner	Indonesia	Jakarta, Indonesia

The Board of Commissioners (BOC) is the Bank's organ with general and/or specific oversight responsibilities pursuant to Articles of Association. It provides advice to the Board of Directors concerning the Board of Directors' performance of duties and responsibilities and is involved in overseeing corporate governance activities across the Bank's business endeavors and levels.

BOC works independently in performing its responsibilities. In terms of oversight, BOC is assisted by 4 (four) committees: Audit Committee, Risk Oversight Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Integrated Governance Committee.

Members of the BOC are appointed by the GMS based on the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee. The BOC consists of experienced banking professionals. The BOC is committed to good corporate governance and transparency and upholds good ethics and moral principles.

The membership of BOC observes Financial Services Authority Regulations (POJK) Number 55/POJK.03/2016 concerning Good Corporate Governance Implementation in Commercial Banks, which stipulates that a bank is required to have at least 3 (three) Commissioners and that the number of commissioners may not exceed the number of its members of Board of Directors. At least 1 (one) commissioner is domiciled in Indonesia.

Pursuant to Annual General Meeting of Shareholders on 22 April 2016, the BOC's membership is as follows:

Number and Composition of BOC

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah melalui proses seleksi *fit and proper test* Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dinyatakan lulus *fit and proper test* serta memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria yaitu memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Adapun, penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Per 31 Desember 2016, jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 6 (enam) orang dengan komposisi 1 (satu) orang Presiden Komisaris, 2 (dua) orang Komisaris Non Independen dan 3 (tiga) orang yang merupakan Komisaris Independen. Salah satu dari 3 (tiga) orang Komisaris Independen terdapat 1 (satu) orang Komisaris Independen wanita.

Berdasarkan POJK Nomor 55//POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, jumlah tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu

Rangkap Jabatan

Berdasarkan POJK Nomor 55//POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum diatur bahwa anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank dan pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Adapun, rangkap jabatan tidak termasuk dalam hal anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank serta Komisaris Non Independen yang menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank juga anggota Dewan Komisaris yang menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Per 31 Desember 2016, Dewan Komisaris telah mengungkapkan rangkap jabatan yang dimiliki dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani dan tidak ada Dewan Komisaris yang memiliki rangkap jabatan diluar dari yang diperbolehkan dalam POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

All members of the BOC have undertaken and passed mandatory fit and proper test administered by Bank Indonesia/Financial Services Authority according to prevailing regulations. They have also obtained approval letter from Bank Indonesia/Financial Services Authority. With respect to this, all members of the BOC have met the criteria of having sound integrity, competence, and financial reputation. Replacement and/or appoint of the members of BOC observe the recommendations from Nomination and Remuneration Committee.

Number and Composition of BOC

As per 31 December 2016, the BOC consists of 6 (six) Commissioners – 1(one) President Commissioner, 2 (two) Commissioners, and 3 (three) Independent Commissioners. One of the 3 (three) Independent Commissioners is female.

Pursuant to POJK Nomor 55//POJK.03/2016 concerning Good Corporate Governance Implementation in Commercial Banks, the number of Commissioners has conformed with the regulation's provisions.

Concurrent Positions

POJK Nomor 55//POJK.03/2016 concerning Good Corporate Governance Implementation in Commercial Banks stipulates that members of BOC are not allowed to serve concurrently as members of BOD, BOD, or Executive Officers in other financial institution or company, bank and non-bank, and in more than 1(one) non-financial institutions and companies domiciled in and outside of Indonesia.

However, concurrent position provisions allow a BOC member to serve concurrent position as member of BOD, BOC, or Executive Officer tasked with oversight function in 1 (one) non-bank subsidiary company controlled by the Bank; as Commissioner tasked with functional responsibilities of the Bank's owner that is a legal entity in the business group; and as member of BOC in non-profit organizations.

As per 31 December 2016, the BOC has disclosed the details of their concurrent positions by virtue of signed Statement Letter. No members of BOC maintain concurrent positions other than the positions allowed by POJK on Good Corporate Governance Implementation in Commercial Banks.

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen

Berdasarkan POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

Sementara, Komisaris Non Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen.

Per 31 Desember 2016, Bank Maybank Indonesia memiliki 2 (dua) orang anggota Komisaris Non Independen dan 3 (tiga) orang anggota Komisaris Independen.

Independent and Non-Independent Commissioners

POJK Number 55/POJK.03/2016 Good Corporate Governance Implementation in Commercial Banks defines Independent Commissioner as a member of the BOC that does not have financial, management, and/or shareholding relations with BOD members, other members of BOC, or other forms of relationship with the Bank that may influence the concerned member's ability to act independently.

A Non-Independent Commissioner is a member of the BOC that is not an Independent Commissioner.

Per 31 December 2016, Maybank Indonesia has 2 (two) non-Independent Commissioners and 3 (three) Independent Commissioners.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen Statement of Independent by the Independent Commissioner	Komisaris Independen Independent Commissioners		
	Umar Juoro	Budhi Dyah Sitawati	Achjar Ijas
Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen. Do not have any financial, organizational, share ownership, and/or family relationship with other members of BOC, the BOD and/or the controlling shareholders or other relationship with the Bank which may affect the ability to act independently.	✓	✓	✓

Tugas dan Tanggung Jawab Presiden Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Presiden Komisaris diantaranya adalah :

- Presiden Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana yang dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya;
- Presiden Komisaris bersama-sama seluruh anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menetapkan kerangka kebijakan dan memastikan bahwa Dewan komisaris mendukung strategi yang dirumuskan oleh Perusahaan serta memantau pelaksanaannya;
- Presiden Komisaris memastikan tata tertib dan tata kerja serta mendorong perdebatan yang sehat mengenai isu-isu yang sedang dibahas sehingga mencerminkan tingkat skeptisisme dan independensi Dewan Komisaris;

Duties and Responsibilities of President Commissioner:

The President Commissioner has the following duties and responsibilities:

- Oversight function as tasked to other members of BOC;
- With other members of BOC collectively responsible to set out policy framework, ensure that BOC endorses the strategy defined by the Bank, and monitor strategy implementation;
- President Commissioner ensures rules and work procedures are adopted. President Commissioner also encourages healthy debate on current issues relevant to the Bank to reflect the BOC's level of scepticism and independency.

Dewan Komisaris Board of Commissioners

- d. Presiden Komisaris juga memastikan bahwa jika diperlukan resolusi Dewan Komisaris diputuskan melalui pemungutan suara guna memastikan bahwa keputusan dibuat secara kolektif dan mencerminkan kehendak mayoritas;
- e. Presiden Komisaris memimpin evaluasi terhadap kesesuaian dan efektivitas program perencanaan suksesi untuk tingkat Dewan Komisaris dan Direksi;
- f. Presiden Komisaris juga mendorong hubungan kerja yang sehat dengan Presiden Direktur dan memberikan dukungan yang diperlukan serta saran yang sesuai;
- g. Presiden Komisaris menunjukkan standar tertinggi praktik tata kelola perusahaan dan memastikan bahwa praktik-praktik ini secara teratur dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan;
- h. Presiden Komisaris memimpin jalannya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
- i. Presiden Komisaris dapat memanggil/mengadakan Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris dan berhak menentukan jangka waktu lain terkait dengan cara pemanggilan Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi.
- j. Presiden Komisaris memimpin jalannya Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris yang dilakukan bersama dengan Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
3. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilaksanakan antara lain melalui rapat berkala Dewan Komisaris dengan Direksi atau melalui laporan-laporan yang disampaikan secara khusus oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Direktur Kepatuhan atau melalui sarana komunikasi tertulis lainnya.
4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.

Duties and Responsibilities of BOC

The BOC has the following duties and responsibilities:

1. BOC supervises management's policy, management practices in general with regards to the Bank, and the Bank's business activities, and provides advices to the BOD. Oversight and advisory function is performed in the interest of the Bank and and in consistency with the Bank's purpose and goals.
2. BOC members shall perform their duties and responsibilities in good faith, responsibly, and with prudence.
3. BOC oversight is performed among others through regular joint BOC and BOD meetings; through reports from Internal Audit Unit (SKAI), Audit Committee, Risk Oversight Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Compliance Director; or through other means of written communication.
4. Under certain circumstances, BOC is obligated to hold Annual GMS and other GMS in accordance with its authority under the legislation and Bank's Articles and Association.

Dewan Komisaris Board of Commissioners

5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk komite-komite tingkat Dewan Komisaris, dan memastikan bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugasnya secara efektif serta melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku. Komite-komite tersebut antara lain:
- Komite Audit
 - Komite Pemantau Risiko
 - Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam rangka pengawasan atas penerapan tata kelola terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan ketentuan Regulator maka dibentuk pula:

- Komite Tata Kelola Terintegrasi.
Informasi lengkap mengenai komite-komite ini dipaparkan pada bagian Komite-Komite Tingkat Dewan Komisaris.
6. Melalui keberadaan komite-komite, Dewan Komisaris melakukan penilaian atas laporan audit internal maupun eksternal, memberikan pengarahannya serta memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan serta otoritas lainnya, memberikan pendapat dan pengarahannya atas sistem pengelolaan sumber daya manusia serta penerapan sistem pengendalian risiko yang terdapat pada Bank.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa:
- Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
 - Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
8. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris secara aktif memastikan telah diterapkannya prinsip-prinsip GCG yang baik dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

5. To ensure BOC's effective performance of duties and responsibilities, BOC establishes committees that report to the BOC. The BOC assures that the committees carry out their responsibilities effectively and evaluates the committees' performance at the end of each fiscal year. The committees among others are:

- Audit Committee
- Risk Oversight Committee
- Nomination and Remuneration Committee.

The following committee has also been established to comprehensively and effectively oversee integrated governance implementation according to regulatory requirement:

- Integrated Governance Committee
Detailed information concerning these committees are presented under BOC Committee section of this report.
6. The committees enable BOC to assess internal and external audit reports; direct and ensure BOD's follow-up on audit findings and recommendations from SKAI, external auditors, and Bank Indonesia and/or Financial Services Authority as well as other authorities; provide opinion and counsel on human resource management system and risk control system in the Bank.
7. Members of BOC are jointly responsible for the Bank's losses caused by erroneous performance or negligence of the BOC in carrying out its responsibilities unless it can be proven that:
- BOC has carried out its oversight function in good faith and with prudence in the interest of the Bank and for the Bank's goals and purpose.
 - BOC carries no direct or indirect personal interests in the BOD's management that causes the loss.
 - BOC has counseled the BOD to prevent or to stop such losses from continuing.
8. In performing its responsibilities, the BOC actively ensures that GCG principles are embedded in all business activities across all levels of the Bank.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

9. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bisnis Bank secara keseluruhan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar serta hasil keputusan RUPS serta menghindari segala bentuk benturan kepentingan.
10. Dewan Komisaris memberikan pendapat dan pengarahan kepada Direksi tentang penentuan visi, misi, budaya kerja dan nilai-nilai Bank.
11. Dewan Komisaris tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, atau hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
12. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen senior mempertahankan dan memperbaharui sistem pengendalian internalnya guna memastikan efektivitas dan efisiensi dalam hal pengendalian operasional, keuangan internal dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
13. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Regulator paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan serta apabila terdapat keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
14. Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal serta berpartisipasi dalam program peningkatan kompetensi dan keahlian.
15. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya dalam laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi pada RUPS.
16. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas kebijakan Program APU dan PPT.
17. Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU dan PPT, termasuk komitmen yang dibuat oleh bank kepada Regulator.
9. With respect to its oversight function the BOC is responsible to guide, monitor, and evaluate bank-wide business strategy implementation to ensure its conformity with relevant laws and regulations, Articles of Association, and GMS resolutions as well as to avoid any conflict of interests.
10. The BOC shall provide its opinion and counsel to the BOD in defining the Bank's vision, mission, work culture, and values.
11. With regards to its oversight function the BOC may not be involved in decision-making process related to the Bank's operational matters unless in a matter of fund provisioning to related parties or other matters specified in the Articles of Association and/or prevailing laws and regulations.
12. The BOC is responsible to ensure that the Bank's senior management maintains and updates internal control system to preserve effectiveness and efficiency of operational, financial, and internal control and to comply with rules and legislations.
13. In the event of financial and banking regulations violation or circumstances that potentially jeopardize the Bank's continuity, the BOC must notify the Regulators no later than 7 (seven) days since the discovery of violation or since the circumstances occur.
14. The BOC shall set aside sufficient time to optimally perform its responsibilities and to participate in competency and skills enhancement programs.
15. The BOC reports the result of its oversight responsibility during a fiscal year in a annual report submitted by the BOD to the GMS.
16. The BOC approves AML and CFT program policies.
17. The BOC oversees the implementation of BOD's responsibility in applying AML and CFT programs including the Bank's commitments to regulators.

Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki wewenang antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
2. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kantor Bank berhak memasuki gedung-gedung, kantor-

BOC Scope of Authority

The BOC's authority is defined as follows:

1. Under exceptional circumstances the BOC may perform management of the Bank for a certain period of time as stipulated in the Articles of Association or pursuant to GMS resolutions.
2. With respect to performing their responsibilities, members of BOC, individually and jointly, may enter the Bank's buildings, offices, and other premises at

Dewan Komisaris Board of Commissioners

kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Bank dan berhak untuk memeriksa catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta kekayaan Bank untuk melaksanakan kewajiban mereka.

3. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain.
4. Dewan Komisaris memiliki wewenang memberhentikan sementara anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. Sesudah pemberhentian sementara itu, maka dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

Etika Kerja Dewan Komisaris

Etika Kerja merupakan penjabaran prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang diharapkan dilakukan oleh Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris berpedoman pada Anggaran Dasar Bank maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kode Etik Bank dan Pedoman Tingkah Laku serta Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Secara garis besar Etika Kerja Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas, tanggung jawab, hak dan wewenangnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan itikad moral yang baik sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib tunduk pada Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan internal Bank.
3. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/ atau anggota Direksi.
4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali terhadap:

any time within the Bank's operational hours and are entitled to inspect records and documents as well as the Bank's assets.

3. With regards to performing its responsibilities the BOC has the authority to communicate directly with employees, BOD, and other parties.
4. The BOC has the authority to suspend a member of the BOD in the event that the member concerned undertakes actions that conflict with the Articles of Association and prevailing laws and regulations. The suspension and reason for it shall be notified in written to the member concerned. Following this suspension and no later than 90 (ninety) calendar days from the date thereof the BOC is to hold a GMS to determine the dismissal or reinstatement of the said member. The said member of BOD has the opportunity to be present at the meeting and contest its position.

BOC Work Ethics

Work ethics elaborate the basic principles personal and professional behavior expected of the BOC to demonstrate. In performing its oversight to the BOD responsibility implementation and in providing advice to the BOD, the BOC complies with the Bank's Articles of Association, prevailing laws and regulations, the Bank's Code of Ethics and Code of Conduct, and BOC Manual.

BOC Work Ethics are broadly as follows:

1. Members of the BOC carry out and exercise their duties and responsibilities as well as rights and authority by adhering to the highest ethical values and good moral faith as set out in the Code of Ethics and Code of Conduct.
2. Members of the BOC are subject to the Bank's Code of Ethics and Code of Conduct, prevailing laws and regulations, and the Bank's bylaws.
3. The majority of BOC members may not have familial relationship up to the second degree with another members of BOC and/or BOD.
4. With respect of performing its oversight responsibility, the BOC may not be involved in decision-making process related to the Bank's operational matters unless

Dewan Komisaris Board of Commissioners

- a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
 - b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
5. Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri dalam Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Laporan Tahunan Bank.
 6. Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank, dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
 7. Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas yang diperoleh dari Bank pada Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
 8. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan informasi Bank maupun informasi nasabah Bank.
 9. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila anggota Dewan Komisaris:
 - a. menjalankan tugas fungsional dari pemilik Bank yang berbentuk badan hukum; atau
 - b. merangkap jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.
- a. In a matter of fund provisioning to related parties as regulated under Bank Indonesia regulation on Legal Lending Limit of Commercial Banks; and
 - b. Other matters specified in the Articles of Association and/or prevailing laws and regulations.
5. All members of BOC must disclose their share ownership that amounts to 5% (five per cent) or more) in the Bank or in other banks or companies domiciled in and outside of the country in the Bank's Good Corporate Governance Report and Annual Report.
 6. All members of the BOC must disclose their financial and familial relationship with other members of the BOC, BOD, and/or the Bank's shareholders in Good Corporate Governance Report.
 7. The BOC must disclose the amount of remuneration and facilities provided by the Bank in Good Corporate Governance Report.
 8. Each member of the BOC is obliged to maintain the Bank's and the Bank's customers' confidential information.
 9. Members of the BOC may only serve concurrent position as member of BOD, BOC, or Executive Officer tasked with oversight function in 1 (one) non-financial institution/company. Definition of concurrent position does not apply to:
 - a. The performance of functional tasks of the Bank's owners established as legal entities; or
 - b. Concurrent positions in non-profit organizations or institutions provided that members serving other positions do not neglect his/her responsibilities as members of the Bank's BOC.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang disebut dengan *Board of Commissioners Manual* (BOC Manual) sebagai pedoman dan referensi dalam menjalankan tugas-tugas Dewan Komisaris. BOC Manual tersebut ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang menginformasikan antara lain mengenai:

- Struktur Tata Kelola.
- Pengangkatan dan Pengunduran Diri Dewan Komisaris.
- Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris.
- Rapat Dewan Komisaris.
- Penyediaan Informasi ke Dewan Komisaris.
- Penilaian Tahunan Dewan Komisaris.
- Benturan Kepentingan Dan Transaksi Pihak Terkait.

BOC Manual

BOC has Board of Commissioners Manual that contains rules of procedures and guidelines concerning BOC's responsibilities. Provided in Indonesian and English, BOC Manual informs the following:

- Governance Structure
- BOC Appointment and Resignation
- BOC Duties and Responsibilities
- BOC Meeting
- Information provision to BOC
- BOC Annual Appraisal
- Conflict of Interests and Related Party Transactions

Dewan Komisaris Board of Commissioners

BOC Manual tersebut mencerminkan praktik terbaik yang harus dilakukan oleh Dewan Komisaris dan bagaimana Dewan Komisaris secara khusus mematuhi ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan tugas tanggung jawabnya.

Untuk memastikan bahwa BOC Manual tetap relevan sebagai Pedoman Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, maka BOC Manual diperbaharui secara periodik mengikuti perubahan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Penilaian Kinerja Anggota Dewan Komisaris

Pelaksanaan Penilaian

Penilaian terhadap kinerja Anggota Dewan Komisaris dilakukan secara rutin setiap tahun. Proses penilaian tersebut dilakukan dengan melakukan evaluasi dari segi kompetensi dan keahlian/pengalaman, kinerja komite-komite Dewan Komisaris, efektivitas pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris dan penilaian mandiri maupun penilaian rekan sejawat terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Kriteria Pelaksanaan Penilaian

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris mencakup hal-hal sebagaimana berikut:

1. Evaluasi Pribadi
2. Evaluasi Kompetensi
3. Kinerja Komite-Komite Dewan Komisaris dan rekomendasi perbaikan yang diperlukan (bila ada)
4. Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab dan Proses Kerja Dewan Komisaris.
5. Efektivitas Rapat Dewan Komisaris.
6. Evaluasi diri dan rekan sejawat.
7. Evaluasi oleh Presiden Direktur (mewakili Direksi).

Pihak yang melakukan penilaian

Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui 3 (tiga) sudut pandang, yaitu penilaian secara individual (*self-assessment*), penilaian oleh rekan sejawat (*self & peers assessment*) dan penilaian oleh pihak ketiga yang dilakukan oleh Presiden Direktur (yang mewakili Direksi).

1. Penilaian secara individual (*self-assessment*)
Penilaian secara individual (*self-assessment*) meliputi penilaian terhadap kompetensi yang dimiliki oleh Dewan Komisaris serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

BOC Manual reflects the best practices expected of the BOC and delineates procedurs for the BOC to implement its resopnsibilities according to Bank's rules and prevailing legislations.

To ensure the relevancy of BCO Manual, the document is periodically updated to follow any legal and regulatory changes.

Policy on BOC Performance Appraisal

Schedule of Appraisal

BOC's performance appraisal is conducted annually. It evaluates competence, expertise/experience, performance of committees under the BOC, and effectiveness of BOC's implementation of duties. It also involves self and peer assessment on the performance of oversight function of BOC's members individually.

Criteria of Appraisal

BOC performance appraisal covers the following:

1. Personal evaluation
2. Competence evaluation
3. Performance of committees under the BOC and improvement recommendations (if any)
4. Effectiveness of BOC's implementation of duties
5. Effectiveness of BOC's meetings
6. Self and peer assessment
7. Evaluation by the President Director (on behalf of the BOD).

Assessor

BOC appraisal is a three-prong process of self-assessment, peer-assessment, and third-party assessment carried out by the President Director representing the BOD.

1. Self-assessment
Self-assessment considers the competence of a member of BOC and implementation of duties and responsibilities. It covers four core components:

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Penilaian terhadap kompetensi yang dimiliki oleh Dewan Komisaris mencakup empat aspek utama yaitu:

- Keahlian;
- Pengalaman;
- Sektor Industri; dan
- Bahasa yang dikuasai.

Penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris mencakup antara lain:

- Rencana Strategis
Keterlibatan Dewan Komisaris dalam pengembangan strategi dan penyusunan target Perusahaan.
- Pengelolaan Kinerja
Keterlibatan Dewan Komisaris dalam memantau kinerja Direksi dalam pelaksanaan strategi dan pencapaian target serta anggaran yang dicanangkan selama satu tahun.
- Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Keterlibatan Dewan Komisaris dalam memastikan pelaksanaan rencana suksesi di level Direksi. Dewan Komisaris juga memperhatikan agar komposisi remunerasi yang diberikan kepada Direksi dan pejabat eksekutif senior berada dalam level yang kompetitif dengan industri.
- Manajemen Risiko
Keterlibatan Dewan Komisaris dalam melakukan kajian terhadap manajemen risiko, kepatuhan dan pengendalian risiko serta etika bisnis Perusahaan.
- Komunikasi
Komunikasi yang terbuka dan partisipasi anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris, akses ke Presiden Komisaris, Direksi dan Sekretaris Perusahaan, dan tindak lanjut atas hal-hal yang dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris.
- Penciptaan Nilai Bagi Pemegang Saham
Keberhasilan dalam memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan. Penilaian Dewan Komisaris terhadap transaksi yang dapat mempengaruhi posisi dan hak pemegang saham dan bagaimana Dewan Komisaris memastikan adanya kebijakan yang efektif mengenai hubungan dengan investor dan komunikasi kepada pemegang saham/pemangku kepentingan/masyarakat.

Assessment upon competences of Board of Commissioners consist of 4 (four) main aspects as follow:

- Expertise
- Experience
- Industry sector; and
- Language proficiency

Appraisal on BOC implementation of duties covers, among others:

- Strategic Plan
BOC's involvement in the Bank's strategic and target planning process
- Performance Management
BOC's involvement in monitoring the BOD's performance with respect to strategy implementation and target and budget achievement for the year.
- Human Resource Management
BOC's involvement in ensuring that succession planning at BOD level is in place. BOC is also expected to ensure that remuneration provided to the BOD and senior executive officers are competitive against industry peers.
- Manajemen Risiko
BOC's involvement in evaluating risk management, risk compliance, and risk control as well as the Bank's business ethics.
- Communication
Open communication and participation of BOC members in BOC meetings; access to President Commissioner, BOD, and Corporate Secretary; and follow-up on result of BOC meeting discussions.
- Value for Shareholders
Ability to create added value for shareholders and stakeholders; BOC's judgement on transactions that may affect the shareholders' positions and rights, and BOC's measures to ensure effective policies regarding investment relations and communications with shareholders/stakeholders are in place.

Dewan Komisaris Board of Commissioners

- Inovasi
Keterlibatan Dewan Komisaris dalam mendorong terciptanya inovasi dan penyusunan strategi yang tetap untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan.
 - Lainnya
Informasi terkait dengan tingkat kehadiran, efektivitas Rapat Dewan Komisaris dan tindak lanjut oleh Manajemen atas permasalahan yang dibahas didalam Rapat Dewan Komisaris.
2. Penilaian individual dan rekan sejawat (*self & peers assessment*)
Penilaian individual dan rekan sejawat (*self & peers assessment*) mencakup tiga aspek utama yaitu:
 - i. Pemahaman anggota Dewan Komisaris terhadap perbedaan antara peran Dewan Komisaris dan Direksi;
 - ii. Kontribusi terhadap interaksi antara anggota Dewan Komisaris dan kualitas dari masukan yang diberikan;
 - iii. Peran dari Presiden Komisaris.
 3. Penilaian oleh Presiden Direktur (yang mewakili Direksi)
Penilaian oleh Presiden Direktur (yang mewakili Direksi) yang mencakup, antara lain:
 - i. Pembagian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab oleh Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - ii. Rekomendasi dan arahan yang bersifat strategis.
- Innovation
BOC's involvement in encouraging innovation and strategy planning that place sustainable growth at the center.
 - Others
information on attendance, effectiveness of BOC meetings, and follow-up on result of BOC meeting discussions.
2. Self and peer-assessment
Self and peer-assessment covers three core components:
 - i. BOC's members' understanding on the distinction of roles between BOC and BOD;
 - ii. Contribution to interaction between BOC's members and quality of input;
 - iii. Role of President Commissioner
 3. Assessment by President Director (representing BOD)
Assessment by President Director representing the BOD covers, among others:
 - i. Distribution of responsibilities between BOD and BOC; and
 - ii. Strategic recommendations and advice.

Tindak Lanjut Hasil Penilaian

Hasil dari *assessment* tersebut akan dijadikan acuan dalam menetapkan langkah yang perbaikan yang perlu dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris

Kebijakan pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris mengacu kepada keputusan dari Pemegang Saham sebagaimana ditetapkan dalam RUPS. Berdasarkan Hasil Keputusan RUPS Tahunan 2016, RUPS Tahunan telah menyetujui pelimpahan wewenang dan pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Pengendali Bank untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016 dengan memperhatikan usulan dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mendapat sejumlah paket remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit) sesuai

Appraisal follow-up

Results of appraisal are used to identify steps of improvement of the BOC.

BOC Remuneration Policy

BOC remuneration and facility policy follows shareholders' decisions adopted and ratified in the GMS. In 2016, the Annual GMS approved the transfer of authority and to confer the power of determining honorarium and/or other benefits for the BOC for fiscal year 2016 to the Bank's controlling shareholders that shall observe the recommendations from Nomination and Remuneration Committee.

For the performance of its duties and responsibilities, in accordance with the Bank's rules, BOC is entitled to a remuneration package consisting of in-kind benefits, salaries, and other fixed income components such as allowances.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

dengan ketentuan Bank dan bentuk remunerasi lainnya serta fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Ketentuan tentang besarnya gaji/honorarium atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut diserahkan kepada Dewan Komisaris dan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

Remunerasi Dewan Komisaris direkomendasikan dan diusulkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan formulasi remunerasi yang mengacu kepada kebijakan internal Bank, peraturan eksternal yang berlaku, *industry comparison* serta fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing anggota Dewan Komisaris serta yang besarnya diberikan sesuai kinerja Bank.

Gambaran ringkas Prosedur Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

BOC is also entitled to other forms of remuneration and pecuniary facilities, namely other non-fixed income components, including housing and transportation benefits and other ownable and non-ownable facilities by the BOC.

BOC Remuneration Setting Procedure

The amount of salaries/honorarium or remuneration and/or benefits provided to the BOC is determined by the GMS observing the recommendations from Nomination and Remuneration Committee. Nomination and Remuneration Committee submits its recommendations to the BOC and presented to the GMS for approval.

Nomination and Remuneration Committee develops its recommendations on BOC remuneration based on remuneration formula that refers to Bank's internal policies, prevailing external regulations, industry comparison, and functions and responsibilities of individual member of BOC as well as the Bank's performance.

The following chart provides an overview of BOC remuneration setting procedure.



Dewan Komisaris Board of Commissioners

Besar Remunerasi Dewan Komisaris

Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Type of Remuneration and Facility	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun Dewan Komisaris Board of Commissioner					
	2016		2015		2014	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura Salary, bonus, routine allowance, tantiem, and other facilities in cash						
- Gaji, bonus, tunjangan rutin & tunjangan lainnya Salary, bonus, routine allowance and other facilities	6	11,268	6	11,268	6	11,268
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang Other facilities in kind (housing, medical insurance, etc.) which:	6	1,194	6	1,300	6	817
a. dapat dimiliki can be owned;						
b. tidak dapat dimiliki cannot be owned						
Total		12,462		12,568		12,085

Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun:

Amount of Board of Commissioners' Remuneration

Package of remuneration and facilities received by the the Board of Commissioners includes the Remuneration structure and details of nominal value:

Remuneration package is grouped based on the level of income received by members of the Board of Commissioners in 1 (one) year:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (Satu) Tahun *) Amount of Remuneration per Person in 1 (one) Year *)	Jumlah Komisaris Number of the Board of Commissioners Members		
	2016	2015	2014
Di atas Rp2 miliar Above Rp2 billion	1	1	1
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar Above Rp1 billion up to Rp2 billion	5	5	5
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Above Rp500 million up to Rp1 billion	0	0	0
Rp500 juta ke bawah Below Rp500 million	0	0	0

Keterangan: *) yang diterima secara tunai | Note: *) received in cash

Jumlah Dewan Komisaris yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Number of Board of Commissioners and total amount of variable remuneration in 1 (one) year are as follow:

Remunerasi yang Bersifat Variabel Total Amount of Variable Remuneration	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun 2016 Amount Received in 1 (one) Year 2016 Dewan Komisaris Board of Commissioners	
	Orang	Juta Rp
Total	0	0

Kebijakan Pelaksanaan dan Frekuensi Rapat

Ketentuan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta

Meeting Policy and Frequency

BOC's meeting mechanism is regulated under POJK Number 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Listed Companies or Publicly

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yaitu Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Kemudian Dewan Komisaris juga wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Dewan Komisaris harus menjadwalkan Rapat Dewan Komisaris maupun rapat yang diadakan bersama dengan Direksi tersebut untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir dalam Rapat, yang mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris wajib dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

Bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota dewan komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

Frekuensi Rapat

Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 14 (empat belas) kali rapat Dewan Komisaris. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi dilakukan untuk beberapa agenda khusus rapat yang terdapat dalam Rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris dihadiri secara fisik maupun melalui teknologi telekonferensi.

Tingkat Kehadiran

Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat-rapat Dewan Komisaris selama 2016 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Listed Companies and POJK Number 55/POJK.03/2016 on Corporate Governance Implementation for Commercial Banks. The regulations stipulate that BOC must meet periodically at least 4 (times) in one year.

BOC must also hold periodical joint meetings with the BOD at least 1 (one) in 4 (four) months. BOC meeting schedules, both BOC's own meetings and meetings with the BOD, must be planned prior to the end of a fiscal year. BOC meeting is chaired by the President Commissioner. In the event that the President Commissioner is absent or is unavailable, the meeting shall be presided by a member of BOC appointed by and from the attending BOC members or their proxies. The President Commissioner is not required to verify his/her inattendance at a meeting to any third party.

Meeting materials should circulated to meeting participants no later than than 5 (five) days prior. For meetings organized outside a set schedule, meeting materials may be circulated at the latest before the meeting commences.

All members are required to attend BOC meetings in person at least 2 (two) times a year.

Meeting Frequency

In 2016, the BOC held 14 (fourteen) meetings. Joint BOC-BOD meetings were organized for several specific agenda items identified in BOC meetings. BOC members attended BOC meetings in person and remotely by teleconference.

Level of Attendance

The following table lists the attendance of BOC members in BOC meetings in 2016.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

NO	DATE	BOC						INVITEE									NOTE	
		TSM	DAFA	SL	UJ	BDS	AI	TZ	GMR	TN	JW	DT	HS	EB	IF	DF		MRM
1	22-Jan-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	
2	23-Feb-16	✓ ^{***}	✗	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓ ^{***}	Special BOC Meeting, DAFA absent
3	26-Feb-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	
4	28-Mar-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	-	-	✓	EB on leave
5	22-Apr-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-
6	26-Apr-16	✓ ^{***}	✓ ^{***}	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓ ^{***}	Special BOC Meeting
7	30-May-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-
8	24-Jun-16	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	DAFA absent
9	25-Jul-16	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	SL absent
10	28-Jul-16	✓ ^{***}	✗	✓ ^{***}	✓ ^{***}	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	Special BOC Meeting
11	23-Sep-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
12	21-Oct-16	✓ ^{***}	✓ ^{***}	✓ ^{***}	✓	✓	✓	✓ ^{***}	-	✓	-	✓ ^{***}	-	-	-	-	-	Special BOC Meeting
13	31-Oct-16	✓	✓	✓	✓ ^{***}	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗✗	✓	✓	✓	-	TN on leave, DT Business Trip, HS Gardening leave
14	28-Nov-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗✗	✓	✓	✓	-	JW business trip, DT business trip
TOTAL		14	14	14	14	14	14											
ATTEND		14	11	13	14	14	14											
ABSENT		0	3	1	0	0	0											
Percentage		100%	79%	93%	100%	100%	100%											

Note :

TSM	Tan Sri Dato'Megat Zaharuddin	✓	Attendance
DAFA	Datuk Abdul Farid bin Alias	✗	Absent
SL	Spencer Lee Tien Chye	✓ ^{***}	Teleconference/Conference call
UJ	Umar Juoro	***)	Only specific agenda
BDS	Budhi Dyah Sitawati	****)	Effectively Resign
AI	Achjar Iljas	-	no invitee
TZ	Taswin Zakaria	✗✗	Gardening Leave
TN	Thilagavathy Nadason		
GMR	Ghazali Moh Rasad		
JW	Jenny Wiriyanto		
DT	Dhien Tjahajani		
HS	Henkys Sulisty		
EB	Eri Budiono		
MRM	Mohamed Rafique Merican		
DF	Datuk Feisal		
MRM	Mohammed Rafique Merican		

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Agenda Rapat

Secara garis besar, Agenda Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Meeting Agenda

Broadly, BOC meeting agenda items in 2016 are as follows.

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Dewan Komisaris Agenda of the Board of Commissioners Meetings
22-Jan-16	<p>No. 01/KOM/01.2016, 22 January 2016- BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) MEETING</p> <ol style="list-style-type: none"> Minutes of BOC meeting held on 30 November 2015 Matters arising from the minutes of BOC meeting held on 30 November 2015. CEO Update & Review of Group Financial Performance for November and December 2015 CR Update Rebranding BNM CRR Update Report of the Committee (Audit Committee, Risk Oversight Committee, and Nomination and Remuneration Committee)
23-Feb-16	<p>No.02/KOM/02/2016, 23 February 2016 - Special BOC Meeting</p> <p>Audited financial statement for 2015</p>
26-Feb-16	<p>No. 03/KOM/02.2016, 26 February 2016-BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) MEETING</p> <ol style="list-style-type: none"> Minutes of the BOC meeting held on 22 January 2016. Matters arising from the minutes of BOC meeting held on 22 January 2016. CEO Update & Review of Group Financial Performance for January 2016. Compliance Update. Important Legislation/Policies Update. Update on Integrated Risk Management of Maybank Financial Conglomeration. Shariah Update. Report of the Committee (Audit Committee, Risk Oversight Committee, Integrated Good Corporate Governance Committee and Nomination and Remuneration Committee).
28-Mar-16	<p>No. 04/KOM/03.2016, 28 March 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> Minutes of the BOC meeting held on 28 February 2016. Matters arising from the minutes of BOC meeting held on 28 February 2016. CEO Update & Review of Group Financial Performance for February 2016. Operation Update. Productivity Update. AGMS FY2015 (including utilization of net profit). Appointment of External Auditor. GCG Report Annual Report 2015 Report of the Committee (Audit Committee, Risk Oversight Committee, Integrated Good Corporate Governance Committee and Nomination and Remuneration Committee).
22-Apr-16	<p>No. 05/KOM/04.2016, 22 April 2016-JOINT BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) AND BOARD OF DIRECTORS (“BOD”) MEETING</p> <ol style="list-style-type: none"> CEO Update & Review of Group Financial Performance for March 2016.
	<p>No. 06/KOM/04.2016, 22 April 2016-BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) MEETING</p> <ol style="list-style-type: none"> Minutes of the BOC meeting held on 28 March 2016; Matters arising from the minutes of BOC meeting held on 28 March 2016; Global Banking and Global Market Update; CFS Update; Important Legislation/Policy Update; BNM CRR Update; Report of the Committee (Audit Committee, Risk Oversight Committee, Integrated Good Corporate Governance Committee and Nomination and Remuneration Committee). BOC Meeting Annual Outline Agenda for the Year 2016

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Dewan Komisaris Agenda of the Board of Commissioners Meetings
26-Apr-16	<p>No.07/KOM/O4.2016, 26 April 2016 Special BOC Meeting Consolidated Financial Statement 2016 Q1</p>
30-May-16	<p>No. 08/KOM/05.2016, 30 May 2016 - JOINT BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) AND BOARD OF DIRECTORS (“BOD”) MEETING 1. Minutes of Meeting of the Joint BOC and BOD Meeting Held on 22 April 2016 2. CEO Update & Review of Group Financial Performance for April 2016</p> <p>No. 09/KOM/05.2016, 30 May 2016 - BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) MEETING 1. Minutes of the BOC meeting held on 22 April 2016. 2. Matters arising from the minutes of BOC meeting held on 28 March 2016. 3. Digital Banking Update. 4. Report of the Committee (Audit Committee, Risk Oversight Committee, Integrated Good Corporate Governance Committee and Nomination and Remuneration Committee). 5. BOC Meeting Annual Outline Agenda for the Year 2016</p>
24-Jun-16	<p>No. 10/KOM/06.2016, 24 June 2016-JOINT BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) AND BOARD OF DIRECTORS (“BOD”) MEETING 1. Minutes of Meeting of the Joint BOC and BOD Meeting Held on 30 May 2016 2. CEO Update & Review of Group Financial Performance for May 2016</p> <p>No. 11/KOM/06.2016, 24 June 2016-BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) MEETING 1. Minutes of the BOC meeting held on 30 May 2016. 2. Matters arising from minutes of the BOC meeting held on May 30, 2016. 3. Liquidity Management Update. 4. IT Update. 5. Revised RBB 2016-2018 (Business Plan) Approval for Submission to OJK. 6. Report of the Committees (Audit Committee, Risk Oversight Committee, Integrated Good Corporate Governance Committee, and Nomination and Remuneration Committee). 7. BOC Meeting Annual Outline Agenda for the Year 2016.</p>
25-Jul-16	<p>No. 12/KOM/07.2016, 25 July 2016-JOINT BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) AND BOARD OF DIRECTORS (“BOD”) MEETING 1. Minutes of Meeting of the Joint BOC and BOD Meeting Held on June 24, 2016 2. CEO Update & Review of Group Financial Performance for June 2016</p> <p>No. 13/KOM/07.2016, 25 July 2016-BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) MEETING 1. Minutes of the BOC Meeting Held on 24 June 2016. 2. Matters Arising from Minutes of the BOC Meeting Held on 24 June 2016. 3. Maybank Indonesia Productivity Update. 4. Project Matrix. 5. Governance Update. 6. Audit Performance and Productivity. 7. Report of the Committees (Audit Committee, Risk Oversight Committee, Integrated Good Corporate Governance Committee, and Nomination and Remuneration Committee). 8. BOC Meeting Annual Outline Agenda for the Year 2016.</p>
28-Jul-16	<p>No.14/KOM/07.2016, 28 July 2016 Special BOC Meeting Consolidated Financial Statements 30 June 2016</p>

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Dewan Komisaris Agenda of the Board of Commissioners Meetings
23-Sep-16	<p>No. 15/KOM/09.2016, 23 September 2016-JOINT BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) AND BOARD OF DIRECTORS (“BOD”) MEETING</p> <ol style="list-style-type: none"> Minutes of the Joint BoC and BoD Meeting Held on 25 July 2016 CEO Update & Review of Group Financial Performance for July & August 2016 <p>No. 16/KOM/06.2016, 23 September 2016-BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) MEETING</p> <ol style="list-style-type: none"> Minutes of the BOC Meeting Held on 25 July 2016 and 28 July 2016. Matters Arising from the Minutes of the BoC Meeting Held on 25 July 2016. Maybank 2020. Preliminary Review of AOP 2017. IFRS 9 Implementation Project. Group Inclusiveness & Diversity Agenda. Report of the Committees (Audit Committee, Risk Oversight Committee, Integrated Good Corporate Governance Committee, and Nomination and Remuneration Committee). BoC Meeting Annual Outline Agenda for the Year 2016.
21-Oct-16	<p>No. 17/KOM/06.2016, 21 October 2016-Special BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) MEETING</p> <p>Long Form Financial Statements & BI Publication Report</p>
31-Oct-16	<p>No. 18/KOM/06.2016, 31 October 2016-JOINT BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) AND BOARD OF DIRECTORS (“BOD”) MEETING</p> <ol style="list-style-type: none"> Minutes of the Joint BOC and BOD Meeting Held on September 23, 2016 CEO Update & Review of Group Financial Performance for September 2016 <p>No. 19/KOM/06.2016, 31 October 2016-BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) MEETING</p> <ol style="list-style-type: none"> Minutes of the BOC Meeting Held on 23 September 2016. Minutes of the BOC Meeting Held on 21 October 2016. Matters Arising from the Minutes of the BOC Meeting Held on 23 Sep. 2016. FY2017 Business Plan (AOP) & Budget. Attrition 2016. Compliance Update. Important Legislation/Policies Update. BNM Update. Audit Committee Report. Risk Oversight Committee Report. Nomination and Remuneration Committee Report. Integrated Good Corporate Governance Committee Report. BOC Meeting Annual Outline Agenda for the Year 2016.
25-Nov-16	<p>No. 20/KOM/11.2016, 25 November 2016-JOINT BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) AND BOARD OF DIRECTORS (“BOD”) MEETING</p> <ol style="list-style-type: none"> Minutes of the Joint BOC and BOD Meeting Held on October 31, 2016. CEO Update & Review of Group Financial Performance for October 2016. <p>No. 21/KOM/11.2016, 25 November 2016-BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) MEETING</p> <ol style="list-style-type: none"> Minutes of the BOC Meeting Held on 31 October 2016. Matters Arising from the Minutes of the BOC Meeting Held on 31 October 2016. RBB 2017-2019 (Business Plan). Project Matrix 2. 2017 AML/CFT Strategy. Audit Committee Report. Risk Oversight Committee Report. Integrated Good Corporate Governance Committee Report. Remuneration and Nomination Committee Report. BOC Annual Outline Agenda for the Year 2016 and BOC Annual Outline Agenda for the year 2017.

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Kebijakan Suksesi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan posisi strategis yang berperan penting dalam melakukan fungsi pengawasan. Proses seleksi yang dilakukan untuk kandidat yang akan menduduki posisi ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian melalui proses yang melibatkan baik pihak internal (top manajemen) dan pihak eksternal dengan mempertimbangkan keterkaitan antara kriteria calon Komisaris dengan arahan atau rencana strategis perusahaan. Kandidat untuk posisi ini diperoleh baik melalui referral maupun melalui jasa pihak ke 3 (Executive Search), semua potensial kandidat akan di review terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dalam proses seleksi.

Tahapan seleksi diawali dengan wawancara yang dilakukan oleh dua orang atau lebih Komisaris Maybank Indonesia, kemudian apabila direkomendasikan untuk dilanjutkan maka tahap berikutnya adalah interview dengan President Komisaris/Top Manajemen di Group Maybank.

Kandidat yang telah melalui seluruh tahapan tersebut selanjutnya akan diikutsertakan dalam proses competencies assessment yang dilakukan oleh pihak eksternal yang ditunjuk.

Kriteria Dewan Komisaris

Dalam pemilihan anggota Dewan Komisaris, terdapat sejumlah kriteria yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.
2. Calon anggota Dewan Komisaris Bank yang belum mendapat persetujuan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dilarang melakukan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.
3. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), yaitu:
 - a. Persyaratan integritas meliputi:
 - Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Succession Policy of Board of Commissioners

The Board of Commissioners has a strategic position with a vital role in the supervision function. The selection process for candidates for the position shall be conducted carefully through a process that involves the internal parties (top management) as well as external parties, with considerations of the relationship between the criteria for Commissioner candidates and the Bank's strategic direction or plans. Candidates for the position is obtained either via a referral process or an executive search by a third party.

All prospective candidates shall undergone a review prior to the selection process. The selection process is initiated with an interview by two or more Commissioners of Maybank Indonesia. On being recommended for further process, the next step will be an interview with the President Commissioner/Top Management of Maybank Group. Candidates that successfully passed all these selection processes are then included in the competencies assessment process conducted by the appointed external party.

BOC Criteria

The Bank applies a number of criteria in selecting members of the BOC, namely:

1. A candidate must obtain approval from Bank Indonesia or Financial Services Authority prior to performing his/her duties and function.
2. Without approval from Bank Indonesia or Financial Services Authority a candidate may not exercise the duties as BOC members despite having received approval and appointment by the GMS.
3. A candidate must satisfy integrity, competence, and financial reputation requirements as stipulated in Bank Indonesia Regulation No.12/23/PBI/2010 dated 29 December 2010 concerning Fit and Proper Test:
 - a. Integrity requirements cover:
 - A candidate shall uphold strong moral values and principles. This should be demonstrated by the candidate's compliance with regulations, no history of certain criminal convictions within 20 (twenty) years prior to nomination;
 - Commitment to comply with prevailing laws and regulations;

Dewan Komisaris Board of Commissioners

- Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
 - Memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, bagi calon anggota Dewan Komisaris yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia tersebut diatas.
- Commitment to developing robust and healthy banking operations;
 - Not listed under the Disqualified List (DTL);
 - Commitment to not committing and/or repeating offences and/or actions as specified under Article 27 and Article 28 for BOC member candidates that have been disqualified from the fit and proper test and have fulfilled a sanction period as intended under Article 35 paragraph (1), Article 40 paragraph (4) point a and Article 40 paragraph (5) of the said Bank Indonesia Regulation
- b. Persyaratan kompetensi meliputi:
- Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - Pengalaman di bidang perbankan dan/ atau bidang keuangan.
- b. Competence requirements cover:
- Sufficient banking knowledge relevant to the position
 - Experience in banking and/or financial industry
- c. Persyaratan reputasi keuangan meliputi:
- Tidak memiliki kredit macet; dan
 - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- c. Financial reputation requirements cover:
- A candidate shall not have bad debt;
 - A candidate has never been declared bankrupt or served as director or commissioner found guilty for a company's bankruptcy within past 5 (five) years prior to nomination.
4. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
4. A candidate shall also satisfy the criteria under Financial Services Authority Regulation No.33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Listed or Public Companies, namely:
- a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- a. Upholds strong moral values, principles, and integrity;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- b. Legally competent
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
- Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
- Has never been declared bankrupt
 - Has never served as director or commissioner found guilty for a company's bankruptcy
 - Has never been convicted for committing criminal offences that bring damages to the state's finances and/or offences relating to the financial sector; and
 - Has never served as director or commissioner in BOD or BOC that during their service:

Dewan Komisaris Board of Commissioners

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan. ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan. | <ul style="list-style-type: none"> i. Fail to organize annual GMS ii. Fail to have the board's accountability report accepted by the GMS or fail to present accountability report as member of BOD and/or BOC to GMS; and iii. Cause the company that has permit and approval from or registered with the Financial Services Authority to fail meeting its obligation to present annual report and/or financial statements to the Financial Services Authority. d. A candidate shall be committed to comply with laws and regulations e. A candidate has the knowledge and/or expertise required by the nominating company. |
|---|--|

Transparansi Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris.

Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar. Dalam hal Pemegang Saham Pengendali Bank berbentuk badan hukum, maka hubungan keluarga antara Komisaris Independen dengan Pemegang Saham Pengendali Bank dilihat dari hubungan keluarga antara seseorang dengan Pemegang Saham Pengendali dari badan hukum yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Bank.

Familial Relationship Disclosure

Familial relationship is defined as familial relationship up to the second degree, vertically and horizontally, which includes relationships as in-laws. In the event that the Bank's controlling shareholders are incorporated legal entities, familial relationship between Independent Commissioner and Controlling Shareholder is defined as familial relationship of the Independent Commissioner with an individual within the Bank's Controlling Shareholders.

No	Nama Name	Hubungan Keluarga Dengan Familial Relationship With											
		Dewan Komisaris Board of Commissioners				Direksi Board of Directors				Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders			
		Ya	Yes	Tidak	No	Ya	Yes	Tidak	No	Ya	Yes	Tidak	No
1	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	-		✓		-		✓		-		✓	
2	Datuk Abdul Farid bin Alias	-		✓		-		✓		-		✓	
3	Spencer Lee Tien Chye	-		✓		-		✓		-		✓	
4	Umar Juoro	-		✓		-		✓		-		✓	
5	Budhi Dyah Sitawati	-		✓		-		✓		-		✓	
6	Achjar Iljas	-		✓		-		✓		-		✓	

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Transparansi Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris.

Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari:

- Anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank.
- Perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank.
- Pemegang Saham Pengendali Bank.

Financial Relationship Disclosure

Financial relationship occurs when an individual receives income, financial aid, or loan, from:

- Member of the Bank's BOC and/or BOD
- Companies where members of the Bank's BOC and/or BOD serve as the controlling shareholders
- The Bank's controlling shareholders

No	Nama Name	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship With					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
1	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	-	✓	-	✓	✓	-
2	Datuk Abdul Farid bin Alias	-	✓	-	✓	✓	-
3	Spencer Lee Tien Chye	-	✓	-	✓	✓	-
4	Umar Juoro	-	✓	-	✓	-	✓
5	Budhi Dyah Sitawati	-	✓	-	✓	-	✓
6	Achjar Iljas	-	✓	-	✓	-	✓

Training Dewan Komisaris selama tahun 2016:

BOC Training in 2016:

No	Nama Name	Penyelenggara - Pelatihan/Seminar Training/Seminar Organizer	Tanggal Date	Tempat Venue
1.	Tan Sri Megat	Invest Asean Singapore 2016 (Maybank Investment Bank)	14-15 April 2016	
		Annual Risk Workshop (Maybank)	29 July 2016	
		Maybank Indonesia - AML/CFT Seminar	25 Juli 2016	Sentral Senayan 3, 27 th floor, Jakarta

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

No	Nama Name	Penyelenggara - Pelatihan/Seminar Training/Seminar Organizer	Tanggal Date	Tempat Venue
2.	Datuk Abdul Farid bin Alias	Maybank Indonesia - AML/CFT Seminar	25 Juli 2016	Sentral Senayan 3, 27 th floor, Jakarta
		SIDC – Capital Market Directors Programme Module 1: Directors as Gatekeepers of Market Participants	21 Maret 2016	Securities Commission Malaysia
		SIDC – Capital Market Directors Programme Module 2: Business Challenges & Regulatory Expectation – What Directors Need to Know (Equities & Futures Broking)	22 Maret 2016	Securities Commission Malaysia
		Bursa Malaysia & Maybank Kim Eng – Invest Malaysia	12-13 April 2016	Shangri-la Hotel, Kuala Lumpur
		Maybank Kim Eng	14 & 15 April 2016	Ritz Carlton Hotel, Singapore
		Advancing Financial Crime Professionals Worldwide (ACAMS)	25 Juli 2016	Maybank Indonesia, Jakarta
		Maybank – Annual Risk Workshop	29 Juli 2016	Maybank, Kuala Lumpur
		SIDC - Capital Market Directors Programme by SIDC	11 Oktober 2016	Securities Commission Malaysia
		SIDC - Capital Market Directors Programme Module 2B: Business Challenges & Regulatory Expectations (Fund Management)	11 Oktober 2016	Securities Commission Malaysia
		SIDC - Capital Market Directors Programme Module 3: Risk Oversight and Compliance-Action Plan for BOD	11 Oktober 2016	Securities Commission Malaysia
		SIDC - Capital Market Directors Programme Module 4: Current & Emerging Regulatory Issues in the Capital Market	11 Oktober 2016	Securities Commission Malaysia
		Maybank – The Guru Series: Integrity Dilemmas, by Mr. Simon Culhan, Chartered FCSEI, CEO Chartered Institute for Securities & Investments	18 November 2016	Maybank Indonesia, Jakarta
		Maybank - Maybank Compliance Training Program: Amla Malaysia & Bank's AML Program	7 Desember 2016	Maybank, Kuala Lumpur

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

No	Nama Name	Penyelenggara - Pelatihan/Seminar Training/Seminar Organizer	Tanggal Date	Tempat Venue
3.	Spencer Lee	-	-	-
4.	Budhi Dyah Sitawati	Maybank Indonesia - AML/CFT Seminar	25 Juli 2016	Sentral Senayan 3, 27 th floor, Jakarta
		Maybank Indonesia - Diskusi Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak	27 Juli 2016	Sentral Senayan 3, 28 th floor, Jakarta
		LPS 1D1C - Seminar Challenges To Global Economy	22 September 2016	The Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta
5.	Umar Juoro	Maybank Indonesia - AML/CFT Seminar	25 Juli 2016	Sentral Senayan 3, 27 th floor, Jakarta
		Maybank Indonesia - Economic Insight, Seminar Tax Amnesty (SME&Commercial) Seminar Tax Amnesty	27 Juli 2016	Sentral Senayan 3, 28 th floor, Jakarta
		Maybank Indonesia - Diskusi Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak	27 Juli 2016	Sentral Senayan 3, 28 th floor, Jakarta
6.	Achjar Iljas	Maybank Indonesia - AML/CFT Seminar	25 Juli 2016	Sentral Senayan 3, 27 th floor, Jakarta
		LPPI Workshop Akselerasi Pertumbuhan Keuangan Syariah	11 -12 November 2016	Intercontinental Hotel, Jakarta

Dewan Komisaris Board of Commissioners

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Per 31 Desember 2016, Dewan Komisaris telah mengungkapkan rangkap jabatan yang dimiliki dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani dan tidak ada Dewan Komisaris yang memiliki rangkap jabatan diluar dari yang diperbolehkan dalam POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Berdasarkan POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif:

- pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
- pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Adapun, tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal sebagai berikut:

- anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
- Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
- anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Berikut adalah tabel rangkap jabatan Dewan Komisaris:

No	Nama Name	Jabatan di Bank Maybank Indonesia Position in Maybank Indonesia Bank	Jabatan di Perusahaan/ Organisasi/ Lembaga Lain Position in Company/ Organization/ Other Institutions	Nama Perusahaan/Organisasi/ Lembaga Lain Name of Company/Organization Other Institutions
1	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	Presiden Komisaris	Director	ICLIF Leadership and Governance Center, Malaysia
			Chairman	Malayan Banking Berhad
			Chairman	Maybank Ageas Holding Berhad
2	Datuk Abdul Farid Bin Alias	Komisaris	Member	Asian Banker Association (ABA) Policy Advocacy Committee
			Chairman	ASEAN Inter-Regional Relations, ASEAN Banking Council (ABC)

CONCURRENT POSITIONS OF MEMBERS OF BOC

As of 31 December 2016, the BOC has disclosed their concurrent positions by virtue of Statement Letter signed by BOC members. There is no concurrent position served other than the positions allowed by POJK No. 55/POJK.03/2016 on Corporate Governance Implementation for Commercial Banks.

Pursuant to the respective regulation, members of BOC are not allowed to hold concurrent positions as member of BOD, BOC or Executive Officer of:

- Financial institution or company, bank and non-bank
- More than 1 (one) non-financial institution or company domiciled in and outside of the country;

However, concurrent position regulation excludes the following:

- Position as member of BOD, BOC, or Executive Officer tasked with oversight function in 1 (one) non-bank subsidiary company controlled by the Bank;
- Position as Commissioner tasked with functional responsibilities of the Bank's shareholder that is incorporated as a legal entity in the business group; and/or
- Position as member of BOC in non-profit organizations or institutions.

The following table shows the concurrent positions of BOC:

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

No	Nama Name	Jabatan di Bank Maybank Indonesia Position in Maybank Indonesia Bank	Jabatan di Perusahaan/ Organisasi/ Lembaga Lain Position in Company/ Organization/ Other Institutions	Nama Perusahaan/Organisasi/ Lembaga Lain Name of Company/Organization Other Institutions
			Director	Maybank Investment Bank Berhad
			President & Chief Executive Officer	Malayan Banking Berhad
			Chairman	The Association of Banks in Malaysia
			Member	Visa Asia Pacific Senior Client Council Program
			Member	Investment Panel of Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadanan) (KWAP)
			Director	Maybank Ageas Holding Berhad
			Chairman	Malaysian Electronic Payment System Sdn Bhd (MEPS)
			Vice Chairman	Asian Institute of Chartered Bankers
			Director	Cagamas Holdings Berhad
			Member	Emerging Markets Advisory Council of Institute International Finance, London
3	Spencer Lee Tien Chye	Komisaris	Trustee	Maybank Foundation
			Non Executive Director	Boardroom Limited, Singapore
			Non Executive Director	Maybank (Cambodia) Plc
4	Umar Juoro	Komisaris Independen	Senior Fellow	The Habibie Center
			Ketua	BSBI (Badan Supervisi Bank Indonesia)
5	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	-	-
6	Achjar Iljas	Komisaris Independen	Penasehat	MEK – PP Muhammadiyah
			Penasehat	IAEI
			Penasehat	ASBISINDO

Kebijakan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Menurut POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Adapun, yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepemilikan saham adalah apabila seseorang menjadi pemegang saham pada: Perusahaan yang secara bersama-

Share Ownership Policy of BOC Members

Pursuant to POJK No. 55/POJK.3/2016 on Corporate Governance Implementation for Commercial Banks, members of BOC must disclose their shareholding that amount to 5% (five percent) or more at the Bank and in other bank or companies in and outside of the county.

Thus, shareholding relationship is defined when an individual is a shareholder in a company jointly owned by members of BOC, BOD, and/or the Bank's controlling

Dewan Komisaris Board of Commissioners

sama dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank sehingga bersama-sama menjadi Pemegang Saham Pengendali pada perusahaan tersebut; dan/atau Perusahaan Pemegang Saham Pengendali Bank.

Transparansi Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank Maybank Indonesia maupun pada Bank dan Perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri, dinyatakan dalam Surat Pernyataan Dewan Komisaris. Bagi Komisaris Independen tidak diperkenankan untuk memiliki saham Bank dengan jumlah kepemilikan lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak tidak independen.

Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dipaparkan pada tabel berikut:

Transparansi Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

shareholders, effectively positioning all parties as the Controlling Shareholders of the said company; and/or the Bank's Controlling Entity.

Shareholding of members of the BOC that amount to 5% (five per cent) or more in Maybank Indonesia Bank or other banks and companies located in and outside of Indonesia is disclosed in a BOC statement. An Independent Commissioner is not allowed to own the Bank's shares in the amount that exceeds 5% (five per cent) of the Bank's paid-up capital in consideration that this may influence the commissioner's ability to act independently.

Shareholding Disclosure of BOC's members is described in the table below:

Shareholding Disclosure

No	Nama Name	Maybank Indonesia	Bank Lain Other Banks	Perusahaan Lain Other Companies	%
1	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None	-
2	Datuk Abdul Farid bin Alias	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None	-
3	Spencer Lee Tien Chye	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None	-
4	Umar Juoro	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None	-
5	Budhi Dyah Sitawati	Tidak ada None	Tidak ada None	PT Lintas Jeram Nusantara, Jakarta	25%
				PT Bangkit Maju Wisata, Purwokerto	55%
				PT Apsara Selaras Investa, Jakarta	25%
				PT Bravo Outdoor Supplies & Services, Jakarta	25%
6	Achjar Iljas	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None	-

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris terdiri dari beragam latar belakang kualifikasi pendidikan, keahlian serta pengalaman kerja profesional, usia, jenis kelamin dan kewarganegaraan. Penetapan komposisi Dewan Komisaris tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank.

Keberagaman komposisi Anggota Dewan Komisaris dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk melakukan fungsi pengawasan pada Bank.

Board of Commissioners Composition Diversity

The BOC's composition comprises the diversity of backgrounds that includes education qualification, expertise as well as professional experience, ages, genders and citizenships. The determination of the BOC's composition diversity is conducted by taking into account the Bank's requirements and complexity.

The BOC's composition diversity supports the implementation of BOC's roles and responsibilities, and allows supervisory functions at the Bank.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dengan keberagaman komposisi tersebut dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus proses fit and proper test dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian keberagaman komposisi Dewan Komisaris telah didukung dengan integritas, kompetensi serta reputasi keuangan yang baik dari seluruh Anggota Dewan Komisaris.

Rincian lengkap keberagaman anggota Dewan Komisaris disajikan dalam profil singkat Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan.

Keberagaman Komposisi Direksi

Keberagaman Komposisi Direksi terdiri dari beragam latar belakang kualifikasi pendidikan, keahlian serta pengalaman kerja profesional, usia, jenis kelamin dan kewarganegaraan. Penetapan komposisi Direksi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank.

Keberagaman komposisi Anggota Direksi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi untuk mengelola perusahaan dan mengembangkan pelaksanaan tata kelola pada Bank.

Pengangkatan anggota Direksi dengan keberagaman komposisi tersebut dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus proses fit and proper test dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian keberagaman komposisi Direksi telah didukung dengan integritas, kompetensi serta reputasi keuangan yang baik dari seluruh Anggota Direksi.

Rincian lengkap keberagaman anggota Direksi disajikan dalam profil singkat Direksi dalam Laporan Tahunan.

The appointment of the BOC with the above composition diversity is effective after the approval of the fit and proper test and approved by the Financial Services Authority. Thus the BOC's composition diversity is supported by integrity, competence and good financial reputation of all members of the BOC.

The details of the diversity of members of the BOC are presented in the brief profiles of the BOC in the Annual Report.

Board of Directors Composition Diversity

The BOD's composition comprises the diversity of background that includes education qualification, expertise as well as professional experiences, ages, genders and citizenship. The determination of the BOD's composition diversity is conducted by taking into account the Bank's requirements and complexity.

The BOD's composition diversity is managed in order to support the implementation of BOD's roles and responsibilities to manage the Company and develop the implementation of governance at the Bank.

The appointment of a BOD with the above composition diversity is effective after the approval of fit and proper test and approved by Financial Services Authority. Thus the BOD's composition diversity has been supported by the integrity, competence as well as good financial reputation of all members of BOD.

The details of the diversity of members of the BOD are presented in the brief profiles of the BOD in the Annual Report.

KOMITE DIBAWAH DEWAN KOMISARIS

Committee Under the Board of Commissioners

KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE)

Dalam rangka melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Perseroan wajib membentuk dan memiliki Komite Audit. Kewajiban tersebut tertuang di dalam Peraturan Bapepam Nomor: IX.1.5 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit sebagaimana telah diganti dengan POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 serta dan POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum tanggal 7 Desember 2016; dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007.

Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit yang memuat tujuan, kewenangan, keanggotaan (komposisi, kualifikasi, independensi dan masa keanggotaan), tugas-tugas, tata cara dan prosedur kerja dan rapat, pelaporan, kerahasiaan, evaluasi dan lain-lain hal yang penting. Piagam Komite Audit ini kemudian beberapa kali dikaji ulang untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Adapun, pengkinian terakhir atas Piagam Komite Audit adalah per tanggal 22 April 2016.

Struktur Keanggotaan Komite Audit

Berdasarkan POJK Nomor 55/POJK.03/2016, Komite Audit beranggotakan paling sedikit:

- 1 (satu) orang Komisaris Independen;
- 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi
- Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
- Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite audit.
- Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota komite audit paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite audit.

Berdasarkan Piagam Internal Audit, ketentuan komposisi keanggotaan Komite Audit diantaranya adalah:

- Salah satu dari anggota Komite Audit bertindak sebagai Sekretaris Eksekutif.
- Ketua dan Anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris, dan dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham.

AUDIT COMMITTEE

To implement good corporate governance and to improve effectiveness of the monitoring function carried out by the BOC, the Bank is required to establish and maintain an Audit Committee. This regulation is stated in Bapepam Regulation No.: IX.1.5 date 24 September 2004 on Establishment and Guidelines of Audit Committee, as amended by POJK No. 55/POJK.04/2015 dated 29 December 2015 and POJK No. 55/POJK.03/2016 on Implementation of Corporate Governance in Commercial Banks dated 7 December 2016; and Bank Indonesia Circular Letter (SEBI) No. 9/12/DPNP dated 30 May 2007.

Audit Committee Charter

Audit Committee has Audit Committee Charter that covers goals, authority, Committee membership (composition, qualification, independence and membership period), duties and responsibilities, work and meeting procedures, reporting, confidentiality, evaluation and other material matters. Audit Committee Charter has been reviewed several times to adjust with the applicable regulations. The latest update on Audit Committee Charter was as of 22 April 2016.

Audit Committee Membership Structure

Based on POJK No. 55/POJK.03/2016, Audit Committee shall have minimum number of members of:

- 1 (one) Independent Commissioner;
- 1 (one) independent member with expertise in finance or accounting
- Audit Committee is chaired by Independent Commissioner who is also member.
- A member of the BOD is may not sit in the Audit Committee.
- Independent Commissioner and Independent Member who serve members of Audit Committee must account to at least 51% (fifty one percent) of the total number of Audit Committee members.

Based on the Internal Audit Charter, the regulation on membership composition of Audit Committee is as follows:

- One member of the Audit Committee serves as Executive Secretary
- Chairman and Members of Audit Committee are appointed by BOC and reported to the General Meeting of Shareholders

Komite Dibawah Dewan Komisaris

Committee Under the Board of Commissioners

Saat ini, anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Currently, the members of Audit Committee are as follows:

No	Nama Name	Jabatan pada Komite Audit Position in Audit Committee	Periode Jabatan Term of Office	Keterangan/Keahlian Description/Expertise
1	Achjar Ilyas (AI)	Ketua merangkap Anggota Chairman and member	2015 -2018	Komisaris Independen Independent Commissioner
2	Umar Juoro (UJ)	Anggota *) Member *)	2015 -2018	Komisaris Independen Independent Commissioner
3	Umar Juoro (UJ)	Anggota *) Member *)	2015 -2018	Pihak Independen – Bidang Akuntansi dan Perbankan Independent Party - Accounting and Banking
4	Umar Juoro (UJ)	Anggota merangkap Sekretaris Member and Secretary	2015 -2018	Pihak Independen – Bidang Akuntansi dan Perbankan Independent Party - Accounting and Banking

*) sebagai Anggota Komite Audit sejak 24 April 2015 | as Member of Audit Committee since 24 April 2015

Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Achjar Ilyas dan beberapa anggotanya juga memiliki keahlian dalam bidang akuntansi serta perbankan. Dari aspek komposisi keanggotaan, Komite Audit telah memenuhi ketentuan POJK terkait serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku.

Audit Committee is chaired by Independent Commissioner Achjar Ilyas. Several Audit Committee members have expertise in accounting and banking. From the membership composition aspect, Audit Committee has complied with the related POJK regulations and other applicable regulations.

Kebijakan Pelaksanaan Rapat Komite Audit

Merujuk kepada Piagam Komite Audit, berikut adalah kebijakan pelaksanaan rapat Komite Audit:

Audit Committee Meeting Policies

Referring to Audit Committee Charter, below are the Audit Committee meeting policies:

Prosedur Kerja dan Rapat

Berdasarkan agenda tahunan Komite Audit, pelaksanaan pekerjaan dilakukan melalui penelaahan dan rapat-rapat dengan prosedur sebagai berikut:

- Bahan-bahan yang akan ditelaah termasuk laporan dan atau draft laporan disampaikan oleh unit kerja terkait kepada Komite Audit melalui email ataupun dalam bentuk hardcopy minimal dalam 3 (tiga) hari sebelum rapat reguler untuk ditelaah.
- Setelah melakukan penelaahan, Komite Audit dapat memberikan tanggapan dan/atau pertanyaan melalui email agar pelaksanaan rapat lebih efisien.
- Komite Audit menghadiri rapat dengan unit/pihak terkait.
- Komite Audit menyusun laporan /rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- Pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan oleh Ketua Komite Audit dalam Rapat Dewan Komisaris.
- Ketua Komite Audit dapat langsung menjalankan kewenangan untuk melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Audit dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris.

Roles and Meeting Procedures

Based on annual agenda of Audit Committee, the implementation of roles is conducted through review and meetings with the following procedures:

- Materials to be reviewed, including reports and/ or report drafts are submitted by related unit to the Audit Committee through email or hardcopy minimum 3 (three) days before regular meetings so that the materials can be reviewed.
- After the review, Audit Committee will be able to respond and/or ask questions through email to achieve more efficient meeting agenda.
- Audit Committee attends meetings with related units/ parties.
- Audit Committee prepares reports/recommendations to the BOC.
- Recommendation for the BOC can be submitted in written or verbally by the Chairman of Audit Committee in the BOC Meeting.
- Chairman of Audit Committee can immediately exercise the authority to involve independent party that are not members of the Audit Committee required to assist the roles of Audit Committee and report the results to BOC.

Komite Dibawah Dewan Komisaris Committee Under the Board of Commissioners

- g. Tata cara dan prosedur kerja untuk tugas-tugas tertentu seperti untuk memberikan rekomendasi atas penunjukan Kantor Akuntan Publik ditetapkan oleh Ketua Komite Audit.

Frekuensi Rapat

- Rapat reguler Komite Audit minimal sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, yang diadakan beberapa hari sebelum pelaksanaan rapat reguler Dewan Komisaris.
- Rapat reguler Komite Audit harus dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota Komite Audit.
- Komite Audit dapat setiap saat mengadakan Rapat lain untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu.

Agenda Rapat

- Agenda setiap Rapat harus ditetapkan dengan jelas dan didistribusikan kepada anggota Komite Audit sebelum pelaksanaan Rapat.
- Untuk rapat yang bersifat rutin dalam agenda rapat sedapat mungkin diawali dengan pembahasan tindak lanjut rapat sebelumnya.

Peserta dan Ketua Rapat

- Ketua Komite Audit dapat mengundang Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), akuntan publik, anggota Direksi, pejabat dan karyawan Bank maupun pihak-pihak lainnya yang terkait dengan agenda Rapat yang hendak dibicarakan.
- Ketua Komite Audit akan memimpin rapat. Dalam hal Ketua Komite Audit tidak hadir, salah seorang Komisaris independen lainnya yang menjadi Anggota Komite Audit akan memimpin rapat.

Hasil dan Risalah Rapat

- Keputusan rapat berdasarkan musyawarah mufakat.
- Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dituangkan dalam risalah rapat.
- Perbedaan pendapat (dissenting opinions), wajib dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasannya.
- Risalah rapat dapat dibuat oleh staf satuan kerja Bank yang hadir, tetapi harus ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite Audit yang hadir. Kecuali untuk rapat internal Komite Audit, risalah rapat disiapkan oleh Sekretaris Eksekutif Komite Audit.

- g. Methods and procedures for tasks such as giving recommendations on the appointment of Public Accountant Office is determined by Chairman of Audit Committee.

Meeting Frequency

- The minimum frequency of Audit Committee regular meetings is the same as the minimum frequency of BOC meetings as stipulated in the Articles of Association of the Bank. Audit Committee shall conduct its meetings several days prior to regular meeting of BOC.
- Regular meetings of Audit Committee must be attended by more than half of the number of members of Audit Committee.
- Audit Committee can at any time hold other meetings to discuss matters deemed necessary.

Meeting Agenda

- Agenda of each meeting should be determined clearly and distributed to the members of Audit Committee prior to the meeting.
- For routine meeting, the agenda shall start with the discussion of follow-up of the previous meeting.

Meeting Participants and Chairperson

- The Chairperson of Audit Committee may invite Head of Internal Audit Unit (SKAI), public accountant, members of BOD, officials, and employees of the Bank along with other parties that are related with the agenda of the Meeting to be discussed.
- The Chairperson of Audit Committee will lead the meeting. In the case of Chairman of Audit Committee's absence, one of the Independent Commissioners that is also member of Audit Committee will lead the meeting.

Result and Minutes of Meeting

- Decision of the meeting is taken based on consensus.
- In the case of consensus is not reached as stated in letter a, decision is made based on the most number of votes.
- Meeting result as stated in point (a) shall be recorded as Minutes of Meeting.
- Dissenting opinions must be recorded in the Minutes of Meeting along with the reasons.
- Minutes of Meeting can be composed by attending staff member of the Bank and shall be signed by all Members of Audit Committee attending the meeting with the exception of Audit Committee internal meeting in which the Minutes of Meeting is prepared by Executive Secretary of Audit Committee.

Komite Dibawah Dewan Komisaris

Committee Under the Board of Commissioners

Daftar Hadir Rapat Komite Audit Selama Tahun 2016

Merujuk kepada Piagam Komite Audit, rapat reguler Komite Audit minimal sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang berdasarkan POJK Nomor 55/POJK.03/2016 wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. Piagam Komite Audit juga menyatakan bahwa rapat reguler Komite Audit harus dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota Komite Audit.

Attendance List of the Audit Committee Meetings in 2016

Referring to Audit Committee Charter, regular meeting of Audit Committee should be conducted at least the same number of the minimum required meeting of BOC pursuant to POJK No. 55/POJK.3/2016, i.e. regularly at minimum 4 (four) times in 1 (one) year. Audit Committee Charter also stated that regular meeting of Audit Committee must be attended by more than half of the number of members of Audit Committee.

No	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Rate (%)
		Jan 11 (EY)	Jan 19 (SKAI)	Feb 22 (FAD)	Feb 23 (SKAI)	Mar 22 (SKAI)	Mar 31 (EY/FAD)	Apr 20 (SKAI)	Apr 25 (FAD)	Mei 25 (SKAI)	Jun 21 (SKAI)	Jul 20 (SKAI)	Jul 27 (FAD)	Sep20 (SKAI)	Okt 20 (FAD)	Okt 26 (SKAI)	Nov 22 (SKAI)		
1.	Achjar Ilijas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16	100%
2.	Umar Juoro	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16	94%
3.	Agus Kretarto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16	100%
4.	Nina Diyanti Anwar	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16	94%

Keterangan:

✓ = Hadir ; ✗ = Tidak hadir

Tingkat kehadiran dihitung berdasarkan atas frekuensi rapat sebagai anggota Komite Audit Description

✓ = Attended; ✗ = Absent

Attendance rate is calculated based on meeting frequency as member of Audit Committee

Selama tahun 2016, telah dilaksanakan Rapat Komite Audit sebanyak 16 (enam belas) kali. Kemudian, merujuk kepada data kehadiran rapat Komite Audit selama tahun 2016, setiap rapat Komite Audit telah dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota Komite Audit. Hal ini telah sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku.

During 2016, meetings of Audit Committee had been conducted 16 (sixteen) times. Furthermore, referring to Audit Committee meeting attendance data throughout 2016, each meeting of the Audit Committee was attended by more than half of the member of Audit Committee. This complies with all the applicable regulations.

Independensi Anggota Komite Audit

Audit Committee Member Independency

No	Kriteria Independensi Independency Criteria	Anggota Komite Audit Audit Committee Member			
		AI	UJ*)	AK	NDA
1	Tidak mempunyai saham baik langsung ataupun tidak langsung; jika anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut. No ownership of shares directly or indirectly; in the event that a member of Audit Committee obtains the Bank's shares as a result of a legal event, the stocks must be transferred to other parties within maximum 6 (six) months since the shares are obtained.	✓	✓	✓	✓

Komite Dibawah Dewan Komisaris Committee Under the Board of Commissioners

No	Kriteria Independensi Independency Criteria	Anggota Komite Audit Audit Committee Member			
		AI	UJ ^{*)}	AK	NDA
2	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi maupun pemegang saham utama Bank. No affiliation with members of BOC, members of BOD and main shareholders of the Bank.	✓	✓	✓	✓
3	Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank. No business relationship directly and indirectly that are related with the Bank's business activities.	✓	✓	✓	✓
4	Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen. An Audit Committee member is not working, has the authority over, or is responsible to plan, lead, control, or monitor the Bank's activities in the last 6 (six) months except for Independent Commissioner.	✓	✓	✓	✓
5	Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa <i>assurance</i> , jasa <i>non-assurance</i> , jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Audit Committee Member is not a part of any Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm, Public Appraisal Firm, or other parties providing assurance, non-assurance, appraisal, and/or other consulting services to the Bank in the last 6 (six) months.	✓	✓	✓	✓

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Selama Tahun 2016

Selama tahun 2016, Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dilakukan melalui komunikasi secara tertulis (pelaporan) maupun dengan mengadakan rapat secara berkala, baik dengan SKAI, Internal Audit Committee (IAC), unit kerja Finance & Accounting Division (FAD) maupun Kantor Akuntan Publik (KAP). Ketua Komite Audit menyampaikan laporan terkait dengan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut hasil audit termasuk pula rekomendasi (jika ada) kepada Dewan Komisaris dalam rapat yang diadakan setelah Rapat Komite.

Komite Audit juga telah melakukan evaluasi atas rencana dan hasil audit SKAI, memonitor pelaksanaan audit oleh KAP agar sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku termasuk memberikan rekomendasi dalam rangka meyakinkan bahwa laporan keuangan telah disiapkan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum dan peraturan yang ada serta pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, KAP dan hasil pengawasan Bank Indonesia (OJK). Pelaksanaannya dilakukan melalui *review*, rapat-rapat dan komunikasi dengan KAP, SKAI yang dihadiri oleh IAC, Unit Kerja FAD dan Direktur Keuangan.

Audit Committee Activities in 2016

In 2016, Audit Committee conducted monitoring and evaluation of the planning and audit implementation, and monitored the follow-up of the audit results to assess adequacy of internal control, including adequacy of financial reporting process. These were conducted through written communication (reporting) and by hosting regular meetings, with SKAI, Internal Audit Committee (IAC), Finance & Accounting Division (FAD), and with Public Accounting Firm (KAP). Chairman of Audit Committee submitted the reports that are related with monitoring and evaluation and audit results follow-up, as well as recommendations (if any) to the BOC in the meeting that was conducted after the Committee Meeting.

Audit Committee had already conducted evaluation of the plans and audit results of SKAI, monitored audit activities by KAP to comply with the applicable audit standards, including in giving recommendations to ensure that the financial reports had been prepared per applicable accounting standard and regulations. Follow-up actions were also taken by BOD on the findings of SKAI, KAP and monitoring results of Bank Indonesia (OJK). The implementation was done through review, meetings and other communications with KAP and SKAI, attended by IAC, FAD Unit and Finance Director.

Komite Dibawah Dewan Komisaris

Committee Under the Board of Commissioners

Profil Anggota Komite Audit

Profiles of Audit Committee Members



Achjar Iljas – Ketua Komite Audit, Komisaris Independen | Chairman of Audit Committee, Independent Commissioner

Menjabat sebagai Ketua Komite Audit PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada profil Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.

As Chairman of Audit Committee PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Detail of his experience and qualifications are provided in Board of Commissioners profile on Company Profile chapter.



Umar Juoro – Anggota Komite Audit, Komisaris Independen | Member of Audit Committee, Independent Commissioner

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada profil Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.

As Member of Audit Committee PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Detail of his experience and qualifications are provided in Board of Commissioners profile on Company Profile chapter.



Agus Kretarto – Anggota Komite Audit, Pihak Independen | Member of Audit Committee, Independent Party

Warga Negara Indonesia. Seorang *Chartered Accountant*. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit dan Pemantau Risiko PT Bank Maybank Indonesia Tbk sejak 19 April 2012. Sebelumnya beliau menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko BII sejak 2008. Beliau juga pernah menjabat sebagai anggota Komite Audit dan Pemantau Risiko Bank Barclays Indonesia. Karir beliau sebelumnya di bidang perbankan adalah sebagai Direktur Kepatuhan Bank Harmoni Internasional (2002-2003), Kepala Divisi Perencanaan & Pengembangan dan Sekretaris Perusahaan PT Bank Rama Tbk (1995-2000) dan Kepala Internal Audit (1993-1994). Beliau memulai karirnya sebagai Auditor pada Badan Pengawas Keuangan dan Pengembangan sejak 1981 dan pernah ditempatkan sebagai Ketua Tim Audit pada Bank Ekspor Impor Indonesia (1987-1992). Beliau juga pernah menjadi board member Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta (2005-2011). Beliau adalah lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan memperoleh gelar Master (Magister Manajemen) dari Universitas Indonesia pada tahun 1991.

Indonesian Citizen. A Chartered Accountant. He is Member of Audit Committee and Risk Oversight Committee in PT Bank Maybank Indonesia Tbk since 19 April 2012. Prior to his current position, he was a member of Risk Oversight Committee in BII since 2008. He also once served as member of Audit Committee and Risk Oversight Committee at Bank Barclays Indonesia. Previously, his career in banking was as Compliance Director at Bank Harmoni Internasional (2002-2003), Head of Planning and Development Division and Corporate Secretary at PT Bank Rama Tbk (1995-2000), and Head of Internal Audit (1993-1994). He started his career as Auditor at The Audit and Development Board since 1981, and was assigned as Head of Audit Team at Bank Ekspor Impor Indonesia (1987-1992). He also served as board member of DKI Jakarta Drinking Water Regulator Board (2005-2011). He graduated from Indonesia State College of Accountancy (STAN) and earned his Master (Master of Management) from University of Indonesia in 1991.

Komite Dibawah Dewan Komisaris Committee Under the Board of Commissioners



Nina Diyanti Anwar – Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif Komite Audit | Member and Executive Secretary of Audit Committee Independent Party

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Bank Maybank Indonesia Tbk sejak 19 April 2012. Karir beliau dimulai sebagai Auditor pada Kantor Akuntan PriceWaterhouse (1985-1988) dan selanjutnya menjadi Analis Keuangan pada USAID, Jakarta (1988-1989). Beliau kemudian berkarir di industri perbankan dan sempat menduduki beberapa posisi diantaranya *Account Manager* pada Bank Indovest (1989-1994); *Senior Credit Analyst* (1994-1995) dan *Account Manager/AVP* (1995-1999) pada Rabobank; *Account Officer/AVP* pada ABN Amro Bank (1999-2000); *Group Head/VP Investor Relations Division/Treasury Group/Assets Management Division* pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN (2000-2004). Selanjutnya beliau juga pernah menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Semen Gresik (2004-2011) dan PT GMF Aerosia (2006-2015). Beliau meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 1985.

Indonesian Citizen. She is Member of Audit Committee in PT Bank Maybank Indonesia Tbk since 19 April 2012. Her career started as Auditor at PriceWaterhouse Accounting Firm (1985-1988) and she Worked as Financial Analyst at USAID, Jakarta (1988-1989). She then started her career in Banking and had the opportunity to work in various positions, namely Account Manager in Bank Indovest (1989-1994); Senior Credit Analyst (1994-1995) at Rabobank; Account Officer/AVP at ABN Amro Bank (1999-2000); Group Head/VP Investor Relations Division/Treasury Group/Assets Management Division at Indonesian Bank Restructuring Agency/IBRA (2000-2004). She also once served as member of Audit Committee of PT Semen Gresik (2004-2011) and PT GMF Aerosia (2006-2015). She earned her degree, Bachelor in Accounting from Faculty of Economics, University of Indonesia in 1985. Training Data of the Audit Committee in 2016 Yellow highlight indicates training attended by Audit Committee members.

Data Pelatihan Komite Audit Selama Tahun 2016

No	Nama Name	Penyelenggara - Pelatihan/ Seminar Organizer - Training/Seminar	Tanggal Date	Tempat Venue
1.	Umar Juoro	Maybank Indonesia - AML/CFT Seminar	25 Juli 2016	Sentral Senayan 3, 27 th floor, Jakarta
		Maybank Indonesia - Economic Insight, Seminar Tax Amnesty (SME&Commercial) Seminar Tax Amnesty	27 Juli 2016	Sentral Senayan 3, 28 th floor, Jakarta
		Maybank Indonesia - Diskusi Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak	27 Juli 2016	Sentral Senayan 3, 28 th floor, Jakarta
2.	Achjar Iljas	Maybank Indonesia - AML/CFT Seminar	25 Juli 2016	Sentral Senayan 3, 27 th floor, Jakarta
		LPII Workshop Akselerasi Pertumbuhan Keuangan Syariah	11 -12 November 2016	Intercontinental Hotel, Jakarta
3.	Agus Kretarto	Training PSAK	25 Agustus 2016	Sentral Senayan 3, Jakarta
4.	Nina Diyanti Anwar	Training PSAK	25 Agustus 2016	Sentral Senayan 3, Jakarta

Komite Dibawah Dewan Komisaris

Committee Under the Board of Commissioners

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan berdasarkan:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko:

Pedoman dan tata tertib dituangkan dalam Piagam Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee Charter*) yang disetujui oleh Dewan Komisaris. Piagam tersebut memuat antara lain struktur dan keanggotaan komite, tujuan dan tugas komite, ruang lingkup tanggung jawab, pengaturan rapat dan ketentuan lain-lain. Adapun, Piagam Komite Pemantau Risiko telah dikinikikan per tanggal 22 April 2016.

Struktur Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Nama Name	Jabatan pada Komite Pemantau Risiko Position in the RMC	Periode Jabatan Periodt	Keterangan/Keahlian Note/Expertise
Umar Juoro (UJ)	Ketua merangkap Anggota Chair and Member	2015 - 2018	Komisaris Independen Independent Commissioner
Budhi Dyah Sitawati (BD)	Anggota Member	2015 - 2018	Komisaris Independen Independent Commissioner
Spencer Lee Tien Chye (SL)	Anggota Member	2015 - 2018	Komisaris Commissioner
Achjar Iljas (AI)	Anggota Member	2015 - 2018	Komisaris Independen Independent Commissioner
Farid Harianto (FH)	Anggota Member	2015 - 2018	Pihak Independen – Bidang Manajemen Risiko Independent Party-Risk Management
Agus Kretarto (AK)	Sekretaris merangkap Anggota Secretary and Member	2015 - 2018	Pihak Independen – Bidang Keuangan Independent Party-Financial

RISK OVERSIGHT COMMITTEE

Risk Oversight Committee is established pursuant to:

Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 55/POJK.03/2016 on the Implementation of Governance for Commercial Banks and Bank Indonesia Circular (SEBI) Number 15/15/DPNP dated 29 April 2013.

Risk Oversight Committee Charter:

The guidelines and rules of the Risk Oversight Committee (ROC) are delineated in the ROC Charter approved by the BOC. The Charter describes structure, membership, goals and tasks, scope of responsibilities, meeting mechanisms, and other matters pertaining the RMC. The RMC charter was last updated on 22 April 2016.

Risk Oversight Committee Membership

Komite Dibawah Dewan Komisaris Committee Under the Board of Commissioners

Berikut adalah profil dari anggota Komite Pemantau Risiko

Risk Oversight Committee



Umar Juoro – Ketua Komite Pemantau Risiko, Komisaris Independen | Umar Juoro – RMC Chairperson, Independent Commissioner

Menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada profil Komisaris dalam bab Profil
Perusahaan.

As Chairman of Risk Oversight Committee PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
Detail of his experience and qualifications are provided in Board of Commissioners profile on
Company Profile chapter.



Budhi Dyah Sitawati – Anggota Komite, Komisaris Independen | Budhi Dyah Sitawati – Member, Independent Commissioner

Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada profil Komisaris dalam bab Profil
Perusahaan.

As Member of Risk Oversight Committee PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
Detail of her experience and qualifications are provided in Board of Commissioners profile on
Company Profile chapter.



Spencer Lee Tien Chye – Anggota Komite , Komisaris | Spencer Lee Tien Chye – Committee Member, Commissioner

Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada profil Komisaris dalam bab Profil
Perusahaan.

As Member of Risk Oversight Committee PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
Detail of his experience and qualifications are provided in Board of Commissioners profile on
Company Profile chapter.



Achjar Iljas – Anggota Komite, Komisaris Independen | Achjar Iljas – Member, Independent Commissioner

Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada profil Komisaris dalam bab Profil
Perusahaan.

As Member of Risk Oversight Committee PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
Detail of his experience and qualifications are provided in Board of Commissioners profile on
Company Profile chapter.

Komite Dibawah Dewan Komisaris

Committee Under the Board of Commissioners



Farid Harianto – Anggota Komite, Pihak Independen | Farid Harianto – Committee Member, Independent Party

Warga Negara Indonesia. Diangkat sebagai anggota Komite Manajemen Risiko PT Bank Internasional Indonesia Tbk sejak 28 Mei 2007. Dr. Farid Harianto adalah seorang ekonom dengan keahlian di bidang keuangan. Beliau pernah menjabat sebagai staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga penasehat Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Tim Resolusi BI untuk Bank Indover. Beliau juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Unggul Indah Cahya Tbk, PT Lippo Karawaci Tbk, dan PT Toba Bara Sejahtera Tbk, serta editor pada Globe Asia. Beliau adalah anggota dari Asian Executive Board Wharton School, University of Pennsylvania dan anggota Presidential Advisory Committee dari National University of Singapore. Selama dua puluh lima tahun terakhir, karir profesional beliau mencakup sektor akademik serta publik dan swasta. Beliau sempat menjabat sebagai CEO Credit Rating Indonesia (1995-1998) dan kemudian diangkat menjadi Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN; 1998-2000). Selama masa jabatannya di BPPN, beliau adalah ujung tombak konsolidasi (penutupan, penggabungan, dan rekapitulasi) dari sektor perbankan, serta proses negosiasi dan penyelesaian dengan para pemegang saham pengendali bank yang mengakibatkan miliaran dolar aset berpindah ke BPPN. Beliau adalah Direktur Program Pasca Sarjana pada Institut Manajemen Pendidikan dan Pengembangan, dan Kepala Riset Ekonomi Mikro pada Pusat Antar Universitas (PAU), Universitas Indonesia. Beliau sempat menjadi dosen tamu dan Ketua ASEAN and International Studies pada Center of International Studies (CIS) University of Toronto (1993-1995), dan pernah menjabat sebagai penasehat pada berbagai perusahaan swasta Indonesia dan berbagai organisasi internasional termasuk FIAS/World Bank, Asian Development Bank, CIDA, dan IDRC. Kolumnya terbit bulanan pada GlobeAsia, dan tulisannya telah diterbitkan pada berbagai jurnal ilmiah terkemuka termasuk Policy Research, Transnasional Company, Strategic Management Journal, Academy of Management Journal, Organization Studies, dan buku-buku berbagai editan. Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB, 1975), serta gelar Master (1988) dan Ph.D (dengan distinctions) dari University of Pennsylvania/Wharton School (1989).

Indonesian Citizen. Appointed as Member of Risk Management Committee PT Bank Internasional Indonesia Tbk since 28 May 2007. Dr. Farid Harianto is an economist with expertise in finance. Previously he served as special staff to the Vice President, Republic of Indonesia (2009-2014) and as an advisor of Governor of Bank Indonesia and Head of BI Resolution Team for Bank Indover. He currently serves as member of the Board of Commissioners of PT Unggul Indah Cahya Tbk, PT Lippo Karawaci Tbk, and PT Toba Bara Sejahtera Tbk, and as a contributing editor at Globe Asia magazine. He is a member of the Presidential Advisory Committee of the National University of Singapore. Over the last twenty-five years, his professional career encompasses academic, public and private sectors. He was the CEO of Credit Rating Indonesia (1995-1998) and later appointed as Vice Chairman of the Indonesian Banking Restructuring Agency (IBRA: 1998-2000). During his service at IBRA, he led the consolidation process (closing, merger and recapitalization) of the banking sector as well as the negotiation and settlement process with controlling shareholders of the banks that resulted in the transfer of billions of dollars worth of assets to IBRA. He is Director of the Graduate Program at Institut Manajemen Pendidikan dan Pengembangan (1990-1993), and Head of Research of Microeconomics at the interuniversity (PAU), University of Indonesia. He was a visiting lecturer and Chairman of the ASEAN and international studies at the Center of International Studies (CIS), University of Toronto (1993-1995), and served as advisor at many private companies in Indonesia and various international organizations including FIAS/World Bank, Asian Development Bank, CIDA, and IDRC. His research papers have been published in leading scientific journals such as Policy Research, Transnational Company, Strategic Management Journal, Academy of Management Journal, Organization Studies, and books of various editions. He earned Bachelor in Electrical Engineering at Institut Teknologi Bandung (ITB, 1975) and Master's (1988) and Ph.D. with distinction (1989) from University of Pennsylvania/Wharton School (1989).

Komite Dibawah Dewan Komisaris Committee Under the Board of Commissioners



Agus Kretarto – Anggota Merangkap Sekretaris Eksekutif, Pihak Independen | Agus Kretarto – Member and Executive Secretary, Independent Party

Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada profil Komite Audit dalam bab Tata Kelola Perusahaan.

As Member of Risk Oversight Committee PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Detail of his experience and qualifications are provided in Audit Committee profile on Good Corporate Governance chapter.

No	Kriteria Independensi Independency Criteria	Anggota Komite Pemantau Risiko Members of RMC					
		UJ	BD	SL	AI	FH	AK
1	Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Has no shareholding affiliation with members of the BOC, BOD, and/or Controlling Shareholders or with the Bank that may affect the ability to act independently.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Has no financial affiliation with members of the BOC, members of BOD and controlling shareholders of the Bank that may affect the ability to act independently.	✓	✓	✗	✓	✓	✓
3	Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Has no management affiliation with members of the BOC, BOD, and/or Controlling Shareholders or any forms of relationship with the Bank that may affect the ability to act independently.	✓	✓	✗	✓	✓	✓
4	Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Has no familial affiliation with members of the BOC, BOD, and/or Controlling Shareholders or with the Bank that may affect the ability to act independently.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan: ✓ = Ya ; ✗ = Tidak

Note: ✓ = Yes ; ✗ = No

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Piagam Komite Pemantau Risiko, tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- 1) Mereviu kerangka, kebijakan dan strategi yang dibuat oleh manajemen meliputi:
 - a. Kerangka dan kebijakan Manajemen Risiko Bank secara keseluruhan

Tasks and Responsibilities of RMC

Pursuant to RMC Charter, the RMC has the following tasks and responsibilities:

- 1) Review the following frameworks, policies, and strategies of the management:
 - a. Risk management framework and policy bank-wide

Komite Dibawah Dewan Komisaris

Committee Under the Board of Commissioners

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> b. Kebijakan serta limit treasury dan Institusi Keuangan c. Kebijakan manajemen risiko kredit d. Kebijakan manajemen risiko operasional e. Kebijakan manajemen risiko likuiditas f. Kebijakan manajemen risiko pasar | <ul style="list-style-type: none"> b. Policy and treasury limit and financial institutions c. Credit risk management policy d. Operational risk management policy e. Liquidity risk management policy f. Market risk management policy |
| <ul style="list-style-type: none"> 2) Melakukan review dan menilai kebijakan untuk melaksanakan program <i>stress testing</i>, dan mereview efektivitas program <i>stress testing</i>. 3) Mengevaluasi implementasi kerangka dan kebijakan manajemen risiko. 4) Melakukan review pada area ketidakpatuhan terkait dengan <i>prudential regulations</i> serta area ketidakpatuhan dalam kerangka kebijakan dan kontrol yang telah ditetapkan oleh unit kerja terkait. 5) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit-unit Manajemen Risiko. 6) Memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan informasi pemantauan risiko dan pelaksanaan tanggung jawabnya. 7) Hal-hal lain yang dipandang perlu oleh Dewan Komisaris ataupun Anggota Komite Pemantau Risiko. | <ul style="list-style-type: none"> 2) Review and assess the policy and effectiveness of stress testing program 3) Evaluate risk management framework and policy implementation 4) Review any incompliance with prudential regulations and policies and control applied by relevant units 5) Review and evaluate the performance of Risk Management Committee and Risk Management Units 6) Provide inputs to the BOC relating to risk monitoring information and implementation of responsibilities 7) Other matters deemed important by the BOC or members of RMC. |

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2016

Risk Oversight Committee List and Level of Meeting Attendance 2016

No.	Nama Name	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Sep	Okt	Nov	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Tingkat Kehadiran Rate of Attendance
1	Umar Juoro	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	90%
2	Budhi Dyah Sitawati	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	100%
3	Spencer Lee	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	100%
4	Achjar Iljas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	100%
5	Farid Harianto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	100%
6	Agus Kretarto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	100%

Pada dasarnya program Komite Pemantau Risiko adalah dalam rangka mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko oleh Komite Manajemen Risiko dan Unit Manajemen Risiko.

Kegiatan utama Komite Pemantau Risiko dilaksanakan dengan rapat-rapat, yang selama tahun 2016 dilakukan sebanyak 10 kali rapat.

RMC work programs in principle aim to evaluate the consistency between risk management policies and practices and to monitor and evaluate risk management implementation of the Risk Management Committee and Risk Management Units.

RMC main activities take place during its meetings. In 2016, RMC held 10 meetings that addressed the following issues:

Komite Dibawah Dewan Komisaris Committee Under the Board of Commissioners

Adapun pokok bahasan masing-masing rapat adalah:

- Kerangka Acuan Komite Kredit; dan Kewenangan Pemberian Kredit Back to Back.
- Limit Industri Internal 2016 sebagai Management Alert Action
- Risk Appetite Statement 2016
- Pagu Kewenangan untuk Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit
- Kebijakan Stress Test.
- Kebijakan ICAAP

Sedangkan selama semester II tahun 2016 evaluasi dilakukan terhadap:

- Industri limit - review tengah tahunan
- Limit kewenangan untuk penghapus-bukuan
- TOR untuk RMC
- Kerangka kerja manajemen risiko
- Trading Book Policy Statement
- Kebijakan Manajemen Risiko Operasional

Thus, the main topics discuss in the meetings are as follow:

- Credit Committee Terms of Reference and authority of Back to Back Lending
- Internal Industry Limit for 2016 as Management Alert Action
- Risk Appetite Statement 2016
- Limit of Authority for Credit Restructuring and Settlement
- Stress Test Policy
- ICAAP Policy

In the second semester of 2016, RMC evaluated the following:

- Industry limit – half year review
- Authority limit for write-off
- RMC TOR
- Risk Management Framework
- Trading Book Policy Statement
- Operational Risk Management Policy

Daftar Pelatihan Komite Pemantau Risiko Tahun 2016

List of Risk Oversight Committee Training in 2016

No	Nama	Penyelenggara	Tanggal	Tempat
1	Umar Juoro	Dapat merujuk kepada Tabel Training Dewan Komisaris		
2	Budhi Dyah Sitawati			
3	Spencer Lee Tien Chye			
4	Achjar Iljas			
5	Farid Harianto		-	-

Komite Dibawah Dewan Komisaris

Committee Under the Board of Commissioners

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Latar Belakang

Dalam semangat perbaikan yang berkesinambungan bagi fungsi pengawasan serta dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, maka Dewan Komisaris dari PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi.

Hal ini dilakukan untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan kebijakan remunerasi Perseroan dan pencalonan nominasi anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan.

Inisiatif ini sejalan dengan beberapa regulasi yang menjadi dasar pembentukan Komisi Nominasi & Remunerasi yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum
2. Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Komersial
3. Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum yang mengubah Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
5. Surat Keputusan Direksi No.SK.2016.002/DIR COMPLIANCE tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Periode 2015 – 2018
6. Surat Keputusan Direksi No.SK.2013.003/Dir Compliance tanggal 16 Mei 2013 tentang Perubahan Atas Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Periode 2012-2015
7. Surat Keputusan Direksi No.SK.2013.006/Dir Compliance tanggal 1 Juni 2013 tentang Perubahan Atas Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Periode 2012-2015
8. Surat Keputusan Direksi No.SK.2014.002/Dir HC tanggal 1 Juli 2014 tentang Perubahan Atas Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Periode 2012-2015.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Background

As part of the efforts of continuous improvement and to implement Good Corporate Governance the BOC and PT Bank Maybank Indonesia Tbk have established the Nomination and Remuneration Committee (NRC).

The Committee is formed as a unit that reviews and provides recommendations to the BOC concerning the Bank's remuneration policies and the nomination of BOC and BOC members.

This initiative is also aligned with the following regulations, which are the basis of establishment of Nomination and Remuneration Committee:

1. Bank Indonesia Regulation No.8/4/PBI/2006 dated 30 January 2006 on Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks
2. Bank Indonesia Regulation No.8/14/PBI/2006 dated 5 October 2006 on the Amendment to Bank Indonesia Regulation No.8/4/PBI/2006 dated 30 January 2006 on Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks
3. Bank Indonesia Circular Letter No.15/12/DPNP dated 29 April 2013 on Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks as amended by Bank Indonesia Circular Letter No.9/15/DPNP dated 30 May 2007
4. Financial Services Authority Regulation No.34/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 on Nomination and Remuneration Committee of Issuer or Public Company
5. Board of Directors Decision Letter No.SK.2016.002/DirCOMPLIANCE on the Composition of Nomination and Remuneration Committee for the Period 2015-2018
6. Board of Directors Decision Letter No.SK.2013.003/Dir Compliance dated 16 May 2013 on Changes to the Composition of Nomination and Remuneration Committee for the Period 2012-2015
7. Board of Directors Decision Letter No.SK.2013.006/Dir Compliance dated 1 June 2013 on Changes to the Composition of Nomination and Remuneration Committee for the Period 2012-2015
8. Board of Directors Decision Letter No.SK.2014.002/Dir HC dated 1 July 2014 on Changes to the Composition of Nomination and Remuneration Committee for the Period 2012-2015

Komite Dibawah Dewan Komisaris Committee Under the Board of Commissioners

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 9. Hasil Keputusan RUPS Tahunan Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 26 tanggal 24 April 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Engawati Ghazali, SH. 10. Surat Keputusan Direksi No.SK.2015.004/Dir Compliance tanggal 22 Mei 2015 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi periode 2015-2018. 11. Surat Keputusan Direksi No.SK.2016.002/Dir Compliance tanggal 24 Juni 2016 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Periode 2015-2018 12. Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi | <ol style="list-style-type: none"> 9. The Bank's Annual GMS Resolution as stipulated in the Deed of Meeting No. 26 dated 24 April 2015 of Notary Engawati Ghazali, SH 10. Board of Directors Decision Letter No.SK.2015.004/Dir Compliance dated 22 May 2015 on Changes to the Composition of Nomination and Remuneration Committee for the Period 2015-2018 11. Board of Directors Decision Letter No.SK.2016.002/Dir COMPLIANCE dated 24 June 2016 on the Nomination and Remuneration Committee for the Period 2015-2018 12. Nomination and Remuneration Committee Charter |
|--|--|

Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki pedoman yang berisi tujuan, tugas dan tanggung jawab, komposisi, keanggotaan, mekanisme rapat, tata cara dan prosedur kerja komite serta pelaporan dan pemberian rekomendasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Tanpa bermaksud membatasi peran Komite, berikut merupakan tugas dan tanggung jawab spesifik Komite Nominasi dan Remunerasi:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> a. Nominasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Dewan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris (jumlah, kompetensi, kemampuan, dan keseimbangannya dari status independen dan non-independen). 2. Menentukan prosedur, kebijakan, dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi untuk penunjukan dan/atau penggantian Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, anggota independen dari Komite-Komite Dewan Komisaris, dan <i>Executive Vice President</i>. 3. Memberikan rekomendasi mengenai kandidat untuk mengisi posisi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman masing-masing individu untuk dinominasikan kepada Dewan Komisaris, dan kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. | <h3>Nomination and Remuneration Committee Charter</h3> <p>The NRC Charter describes the goals, tasks and responsibilities, composition, membership, meeting mechanism, work mechanism and procedures, and reporting and recommendation mechanism of the NRC.</p> <h3>Nomination and Remuneration Committee Charter Tasks and Responsibilities</h3> <p>The NRC, without limiting its role, has the following tasks and responsibilities:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nomination <ol style="list-style-type: none"> 1. Recommend the composition of BOD and/or BOC to the BOC (number of members, competence, skills, and the ratio between independent and non-independent members) 2. Determine the procedures, policies, and criteria required in the nomination process pertaining the appointment and/or replacement of the members of BOC, BOD, Shariah Supervisory Board, independent members of BOC committees, and Executive Vice President. 3. Recommend candidates of the members of BOC, BOD, Shariah Supervisory Board. Recommendations shall be made based on the competence, skills, and experience of each candidate. Nominees are submitted to BOC to be proposed to the General Meeting of Shareholders. |
|--|---|

Komite Dibawah Dewan Komisaris

Committee Under the Board of Commissioners

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kandidat untuk menjadi anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman dari individu yang dinominasikan. 5. Mengkaji dan memberikan persetujuan kepada kandidat yang sesuai untuk menjabat sebagai <i>Executive Vice President</i> berdasarkan dukungan dari Dewan Direksi. 6. Membantu dan/atau merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai promosi, konfirmasi dan penghentian masa tugas dari anggota Dewan Direksi. 7. Membantu dan/atau memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai syarat dan ketentuan pengangkatan atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris. 8. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, kandidat-kandidat yang potensial pada nominasi Dewan Komisaris dan Presiden Direktur bagi anak perusahaan. <p>b. Remunerasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait prosedur untuk meninjau struktur, kebijakan dan rencana remunerasi serta syarat dan ketentuan bagi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 2. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan-kebijakan remunerasi dan/atau rencana dan syarat dan ketentuan masa tugas bagi anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan karyawan secara umum, untuk kemudian diajukan kepada Dewan Direksi. 4. Memastikan keselarasan antara keputusan remunerasi dengan kinerja finansial dan hasil pencadangan, hasil penilaian kinerja, kesetaraan dengan kelompok yang setara, dan juga sasaran jangka panjang dan strategi Bank. 5. Mengajukan dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai kepangkatan bagi Dewan Direksi. | <ol style="list-style-type: none"> 4. Recommend candidates of independent members of BOC committees based on the competence, skills, and experience of each candidate. 5. Review and approve the suitable candidate to serve as Executive Vice President. The candidate shall have the endorsement from BOD. 6. Assist and/or recommend promotion, confirmation, and discharge of BOD members to the BOC. 7. Assist and/or recommend the terms and conditions of appointing or dismissing members of the BOC. 8. Evaluate and recommend potential candidates nominated as members of Board of Commissioners and President Director of subsidiaries to the BOC. <p>b. Remuneration</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recommend to the BOC procedures to review the structure, policies, plan and terms and conditions of BOC and BOD remuneration, submitted to the General Meeting of Shareholders. 2. Evaluate and recommend to the BOC remuneration policies and/or plan and terms and conditions of the tenure of independent members of BOC committees and Shariah Supervisory Board. 3. Recommend to the BOC remuneration policies of Executive Officers and employees to be proposed to the BOD. 4. Ensure that remuneration decisions are consistent with the Bank's financial performance, financial provisioning, results of performance appraisal, position against peers in the industry, long-term goals, and strategies. 5. Propose and recommend to the BOC the rank of BOD. |
|--|--|

Komite Dibawah Dewan Komisaris Committee Under the Board of Commissioners

Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee Independency

Kriteria Independensi Independency Criteria	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Members of NRC			
	BDS	UJ	DAF	SR
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Has no shareholding affiliation with members of the BOC, BOD, and/or Controlling Shareholders or with the Bank that may affect the ability to act independently	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Has no financial affiliation with members of the BOC, members of BOD and controlling shareholders of the Bank that may affect the ability to act independently	√	X	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Has no management affiliation with members of the BOC, BOD, and/or Controlling Shareholders or any forms of relationship with the Bank that may affect the ability to act independently	√	X	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Has no familial affiliation with members of the BOC, BOD, and/or Controlling Shareholders or with the Bank that may affect the ability to act independently	√	√	√	√

Kebijaksanaan dan Pelaksanaan Tentang Frekuensi Rapat Komite

Meeting Policy and Frequency

Rapat Komite

- Frekuensi dan Tingkat Kehadiran
Komite diwajibkan mengadakan rapat minimum (1) kali setiap 4 (empat) bulan. Meeting dapat diadakan dalam bentuk pertemuan fisik, atau melalui *telepresence* atau *teleconference*. Selama tahun 2016, Rapat Komite Nominasi & Remunerasi telah diadakan 9 (Sembilan) kali.

Committee Meeting

- Frequency and Level of Attendance
The Committee is required to meet at least 1 (one) time every 4 (four) months. A meeting may be attended in person or remotely via teleconference. In 2016, NRC held 9 (nine) meetings.

Komite Dibawah Dewan Komisaris

Committee Under the Board of Commissioners

Daftar Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi:

NRC List and Rate of Attendance:

No	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi NRC Members	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Frekuensi kehadiran Rapat Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Rate of Attendance (%)	
		21 Januari	22 Februari	24 Maret	21-Apr	30 Mei	23 Juni	23-Sep	28 Oktober	25-Nov			
1	Budhi Dyah Sitawati	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	100%	
2	Datuk Abdul Farid bin Alias	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	8	89%	
3	Umar Juoro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	100%	
4	Herman Cahyadi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sudah tidak menjadi anggota Komite No longer served as committee member			6	67%	
5	Setyorini Rahayu	Belum menjadi anggota Komite Not yet a member of the committee						✓	✓	✓		3	33%

Keterangan: Terdapat perubahan dari Herman Cahyadi ke Setyorini Rahayu berdasarkan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 23 Juni 2016 dan Rapat Dewan Komisaris tanggal 24 Juni 2016 dan Surat Keputusan Direksi No.SK.2016.002/Dir Compliance tanggal 24 Juni 2016.

Note: Membership position of Herman Cahyadi was later resumed by Setyorini Rahayubased on NRC Meeting on 23 June 2016 and BOC Meeting on 24 June 2016 as well as BOD Decision Letter No.SK.2016.002/Dir Compliance dated 24 June 2016.

b. Kuorum Rapat

Semua rapat harus dihadiri oleh minimal 51% dari jumlah anggota, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif, dan dihadiri oleh Ketua Komite.

b. Meeting Quorum

All meetings must be attended by at least 51% of the members and must include 1 (one) Independent Commissioner, Executive Officer, and Chair of the Committee.

Ketua Komite, anggota Komite Nominasi & Remunerasi, atau Presiden Komisaris dapat mengajukan rapat kapanpun dirasa ada masalah penting yang perlu segera didiskusikan dan diputuskan oleh Komite.

NRC's chairman, members, or the President Commissioner may also convene a meeting at any time necessary given urgent matters that require immediate decision-making.

c. Pemberitahuan Rapat

Sebelum diadakannya rapat Komite, salah satu anggota akan mengirimkan pemberitahuan tertulis untuk menginformasikan tanggal, waktu, tempat, dan objektif dari rapat tersebut. Pemberitahuan ini wajib untuk diberikan kepada setiap anggota Komite sedikitnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan.

c. Meeting Notice

Prior to a meeting one of the NRC members is to distribute written notice informing the date, time, place, and objective(s) of the meeting. The notice must be delivered to all members at minimum 5 (five) days before the day of the meeting or less in the event of urgent matters or if approved by all NRC members.

Periode pemberian notifikasi dapat dipersingkat dalam kasus adanya kepentingan yang bersifat emergensi atau jika disetujui oleh semua anggota Komite.

Komite Dibawah Dewan Komisaris Committee Under the Board of Commissioners

- d. Agenda dan Laporan
Agenda dan laporan wajib untuk diberikan kepada setiap anggota Komite sedikitnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat yang dijadwalkan atau jika terjadi kasus rapat emergensi maka diberikan pada saat rapat berjalan.

- e. Metode Resolusi
Semua rapat wajib dipimpin oleh Ketua Komite. Keputusan yang dihasilkan dari rapat harus didapat dari persetujuan penuh. Dalam keadaan di mana persetujuan sepenuhnya tidak dapat terpenuhi maka resolusi dari Komite harus diputuskan berdasarkan suara mayoritas dari seluruh anggota.

Setiap anggota yang memiliki kepentingan pada subjek-subjek tertentu tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak suara mereka, jika terjadi hal tersebut maka jumlah suara yang tidak dapat digunakan tidak akan dimasukkan ke dalam jumlah suara anggota yang sah untuk dihitung. Setiap rekomendasi Komite wajib untuk diberikan kepada seluruh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.

- f. Notulen Rapat
Setiap diskusi yang terjadi pada rapat Komite wajib untuk didokumentasikan di Notulen Rapat. Notulen rapat wajib berisikan agenda, poin-poin diskusi penting, semua keputusan yang diambil, dan pandangan yang bertentangan. Setelah itu, notulen akan ditandatangani oleh semua anggota Komite yang hadir pada rapat. Notulen Rapat wajib ditanda-tangani oleh Ketua dan semua anggota yang hadir pada saat rapat dan disimpan sebagai catatan setelah disetujui oleh ketua dan salinan dari notulen akan didistribusikan kepada setiap anggota Komite. Pendapat yang bertentangan (jika ada) wajib untuk didokumentasikan dengan layak dalam Notulen.

Uraian Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2016, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan berbagai aktivitas yang sekaligus merupakan program kerja yang mana meliputi:

- 1) Contract Extension of an Independent Commissioner
- 2) 2015 MBI CEO Scorecard (Achievement)
- 3) 2016 MBI CEO Scorecard (Goal Setting)
- 4) 2016 MBI CEO Scorecard (Goal Setting)
- 5) 2015 MBI BOD Scorecards (Achievement)

- d. Meeting Agenda and Report
Meeting agenda must be delivered to all members at minimum 5 (five) days before the day of the meeting or less in the event of urgent matters, in which case the agenda may be distributed during the meeting.

- e. Decision-making
All meetings are chaired by the Committee's Chairperson. Decisions of the meeting must be unanimous. In the event of dissenting opinion, the decision of the committee refers to the majority opinion.

Any members who have certain interests in certain topics are not allowed to exercise their voting rights. Voting by interested members will not be counted as legitimate votes. All recommendations of the NRC must be submitted to all members of the BOC for approval.

- f. Meeting Minutes
Meeting Minutes document all discussions taking place in all Committee meetings. Meeting Minutes contains agenda, discussion points, decisions, and dissenting opinion. All members of the Committee attending the meeting must sign the minutes. Following approval from the chairman, Meeting Minutes documents are kept as records and their copies are distributed to all members. Dissenting opinion, if occurs, must be properly documented in the minutes.

Summary of Nomination and Remuneration Committee

In 2016, the NRC carried out various activities as planned in its work program. The activities are as follows:

- 1) Contract Extension of an Independent Commissioner
- 2) 2015 MBI CEO Scorecard (Achievement)
- 3) 2016 MBI CEO Scorecard (Goal Setting)
- 4) 2016 MBI CEO Scorecard (Goal Setting)
- 5) 2015 MBI BOD Scorecards (Achievement)

Komite Dibawah Dewan Komisaris Committee Under the Board of Commissioners

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 6) 2015 Performance Bonus for MBI Executives & 2016 Salary Increase for CFS 7) 2015 Performance Bonus for MBI CEO 8) Annual Review for MBI Executives 9) 2016 MBI BOD Scorecards (Goal Setting) 10) Nomination of Maybank Indonesia Finance (MIF) President Commissioner 11) Other Matters Arising - Sharia Secretary & Succession Plan for Sharia Supervisory Board (SSB) 12) MBI BOC Annual Assessment 13) Contract Renewal of MBI BOC Members 14) MBI BOD Succession Planning 15) 2016 MBI CEO Development Plan 16) Personal Development Plan (PDP) of MBI BOD 17) Development Program for MBI BOC 18) Nomination of Head, Transaction Banking 19) Other Matters Arising – Replacement of NRC Secretary 20) 2016 MBI Board of Directors (BOD) Scorecards (Mid Year Result) 21) Nomination of Executive Vice President (EVP) 22) Talent Management Update 23) MBI BOD Contracts and Movement 24) Other Matters Arising - Medical Coverage for Sharia Supervisory Board (SSB) 25) Implementation of New OJK Regulation – Remuneration Policy & Governance fo Commercial Banks 26) Board of Directors (BOD) Remunerations Projections 27) Other Matters Arising: 28) Employee Engagement Survey (EES) Index Rate in BOD Scorecards 29) 2017 Planned NRC Schedule & Agenda | <ul style="list-style-type: none"> 6) 2015 Performance Bonus for MBI Executives & 2016 Salary Increase for CFS 7) 2015 Performance Bonus for MBI CEO 8) Annual Review for MBI Executives 9) 2016 MBI BOD Scorecards (Goal Setting) 10) Nomination of Maybank Indonesia Finance (MIF) President Commissioner 11) Other Matters Arising - Sharia Secretary & Succession Plan for Sharia Supervisory Board (SSB) 12) MBI BOC Annual Assessment 13) Contract Renewal of MBI BOC Members 14) MBI BOD Succession Planning 15) 2016 MBI CEO Development Plan 16) Personal Development Plan (PDP) of MBI BOD 17) Development Program for MBI BOC 18) Nomination of Head, Transaction Banking 19) Other Matters Arising – Replacement of NRC Secretary 20) 2016 MBI Board of Directors (BOD) Scorecards (Mid Year Result) 21) Nomination of Executive Vice President (EVP) 22) Talent Management Update 23) MBI BOD Contracts and Movement 24) Other Matters Arising - Medical Coverage for Sharia Supervisory Board (SSB) 25) Implementation of New OJK Regulation – Remuneration Policy & Governance fo Commercial Banks 26) Board of Directors (BOD) Remunerations Projections 27) Other Matters Arising: 28) Employee Engagement Survey (EES) Index Rate in BOD Scorecards 29) 2017 Planned NRC Schedule & Agenda |
|--|--|

Struktur dan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

Pengangkatan

Pada tanggal 30 November 2015, terdapat penggantian salah satu anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yaitu dari Paulus Danang Yanri Hatmoko kepada Herman Cahyadi. Posisi anggota tersebut sekaligus merangkap Sekretaris Eksekutif.

Perubahan tersebut diputuskan di dalam Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 27 November 2015 dan Rapat Dewan Komisaris tanggal 30 November 2015, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.SK.2015.006/Dir Compliance tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Periode 2015-2018.

Nomination and Remuneration Committee Structure and Membership

Appointment

On 30 November 2015, a position of a member previously held by Paulus Danang Yanri Hatmoko was transferred to Herman Cahyadi. This position is a concurrent position as Executive Secretary.

The transfer was decided in the NRC Meeting on 27 November 2015 and BOC Meeting on 30 November 2015 in accordance with BOD Decision Letter No.SK.2015.006/Dir Compliance on Nomination and Remuneration Committee Period 2015-2018.

Komite Dibawah Dewan Komisaris Committee Under the Board of Commissioners

Kemudian, pada tahun 2016, berdasarkan hasil Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 23 Juni 2016 dan Rapat Dewan Komisaris tanggal 24 Juni 2016 terdapat perubahan pada susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu dari Herman Cahyadi kepada Setyorini Rahayu, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. SK.2016.002/Dir Compliance tanggal 24 Juni 2016 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Periode 2015-2018.

Komite Nominasi dan Remunerasi diharuskan terdiri dari minimum 3 (tiga) anggota dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 1 (satu) orang Ketua yang juga merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen, dan
2. Anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - a. Anggota Dewan Komisaris
 - b. Pihak lain yang bukan merupakan karyawan Bank
 - c. Pejabat eksekutif yang menangani sumber daya manusia

Komite harus diketuai oleh anggota yang berasal dari Komisaris Independen. Ketua Komite ini hanya dapat memegang jabatan sebagai ketua komite pada tidak lebih dari 1 (satu) komite lainnya.

Jika jumlah anggota dari Komite melebihi 3 (tiga) orang, maka jumlah anggota yang berasal dari Komisaris Independen harus minimal 2 (dua) orang.

Periode dan Masa Jabatan Anggota Komite

Masa jabatan dari Ketua dan Anggota Komite tergantung pada masa jabatan dari Komisaris dan Karyawan Eksekutif yang bersangkutan. Namun, Dewan Komisaris memiliki hak, dari waktu ke waktu untuk mengganti mereka.

Dewan Komisaris wajib mengkaji ulang masa jabatan dan kinerja Komite dan semua anggota Komite minimal satu kali dalam satu tahun untuk menentukan apakah Komite telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian.

Berdasarkan Keputusan Direksi No.SK.2016.002/Dir Compliance tanggal 24 Juni 2016 menetapkan susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi periode 2015-2018 sebagai berikut:

In 2016, based on the resolution of NRC Meeting on 23 June 2016 and BOC Meeting on 24 June 2016, the composition of NRC changed with Setyorini Rahayu resuming the position of Herman Cahyadi pursuant to BOD Decision Letter No. SK.2016.002/Dir Compliance dated 24 June 2016 on Nomination and Remuneration Committee Period 2015-2018.

The NRC must have at least 3 (three) members and observes the following terms:

1. 1 (one) person selected from among Independent Commissioners shall serve as Chairperson and Member, and
2. Other members may be selected from:
 - a. The BOC
 - b. Other parties that are non-employee of the Bank
 - c. Executive Officer handling human resources

The Committee must be chaired by a member who is an Independent Commissioner and who may only serve as a chairman in 1 (one) other committee.

In the event that the Committee's members comprise more than 3 (three) persons, at least 2 (two) Independent Commissioners must make up the total membership.

Committee Tenure

The tenure of the Committee's Chairperson and Members follows the term of office of the serving Commissioners and Executive Officers. The BOC reserves the discretion to replace any of the members from time to time.

The BOC must review the tenure and performance of the Committee and its members at least one time every year. The review assesses the consistency of the Committee's performance of responsibilities with agreed provisions.

Pursuant to BOD Decision Letter No.SK.2016.002/Dir Compliance dated 24 June 2016, the members of Nomination and Remuneration Committee Period 2015-2018 are:

Komite Dibawah Dewan Komisaris

Committee Under the Board of Commissioners



Budhi Dyah Sitawati – Ketua Komite, Komisaris Independen | Budhi Dyah Sitawati – Committee Chair, Independent Commissioner

Menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi & Remunerasi PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada profil Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.

As Chairman of Nomination & Remuneration Committee PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Detail of her experience and qualifications are provided in Board of Commissioners profile on Company Profile chapter.



Datuk Abdul Farid Bin Alias – Anggota Komite, Komisaris | Datuk Abdul Farid Bin Alias – Committee Member, Commissioner

Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi & Remunerasi PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada profil Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.

As Member of Nomination & Remuneration Committee PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Detail of his experience and qualifications are provided in Board of Commissioners profile on Company Profile chapter.



Umar Juoro – Anggota Komite, Komisaris Independen | Umar Juoro – Committee Member, Independent Commissioner

Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi & Remunerasi PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada profil Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.

As Member of Nomination & Remuneration Committee PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Detail of his experience and qualifications are provided in Board of Commissioners profile on Company Profile chapter.



Setyorini Rahayu – Anggota Komite merangkap Sekretaris Eksekutif, Pejabat Eksekutif | Setyorini Rahayu – Committee Member and Executive Secretary, Executive Officer

Saat ini beliau menjabat sebagai Head, BHC CFS & Community Distribution. Usia 48 tahun. Sebelumnya beliau telah memimpin unit kerja BHC BB & Corporate Functions, Shared Services, dan Resourcing Center selama berkarir di Bank Maybank Indonesia. Beliau juga terlibat langsung dalam membangun Employee Value Proposition (EVP), Maybank GO Ahead Challenge dan berbagai kompetisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang diikuti oleh Bank Maybank Indonesia. Memulai karir dalam bidang SDM di PT Bank Bali Tbk (1993-2001), beliau kemudian membangun karirnya dan menduduki berbagai posisi SDM di PT Multipolar Corporation Tbk (2001-2003) dan PT Bank Permata Tbk (2004-2010) sebelum bergabung dengan Bank Maybank Indonesia. Beliau meraih gelar Master dalam bidang Penelitian Sosial dari Universitas Indonesia. Selain pendidikan formal, beliau telah mengikuti berbagai pelatihan komprehensif dan program lainnya yang terkait dengan SDM dan strategi bank.

Currently serves as Head, BHC CFS & Community Distribution. 48 years old. During her career with Maybank Indonesia, she has led the BHC BB & Corporate Functions, Shared Services, and Resourcing Center. She was directly involved in developing Employee Value Proposition (EVP), Maybank GO Ahead Challenge, and various Human Resource competitions that Myabank Indonesia participated in. She started her career in HR with PT Bank Bali Tbk (1993-2001) and continued to occupy various HR positions in PT Multipolar Corporation Tbk (2001-2003) and PT Bank Permata Tbk (2004-2010) prior to joining Maybank Indonesia. She holds a Master's in Social Research from the University of Indonesia. Other than formal education, she also attended various training programs relating to HR and banking strategies.

Komite Dibawah Dewan Komisaris Committee Under the Board of Commissioners

Daftar Pelatihan Komite Nominasi & Remunerasi Tahun 2016

List of Nomination & Remuneration Committee Training in 2016

No	Nama	Penyelenggaraan	Tanggal	Tempat
1	Budhi Dyah Sitawati			
2	Datuk Abdul Farid Bin Alias			
3	Umar Juoro			
4	Setyorini Rahayu	STRATEGIC WORKSHOP & TIGER CAMP HC 2016	8 – 10 Januari 2016	Pancawati, Bogor
		HR EXCELLENCE AWARD 2015	24 Februari 2016	
		SHARING SESSION WITH PUAN NORA SESI 2	16 Maret 2016	Sentral Senayan 3, Jakarta
		PERFORMANCE BONUS & SALARY INCREASE 2016	22 Maret 2016	Sentral Senayan 3, Jakarta
		RACI-To be a truly HC Business Partner	13 April 2016	Sentral Senayan 3, Jakarta
		HUMAN CAPITAL SHARING SESSION	14 April 2016	Sentral Senayan 3, Jakarta
		MINI TOWN HALL WITH PUAN NORA AND HC	24 Mei 2016	Sentral Senayan 3, Jakarta
		COMPETING THROUGH ORGANIZATION	25 – 26 Mei 2016	Sentral Senayan 3, Jakarta
		CD WORKSHOP & SHARING SESSION REG SUMSEL	2 – 3 Juni 2016	Sumatera Selatan
		CD WRKSHP & SHARING SESSION REG JATIM	14 – 15 Juni 2016	Maybank KC Pemuda Surabaya
		TOWNHALL COMMUNITY FINANCIAL SERVICES	28 Juni 2016	Sentral Senayan 3, Jakarta
		GLOBAL REMUNERATION PROFESSIONAL (GRP)	03 Oktober 2016	Sentral Senayan 3, Jakarta
		HUMAN CAPITAL QUARTERLY SHARING SESSION	06 Oktober 2016	Sentral Senayan 3, Jakarta

Komite Dibawah Dewan Komisaris

Committee Under the Board of Commissioners

LAPORAN DAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Latar Belakang

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi (“TKT”) pada Konglomerasi Keuangan didasari oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 18/POJK.03/2014 (“POJK No.18”). Berdasarkan POJK No.18, setiap Konglomerasi Keuangan wajib memiliki Pedoman TKT dengan mengacu pada peraturan yang konservatif guna menjadi panduan bagi Lembaga Jasa Keuangan (“LJK”) dalam Konglomerasi Keuangan untuk menerapkan tata kelola. Dengan demikian diperoleh peningkatan kualitas penerapan TKT, yang akan mendorong Konglomerasi Keuangan memiliki tata kelola yang lebih *prudent* sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*profesional*), dan kewajaran (*fairness*), serta dapat mendorong stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

Konglomerasi Keuangan Maybank Group di Indonesia

Berdasarkan POJK NO.18, LJK-LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/ atau pengendalian wajib membentuk Konglomerasi Keuangan. Konglomerasi Keuangan tersebut memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan perusahaan anak dan/atau perusahaan terelasi. Konglomerasi Keuangan tersebut meliputi jenis LJK berupa bank, perusahaan asuransi dan reasuransi, perusahaan efek, dan/atau perusahaan pembiayaan.

Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan merupakan kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan pengendalian, maka pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan tersebut wajib menunjuk Entitas Utama. Malayan Banking Berhad (“MBB”) sebagai pemegang saham pengendali dari Group Maybank di Indonesia telah menunjuk Maybank Indonesia sebagai Entitas Utama melalui suratnya tertanggal 27 Maret 2015. Penunjukan ini didasarkan pada kriteria jumlah aset terbesar dan/atau memiliki kualitas penerapan manajemen risiko yang baik. Konglomerasi Keuangan Group Maybank di Indonesia terdiri dari Maybank Indonesia sebagai Entitas Utama (EU), dan LJK lainnya sebagai perusahaan anak atau perusahaan terelasi, yaitu PT Maybank Indonesia Finance (dahulu PT BII Finance Center) (perusahaan pembiayaan), PT Wahana Ottomitra Multiartha

INTEGRATED CORPORATE GOVERNANCE REPORT AND COMMITTEE

Background

The implementation of Integrated Corporate Governance (“TKT”) in Financial Conglomerate is based on the Financial Services Authority (“OJK”) Regulation No. 18/POJK.03/2014 (“POJK No.18”). Pursuant thereto, a Financial Conglomerate is required to have a TKT Guideline developed in reference to conservative rules. The Guideline assists Financial Services Institutions (“LJK”) under the Financial Conglomerate to implement corporate governance. Using a standardized manual, quality of TKT implementation will improve – promoting prudent corporate governance of the Financial Conglomerate according to the principles of transparency, accountability, responsibility, independency or professional, and fairness and to contribute to a stable financial system with sustainable growth to enhance national level competitiveness.

Maybank Group Financial Conglomerate in Indonesia

Pursuant to POJK No.18, LJKs under one group and are affiliated in terms of ownership and/or control are required to form a Financial Conglomerate which structure consists of Main Entity and subsidiary and/or related party entities. The Financial Conglomerate entails LJKs incorporated as banks, insurance and reinsurance companies, securities companies, and/or financing companies.

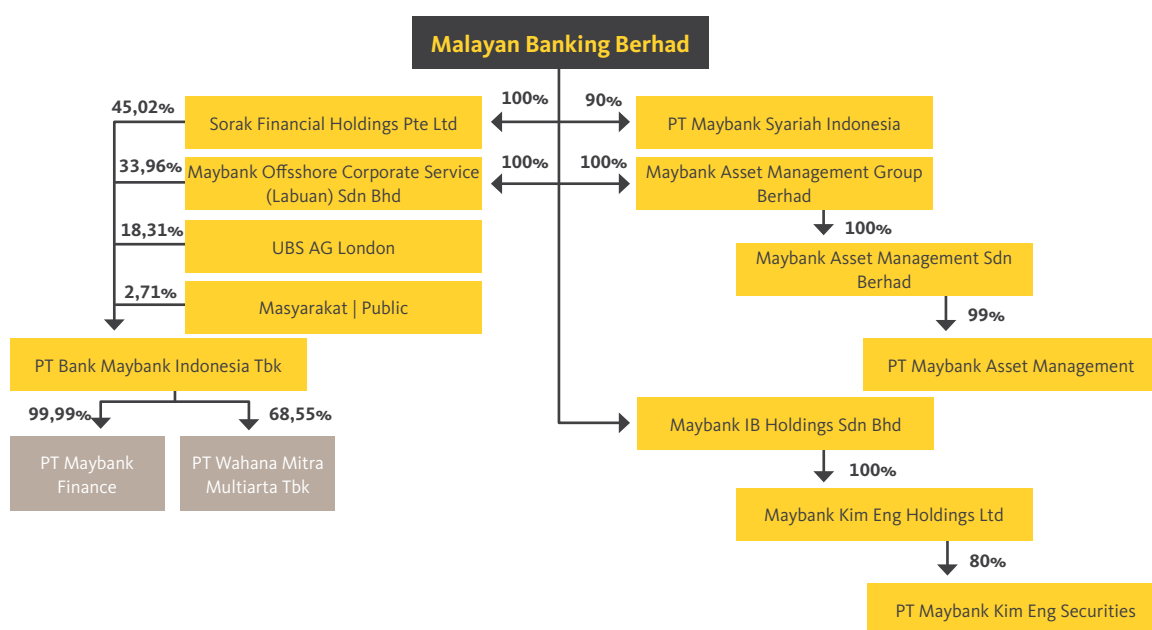
When a Financial Conglomerate forms because of the entities’ relationship in terms of ownership and control, the controlling shareholder of the Financial Conglomerate shall designate a Main Entity. The Malayan Banking Berhad (“MBB”) as the controlling shareholder of the Maybank Group in Indonesia has designated Maybank Indonesia as the Main Entity through its letter dated 27 March 2015. The designation considered the criteria of the largest asset size and/or the quality of risk management implementation. Maybank Group Financial Conglomerate in Indonesia consists of Maybank Indonesia as the Main Entity, and other LJKs as subsidiary entities or affiliated companies, namely PT Maybank Indonesia Finance (formerly PT BII Finance Center) (multi-finance company), PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM) (multi-finance company), PT Maybank Shariah

Komite Dibawah Dewan Komisaris Committee Under the Board of Commissioners

Tbk (WOM) (perusahaan pembiayaan), PT Maybank Syariah Indonesia (Bank Syariah), PT Maybank Asset Management (Manajer Investasi dan Konsultasi), dan PT Maybank Kim Eng Securities (MKE) (perantara pedagang efek).

Indonesia (Shariah Bank), PT Maybank Asset Management (Investment Manager and Consultation), and PT Maybank Kim Eng Securities (MKE) (securities brokerage).

Struktur Konglomerasi Keuangan Maybank Group di Indonesia



Ruang Lingkup Pedoman TKT

Sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Kerangka Tata Kelola bagi Konglomerasi Keuangan merupakan pedoman minimal yang wajib dipatuhi oleh Konglomerasi Keuangan sehingga akan tercapai kesamaan tingkat penerapan tata kelola di seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Ruang Lingkup kebijakan penerapan Tata Kelola Terintegrasi ini mencakup 2 (dua) bagian besar Pedoman dengan penerapannya masing-masing, yang meliputi:

- 1) Pedoman bagi Entitas Utama; dan
- 2) Pedoman bagi LJK.

Scope of TKT Guideline

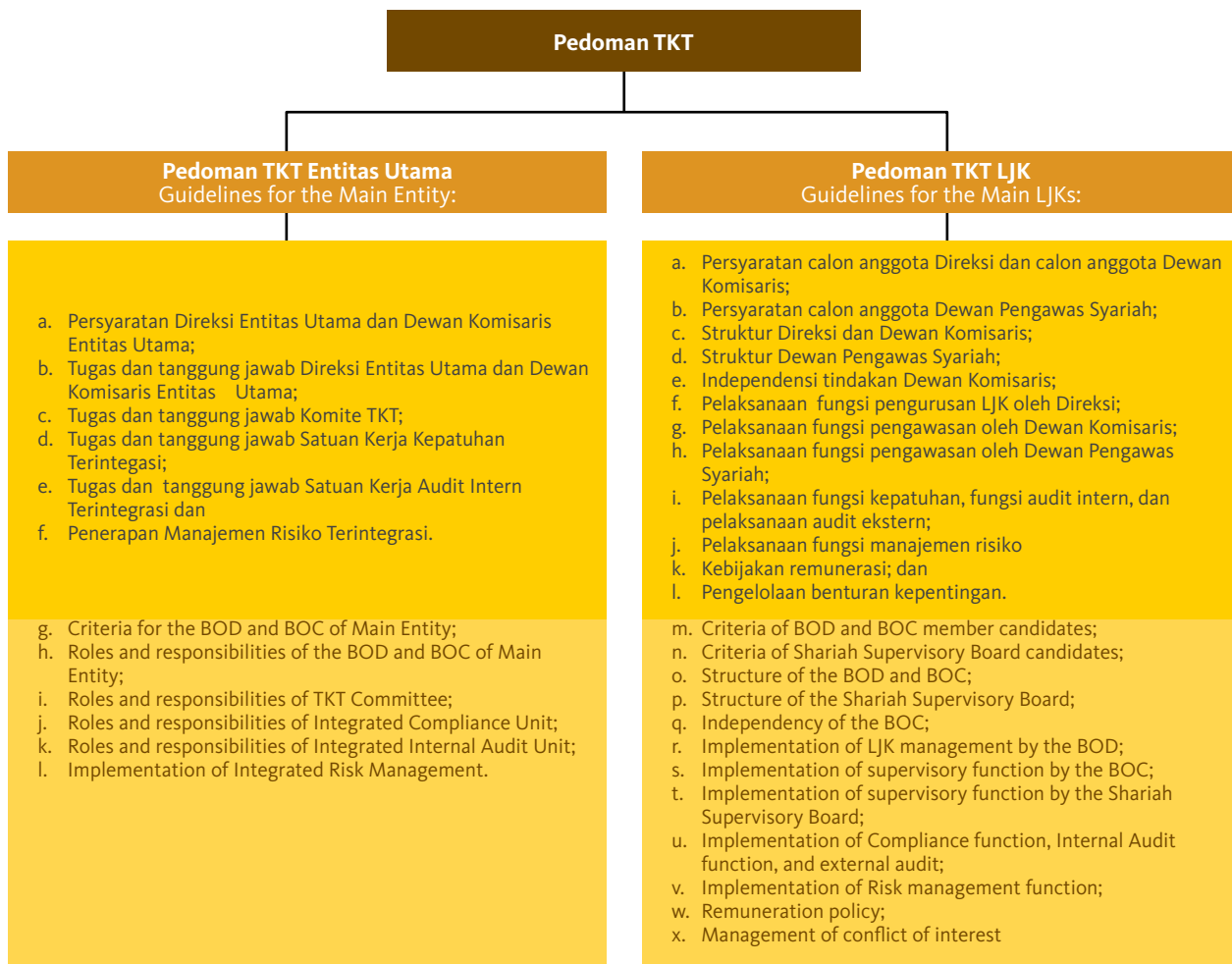
In accordance with OJK Regulation No. 18/POJK.03/2014 on the Implementation of Integrated Corporate Governance for Financial Conglomerate, the TKT of Financial Conglomerate is the minimum guideline that the Financial Conglomerate must abide by in order to achieve a standard corporate governance level across all LJKs under the Financial Conglomerate.

The scope of TKT Guideline implementation covers 2 (two) broad categories and their respective implementation:

- 1) Guidelines for the Main Entity; and
- 2) Guidelines for LJKs

Komite Dibawah Dewan Komisaris

Committee Under the Board of Commissioners



Pengawasan dan Komite TKT

Sebagaimana disyaratkan oleh POJK No.18, Dewan Komisaris Maybank Indonesia selaku Entitas Utama wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan TKT. Tugas tersebut mencakup:

- pengawasan atas penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK agar sesuai dengan Pedoman TKT;
- pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman TKT; dan
- mengevaluasi Pedoman TKT dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.

TKT Supervision and Committee

As stipulated by POJK No. 18, BOC of Maybank Indonesia as the Main Entity must perform oversight of TKT implementation. This responsibility consist of:

- Supervision of governance implementation in each LJKs, ensuring their consistency with TKT Guidelines;
- Supervision of the implementation of responsibilities of the BOD of Main Entity and to provide guidance to the BOD of Main Entity concerning TKT Guideline implementation
- Evaluate TKT Guideline and provide direction to enhance the guideline.

Komite Dibawah Dewan Komisaris Committee Under the Board of Commissioners

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sehubungan dengan TKT, Dewan Komisaris Maybank Indonesia wajib membentuk Komite TKT. Sesuai Keanggotaan POJK No.18, Komite TKT paling sedikit terdiri dari:

- seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota;
- Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;
- seorang pihak independen, sebagai anggota; dan
- anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite TKT dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Melalui Rapat tanggal 22 Mei 2015, Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah menyetujui pembentukan Komite TKT dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua (merangkap anggota):

Umar Juoro (Komisaris Independen Maybank Indonesia)

Anggota:

- Nina Diyanti Anwar (Pihak Independen Maybank Indonesia)
- Fransisca Ekawati (Komisaris Independen MSI)
- Deswandhy Agusman (Komisaris Independen MIF)
- Myrnie Zachraini Tamin (Komisaris Independen WOM)
- Muh. Nahar Nahrawi (Dewan Pengawas Syariah Maybank Indonesia)
- Asrorun Ni'am (Dewan Pengawas Syariah MSI)

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Aspek dan Faktor Penilaian Tata Kelola Terintegrasi

Aspek Penilaian Penerapan TKT Bagi Konglomerasi Keuangan Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi merupakan penilaian terhadap 3 (tiga) aspek Tata Kelola Terintegrasi, yaitu struktur, proses, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi.

To carry out TKT responsibilities, the BOC of Maybank Indonesia is required to establish a TKT Committee. Pursuant to POJK No.18, TKT Committee shall at least comprises:

- An Independent Commissioner to serve as Chairperson in one of the committees in the Main Entity and concurrently as member;
- An Independent Commissioner representing and appointed from LJKs under the Financial Conglomerate to sit as member;
- An Independent Party to sit as member; and
- Member of the Shariah Supervisory Board of LJKs in the Financial Conglomerate as member.

The number and composition of Independent Commissioner as members of the Integrated Corporate Governance Committee is aligned with the needs of the Financial Conglomerate as well as the efficient and effective implementation of duties of the TKT Committee, while observing at least the representation of the respective financial services sectors.

On the meeting of 22 May 2015, the BOC of Maybank Indonesia approved the establishment of TKT Committee with the following membership:

Chairperson (and member):

Umar Juoro (Maybank Indonesia Independent Commissioner)

Members:

- Nina Diyanti Anwar (Independent Party - Maybank Indonesia)
- Fransisca Ekawati (Independent Commissioner - MSI)
- Deswandhy Agusman (Independent Commissioner - MIF)
- Myrnie Zachraini Tamin (Independent Commissioner - WOM)
- Muh. Nahar Nahrawi (Shariah Supervisory Board - Maybank Indonesia)
- Asrorun Ni'am (Shariah Supervisory Board - MSI)

ASSESSMENT ON THE IMPLEMENTATION OF INTEGRATED CORPORATE GOVERNANCE IN FINANCIAL CONGLOMERATE

Aspects and Factors of Assessment

Aspects of Assessment of TKT Implementation in Financial Conglomerate The assessment of Integrated Corporate Governance focuses on 3 (three) aspects of TKT, namely structure, process, and outcome of TKT.

Komite Dibawah Dewan Komisaris

Committee Under the Board of Commissioners

Penilaian Tata Kelola Terintegrasi dilakukan dengan menganalisa ketiga aspek penilaian tersebut sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan sehingga apabila salah satu aspek dinilai tidak memadai maka kelemahan tersebut mempengaruhi hasil penilaian.

1. Struktur

Bertujuan menilai kecukupan struktur Tata Kelola Terintegrasi agar proses pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

2. Proses

Bertujuan menilai efektivitas proses pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang didukung oleh kecukupan struktur Tata Kelola Terintegrasi sehingga memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

3. Hasil Tata Kelola

a. Bertujuan menilai kualitas hasil yang memenuhi harapan pemangku kepentingan, mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:

- kinerja Konglomerasi Keuangan seperti efisiensi dan permodalan;
- kecukupan transparansi laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi;
- obyektivitas dalam melakukan *assessment* atau audit;
- tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi LJK seperti *fraud*, pelanggaran ketentuan terkait laporan LJK kepada Otoritas Jasa Keuangan; sesuai dengan sektor jasa keuangan masing-masing.

b. Hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat penilaian, yaitu:

- Peringkat 1;
- Peringkat 2;
- Peringkat 3;
- Peringkat 4; dan
- Peringkat 5.

Peringkat yang lebih kecil mencerminkan penerapan yang lebih baik.

TKT assessment analyzes the three aspects as an entirety; the inadequacy of one aspect will affect the overall result of the assessment.

1. Structure

Structure assessment aims to measure the adequacy of TKT structure that will ensure that TKT implementation will generate the outcome as expected by all stakeholders.

2. Process

Process assessment looks at the process of TKT implementation, supported by adequate TKT structure, to produce governance outcomes that would meet the expectations of stakeholders.

3. Outcome

a. a. Assessment on outcomes investigates the quality of outcome compared to stakeholders' expectations. This area covers qualitative and quantitative assessment, among others:

- Performance of Financial Conglomerate, e.g. efficiency and capital position;
- Adequacy of annual report transparency on TKT implementation; Audit objectivity;
- Level of compliance with regulations and settlement of cases involving LJKs, e.g. fraud, breach of rules concerning LJKs' reporting to OJK pursuant to the regulations applicable to the LJKs' respective financial sectors.

b. Assessment result has 5 (five) rating categories, namely:

- Rank 1;
- Rank 2;
- Rank 3;
- Rank 4; and
- Rank 5.

The rank that has the smaller number reflects better quality of implementation.

Komite Dibawah Dewan Komisaris Committee Under the Board of Commissioners

Faktor Penilaian Penerapan TKT Bagi Konglomerasi Keuangan

1. Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi meliputi paling sedikit 7 (tujuh) faktor penilaian, yaitu:
 - a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
 - b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
 - c) Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
 - d) Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
 - e) Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;
 - f) Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
 - g) Penyusunan dan pelaksanaan pedoman Tata Kelola Terintegrasi serta memperhatikan informasi lain yang terkait dengan penerapan Tata Kelola Terintegrasi, seperti campur tangan pemilik secara langsung dalam pengelolaan Konglomerasi Keuangan dan komitmen pemegang saham untuk menambah modal Konglomerasi Keuangan.
2. Penilaian dilakukan dengan mengevaluasi struktur, proses, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing faktor penilaian.

Penilaian Pelaksanaan TKT

MBI, selaku Entitas Utama, wajib menyusun laporan penilaian pelaksanaan TKT secara berkala. Laporan penilaian pelaksanaan TKT tersebut disusun setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.

Pelaporan Pelaksanaan TKT

Berdasarkan SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, laporan tersebut disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.

Sebagai bank BUKU 3, kewajiban Maybank Indonesia menyampaikan laporan penilaian pelaksanaan TKT pertama kali adalah untuk posisi akhir bulan Desember 2015. Selanjutnya, secara berkala Maybank Indonesia juga sudah menyampaikan laporan penilaian pelaksanaan TKT yaitu untuk posisi akhir bulan Desember 2016 pada tanggal 13 Februari 2017.

Hasil Penilaian Sendiri atas pelaksanaan TKT untuk posisi Desember 2016 dinilai "baik" dengan "peringkat 2". Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip TKT, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Factors of Assessment of TKT Implementation in Financial Conglomerate

1. TKT assessment entails at least 7 (seven) assessment factors, namely:
 - a) Performance of responsibilities of the BOD of the Main Entity;
 - b) Performance of responsibilities of the BOC of the Main Entity;
 - c) Roles and responsibilities of TKT Committee;
 - d) Roles and responsibilities of Integrated Compliance Unit;
 - e) Roles and responsibilities of Integrated Internal Audit Unit;
 - f) Implementation of Integrated Risk Management;
 - g) Development and implementation of TKT guideline; the assessment also takes into account other information related to TKT implementation, such as direct influence of the owner entity in Financial Conglomerate management, and commitment of shareholders to increase the capital of Financial Conglomerate.
2. The assessment is done by evaluating the structure, process, and result of TKT in each assessment factors.

TKT Assessment Implementation

As the Main Entity, MBI is responsible to prepare periodical TKT assessment report, i.e. on semester basis for end of June and end of December positions.

TKT Report

Pursuant to OJK Circular Number 15/SEOJK.03/2015 dated 25 May 2015 on the Implementation of Integrated Corporate Governance for Financial Conglomerate, the report shall be submitted to OJK no later than the 15th (fifteenth) day of the following month of report period.

As a BUKU 3 bank, Maybank Indonesia had to submit its TKT report for the first time in December 2015. Subsequent to that, Maybank Indonesia has submitted TKT reports on 13 February 2017 for end of December 2016 position.

The result of self-assessment of TKT for December 2016 position was "Good" or quantitative score of "2". Weaknesses in TKT implementation were not significant and can be resolved using ordinary measures by the Bank's management.

TATA KELOLA REMUNERASI

Remuneration Governance

Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan Remunerasi

Dalam semangat perbaikan yang berkesinambungan bagi fungsi pengawasan serta dalam rangka penerapan prinsip tata kelola yang baik, maka dibentuklah kebijakan remunerasi yang bertujuan untuk memastikan Bank tetap kompetitif, meraih kesuksesan bisnis jangka panjang, memenuhi kepentingan pemegang saham, dan menerapkan prinsip keterkaitan yang kuat antara sistem remunerasi dan kinerja.

Atas kebijakan remunerasi ini telah dilakukan kaji ulang, sehingga kebijakan ini telah diperbaharui per Mei 2016. Dalam pelaksanaannya, setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diwajibkan untuk menyediakan waktu yang cukup menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, mematuhi standar etika sebagaimana diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Perusahaan, semua anggota Komite harus memiliki integritas dan independen dari Dewan Direksi dan bebas hubungan bisnis atau lainnya dengan Bank, yang dapat mengganggu penilaian independen mereka. Setiap anggota Komite juga dilarang mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Emiten selain penghasilan yang sah.

Mekanisme Penetapan Remunerasi

Dewan Komisaris:

- Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi dan usulan remunerasi Dewan Komisaris sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta sesuai dengan standar Remunerasi untuk jabatan dan industry sejenis dipasarkan untuk kemudian diajukan kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris mempelajari rekomendasi dan usulan remunerasi Dewan Komisaris dan mengusulkannya kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
- RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris untuk melaksanakan pembagiannya kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris.
- Pembagian remunerasi kepada anggota Dewan Komisaris sesuai dengan hasil keputusan RUPS.

Direksi:

- Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi dan usulan remunerasi Direksi berdasarkan formulasi remunerasi yang mengacu kepada kebijakan internal Bank, peraturan eksternal

Remuneration Background and Purpose

To have continuous improvement of oversight and to implement the principles of good corporate governance, the Bank delineates remuneration policy. The policy aims to ensure the Bank remains competitive, is able to meet its long-term goals, and able to meet the interests of shareholders. It also promotes robust performance and remuneration link.

The Bank regularly reviews its remuneration policy; the last update was done in May 2016. Members of the Nomination and Remuneration Committee/NRC must allocate sufficient time to optimally perform their responsibilities and complying with ethical standards as defined in the Code of Ethics and Code of Conduct. Members of the NRC must also maintain integrity and independency from the BOD and are not involved in business or other forms of affiliation with the Bank that may impair their objectivity. All members of the NRC may not take personal gains directly or indirectly from activities of the Issuers other than their legitimate salaries.

Remuneration Mechanism

Board of Commissioners

- The NRC recommends and proposes the remuneration of the BOC by considering the BOC's function and responsibilities and taking into account the remuneration standard of industry peers for BOC level. The recommendation is submitted to the GMS through the BOC.
- The BOC studies the recommendations and remuneration proposal and submits the document to the GMS for approval.
- GMS ratifies the remuneration for BOC members and confers the authority to the President Commissioner to distribute the remuneration to each member of the BOC.
- Remuneration to the BOC adheres to GMS resolutions.

Board of Directors:

- The NRC recommends and proposes the remuneration of the BOD by considering the Bank's internal policies, applicable external regulations, remuneration standard of industry peers for BOD level, and the Bank's

Tata Kelola Remunerasi Remuneration Governance

yang berlaku, perbandingan dalam industri perbankan, performance Direksi serta dengan memperhitungkan kinerja Bank untuk kemudian diajukan kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

- Dewan Komisaris mempelajari rekomendasi dan usulan remunerasi Direksi dan mengusulkannya kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
- RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan pembagiannya kepada masing-masing anggota Direksi.
- Pembagian remunerasi kepada anggota Direksi sesuai dengan hasil keputusan RUPS.

Struktur dan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

Pengangkatan

Berdasarkan hasil Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 23 Juni 2016 dan Rapat Dewan Komisaris tanggal 24 Juni 2016 terdapat perubahan pada susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu dari Herman Cahyadi kepada Setyorini Rahayu, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. SK.2016.002/Dir Compliance tanggal 24 Juni 2016 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Periode 2015-2018.

Komite Nominasi dan Remunerasi diharuskan terdiri dari minimum 3 (tiga) anggota dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 1 (satu) orang Ketua yang juga merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen, dan
2. Anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - a. Anggota Dewan Komisaris
 - b. Pihak lain yang bukan merupakan karyawan Bank
 - c. Pejabat eksekutif yang menangani sumber daya manusia

Komite harus diketuai oleh anggota yang berasal dari Komisaris Independen. Ketua Komite ini hanya dapat memangku jabatan sebagai ketua komite pada tidak lebih dari 1 (satu) komite lainnya. Jika jumlah anggota dari Komite melebihi 3 (tiga) orang, maka jumlah anggota yang berasal dari Komisaris Independen harus minimal 2 (dua) orang.

performance. The recommendation is submitted to the GMS through the BOC.

- The BOC studies the recommendations and BOD remuneration proposal and submits the document to the GMS for approval.
- GMS ratifies the remuneration for BOD members and confers the authority to the President Commissioner to distribute the remuneration to each member of the BOD.
- Remuneration to the BOD adheres to GMS resolutions.

Struktur dan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

Appointment

Based on the resolution of NRC Meeting on 23 June 2016 and BOC Meeting on 24 June 2016, the composition of NRC changed with Setyorini Rahayu resuming the position of Herman Cahyadi pursuant to BOD Decision Letter No. SK.2016.002/Dir Compliance dated 24 June 2016 on Nomination and Remuneration Committee Period 2015-2018.

The NRC must have at least 3 (three) members and observes the following terms:

1. 1 (one) person selected from among Independent Commissioners shall serve as Chairperson and Member, and
2. Other members may be selected from:
 - a. The BOC
 - b. Other parties that are non-employee of the Bank
 - c. Executive Officer handling human resources

The Committee must be chaired by a member who is an Independent Commissioner and who may only serve as a chairman in 1 (one) other committee. In the event that the Committee's members comprise more than 3 (three) persons, at least 2 (two) Independent Commissioners must make up the total membership.

Tata Kelola Remunerasi

Remuneration Governance

Periode dan Masa Jabatan Anggota Komite

Masa jabatan dari Ketua dan Anggota Komite tergantung pada masa jabatan dari Komisaris dan Karyawan Eksekutif yang bersangkutan. Namun, Dewan Komisaris memiliki hak, dari waktu ke waktu untuk mengganti mereka.

Dewan Komisaris wajib mengkaji ulang masa jabatan dan kinerja Komite dan semua anggota Komite minimal satu kali dalam satu tahun untuk menentukan apakah Komite telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian.

Berdasarkan Keputusan Direksi No.SK.2016.002/Dir Compliance tanggal 24 Juni 2016 menetapkan susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi periode 2015-2018 sebagai berikut:

Committee Tenure

The tenure of the Committee's Chairperson and Members follows the term of office of the serving Commissioners and Executive Officers. The BOC reserves the discretion to replace any of the members from time to time.

The BOC must review the tenure and performance of the Committee and its members at least one time every year. The review assesses the consistency of the Committee's performance of responsibilities with agreed provisions.

Pursuant to BOD Decision Letter No.SK.2016.002/Dir Compliance dated 24 June 2016, the members of Nomination and Remuneration Committee Period 2015-2018 are:



Budhi Dyah Sitawati – Ketua Komite, Komisaris Independen | Committee Chair, Independent Commissioner

Menjabat sebagai Ketua Komite Tata Kelola Remunerasi PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada profil Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.

As Chairman of Remuneration Governance Committee PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Detail of her experience and qualifications are provided in Board of Commissioners profile on Company Profile chapter.



Datuk Abdul Farid Bin Alias – Anggota Komite, Komisaris | Datuk Abdul Farid Bin Alias – Committee Member, Commissioner

Menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Remunerasi PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada profil Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.

As Member of Remuneration Governance Committee PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Detail of his experience and qualifications are provided in Board of Commissioners profile on Company Profile chapter.



Umar Juoro – Anggota Komite, Komisaris Independen |

Menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Remunerasi PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada profil Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.

As Member of Remuneration Governance Committee PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Detail of his experience and qualifications are provided in Board of Commissioners profile on Company Profile chapter.

Tata Kelola Remunerasi

Remuneration Governance



Setyorini Rahayu – Anggota Komite merangkap Sekretaris Eksekutif, Pejabat Eksekutif | Setyorini Rahayu – Committee Member and Executive Secretary, Executive Officer

Saat ini beliau menjabat sebagai Head, BHC CFS & Community Distribution. Usia 48 tahun. Sebelumnya beliau telah memimpin unit kerja BHC BB & Corporate Functions, Shared Services, dan Resourcing Center selama berkarir di Bank Maybank Indonesia. Beliau juga terlibat langsung dalam membangun Employee Value Proposition (EVP), Maybank GO Ahead Challenge dan berbagai kompetisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang diikuti oleh Bank Maybank Indonesia. Memulai karir dalam bidang SDM di PT Bank Bali Tbk (1993-2001), beliau kemudian membangun karirnya dan menduduki berbagai posisi SDM di PT Multipolar Corporation Tbk (2001-2003) dan PT Bank Permata Tbk (2004-2010) sebelum bergabung dengan Bank Maybank Indonesia. Beliau meraih gelar Master dalam bidang Penelitian Sosial dari Universitas Indonesia. Selain pendidikan formal, beliau telah mengikuti berbagai pelatihan komprehensif dan program lainnya yang terkait dengan SDM dan strategi bank.

Currently serves as Head, BHC CFS & Community Distribution. 48 years old. During her career with Maybank Indonesia, she has led the BHC BB & Corporate Functions, Shared Services, and Resourcing Center. She was directly involved in developing Employee Value Proposition (EVP), Maybank GO Ahead Challenge, and various Human Resource competitions that Myabank Indonesia participated in. She started her career in HR with PT Bank Bali Tbk (1993-2001) and continued to occupy various HR positions in PT Multipolar Corporation Tbk (2001-2003) and PT Bank Permata Tbk (2004-2010) prior to joining Maybank Indonesia. She holds a Master's in Social Research from the University of Indonesia. Other than formal education, she also attended various training programs relating to HR and banking strategies.

Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Kriteria Independensi Independency Criteria	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Members of NRC			
	BDS	UJ	DAF	SR
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Has no shareholding affiliation with members of the BOC, BOD, and/or Controlling Shareholders or with the Bank that may affect the ability to act independently	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Has no financial affiliation with members of the BOC, members of BOD and controlling shareholders of the Bank that may affect the ability to act independently	✓	X	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Has no management affiliation with members of the BOC, BOD, and/or Controlling Shareholders or any forms of relationship with the Bank that may affect the ability to act independently	✓	X	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Has no familial affiliation with members of the BOC, BOD, and/or Controlling Shareholders or with the Bank that may affect the ability to act independently	✓	✓	✓	✓

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary

FUNGSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Seiring dengan perkembangannya Perseroan, peran Sekretaris Perusahaan semakin penting dan dibutuhkan tidak hanya berkaitan dengan fungsi administrasi dan komunikasi, namun juga untuk meningkatkan pelaksanaan tata kelola dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan. Sekretaris Perusahaan diharapkan mampu senantiasa mengkinikan informasi tentang peraturan yang wajib dipatuhi oleh Perusahaan Publik dan menyediakan informasi penting bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam membuat keputusan. Sekretaris Perusahaan dituntut untuk memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Keberadaan Sekretaris Perusahaan memberikan nilai positif dalam membantu pengelolaan Perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai perusahaan publik, PT Bank Maybank Indonesia Tbk telah meningkatkan keterbukaan, layanan dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Perusahaan membangun dan memelihara komunikasi yang baik dengan regulator, investor, kalangan pasar modal, maupun masyarakat umum. Dalam hal ini, Sekretaris Perusahaan memiliki peranan penting dalam memastikan kelancaran komunikasi yang baik antara Bank dengan para pemangku kepentingan serta memastikan terselenggaranya penyampaian informasi secara tepat waktu dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan. Setiap informasi yang disampaikan Sekretaris Perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi dari Perusahaan sebagai Emiten atau Perusahaan Publik.

Persyaratan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan yang ditunjuk telah memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- Cakap melakukan perbuatan hukum.
- Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, keuangan, dan tata kelola perusahaan.
- Memahami kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.
- Dapat berkomunikasi dengan baik.
- Berdomisili di Indonesia.

CORPORATE SECRETARY

As the Bank continues to grow, the role of a Corporate Secretary is increasingly important. Corporate Secretary is required not only to oversee administrative and communication functions, but also to enhance corporate governance and ensure the Bank's compliance with the laws and regulations. A Corporate Secretary is expected to continuously update information on regulations applicable to Public Companies and provide material information to the BOC and BOD for their decision-making. This position requires an individual that meets certain qualifications of competence of carrying out the responsibilities as corporate secretary and of improving own knowledge and skills that complement the performance of day-to-day tasks. The presence of Corporate Secretary function is an added value to the Bank's management that positive increases the trust of the shareholders and other stakeholders.

As a public company, Maybank Indonesia consistently attempts to step up its transparency, services, and communications with stakeholders according to GCG principles.

The Bank seeks to build and maintain good communications with regulators, investors, capital market players, and the public at large. The role of Corporate Secretary is pivotal in this regard to ensure that the Bank communicates smoothly with its stakeholders and that information disclosure and reporting are on time and accurate. Information issued from the Corporate Secretary function to the public is official information from the Bank as an Issuer or Public Company.

Corporate Secretary Requirements

An appointed Corporate Secretary at least has met the requirements as follows:

- Legally competent
- Having knowledge and understanding in the area of law, finance, and corporate governance
- Have understanding of the business activities of the issuer or public company.
- Able to communicate well
- Domiciled in Indonesia.

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik dan meningkatkan pelayanan perusahaan kepada masyarakat, maka PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Perusahaan Publik tercatat telah memiliki Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Sekretaris Perusahaan PT Bank Maybank Indonesia Tbk saat ini dijabat oleh Direktur Kepatuhan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.SK.2014.004/Presdir tanggal 18 Juli 2014 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan. Penunjukan dan pengangkatan Sekretaris Perusahaan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia melalui surat No.2014.440/DIR COMPLIANCE tanggal 18 Juli 2014, serta diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Investor Daily yang terbit tanggal 18 Juli 2014.

Kinerja Sekretaris Perusahaan 2016

Uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- Mengikuti Perkembangan Peraturan Pasar Modal serta memberikan masukan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris khususnya terkait dengan dikeluarkannya peraturan baru dari otoritas Pasar Modal maupun dari Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan baru tersebut diantaranya sebagai berikut:
 - POJK No.29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau perusahaan publik
 - POJK No.49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal
 - POJK No.51/POJK.04/2016 tentang Tata Cara untuk Meminta Perubahan dan/ atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran
 - POJK No. 52/POJK.04/2016 tentang Prosedur Penangguhan Penawaran Umum
 - POJK No.53/POJK.04/2016 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Biro Administrasi Efek dan Emiten yang menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri;
 - POJK No. 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka
- Menyelenggarakan RUPS Tahunan yang diselenggarakan 22 April 2016 serta RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan 23 Desember 2016 dan mendokumentasikan risalah rapat, akta-akta RUPS beserta hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan RUPS.

Corporate Secretary Appointment

Carrying out good corporate governance and to improve the Bank's services to the public, PT Bank Maybank Indonesia Tbk as a public company has appointed a Corporate Secretary.

The Corporate Secretary of PT Bank Maybank Indonesia Tbk is currently held by the Compliance Director, who was appointed by Board of Directors Decision No.SK.2014.004/President Director dated July 18, 2014 on the Appointment of the Corporate Secretary. The appointment of the Corporate Secretary was reported to the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange by letter No.2014.440/DIR COMPLIANCE dated July 18, 2014, and was published in the Indonesian language daily newspaper Investor Daily on July 18, 2014.

Corporate Secretary 2016 Performance

In 2016, Corporate Secretary carried out the following:

- Followed regulation developments in the Capital Market and provided input to the BOD and BOC especially concerning new regulations from Capital Market authority and OJK. In 2016, new regulations were:
 - POJK No.29/POJK.04/2016 on Annual Report of Issuer or Public Companies
 - POJK No.49/POJK.04/2016 on Investor Protection Funds
 - POJK No.51/POJK.04/2016 on the Procedure to Request and/or Add Information on Registration Statement
 - POJK No. 52/POJK.04/2016 on the Procedure to Postpone Public Offering
 - POJK No.53/POJK.04/2016 on Document Administration by Securities Administration Agency and Issues Organizing its Own Securities Administration;
 - POJK No. 74/POJK.04/2016 on the Acquisition and Merger of Public Companies
- Organized Annual GMS on 22 April 2016 and Extraordinary GMS on 23 December 2016; documented minutes of meetings, deeds of GMS, and other matters relating to GMS

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi. 4. Membuat Risalah Rapat Direksi dan Risalah Rapat Dewan Komisaris serta menyimpan/ mendokumentasikan Risalah Rapat tersebut. 5. Mengatur dan menghadiri Rapat Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris. 6. Melakukan <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan Tata Kelola Semester 1 dan Semester 2 Tahun 2016. 7. Membuat Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016 dan mempersiapkan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016. 8. Menyiapkan rekomendasi perubahan/penyesuaian atas Panduan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi sesuai peraturan terkini. 9. Mengkaji website Perusahaan dan memberikan input informasi yang harus diungkapkan kepada publik. 10. Menyelenggarakan Paparan Publik pada 22 April 2016, guna memenuhi kewajiban penyampaian informasi kepada publik berdasarkan keputusan Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-E. 11. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan menyediakan informasi pada website, dan melaporkan kepada Bursa Efek Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan setiap informasi yang material yang diperkirakan dapat mempengaruhi pemodal atau harga efek di Bursa. | <ol style="list-style-type: none"> 3. Organized and attended BOC and the BOD meetings. 4. Prepared Minutes of BOD and BOC Meetings as well as keeping the Minutes of the Meetings. 5. Organized and attended committee meetings at the level of the BOC. 6. Conducted GCG self-assessment in the first and second semester of 2016. 7. Compiled GCG Implementation Report 2016 and prepared GCG implementation report for 2016. 8. Prepared recommendations for adjustments to the Board of Commissioners and Board of Directors Charters as well as Committees at the level of the Board of Commissioners and Board of Directors in accordance with current regulations. 9. Reviewed Banks' website and provided input on information that have to be disclosed. 10. Organized a Public Exposé on 22 April 2016 to meet the obligation of information presentation to the public pursuant to Indonesian Stock Exchange Decision No. Kep-306/BEJ/07-2004 on Rule Number I-E. 11. Fulfilled public information disclosure obligation by providing information via website and by reporting all material information to the Indonesia Stock Exchange and the Financial Services Authority that may impact investors or stock prices. |
|---|---|

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan serta Sasaran Kerja Unit Kerja Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi. Secara garis besar Sekretaris Perusahaan bertugas sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Website Perusahaan.
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham.

Roles and Responsibilities of the Corporate Secretary and Corporate Secretary Work Unit

The Corporate Secretary is accountable to the BOD. Broadly, the responsibilities of the Corporate Secretary cover the following aspects:

1. Stay up-to-date with Capital Market developments especially Capital Market regulations.
2. Provide input to the BOD and BOC concerning compliance with capital market regulations.
3. Assist the BOD and BOC in implementing corporate governance, entailing:
 - Information disclosure to the public, including the availability of information on the Bank's Website
 - Timely submission of reports to the Financial Services Authority.
 - Organization and documentation of the GMS.

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

- Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau, Dewan Komisaris.
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sasaran Kerja Unit Kerja *Corporate Secretary*

Dengan adanya Unit Kerja *Corporate Secretary* sebagai unit kerja yang mendukung tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan maka segala kewajiban dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisa kepada Direksi/Dewan Komisaris/Pemegang Saham dapat terlaksana dan dijalankan dengan baik serta sesuai dengan tata kelola Perusahaan.

Unit Kerja *Corporate Secretary* memiliki sasaran kerja antara lain sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai *contact person* Perusahaan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk regulator sehubungan dengan status Perusahaan sebagai Perusahaan Perbankan Publik.
2. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kegiatan usaha Perusahaan termasuk penyampaian keterbukaan informasi kepada otoritas maupun masyarakat telah dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan status Perusahaan sebagai Perusahaan Perbankan Publik.
3. Tercapainya tertib administrasi dan kelengkapan serta keamanan dokumen penting Perseroan.
4. Terpenuhinya hak-hak pemegang saham serta kewajiban Perseroan kepada pemegang saham melalui kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan perbankan publik.
5. Tersedianya informasi yang memadai bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk bahan pengambilan keputusan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta memastikan prosedur pengambilan keputusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keputusan yang dihasilkan sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Menyelenggarakan Rapat-rapat Direksi dan/atau Rapat Dewan Komisaris, termasuk mencatat jalannya Rapat serta mengelola Risalah Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
7. Terselenggaranya dengan baik RUPS, rapat-rapat Direksi dan atau Dewan Komisaris serta kegiatan lainnya yang melibatkan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.

- Organization and documentation of Boards of Directors and Commissioners meetings.
- Implementation of the Bank's orientation program for BOD and BOC.

4. As the Bank's focal point in communicating with the shareholders, Financial Services Authority, and other stakeholders.

Objectives of Corporate Secretary Unit

The Corporate Secretary Working Unit supports the roles and responsibilities of the Corporate Secretary with obligation to provide technical and administrative support and analysis to the BOD/BOC/Shareholders as implemented and executed properly and in accordance with the Bank's governance guidelines.

The objectives of the Corporate Secretary Unit entail the following:

1. As the Bank's focal point in interacting with stakeholders including the regulators with respect to the Bank's status as Listed Banking Company
2. Implement efforts to make sure that the Bank's business activities including information disclosure to authorities and the public have complied with prevailing laws and regulations relevant to the Bank's status as Public Banking Company
3. Ensure orderly administration, comprehensiveness, and security of the Bank's important documents.
4. The rights of shareholders and obligations of the Bank to shareholders are fulfilled; this is achieved by ensuring the Bank's compliance to regulations applicable to a public banking company.
5. Availability of adequate information for the BOD and the BOC as basis of the boards' decision-making; ensuring that the decision-making procedure is in line with prevailing regulations so that decisions are legitimate and accountable.
6. BOD and/or BOC meetings, meeting documentation, and management of BOD and/or BOC minutes of meeting.
7. Proper organization of General Meeting of Shareholders, the BOD and BOC meetings, and other events involving the BOD and BOC.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

- | | |
|---|---|
| <p>8. Terselenggaranya pengelolaan dokumen yang baik terkait dengan pencatatan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham maupun Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-undang Perseroan Terbatas serta dokumen terkait dengan aksi korporasi.</p> <p>9. Mengikuti perkembangan pasar modal dan memberikan masukan/pandangan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris terkait dengan ketentuan pasar modal khususnya aspek keterbukaan informasi maupun pelaporan aksi-aksi korporasi Perusahaan.</p> | <p>8. Good record management pertaining the registration of shareholders in the Shareholder Register and Special List as intended under Article 50 of Limited Liability Company Law and documents on corporate actions.</p> <p>9. Stay updated on recent developments of capital markets and provide input and feedback to the Board of Directors and Board of Commissioners concerning capital market regulations, especially information disclosure and reporting of the Bank's corporate actions</p> |
|---|---|

Profil Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Profile



Dhien Tjahajani, Sekretaris Perusahaan | Dhien Tjahajani, Corporate Secretary

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada profil Direksi dalam bab Profil Perusahaan.

As Corporate Secretary PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Detail of her experience and qualifications are provided in Board of Directors profile on Company Profile chapter.

Daftar Pelatihan Sekretaris Perusahaan Tahun 2016

List of Corporate Secretary Training in 2016

No	Nama	Penyelenggara	Tanggal	Tempat
1	Dhien Tjahajani	Merujuk kepada Daftar Pelatihan BOD tahun 2016 Refer to List of BOD Training in 2016		

UNIT AUDIT INTERNAL

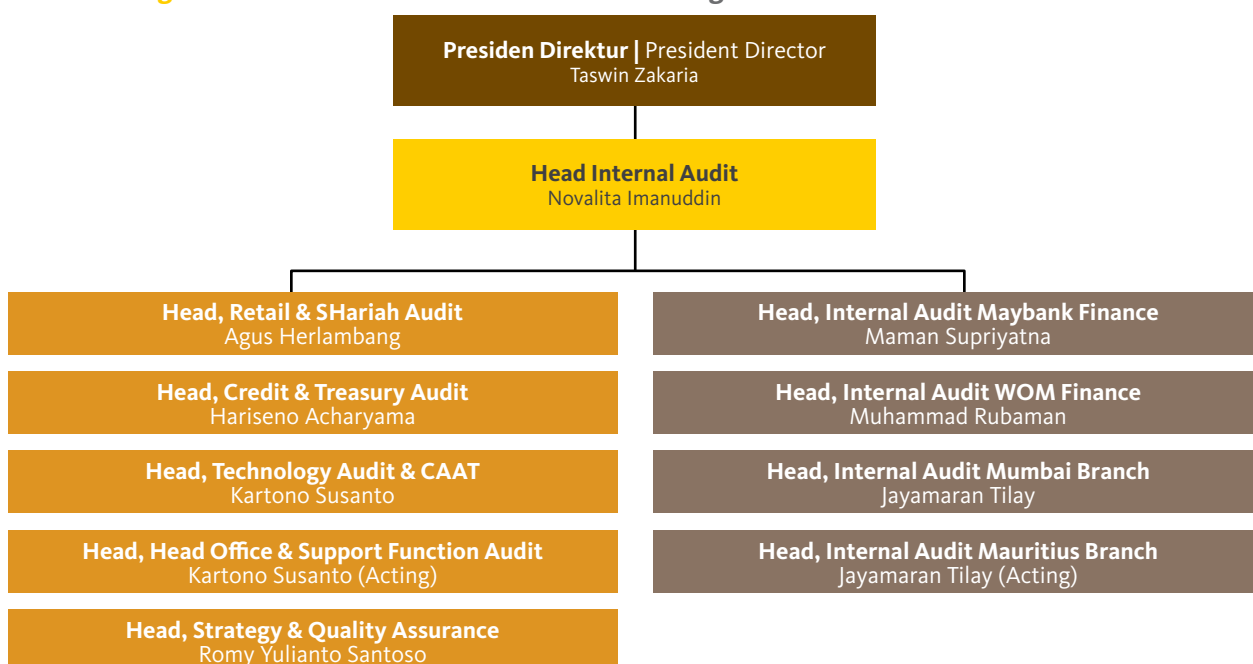
Internal Audit Unit

Fungsi audit internal adalah salah satu fungsi di dalam sistem tata kelola Bank yang turut berperan aktif di dalam membentuk serta meningkatkan lingkungan pengendalian perusahaan (*control environment*) sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis yang berkualitas. Adapun, fungsi audit internal Bank dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

Internal audit function is one of the functions in the Bank's GCG that plays important role in establishing and improving the control environment and to promote quality business growth. The Bank's internal audit function is performed by Internal Audit Unit (SKAI)

Struktur Organisasi dan Kedudukan SKAI

Organizational Structure and Position of SKAI



Kepala SKAI

SKAI dipimpin oleh seorang Kepala SKAI yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris. Saat ini SKAI dipimpin oleh Novalita Imanuddin yang diangkat sejak tanggal 24 Februari 2014 sesuai dengan Surat Keputusan No.SK.PERS.2014.0284/DIR HC tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Novalita Imanuddin bergabung dengan Maybank Indonesia sejak Februari 2014 dengan pengalaman 20 tahun di industri perbankan dan non-perbankan. Sebelumnya beliau sempat menjabat sebagai Head of Compliance & Money Laundering Reporting Officer di Bank ANZ, Chief Audit Executive di Commonwealth Bank, Assistance Vice President Quality Assurance di Citibank, dan Financial Management Consultant di Price Waterhouse Indonesia Konsultan.

Head of SKAI

IATF is led by the Head of SKAI that is appointed and terminated by President Director with the approval of BOC. At present, SKAI is led by Novalita Imanuddin that was appointed on 24 February 2014 based on Decision Letter No. SK.PERS.2014.0284/DIR HC on the Appointment of the Head of Internal Audit Work Unit and already reported to Financial Services Authority (OJK).

Novalita Imanuddin joined Maybank Indonesia since February 2014 with 20 years of experience in the banking and non-banking industries. Previously she served as Head of Compliance & Money Laundering Reporting Officer in ANZ Bank, Chief Audit Executive in Commonwealth Bank, Assistant Vice President of Quality Assurance in Citibank, and Financial Management Consultant in Price Waterhouse Indonesia.

Unit Audit Internal

Internal Audit Unit

Kualifikasi atau Sertifikasi Profesi Internal Audit

Per tanggal 31 Desember 2016, SKAI memiliki total 74 karyawan. Kemudian, dalam rangka mempertahankan standar kinerja dan meningkatkan kompetensi auditor secara berkesinambungan, setiap auditor SKAI diwajibkan untuk mengikuti pelatihan internal maupun eksternal serta pelatihan berbasis *e-learning*. Untuk menunjang pelaksanaan audit yang profesional, auditor SKAI juga direkomendasikan untuk memiliki minimal 1 jenis sertifikasi profesi.

Adapun, jenis sertifikasi yang diprioritaskan oleh SKAI adalah sebagai berikut:

1. Sertifikasi Manajemen Risiko
2. Sertifikasi OMEGA
3. Sertifikasi Certified Internal Audit (CIA)
4. Sertifikasi Certified Information System Auditor (CISA)

Di bawah ini merupakan jenis sertifikasi yang dimiliki oleh karyawan SKAI per 31 Desember 2016:

Sertifikasi Certification	Jumlah Auditor Number of Auditors
Certified Information System Auditor (CISA)	3
Certified Information Security Manager (CISM)	1
Certified Fraud Examiner (CFE)	1
Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)	1
Certified Ethical Hacker (CEH)	0
Sertifikasi Kompetensi Audit Internal Bank - LSPP	10
Certified Bank Internal Auditor (CBIA)	6
Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA)	23
Sertifikasi OMEGA	20
Certified Equity Professional (CEP)	0
Certified in Control Self-Assessment (CCSA)	1
Certified in Risk Management Assurance (CRMA)	2
Linux Professional Institute (LPI)	0
Six Sigma	0
Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) - Level 1	52
Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) - Level 2	11
Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) - Level 3	8
Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) - Level 4	1

Pendidikan/pelatihan selama tahun 2016

Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)
2. Pelatihan internal Syariah Banking
3. Pelatihan Syariah Banking yang dilakukan oleh Group Internal Audit Maybank

Professional Qualification or Certification of Internal Audit

As of 31 December 2016, SKAI has a total of 74 employees. And to maintain performance standard and to improve auditors' competence in a sustainable manner, every SKAI auditor must attend internal and external trainings and join e-learning training. To support professional auditing implementations, SKAI auditors are also recommended to obtain a minimum of 1 professional certification.

The certifications prioritized by SKAI are as follows:

1. Risk Management Certification
2. OMEGA Certification
3. Certified Internal Audit (CIA)
4. Certified Information System Auditor (CISA)

The following details show certification types obtained by SKAI employees as of 31 December 2016:

Qualifications/trainings throughout 2016

Qualification and/or trainings attended in 2016 are as follows:

1. Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) training
2. Internal Syariah Banking training
3. Syariah Banking training conducted by Maybank Internal Audit Group

Unit Audit Internal

Internal Audit Unit

4. Pelatihan internal Trade Finance
5. Pelatihan *Business English Writing & Communication*
6. Pelatihan/penempatan jangka pendek dan jangka panjang di Grup Audit Maybank
7. Pelatihan *Certified Information System Auditor (CISA)* dan kompetensi internal auditor yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP).
8. Pelatihan *soft skills* - kolaborasi karyawan untuk meningkatkan *team engagement* dan *cohesiveness* serta meningkatkan semangat kerja karyawan.

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Berikut merupakan tugas dan tanggung jawab SKAI:

- a. Membuat perencanaan audit tahunan berdasarkan pendekatan risiko (*risk based approach*), termasuk risiko dan kontrol yang menjadi perhatian Manajemen dan regulator. Rencana audit tahunan harus mendapatkan persetujuan Presiden Direktur dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- b. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui, termasuk melaksanakan penugasan khusus atas permintaan Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- c. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Bank.
- d. Melakukan evaluasi dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
- e. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan Manajemen.
- f. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan, Direktur Manajemen Risiko, Direktur terkait, dan Kepala Unit terkait.
- g. Melakukan pemantauan dan analisa atas kecukupan tindak lanjut hasil audit termasuk didalamnya memberikan laporan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dalam hal auditee tidak menindaklanjuti hasil audit.
- h. Menyiapkan laporan yang akan disampaikan oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan .
- i. Berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak intern Bank antara lain dengan memberikan tanggapan atas usulan kebijakan, sistem, dan prosedur untuk memastikan kecukupan pengendalian intern.

4. Internal Trade Finance training
5. Business English Writing & Communication training
6. Short-term and long-term training/placement in Maybank Group Audit
7. Certified Information System Auditor (CISA) training and Internal Audit Competence training conducted by Banking Professionals Certification Institution (LSPP).
8. Soft skills training – employee's collaboration to improve team engagement and cohesiveness and to promote work motivation of the employees.

Roles and Responsibilities

Roles and responsibilities of SKAI are as follows:

- a. Prepare annual audit plan based on risk-based approach, including risks and controls that is monitored by Management and regulators. Annual audit plan must be approved by President Director and reported to BOC through Audit Committee.
- b. Implement the approved annual audit plan, including special audits based on instructions from President Director and BOC through Audit Committee.
- c. Test and evaluate implementation of internal control and risk management system in accordance with the Bank's policy.
- d. Perform evaluation and assessment of efficiency and effectiveness in financial, accounting, operational, human resources, marketing, information technology and other activities of the Bank.
- e. Provide recommendations and objective information to all levels of Management on the activities being reviewed.
- f. Prepare and submit audit report to the President Director and BOC with copies to Compliance Director, Risk Management Director, related Director and Unit Head.
- g. Monitor and analyze adequacy of follow up actions on the audit results, including submitting reports to President Director and BOC through Audit Committee if the audited party did not take any follow-up actions on the audit results.
- h. Prepare reports that will be submitted to the Financial Services Authority by the President Director and BOC.
- i. Act as consultant to the Bank's internal parties, such as giving response on the proposed policies, system and procedures to ensure the adequacy of internal control.

Unit Audit Internal

Internal Audit Unit

- j. Menjaga profesionalisme auditor intern dengan pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, serta program sertifikasi yang memadai melalui program pendidikan berkelanjutan.
- k. Membuat program pengendalian mutu (quality assurance program) untuk mengevaluasi dan menjamin mutu kegiatan operasional audit intern.
- l. Membuat program pengembangan metodologi audit untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja SKAI secara berkesinambungan.

Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Unit Audit Internal

Berdasarkan POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai penugasan Direktur Kepatuhan (*compliance director*) dan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum. Hal ini selaras dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang "Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank Umum". Di dalam PBI yang dimaksud, disebutkan bahwa Bank wajib menerapkan fungsi audit intern bank sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang mana mewajibkan Bank untuk menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter), membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) serta menyusun panduan audit intern.

Hal senada juga disebutkan di dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) nomor IX.1.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal serta *International Standards for the Professional Practice of Internal Audit* (IPPF) dari The Institute of Internal Auditors (IIA).

Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) telah disetujui oleh Presiden Direktur dan diketahui oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Hal ini telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun, Piagam Audit Intern terakhir dikinikan pada bulan April 2016.

- j. Maintain internal auditor professionalism through adequate knowledge, skills, experience and certification programs through sustainable learning programs.
- k. Create quality assurance program to evaluate and ensure the quality of internal audit operational activities.
- l. Create audit methodology development program to improve efficiency and effectiveness of SKAI's performance in a sustainable manner.

Statement of owning Internal Audit Unit guidance or charter

Pursuant to Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 55/POJK.03/2016 on Implementation of Good Governance by Commercial Bank, The Bank is obliged to implement internal audit function effectively by referring to requirements and procedures based on the provision that regulates the appointment of compliance director and application of commercial banks internal audit function implementation standards. This conforms to the Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 1/6/PBI/1999, On 20 September 1999 on "Assignment of Compliance Director and Commercial Banks Internal Audit Function Implementation Standards". In the above-stated PBI, it was described that Banks must implement bank internal audit as stipulated in the Bank's Internal Audit Function Implementation Standards (SPFAIB) that stipulates that Bank must compose Internal Audit Charter, establish Internal Audit Work Unit (SKAI) and prepare internal audit guidance.

Similar statement can also be found in the Regulations of Capital Market and Financial Institution Monitoring Board (Bapepam) number IX.1.7 on Establishment and Guidelines for the Preparation of Internal Audit Charter and International Standards for the Professional Practice of Internal Audit (IPPF) from The Institute of Internal Auditors (IIA).

Internal Audit Charter has been approved by the President Director and acknowledged by BOC through Audit Committee. This complies with the regulations stated before. The Internal Audit Charter was last updated on April 2016.

Unit Audit Internal

Internal Audit Unit

Uraian Singkat Pelaksanaan Tugas Unit Audit Internal selama tahun 2016

Di tahun 2016 SKAI telah melakukan penugasan audit yang meliputi audit pada kantor cabang dalam dan luar negeri, unit kerja Kantor Pusat (bisnis dan fungsi support), teknologi dan sistem informasi, audit pada aktivitas perkreditan, serta melakukan audit khusus dan *surprise*.

Fokus dan rencana audit tahun 2017

Di tahun 2017, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan oleh SKAI dalam menentukan auditable unit yang antara lain:

1. proses end to end antar direktorat/sektor bisnis, berfokus pada kepatuhan dan indikasi atas *fraud*.
2. IT audit sebagai fungsi pendukung atas audit bisnis/proses
3. Berfokus pada audit strategi, tata kelola, produk dan kebijakan atas fungsi dikantor pusat
4. Surprise audit untuk kantor cabang yang lokasinya secara geografis jauh dari jangkauan Cabang Induk (audit operasional & servis).

Pada rencana audit tahun 2017, penugasan SKAI akan meliputi audit pada kantor cabang dalam dan luar negeri, aktivitas perkreditan, treasury, unit kerja Kantor Pusat (bisnis dan fungsi pendukung), teknologi dan sistem informasi.

Brief Description of Internal Audit Tasks Implementation throughout 2016.

In 2016, SKAI had conducted audit tasks in the in-country and overseas branch offices, head office work unit (business and support functions), technology and information system, audit tasks on lending activities and conducted special and surprise audit tasks.

Focus and Audit Plan 2017

In 2017, there are several approaches that will be utilized by SKAI in determining auditable unit, namely:

1. End to end process between business directorate/sector, focusing on compliance and indication of fraud.
2. IT audit as supporting function of business/process audit
3. Focus on strategy audit, governance, product and policies of functions in the head office.
4. Surprise audit in the branch offices that are geographically located far from the reach of main branch (operational & services audit).

In the 2017 audit plan, SKAI assignments will cover audit in in-country and overseas branch offices, lending activities, treasury, head office work unit (business and supporting functions), technology and information system.

UNIT KERJA KEPATUHAN

Compliance Unit

Unit Kerja Kepatuhan dibentuk secara tersendiri, independen terhadap satuan kerja operasional dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Unit Kerja Kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank, namun cakupannya meliputi seluruh jaringan kantor dan unit kerja yang ada pada Bank.

Pengkinian struktur organisasi Unit Kerja Kepatuhan telah dilakukan sehingga terdiri dari unit kerja *Compliance Regulatory Affairs* dan unit kerja *Compliance Monitoring & Training*. Kedua unit kerja tersebut berfungsi untuk mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank serta melakukan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen yang telah dibuat kepada otoritas yang berwenang.

Dalam menjalankan tugasnya, Unit Kerja Kepatuhan telah melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (pencegahan) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan BI dan/atau OJK serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, termasuk kepatuhan terhadap Prinsip Syariah bagi UUS, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Kepala Unit Kerja Kepatuhan

Kepala Unit Kerja Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi serta menguasai ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Selain itu tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan serta memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan.

Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Kepala Unit Kerja Kepatuhan Bank telah dilaporkan kepada OJK.

Unit Kerja Kepatuhan terdiri dari 2 Unit yaitu *Compliance Regulatory Affairs* yang dikepalai oleh Tenang Sitepu dan *Compliance Monitoring & Training* yang dikepalai oleh Anindita Widyasari.-

Compliance Unit is established a separate unit and is independent from operational units. It receives not influence from other units and has direct access to the Director in charge of Compliance Function. Compliance Unit is established in the Bank's Head Office but its scope of responsibilities covers the Bank's entire network of offices and work units.

The organization structure of the Compliance Unit has been updated. Currently, the Unit consists of Compliance Regulatory Affairs and Compliance Monitoring & Training – both are tasked to promote Compliance Culture across all organizational levels and banking activities and to manage Compliance Risk of the Bank by monitoring the fulfillment of commitments made to competent authorities.

In performing its duties, the Compliance Unit already performs a series of *ex-ante* (preventive) actions and steps to ensure that the policies, requirements, systems and procedures and business activities conducted by the Bank comply with BI and/or OJK regulations and other prevailing rules and regulations, including compliance with shariah principles for UUS, and to ensure the Bank's compliance with the commitments made by the Bank to OJK and/or other authorities.

Head of Compliance Unit

The Head of Compliance Unit has met independency requirement and is a competent individual with extensive knowledge in OJK and other existing regulations. The holder of this position is dedicated and is not overseeing other responsibilities outside of the Unit and is highly committed to fostering Compliance Culture.

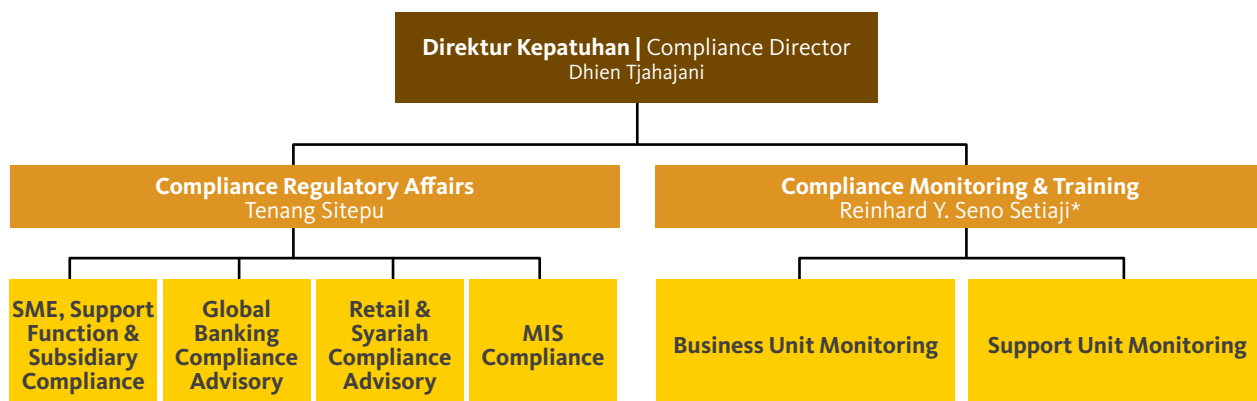
The appointment, dismissal, or replacement of the Head of Compliance Unit is reported to OJK.

Compliance Unit has two work streams of Compliance Regulatory Affairs, led by Tenang Sitepu and Compliance Monitoring & Training led by Anindita Widyasari.

Unit Kerja Kepatuhan Compliance Unit

Struktur Organisasi Unit Kerja Kepatuhan

Compliance Unit Organization Structure



*Efektif bergabung tanggal 30 Januari 2017 | Effectively join on 30 January 2017

Keterangan :

Struktur yang disajikan berdasarkan surat edaran nomor No.SE.2014.004/Dir Compliance tentang Struktur Organisasi Direktorat Legal & Compliance, Corporate Secretary

Note:

The structure is presented based on No.SE.2014.004/Dir Compliance of Organizational Structure of Directorate of Legal & Compliance, Corporate Secretary

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Kerja Kepatuhan

Unit Kerja Kepatuhan berfungsi untuk membantu Direktur Kepatuhan dalam mengelola secara efektif risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta melakukan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen yang telah dibuat kepada otoritas yang berwenang.

Secara garis besar tugas dan tanggung jawab Unit Kerja Kepatuhan dijabarkan menjadi sebagai berikut:

1. Compliance Regulatory Affairs

Akuntabilitas Utama Main Accountability	Aktivitas Utama Main Activities	Output
<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan langkah-langkah yang mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi. Identify steps to grow Compliance Culture across all organizational levels and business activities. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan sistem, program, kerangka kerja kepatuhan (<i>compliance framework</i>), <i>compliance charter</i>, kode etik kepatuhan (<i>compliance code of conduct</i>), atau kebijakan kepatuhan (<i>compliance policy</i>). Prepare the systems, programs, compliance framework, compliance charter, compliance code of conduct or compliance policy 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Compliance awareness</i> seluruh karyawan dan manajemen Bank. Compliance awareness of employees and management

Roles and Responsibilities of Compliance Unit

The Compliance Unit assists the Compliance Director to effectively manage compliance risk of the Bank, realize Compliance Culture across all organizational levels and monitoring the fulfillment of commitments made to competent authorities.

The roles and responsibilities of the Compliance Unit is as follows:

1. Compliance Regulatory Affairs

Unit Kerja Kepatuhan Compliance Unit

Akuntabilitas Utama Main Accountability	Aktivitas Utama Main Activities	Output
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan. Identify, measure, monitor, and control Compliance Risk 	<ul style="list-style-type: none"> Mengkoordinasi proses <i>self assessment</i> Tata Kelola yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja. Coordinate governance self-assessment conducted across all units 	<ul style="list-style-type: none"> Terciptanya tata kelola perusahaan yang baik. Good corporate governance
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan review dan/atau mengevaluasi kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank terhadap ketentuan BI dan/atau OJK, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur. Reviewing and/or evaluating the adequacy and alignment of policies, requirements, systems and procedures maintained by the Bank for BI and/or OJK regulations and other prevailing regulations and providing recommendations for the updates and improvements of policies, requirements, systems and procedures. 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan BI dan/atau OJK maupun otoritas lainnya yang berwenang kepada seluruh unit kerja yang terkait untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepatuhan karyawan. Memberikan opini/<i>advisory</i> kepada unit kerja/cabang terkait dengan permasalahan <i>compliance</i> yang dihadapi. Conduct socialization and training related to regulations issued by BI and/or OJK or other authorities to relevant business units to improve employees' understanding and awareness on compliance. Provide opinion/advise to relevant units/branch office relating to compliance issues 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemahaman atas peraturan yang berlaku. Kebijakan dan Prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip Syariah. Improve understanding on existing regulations Policies and procedures in compliance with prevailing regulations including shariah principles.
<ul style="list-style-type: none"> Bertindak sebagai <i>contact person</i> untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal serta memenuhi komitmen kepada BI dan/atau OJK. As contact person for internal and external parties on the Bank's compliance issues and in meeting the Bank's commitments to BI and/or OJK 	<ul style="list-style-type: none"> Secara berkesinambungan melakukan evaluasi prosedur dan kebijakan internal di Bank agar sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku. Menindaklanjuti setiap permintaan BI dan OJK dalam menyediakan informasi/data dalam rangka pengawasan bank. Menindaklanjuti setiap temuan audit BI dan/atau OJK serta menyelesaikannya sesuai dengan komitmen yang telah disepakati. Continuously evaluate the Bank's procedures and policies, ensuring their consistency with existing regulations Follow up each inquiry from BI and OJK in providing information/ data for bank monitoring purposes. Follow-up every BI and/or OJK audit findings; finalize them based on agreed commitments 	<ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya komitmen tindak lanjut audit dan permintaan data dari BI dan/atau OJK. Meeting the commitments on audit follow-ups and data requests from BI and/or OJK.

Unit Kerja Kepatuhan Compliance Unit

2. Compliance Monitoring & Training

2. Compliance Monitoring & Training

Akuntabilitas Utama Main Accountability	Aktivitas Utama Main Activities	Output
<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan metodologi kepatuhan dan proses-proses yang kuat untuk pemantauan dan pelaporan risiko dan permasalahan kepatuhan. Apply rigorous compliance methodologies and processes to monitor and report compliance risk and issues 	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun rencana pengkajian dan uji kepatuhan berdasarkan pendekatan berbasis risiko sebagai bagian dari rencana tahunan Unit Kerja Kepatuhan serta unit bisnis/ pendukung. Melakukan pengkajian dan uji kepatuhan tahunan, jika keadaan mengharuskan dilakukan pengkajian dan uji kepatuhan terhadap area tersebut. Melakukan pengkajian dan uji kepatuhan secara ad-hoc (berdasarkan persetujuan Direktur Kepatuhan). Prepare risk-based compliance review and test as part of the annual plan of Compliance Unit and supporting/business units Conduct annual compliance review and tests, if required under certain circumstances for compliance review and tests to be conducted in such areas. Conduct compliance review and ad-hoc test (with approval from Compliance Director) 	<ul style="list-style-type: none"> Compliance awareness seluruh karyawan dan manajemen bank. Terciptanya tata kelola perusahaan yang baik. Compliance awareness of employees and management. Good corporate governance

Unit Kerja Kepatuhan Compliance Unit

Akuntabilitas Utama Main Accountability	Aktivitas Utama Main Activities	Output
<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan, menyelaraskan dan menanamkan prinsip-prinsip dan metodologi kepatuhan di semua lini bank dan melakukan pemantauan kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku. Apply, align, and embed compliance methodologies and principles across all lines of the Bank; monitor compliance level with existing regulations 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan <i>compliance visit/</i> review dan memberikan pelatihan yang diperlukan pada unit kerja/ cabang untuk mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan peraturan telah dilaksanakan dengan baik. Menyusun, <i>me-review</i> dan mengkinikan Compliance Plan <i>Self Assessment</i> (CPSA) agar dapat digunakan unit kerja untuk mendeteksi potensi risiko kepatuhan dan harus ditindaklanjuti segera. Melakukan pemantauan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Regulator (BI dan/atau OJK serta otoritas lainnya) Conduct compliance visit/review and providing necessary training at business unit/branch office to obtain assurance that the regulations have been properly complied with. Prepare, review, and update Compliance Plan Self Assessment (CPSA) used by work units to detect compliance risk potentials to be addressed immediately. Monitor follow-up on regulators' findings (BI and/or OJK and other authorities) 	<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan terkait dengan compliance dapat diketahui sejak dini untuk menghindari potensi risiko yang lebih besar. Hasil CPSA unit kerja/cabang akan digunakan sebagai salah satu kriteria untuk melakukan compliance visit/pelatihan. Kerjasama serta koordinasi tindak lanjut temuan dengan Regulator. Early detection of compliance problems to prevent risk potentials from escalating CPSA results from business units/ branch offices would be utilized as criterias to perform compliance visits/training. Cooperate and coordinate follow-ups on regulators' findings

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

PT Bank Maybank Indonesia Tbk ditunjuk oleh Malayan Banking Berhard sebagai pemegang saham pengendali dari Maybank Group menjadi Entitas Utama sesuai dengan Peraturan OJK tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan yang mewajibkan untuk memiliki satuan kerja kepatuhan terintegrasi yang independen.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi mempunyai tugas paling sedikit memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.

Dalam upaya pemenuhan Peraturan OJK tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, maka pelaksanaan tugas serta fungsi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dilakukan oleh Unit Kerja Kepatuhan PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Integrated Compliance Unit

PT Bank Maybank Indonesia Tbk is appointed by Malayan Banking Berhard as the controlling shareholder of the Maybank Group as the Main Entity pursuant to OJK Regulation on the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerate, which requires Maybank to have an independent integrated compliance unit.

Integrated Compliance Unit is tasked to at least monitor and evaluate the performance of compliance function in each Financial Services Institution under the Financial Conglomerate.

To meet OJK Regulation on the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerate, PT Bank Maybank Indonesia Tbk Compliance Unit performs and function and tasks of integrated compliance unit.

Unit Kerja Kepatuhan Compliance Unit

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan 2016

Secara ringkas pelaksanaan tugas Fungsi Kepatuhan diwujudkan melalui program kerja tahunan Direktur Kepatuhan. Secara lengkap Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Direktur Kepatuhan telah disampaikan ke OJK secara semesteran.

Melalui program-program kepatuhan yang terencana dan terintegrasi, Bank berkomitmen membangun budaya kepatuhan dan terus mengembangkan pengelolaan risiko yang efektif. Hal tersebut antara lain dituangkan melalui *Compliance Management Framework*, *Compliance Charter* dan *Compliance Plan* sebagai bagian dari strategi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan yang berkesinambungan melalui pengembangan budaya kepatuhan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.

Strategi Fungsi Kepatuhan diterapkan sesuai 4 (empat) pilar Fungsi Kepatuhan berikut ini:

1. Membangun dan mewujudkan agar terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua fungsi pada organisasi dan kegiatan usaha bank.

1. Pelatihan dan Sosialisasi

Dalam rangka memberikan pemahaman (*awareness*) terhadap budaya kepatuhan (*compliance culture*) yang merupakan bagian dari budaya perusahaan (*corporate culture*), Unit Kerja Kepatuhan melakukan sosialisasi atas peraturan BI dan/atau OJK ke kantor cabang dan unit kerja terkait antara lain penurunan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Primer dalam Rupiah, penyesuaian Rasio Loan To Value (LTV) untuk kredit properti, rasio Financing To Value (FTV) untuk pembiayaan properti, penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP), serta pembentukan tambahan modal berupa *Capital Conservation Buffer* secara bertahap.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pegawainya, Unit Kerja Kepatuhan juga mengirimkan pegawainya untuk mengikuti pelatihan baik yang dilaksanakan oleh pihak Internal maupun Eksternal.

- Pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Kepatuhan adalah sebagai berikut:

Implementation of Compliance Function 2016

In brief, Compliance Function is performed through the Compliance Directors' annual work program. Report of the program's implementation is submitted to OJK every semester.

Through organized and integrated compliance programs, the Bank is committed to building the compliance culture and to continuously developing effective risk management. These commitments are recorded in among others the Compliance Management Framework, Compliance Charter, and Compliance Plan as a part of the continuous Compliance Function implementation strategy through the development of the compliance culture for the purpose of managing compliance risks.

Compliance Strategy is based on the following 4 (four) Compliance Pillars:

1. Building and realizing Compliance Culture across the Banks's organization and business activities.

1. Training and dissemination programs

For the purpose of nurturing compliance culture awareness as a part of corporate culture, the Compliance Unit regularly communicates BI and/or OJK regulations to relevant branch offices and work units, among others include the Primary Statutory Reserves in Rupiah, Adjustments to Loan to Value (LTV) ratio for property loan, Financing to Value (FTV) for propert loan, Payment Transaction Processing (PTP) implementation, and formation of capital of gradual Capital Conservation Buffer.

To improve employee competence and knowledge, the Compliance unit also assigns employees to participate in internal and external training programs.

- Training/socialization conducted by Compliance Unit is as follows:

Semester I – 2016

29 kali pelatihan/sosialisasi | 29 Training/socialization events

Semester II – 2016

31 kali pelatihan/sosialisasi | 31 Training/socialization events

Unit Kerja Kepatuhan Compliance Unit

- Pelatihan/sosialisasi yang diikuti oleh karyawan Unit Kerja Kepatuhan adalah sebagai berikut:

- Training/socialization evens attended by Compliance Unit staff members:

Perihal Remarks	Semester I –2016	Semester II –2016
Jenis Training Yang Diikuti Types of training	14 kali pelatihan/sosialisasi 14 Training/socialization events	30 kali pelatihan/sosialisasi 30 Training/socialization events

2. Penyampaian *Compliance News, Update FAQ dan Advisory*
Sebagai upaya untuk mewujudkan budaya kepatuhan, selain memberikan pelatihan dan sosialisasi maka Unit Kerja Kepatuhan juga melakukan sosialisasi ketentuan antara lain dalam bentuk *Compliance News, Update FAQ dan Compliance Advisory*.
3. Penyampaian Informasi Terkini Ketentuan OJK dan/atau BI kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam hal terdapat penerbitan ketentuan baru oleh OJK dan/atau BI atau regulator lainnya yang berdampak signifikan terhadap operasional Bank, Unit Kerja Kepatuhan menyampaikan informasi singkat kepada Dewan Komisaris dan Direksi melalui *CEO Update* atau melalui pertemuan reguler Dewan Komisaris dan Direksi.
4. *Compliance Plan Self Assessment (CPSA)*.
Sebagai salah satu upaya untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko kepatuhan maka Unit Kerja Kepatuhan memiliki program CPSA yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam ketentuan internal Bank.

Seiring dengan adanya penerbitan regulasi baru, Unit Kerja Kepatuhan berkewajiban untuk menyesuaikan atau mengkinikan aspek-aspek kepatuhan yang disajikan dalam CPSA. Pengkinian aspek kepatuhan dalam CPSA dilakukan oleh Unit Kerja Kepatuhan setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai dengan periode penyampaian laporan CPSA oleh Unit Kerja/Cabang.

5. *Compliance Testing*.
Untuk mengukur tingkat kepatuhan pada Cabang/ Unit Kerja, Unit Kerja Kepatuhan dapat melakukan *Compliance Testing* dalam bentuk pengecekan pemahaman regulasi yang dilakukan baik secara *On-Site Review* maupun secara *Off-Site Review*. Hal-hal yang telah dilakukan antara lain:
 - a. Pengujian Kepatuhan di Kantor Cabang
Pengujian Kepatuhan di Kantor Cabang dilakukan sebagai langkah dan upaya untuk mengukur tingkat kepatuhan pada Kantor Cabang/Unit Kerja.

2. Delivery of Compliance News, Update FAQ dan Advisory
As part of growing compliance culture, other than training and communication programs, the Compliance Unit also communicate policies and regulations in through Compliance News, Update FAQ dan Compliance Advisory.
3. OJK and/or BI Regulation Update to BOC and BOD
In the event of the issuance of new regulations by OJK and/or BI or other regulators, which may have significant impact on the Bank's operations, the Compliance Unit submits brief information to the BOC and BOD through CEO Update or through the regular meetings with the BOC and BOD.
4. Compliance Plan Self-Assessment (CPSA).
To identify and mange compliance risk, the Compliance Unit has CPSA program. The mechanism of this program is set out in the Bank's internal policeis.

Following new regulations, the Compliance Unit must adjust or update compliance aspects in CPSA every 6 (six) months according to the reporting cycle of CPSA from Work Units/Branch.

5. Compliance Testing.
To assess the compliance levels in Branch Offices/ Business Units, the Compliance Unit may perform Compliance Testing by checking the understanding of the regulations either through on-site or off-site reviews. The reviews that have been done are among others:
 - a. Branch office compliance test
Compliance test to measure the level of compliance of branch offices/work units.

Unit Kerja Kepatuhan Compliance Unit

- b. Metodologi Penilaian Risiko Kepatuhan
Dilakukan untuk mengidentifikasi serta menentukan prioritas pemantauan atas risiko kepatuhan yang berdampak signifikan terhadap Bank berupa penurunan tingkat kesehatan Bank (*Risk Based Bank Rating*). Metodologi ini mengharuskan dilakukannya penilaian risiko kepatuhan secara berkala.
 - c. Pemantauan Transaksi *Merchant*
Pemantauan Transaksi *Merchant* dilakukan sebagai salah satu upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, khususnya kartu kredit. Secara berkala dilakukan pemantauan transaksi merchant yang diketahui menerima transaksi gesek tunai dari pemegang kartu kredit.
 6. *Compliance Questionnaire Check List*
Dalam upaya menuju budaya patuh, telah dibuat serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan ketentuan-ketentuan OJK dan/ atau BI maupun ketentuan perundangan lainnya sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit (*Compliance Loan Questionnaire Checklist*) yang akan diberikan pada debitur untuk memberikan pedoman kepada pihak-pihak di Bank yang terlibat dalam proses pemberian kredit agar dalam pemberian kredit selalu mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pemberian kredit tersebut. *Compliance Loan Questionnaire Checklist* ini akan dilakukan update secara berkala apabila terdapat perubahan ketentuan dari regulator terkait.
 7. Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK) *Tools*
BMPK Tools adalah program yang dirancang sebagai alat bantu untuk membantu/ memberikan pedoman kepada pihak-pihak di Bank yang terlibat dalam proses penyaluran dana dapat mengindikasikan bahwa calon debitur/debitur merupakan pihak yang terkait atau bukan merupakan pihak terkait dengan Bank, sehingga dalam setiap penyaluran dana pada calon debitur tersebut dapat dimonitor dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan BMPK antara lain penyaluran dana pada pihak terkait khususnya pada hubungan keluarga dengan pengurus Bank. Penyaluran dana tersebut juga senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian, terutama dalam melakukan penghitungan BMPK sampai derajat kedua bagi keluarga Pengendali, Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank.
- b. Compliance Risk Assessment Methodology
Assessment aims to identify and prioritize monitoring on compliance risk with significant impacts to the Bank, i.e. impairing the Bank's condition (*Risk-Based Bank Rating*). The methodology requires periodic risk compliance assessment.
 - c. Merchant Transaction Monitoring
Merchant transaction monitoring aims to prevent the misuse of card payment equipment, especially credit cards. Regular monitoring is done on merchant transactions that receive cash withdrawal transactions from credit card holders.
 6. Compliance Questionnaire Check List
To create the compliance culture, compliance unit has developed questionnaires related to OJK and/or BI requirements or other regulations in connection with the provision of loan facilities (*Compliance Loan Questionnaires Checklist*) which will be given to debtors so as to provide guidelines for the parties in the Bank who are involved in the loan provisioning process so that the loans provided always refer to the prevailing regulations and at all times uphold the prudent principles in providing such loans. *Compliance Loan Questionnaire Checklist* is regularly updated adjusting to new regulatory requirements.
 7. Legal Lending Limit (LLL) *Tools*
LLL Tools is a program designed to assist/provide guidelines for other parties in the Bank involved in lending. It indicates a debtor/potential debtor's status as related parties to the Bank and lending will therefore be closely monitored to ensure its consistency with LLL requirements, among others lending to related parties, especially parties with familial affiliation with the Bank's management. Lending is also required to observe prudential banking principle, especially in calculating LLL for debtors with familial affiliation with the controlling shareholders, BOC, BOD, and executive officers up to the second degree.

Unit Kerja Kepatuhan Compliance Unit

2. Pengelolaan Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank

1. Penyampaian Informasi ketentuan OJK dan/ atau BI pada Unit Kerja Terkait
Penerbitan ketentuan OJK dan/atau BI dapat berdampak pada kegiatan operasional maupun bisnis Bank. Sejalan dengan hal tersebut, untuk mengelola adanya risiko kepatuhan sebagai akibat penerbitan ketentuan/peraturan baru tersebut maka dilakukan penyampaian informasi ketentuan OJK dan/atau BI kepada kantor cabang/unit kerja terkait melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Penyampaian awal informasi kepada unit kerja terkait melalui email.
 - b. Berdiskusi dengan unit kerja terkait untuk melihat *gap* antara peraturan yang baru diterbitkan terhadap kondisi terkini serta tindak lanjut yang perlu dilakukan.
 - c. Melakukan pemantauan terhadap komitmen implementasi ketentuan tersebut.

2. Bank's Compliance Risk Management

1. Delivery of Information regarding OJK and/or BI regulations to relevant Business Units
The issuance of OJK and/or BI regulations may have an impact on the Bank's operational activities or businesses. In line with such a matter, for the purpose of managing compliance risks due to the issuance of such new regulations, the Bank cascades such information to relevant branch offices business units through the following stages:
 - a. Delivery of initial information to work units via email
 - b. Discuss with relevant work units the gap between new regulations with existing conditions and necessary measures
 - c. Monitor the commitment of regulation implementation



2. Tindak Lanjut Implementasi Ketentuan Regulator Unit Kerja Kepatuhan telah menindaklanjuti beberapa ketentuan yang diterbitkan oleh OJK dan/ atau BI serta menyampaikannya kepada cabang/unit kerja untuk ditindaklanjuti. Untuk memastikan pemenuhan kepatuhan atas Ketentuan Regulator yang baru diterbitkan tersebut maka Unit Kerja Kepatuhan bersama dengan unit kerja terkait membuat Gap Analisis dan memastikan gap analisis maupun kewajiban yang diatur dalam ketentuan Regulator telah terpenuhi dalam ketentuan dan prosedur internal (*Standar Operating Procedure/SOP*).
3. *Self Assessment* atas *Compliance Risk Profile*
Hasil dari *Self Assessment* atas *Compliance Risk* menjadi bagian dari Laporan *Risk Profile Bank* yang

2. Follow-up Regulatory Requirements Implementation
The Compliance Unit has followed up a number of requirements issued by OJK and/or BI and informed of these to branch offices/business units for follow up. To ensure the fulfilment, the Compliance Unit together with relevant business unit prepare a Gap Analysis and ensure that the gap analysis and requirements stipulated under such regulations have been addressed in internal Standard Operating Procedures.
3. Compliance Risk Profile Self-Assessment
Result of Compliance Risk Profile Self-Assessment is part of the Bank's Risk Profile Report to OJK.

Unit Kerja Kepatuhan Compliance Unit

disampaikan ke OJK. Penilaian atas *Compliance Risk Profile* meliputi penilaian terhadap Risiko Inheren, Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) serta Nilai Komposit Risiko Kepatuhan secara keseluruhan.

Untuk nilai komposit Risiko Inherent Kepatuhan Bank secara keseluruhan adalah *Low to Moderate*.

3. Memastikan agar Kebijakan, Ketentuan, Sistem dan Prosedur yang Dijalankan oleh Bank telah Sesuai dengan Ketentuan Regulator serta Perundang-Undangan yang Berlaku

Atas ketentuan yang dikeluarkan oleh regulator, Bank mengidentifikasi adanya risiko berupa denda dan atau teguran yang dapat dikenakan apabila Bank tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana diminta dalam ketentuan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka beberapa hal yang telah dilakukan adalah sebagai berikut

1. Review Kebijakan, Ketentuan, Sistem dan Prosedur Internal yang Akan Diterbitkan
Review kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur internal merupakan sarana yang dilakukan untuk memantau dan memastikan bahwa kebijakan internal Bank yang berlaku senantiasa sejalan dengan peraturan OJK dan/atau BI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses review ini adalah salah satu bentuk implementasi fungsi *advisory* Kepatuhan.

Jenis Review Type of Review	Semester I – 2016	Semester II – 2016
Ketentuan Internal dan Korespondensi dengan Regulator Internal rules and correspondence with regulators	170	121

2. Pengkinian atau Penyempurnaan Kebijakan
Sebagai salah satu elemen penting dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, Unit Kerja Kepatuhan juga melakukan review atas kebijakan, prosedur maupun surat edaran yang telah diterbitkan sebagai bagian dari tanggung jawab dalam melakukan review/rekomendasi pengkinian dan penyempurnaan kebijakan yang telah ada.

Jenis Review Type of Review	Semester I – 2016	Semester II – 2016
Pengkinian atau Penyempurnaan kebijakan Policy update or enhancement	14	17

Assessment includes assessment of inherent risks, the quality of risk management implementation, and composite score of overall compliance risk.

The Bank's composite score for compliance inherent risk is Low to Moderate.

3. Ensure that Policies, Rules, Systems, Procedures of the Bank Conform with Prevailing Laws and Regulations.

With respect to regulatory requirements, the Bank identifies a risk of fine or reprimand in the event that the Bank fails to meet its obligations as required. To mitigate this risk, the Bank has taken a number of actions:

1. Review of policies, requirements, systems and internal procedures to be issued
Review of policies, requirements, systems, and internal procedures represent the measures taken to monitor and ensure that the prevailing internal policies are at all times in accordance with OJK and/or BI regulations and prevailing regulations. The review process represents one of the types of implementation in the Compliance advisory function.

2. Policy Update or Enhancement
An important action in compliance performance, the Compliance Unit reviews issued policies, procedures, and circulars. This is part of the Unit's responsibility of reviewing/recommending policy updates and enhancements.

Unit Kerja Kepatuhan Compliance Unit

4. Memastikan kepatuhan terhadap komitmen bank kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan serta otoritas pengawas lainnya

Dalam mengimplementasikan kepatuhan terhadap komitmen yang telah dibuat atas Hasil Pemeriksaan Regulator, Bank melakukan pemantauan serta memastikan kepatuhan atas pemenuhan komitmen penyelesaian temuan regulator yang telah dibuat kepada OJK dan/atau BI serta otoritas pengawas lainnya dan menyampaikan hasil tindak lanjut tersebut kepada regulator terkait.

1. **Pemantauan Terhadap Hasil Pemeriksaan OJK**
Hasil pemantauan dan penyampaian laporan tindak lanjut kepada OJK dalam upaya untuk memastikan pemenuhan Komitmen Bank yang telah dibuat dan dilaporkan tindaklanjutnya sebagai Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Regulator secara triwulananan, yaitu setiap bulan Maret, Juni, September dan Desember. Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Regulator tersebut mengacu kepada UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 33 ayat 2 dan Peraturan Bank Indonesia No.2/6/ PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank dan penegasannya melalui surat Bank Indonesia No.11/127/ DPB2/TPB2-5.

2. Pemantauan Terhadap Regulator Lain

Untuk Laporan Tindak lanjut hasil Pemeriksaan Regulator Lainnya seperti Bank Indonesia, OJK dalam bidang Pasar Modal disesuaikan dengan jadwal komitmen yang dibuat sampai dinyatakan selesai *closed*.

Di samping pemantauan terhadap hasil Pemeriksaan, Bank juga melakukan pemenuhan Permintaan yang sifatnya Insidentil dari Regulator yaitu permintaan yang harus dipenuhi segera diluar Pemeriksaan Regulator dalam rangka pengawasan secara tidak langsung (off site audit) ataupun untuk kepentingan lain oleh Regulator.

Bank juga memastikan pemenuhan Bank untuk menghadiri undangan pertemuan dengan Regulator baik yang bersifat meminta klarifikasi, dalam rangka mediasi ataupun hal lainnya yang menurut regulator perlu kehadiran dari pejabat ataupun perwakilan Bank

4. Ensuring the Bank's commitment to Bank Indonesia and/or Financial Services Authority and other competent supervisory authorities.

In implementing the compliance with commitments that have already been made on the results of regulator examinations, the Bank performs monitoring and ensures compliance with the completion of such undertakings to OJK and/or BI and other supervisory authorities and submits the follow up results to relevant regulators.

1. **Monitoring on OJK assessment results**
The monitoring results and submission of follow up reports to OJK for the purpose of ensuring that the commitments made have been completed and the follow ups have been made are submitted in Regulator Examination Follow up Reports on a quarterly basis, which is every March, June, September and December. Such reports refers to Law No. 7/1992 amended by Law No. 10/1998 of Banking Article 33 point 2 and Bank Indonesia Regulation No.2/6/PBI/2000 of Requirements and Procedures of Bank Examinations, and the reiteration of which through Bank Indonesia Letter No.11/127/DPB2/TPB2-5.

2. Monitoring by other regulators

To follow up reports of other regulator examinations such as BI, OJK in the capital market, reports are adjusted to the schedule of commitments made until they are declared as closed.

In addition to monitoring examination results, the Bank also responds to the incidental inquiries from regulators such as urgent requests other than the Off-site Regulator Audits or other purpose audits by regulators.

The Bank also ensures its attends meeting invitations with regulators for clarification purpose, mediation purpose, or other matters which require the presence of Bank's officers or representatives.

Unit Kerja Kepatuhan Compliance Unit

Secara ringkas pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan diwujudkan melalui program kerja tahunan Direktur Kepatuhan. Secara lengkap Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran.

Framework Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Framework pengelolaan Risiko Kepatuhan dilakukan melalui pendekatan yang didasarkan pada tiga lini pertahanan sebagai berikut:

Risk Taking Units	Risk Control Units	Internal Audit
1 st lines of Defense	2 nd line of Defense	3 rd line of defense

Risk Taking Unit merupakan pertahanan lini pertama/ *first line of defense* yang bertanggung jawab untuk pengelolaan Risiko Kepatuhan yang melekat di setiap kegiatan usahanya.

Unit Kerja Kepatuhan merupakan pertahanan lini kedua/ *second line of defense*, mengawasi pelaksanaan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko kepatuhan diseluruh aktivitas dan kegiatan usaha Bank.

Fungsi pengelolaan kepatuhan Bank yang dilakukan oleh Risk Taking Unit maupun pengelolaan manajemen risiko kepatuhan oleh Unit Kerja Kepatuhan merupakan objek audit yang direview secara berkala oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), yang merupakan pertahanan lini ketiga/ *third line of defense*.

Laporan Rencana Kerja Kepatuhan

Rencana Kerja Kepatuhan telah disampaikan dalam Rencana Bisnis Bank. Unit Kerja Kepatuhan akan terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka meningkatkan budaya kepatuhan pada seluruh lini unit kerja Bank, baik dalam bentuk *advisory*, *monitoring*, sosialisasi maupun kunjungan kepada unit-unit kerja. Hal ini dilakukan sebagai wujud pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Kerja Kepatuhan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Tata cara penyampaian rencana kerja kepatuhan yang dimuat dalam rencana bisnis Bank dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan OJK dan/atau BI yang mengatur mengenai Rencana Bisnis Bank. Laporan Rencana Kerja Kepatuhan yang disampaikan paling kurang terdiri dari:

1. Evaluasi pedoman internal, yaitu mereview dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dimiliki Bank agar senantiasa sesuai dengan ketentuan

In brief, Compliance Function is performed through the Compliance Directors' annual work program. Report of the program's implementation is submitted to OJK every semester.

Compliance Risk Management Framework

Compliance Risk Management Framework is an approach based on three lines of defense

Risk Taking Unit as the first line of defense is responsible to manage compliance risk inherent in its business activities.

Compliance Unit as the second line of defense supervises the implementation of compliance and compliance risk management across all banking activities.

Compliance management conducted by the Risk Taking Unit and compliance risk management conducted by Compliance Unit are audit objects reviewed periodically by the Internal Audit Unit (SKAI) as the third line of defense.

Annual Compliance Plan

The Annual Compliance Plan has been integrated within the Bank's Business Plan. The Compliance Unit will at all times perform improvements for the purpose of improving the compliance culture in all business units in the Bank, either in the form of advisories, monitoring, socialization or visits to business units. Such activities are performed to meet the roles and responsibilities of the Compliance Unit in accordance with Bank Indonesia Regulation No.13/2/PBI/2011 on the Implementation of Compliance Functions in Commercial Banks.

The procedures for submitting the compliance work plan stated in the Bank's business plan are performed by referring to OJK and/or BI regulation, which governs the Bank's Business Plan. Annual Compliance Plan at minimum must include the following:

1. Internal guidelines evaluation; review and/or recommendation of policy, rules, systems, and procedures updates and enhancements to maintain

Unit Kerja Kepatuhan Compliance Unit

BI dan/atau OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, termasuk prinsip syariah untuk Unit Usaha Syariah.

2. Rencana kegiatan untuk mendorong dan/ atau memelihara Budaya Kepatuhan, termasuk rencana sosialisasi ketentuan.
 3. Monitoring dan tindak lanjut atas ketentuan baru yang diterbitkan Regulator (BI, OJK, dan lain-lain) dengan membuat *gap analysis*.
 4. Kunjungan ke Unit Kerja dan Cabang-Cabang dalam rangka *Compliance Review* dan *Compliance Testing* guna memastikan pemahaman unit kerja atas ketentuan umum yang berlaku.
 5. Sosialisasi kepatuhan di Cabang dan/atau Unit Kerja, termasuk sosialisasi terkait ketentuan baru dari Regulator (BI, OJK, dan lain-lain) yang berdampak terhadap aktivitas dan bisnis bank, melalui kerja sama dengan unit kerja Sumber Daya Manusia.
 6. Mengikutsertakan karyawan Unit Kerja Kepatuhan pada pelatihan untuk meningkatkan pemahaman, kompetensi dan kapabilitas.
 7. Penerbitan Ringkasan Ketentuan Regulator kepada seluruh Unit Kerja.
 8. Mengkoordinir persiapan *Self Assesment*, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola, termasuk Unit Usaha Syariah.
 9. Update *database* atas *review sheet*, opini kepatuhan, denda regulator dan hasil temuan pemeriksaan dari Regulator untuk meningkatkan *monitoring* internal Unit Kerja Kepatuhan.
 10. Monitor dan analisa atas temuan regulator, antara lain:
 - Menyampaikan penyelesaian komitmen unit kerja atas temuan regulator kepada SKAI untuk dilakukan validasi.
 - Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait atas perubahan komitmen bank kepada regulator.
 - Secara berkala menyampaikan laporan tindak lanjut atas komitmen bank kepada regulator.
 11. Monitor risiko kepatuhan pada seluruh lini unit kerja dan menyampaikan *compliance risk profile* kepada unit kerja terkait untuk dikonsolidasikan.
 12. Pelaksanaan fungsi Kepatuhan Terintegrasi sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- their consistency with BI and/or OJK regulations and other prevailing laws and regulations including Shariah principles applicable to Shariah Business Unit.
2. Activities plan to encourage and/or maintain Compliance Culture including regulation dissemination plan.
 3. Monitor and follow-up of new regulations (from BI, OJK, others) by performing gap analysis.
 4. Compliance Review dan Compliance Testing visits to work units and branch offices to ensure their understanding of regulations.
 5. Compliance communications program in collaboration with HR Department at branch/work unit level, including discussions on new regulations (BI, OJK, others) that may impact the Bank's activities and business)
 6. Training programs for staff members of Compliance Unit to improve their knowledge, competence, and capabilities.
 7. Issuance of Regulation Brief to all units
 8. Coordinate Self Assesment and Governance Report preparation including in Shariah unit
 9. Update database of review sheet, compliance opinions, fines, and regulators' findings to improve the monitoring of Compliance Unit.
 10. Monitoring and analysing the findings of regulators, which include among others:
 - Submitting the completion of business units' commitments pertaining to regulators' findings to SKAI for validation purposes.
 - Coordinating with the relevant business units concerning the changes on the Bank's commitments to regulators.
 - Periodically submitting follow up reports of the Bank's commitments to regulators
 11. Monitor compliance risk of all work units and convey compliance risk profile to all relevant work units for consolidation
 12. Implementation of integrated compliance function as required by OJK Regulation No.18/POJK.03/2014 dated 18 November 2014 on the Implementation of Integrated Governance in Financial Conglomerate.

ANTI MONEY LAUNDERING & ASSURANCE

Anti Money Laundering & Assurance

Pelaksanaan Kebijakan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Pelaksanaan Program APU dan PPT mengacu kepada regulasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU PPTPPT) dan peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Pelaksanaan Program APU dan PPT dibawah koordinasi Unit Kerja *Anti Money Laundering & Assurance/AMLA*.

Unit kerja AMLA selama tahun 2016 telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka penerapan fungsi dan peran aktif pemantauan Direksi dan Dewan Komisaris, secara rutin melakukan:
 - *Update* pelaksanaan Program APU dan PPT kepada Direksi (melalui Risk Management Committee), Dewan Komisaris (melalui Risk Oversight Committee) setiap kuartal.
 - Rapat rutin bulanan dengan unit kerja *Community Distribution* (CD) melalui sarana telekonferensi antara Regional Director seluruh wilayah (region), Head, CD, *Operational Risk* dan Direktur terkait.
 - Pembahasan mengenai temuan SKAI yang berkaitan dengan implementasi peraturan APU/PPT pada rapat Internal Audit Komite (tingkat Direksi) dan Audit Committee (tingkat Dewan Komisaris).
2. Mengembangkan kebijakan dan prosedur secara berkesinambungan sesuai regulasi terkini (Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan/Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK) dan *best practice*, antara lain:
 - Mengkinikan ketentuan internal pendukung penerapan pelaksanaan Program APU dan PPT.
 - Melakukan review dan memberikan rekomendasi kebijakan dan prosedur (SE/SOP) unit kerja lain sehingga sejalan dengan penerapan Kebijakan Program APU dan PPT.

The implementation of Anti-Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT) Program Policy

The implementation of AML and CFT Program refer to the regulation of Anti-Money Laundering (PPTPPU) Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, PPTPPU Law No. 9 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of the Financing of Terrorism, and Bank Indonesia Regulation No. 14/27/PBI/2012 dated 28 December 2012, as well as Circular Letter No. 15/21/DPNP dated 14 June 2013 concerning the implementation of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Program for Commercial Bank. The implementation of AML and CFT Program is under the coordination of AMLA Unit.

In the period of 2016, AMLA Unit has conducted the following activities:

1. In order to implement the functions and active roles of monitoring by the Board of Directors (BoD) and the Board of Commissioners (BoC), activities conducted regularly are as follows:
 - Quarterly update to the BoD (through Risk Management Committee) and the BoC (through Risk Oversight Committee) about the implementation of AML and CFT Program.
 - Conducting a monthly meeting with Community Distribution (CD) Unit between Regional Director from all regions, Heads, CD, Operational Risk and related directors through teleconference.
 - Discussing findings of Internal Audit Unit (IAU) with regards to the implementation of AML and CFT Program in Internal Audit Committee (BOD level) and Audit Committee (BOC level) meetings.
2. Developing sustainable policy and procedure in accordance with the latest regulations (Bank Indonesia/Financial Services Authority (OJK)/Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK)) and best practices, among others:
 - Updating internal regulations which support the implementation of AML and CFT Program.
 - Reviewing and providing recommendations for other working units' policy and procedure (SE/SOP) to be in line with the implementation of AML and CFT Program.

Anti Money Laundering & Assurance

Anti Money Laundering & Assurance

- Memberikan rekomendasi dan masukan sebagai tindak lanjut atas pertanyaan dari kantor cabang/unit kerja, baik mengenai penerapan prosedur Program APU dan PPT maupun terkait penanganan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Program APU dan PPT, melalui metode-metode sebagai berikut:
- Melakukan *assessment* terhadap cabang dan unit kerja lain terkait di Kantor Pusat.
 - Melanjutkan program AML Rating sebagai salah satu metode pemantauan pelaksanaan kebijakan Program APU dan PPT oleh cabang, meliputi pemantauan prosedur penerimaan nasabah, pemantauan transaksi, pengkinian data nasabah dan kewajiban pelatihan karyawan.
 - Melakukan koordinasi dengan cabang-cabang dan unit kerja bisnis yang menjadi *auditee* dalam rangka mempersiapkan aspek-aspek yang menjadi indeks pemeriksaan dan menentukan rencana tindak lanjut terhadap temuan audit yang terkait dengan Program APU dan PPT.
 - Melakukan supervisi dan pemantauan aktifitas penerapan Program APU dan PPT bagi anak perusahaan dan cabang luar negeri.
4. Melakukan pemantauan kewajaran transaksi nasabah dengan metode-metode antara lain :
- Pemantauan transaksi terpusat Unit Kerja AMLA melalui sistem otomasi aplikasi Anti Money Laundering (AML).
 - Pemantauan transaksi Out of Profile nasabah yang dilakukan Cabang melalui sistem aplikasi MIS.
 - Menjalankan program APU/PPT yang terkait dengan aktifitas Correspondent Banking sebagai berikut:
 - o Pengkinian data Bank Koresponden,
 - o Memberikan respon atas permintaan pengisian kuisisioner AML oleh Bank Koresponden
 - o Memberikan tanggapan terhadap permintaan klarifikasi oleh Bank Koresponden terkait aktifitas transfer dana nasabah.
- Providing input and recommendations responding to branch offices/working units' inquiries on the implementation procedures of AML and CFT Program or handling of financial crime cases of money laundering and financing terrorism.
3. Monitoring and evaluating the implementation of AML and CFT Program with the following methods:
- Assessing branch offices and other related working units in the Head Office.
 - Continuing AML Rating Program as one of the methods to monitor the implementation of AML and CFT Program policy by branch offices, which includes monitoring the customer acceptance procedure, transaction monitoring, customer data update, and mandatory employee training.
 - Coordinating with branch offices and business working units as the auditee in preparing the aspects which constitute the examination index and determining a follow-up plan on the audit findings related to the AML and CFT Program.
 - Supervising and monitoring the implementation activities of AML and CFT Program by subsidiary companies and overseas branch companies.
4. Monitoring customer's transaction fairness with the following methods:
- AMLA Unit's centralized transaction monitoring through AML automation application system.
 - Customer's Out of Profile transaction monitoring through MIS application system.
 - Operating AML/CFT Program related to the following Correspondent Banking activities:
 - o Updating Correspondent Banks' data,
 - o Responding to Correspondent Banks' inquiry for AML questionnaire.
 - o Responding to Correspondent Banks' inquiry for clarification related to customers' financial transaction activities.

Anti Money Laundering & Assurance

Anti Money Laundering & Assurance

5. Melakukan pengembangan sistem dan manajemen data/informasi antara lain :
 - Melakukan implementasi dan penyempurnaan aplikasi Anti Money Laundering System dalam proses *Transaction Monitoring*, *Case Management*, *Customer Due Diligence*, dan *Reporting*.
 - Melakukan penyesuaian format pelaporan SIPESAT Online sesuai format regulator yang disampaikan pada sosialisasi pelaporan SIPESAT Online.
 - Melakukan pengembangan pelaporan FATCA (SIFINA)
 6. Melaksanakan kewajiban pelaporan Bank ke PPATK, antara lain :
 - Melaporkan transaksi keuangan yang tergolong mencurigakan (LTKM/STR) sebanyak 752 laporan.
 - Melaporkan transaksi tunai dengan jumlah tertentu (LTKT/CTR) sebanyak 44.151 laporan.
 - Melaporkan transaksi transfer dana dari/ke luar negeri (LTKL) sebanyak 335.039 laporan.
 - Melaporkan data nasabah melalui aplikasi SIPESAT sebanyak 4 periode pengiriman.
 7. Menindaklanjuti korespondensi dengan PPATK dan institusi penegak hukum lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
 8. Memberikan sosialisasi ataupun pelatihan Program APU dan PPT dengan metode-metode sebagai berikut :
 - Training/sosialisasi tatap muka,
 - o *Focus Group Discussion* (FGD) ke beberapa cabang dan unit kerja
 - o Regular class Program APU dan PPT yang diadakan oleh Unit Kerja Human Capital (HC) untuk *frontliner*.
 - Modul *E-Learning*
 - Pengiriman contoh-contoh/*pointers* penerapan umum Program APU dan PPT melalui *email* KYC Forum ke seluruh cabang dan unit kerja terkait.
5. Developing system and data/information management, among others:
 - Implementing and refining the AML application system in *Transaction Monitoring*, *Case Management*, *Customer Due Diligence*, and *Reporting* processes.
 - Adjusting SIPESAT Online reporting format in accordance with the regulator's format given at the socialization for SIPESAT Online reporting.
 - Developing FATCA's (SIFINA) reporting.
 6. Carrying out the obligation to provide Bank's reporting to PPATK, among others:
 - Reporting suspicious financial transactions (LTKM/STR) with a total of 752 reports.
 - Reporting cash transaction with certain amount (LTKT/CTR) with a total of 44.151 reports.
 - Reporting a certain amount of cash transactions with a total of 335.039 reports.
 - Reporting customer data through SIPESAT application with a total of 4 distribution periods.
 7. Following up on the correspondence with PPATK and other law enforcement institutions such as Corruption Eradication Commission (KPK), Police Department, and National Narcotics Board (BNN).
 8. Communicating or conducting AML and CFT Program training with the following methods:
 - Training/face-to-face socialization
 - o Conducting a *Focus Group Discussion* (FGD) to several branch offices and working units,
 - o AML and CFT Program's regular class provided by Human Capital (HC) Unit for frontliner.
 - E-learning module.
 - Conveying pointers of AML and CFT Program's general implementation through KYC Forum email to every branch offices and related working units.

EKSTERNAL AUDIT

Audit Eksternal

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan Pemeriksaan Umum tahun 2016

Sebagai perusahaan publik, PT Bank Maybank Indonesia Tbk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Berdasarkan rekomendasi Komite Audit, Dewan Komisaris telah menunjuk KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (PSS) yang terafiliasi dengan *Ernst & Young* (EY) Global sebagai auditor ekstern yang independen untuk memeriksa laporan keuangan PT Bank Maybank Indonesia Tbk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Penunjukkan KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (PSS) yang terafiliasi dengan *Ernst & Young* (EY) dan Akuntan Publiknya untuk tahun buku 2016 adalah tahun kedua untuk KAP-nya dan Akuntan Publiknya. Berdasarkan *track record* yang dimiliki oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Akuntan Publik dan KAP telah menunjukkan bahwa mereka mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank untuk tahun buku 2016 pada tanggal 14 Oktober 2016 dan 14 Februari 2017.

Untuk tahun buku 2016, Akuntan Publik telah melaksanakan auditnya secara independen dan sesuai dengan standar profesional audit. Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit kepada Bank Indonesia untuk tahun buku 2016 pada 14 Februari 2017.

Hasil audit dan *management letter* untuk tahun buku 2016 telah menggambarkan permasalahan Bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Bank Indonesia oleh KAP PSS.

Cakupan hasil audit tahun 2016 sesuai dengan ruang lingkup audit yang telah ditentukan. Auditor telah melakukan audit secara obyektif sesuai dengan standar profesinya.

KAP PSS telah mendapatkan persetujuan izin usaha dari Menteri Keuangan RI berdasarkan keputusan No. 603/KM.1/2015 tertanggal 14 Juli 2015.

Public Accountant Firm (KAP) conducting General Audit 2016

As a public company, PT Bank Maybank Indonesia Tbk appoints a Public Accountant and Public Accounting Firm (KAP) listed in the Bank Indonesia and/or Financial Services Authority to conduct audit of the financial statements of PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Based on recommendation from the Audit Committee, the BOC appointed PSS Public Accounting Firm, a member firm of Ernst & Young (EY) Global as independent auditor to audit the financial statements of PT Bank Maybank Indonesia Tbk for the year ended 31 December 2015. The appointment of Purwanto, Sungkoro & Surja (PSS), a member firm of Ernst & Young (EY), as well as its Public Accountants for 2016 financial year, represents the second year audit for the Accounting Firm and its Public Accountants. Based on the track record obtained by PT Bank Maybank Indonesia Tbk, the Public Accountant and Accounting Firm have shown that they are capable of working independently and meeting the professional standards of public accountants, the audit engagement letter, and the established audit scope. The Public Accountant has made communications with OJK concerning the Bank's conditions for fiscal year 2016 on 14 October 2016 and 14 February 2017.

For 2016 financial year, Public Accountant has conducted audit independently and in accordance with audit professional standard. Public Accountant has reported the audit result to Bank Indonesia for 2016 financial year on 14 February 2017.

The result of audit and management letter for financial year 2016 describes significant issues of the Bank and are presented in timely manner to Bank Indonesia by KAP PSS.

The scope of audit in 2016 conforms to the agreed scope of audit. The auditor has performed audit objectively according to the standards of the profession.

KAP Purwanto, Sungkoro & Surja obtained its license from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia by virtue of decision letter No. 603/KM.1/2015 dated 14 July 2015.

Eksternal Audit

Audit Eksternal

Akuntan yang menandatangani Laporan Keuangan (LK)

Danil Setiadi Handaja, CPA sebagai salah satu partner dari KAP PSS, yang memperoleh Izin Akuntan Publik No. AP.1008, menandatangani Laporan Keuangan (LK) pada tahun 2016.

Biaya Pemeriksaan Umum

Besarnya biaya pemeriksaan Umum (*General Audit Fee*) untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada akhir tahun 31 Desember 2016 adalah Rp3.216.900.000.

Jasa-jasa lainnya

Jasa lainnya yang diberikan KAP PSS adalah jasa *review* untuk melakukan *review atas reporting package* konsolidasian yang tidak diaudit untuk periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dengan biaya sebesar Rp980.000.000.

Independensi

Dalam rangka untuk menjaga independensi selama pemeriksaan umum tahun 2016, maka Akuntan yang bertindak sebagai *Partner-in-Charge (PIC)* telah menandatangani "surat pernyataan independen" dengan surat No. 04861/PSS-AS/2016 tanggal 10 Agustus 2016. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa KAP PSS, baik Partner maupun anggota tim yang melakukan audit atas laporan keuangan PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah independen sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam – LK No. Kep-86/BL/2011 tertanggal 28 Februari 2011 tentang Independensi Akuntan Publik yang Memberikan Jasa di Pasar Modal.

Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik, dan Otoritas Jasa Keuangan

PT Bank Maybank Indonesia Tbk menjalin komunikasi terbuka dan memberikan informasi serta data yang lengkap kepada auditor eksternal untuk kepentingan pemeriksaan selama periode pelaksanaan audit tahun 2016. Komunikasi dan kerjasama dengan auditor eksternal senantiasa dilakukan terkait dengan kebijakan akuntansi terbaru, termasuk perkembangan perpajakan sehingga laporan keuangan disajikan secara wajar. *Management Letter* yang diterima dari KAP PSS (Auditor Ekstern Independen) juga telah menjadi perhatian Direksi untuk ditindaklanjuti.

Audit Signing Partner

Danil Setiadi Handaja, CPA, holder of Public Accountant License No. AP.1008, signed the Financial Statements of 2016.

General Audit Fees

The general audit fees of the Financial Statements for year ended 31 December 2016 was Rp3,216,900,000.

Other Services

PSS Public Accounting Firm provided other services i.e. reviewing unaudited consolidated reporting package for 6 months period ended 30 June 2016. Service fee amounted to Rp980,000,000.

Independency

To maintain independency throughout the process of general audit in 2016, the Accountant as Partner-in-Charge signed a "statement of independency" by virtue of letter No. 04861/PSS-AS/2016 dated 10 August 2016. The letter states that PSS Public Accounting Firm, its Partner and the team members that audit the financial statements of PT Bank Maybank Indonesia Tbk are independent and observe the Decision of the Chairperson of Bapepam-LK No. Kep-86/BL/2011 dated 28 February 2011 concerning the Independency of Public Accountant Providing Services in the Capital Market.

Relationship of the Bank, Public Accountant, and Financial Services Authority

PT Bank Maybank Indonesia Tbk has communicated and provided information and data to external auditor for the purpose of audit during audit period in 2016. The communication and cooperation with external auditor were consistently carried out concerning latest accounting policies, including taxation developments ensuring that the financial statements are fairly presented. The BOD also considers the Management Letter from Independent Auditor for follow-up.

Eksternal Audit

Audit Eksternal

Prosedur Penunjukan Auditor Eksternal

Penunjukan Auditor Eksternal dilakukan melalui prosedur antara lain sebagai berikut:

1. Evaluasi Kinerja Auditor Eksternal
 - a) Setelah penyelesaian Laporan Keuangan Audited periode tahun sebelumnya, unit kerja *Finance & Accounting* bekerja sama dengan Komite Audit melakukan evaluasi atas kinerja dari Auditor Eksternal untuk periode tahun sebelumnya. Unit kerja *Finance & Accounting* akan memberikan masukan dan rekomendasi atas kinerja Auditor Eksternal.
 - b) Hasil Evaluasi kinerja Auditor Eksternal akan di *review* oleh *Finance Director*.
 - c) Setelah *direview* oleh Finance Director, hasil final evaluasi atas kinerja Auditor Eksternal akan dikirimkan ke Komite Audit.
2. Rekomendasi dari Komite Audit kepada Dewan Komisaris
 - a) Komite Audit mereview hasil evaluasi atas kinerja Auditor Eksternal yang diterima dari unit kerja *Finance & Accounting*.
 - b) Memberikan rekomendasi atas penunjukan Auditor Eksternal untuk tahun berikutnya.
3. Penunjukan Auditor Eksternal
Penunjukan Auditor Eksternal dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:
 - a) Melalui Rapat Umum Pemegang Saham, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
 - b) RUPS melimpahkan wewenang pemilihan Auditor Eksternal kepada Dewan Komisaris.

External Auditor Appointment Procedure

The appointment of External Auditor is conducted through the following procedures:

1. External Auditor Performance Evaluation
 - a. Upon finalizing the Audited Financial Statements for the prior year, Finance & Accounting works in cooperation with Audit Committee to evaluate the performance of the External Auditor for the previous year. Finance & Accounting unit provides input and recommendations on the performance of the External Auditor.
 - b. The External Auditor performance evaluation results will be reviewed by the Finance Director.
 - c. After being reviewed by the Finance Director, the final evaluation results of the External Auditor performance is submitted to the Audit Committee.
2. Recommendation from Audit Committee to BOC
 - a. The Audit Committee reviews the External Auditor performance evaluation results from Finance & Accounting.
 - b. The Audit Committee provides recommendation for the appointment of the External Auditor for the following year.
3. Appointment of External Auditor
The appointment of External Auditor may be conducted through 2 (two) methods:
 - a. During General Meeting of Shareholders based on the recommendation provided by the BOC
 - b. General Meeting of Shareholders transfer the mandate to the BOC for the appointment of the External Auditor

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Internal Control System

Latar Belakang

Merujuk kepada SEBI Nomor 5/22/DPNP tentang Pedoman Standar sistem pengendalian intern Bagi Bank Umum dan POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank. Pelaksanaan sistem pengendalian intern dilakukan untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan intern Bank, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu, efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional, serta efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh.

Sistem pengendalian intern dilakukan agar kegiatan operasional Bank dapat berjalan secara sehat, aman dan terkendali. Terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari jajaran manajemen Bank. Selain itu, manajemen Bank juga berkewajiban untuk meningkatkan *risk culture* yang efektif pada organisasi Bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi. PT Bank Maybank Indonesia Tbk telah mengimplementasikan fungsi pengendalian internal dalam kegiatan operasionalnya termasuk melalui pemisahan tugas, *dual control*, rekonsiliasi serta standar proses kerja dan pedoman pelaksanaan.

Pihak-Pihak Yang Berkepentingan dengan sistem pengendalian intern Bank

a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab mengesahkan dan mengkaji ulang secara berkala terhadap kebijakan dan strategi usaha Bank secara keseluruhan, memahami risiko utama yang dihadapi Bank, menetapkan tingkat risiko yang dapat ditolerir (*risk tolerance*), dan memastikan bahwa Direksi telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko tersebut. Selain itu Dewan Komisaris juga mengesahkan struktur organisasi dan memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern.

Background

In accordance with SEBI No. 5/22/DPNP on Guidelines of Internal Control System for Commercial Banks, and POJK No. 18/POJK.03/2016 on Risk Management Implementation for Commercial Banks, the Bank must implement Internal Control System effectively on the activities and operations in all levels of the Bank's organization. Implementation of Internal Control System is carried out to ensure the Bank's compliance on the applicable laws and regulations, including internal regulations of the Bank, availability of the financial and management information that are complete, accurate, appropriate and on time, operational effectiveness and efficiency, and risk culture effectiveness at all levels of the Bank.

Internal Control System is conducted to maintain healthy, safe and controlled operational activities of the Bank. The reliable and effective Internal Control System of the Bank is the responsibility of the Bank's management. Furthermore, the Bank's management is obliged to increase effective risk culture in the Bank, and to ensure that it is implemented in each level of the Bank. PT. Bank Maybank Indonesia Tbk has implemented internal control function in its operations, including task segregation, dual control, reconciliation, work process standards and implementation guidelines.

Parties Related to Internal Control System

a. Board of Commissioners

The BOC is responsible to periodically approve and review the Bank's policies and business strategy in general, understand the major risk exposures of the Bank, and determine risk tolerance and ensure that BOD has conducted necessary steps to identify, measure, monitor and control those risks. Furthermore, BOC also approves the organizational structure and ensure that BOD has monitored the effectiveness of internal control system.

Sistem Pengendalian Intern

Internal Control System

b. Direksi

Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang baik untuk mencapai tujuan Bank serta melakukan monitoring dan memastikan tindak lanjut serta komitmen yang diberikan kepada regulator telah ditindaklanjuti dengan baik. Direksi melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengembangkan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dihadapi Bank, memelihara struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggung jawab dan hubungan pelaporan yang jelas, memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif yang didukung oleh penerapan akuntabilitas yang konsisten. Selain itu Direksi juga menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian internal dan memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern.

c. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

SKAI merupakan bagian dari struktur pengendalian internal Bank yang dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan struktur pengendalian intern, efektivitas pengendalian intern, dan kualitas pelaksanaannya. Pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dari struktur pengendalian internal dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bagi Manajemen bahwa pengendalian telah berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

d. Pejabat dan Pegawai Bank

Setiap pejabat dan pegawai Bank wajib memahami dan melaksanakan sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank. Pengendalian internal yang efektif dapat membangun dan meningkatkan tanggung jawab pejabat dan pegawai Bank, membantu terselenggaranya budaya/kultur risiko (*risk culture*), serta mempercepat proses identifikasi atas praktek perbankan yang tidak sehat melalui sistem deteksi secara lebih cepat dan efisien.

e. Pihak-pihak ekstern

Pihak lain yang turut berkepentingan atas terlaksananya sistem pengendalian intern yang efektif diantaranya otoritas pengawasan Bank, auditor eksternal serta nasabah Bank.

b. Board of Directors

The BOD is responsible of implementing robust Internal Control System to achieve the Bank's objectives, and carry out monitoring and ensure follow-up actions and commitment to regulators have been conducted in good manner. BOD implements the policies and strategies approved by BOC and develop procedures to identify, measure, monitor and control risk exposures of the Bank, maintain organizational structure that reflects clear authority, responsibility and reporting relationship, ensure that the authority delegations are operating effectively and supported by consistent accountability implementation. BOD also determines the policies, strategies and internal control procedures and monitors the adequacy and effectiveness of Internal Control System.

c. Internal Audit Unit (SKAI)

SKAI is part of the Bank's internal control structure whose duties is to carry out audit and assessment on adequacy of internal control structure, internal control effectiveness and quality of the implementations. Objectives of the audit and assessments on effectiveness of internal control structure are to ensure the Management that control has been implemented as intended.

d. Bank's Officers and Employees

Every officer and employee of the Bank must understand and implement Internal Control System as determined by the Bank's management. Effective internal control can develop and improve responsibilities of the Bank's officers and employees, improve the risk culture and accelerate identification process on unhealthy banking practices through quicker and more efficient detection system.

e. External parties

Other parties that also play a role on implementing effective internal control system are Bank's monitoring authority, external auditors and the Bank's customers.

Sistem Pengendalian Intern Internal Control System

Elemen Utama dalam Sistem Pengendalian Intern Bank

a. Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian

Sistem pengendalian intern dijalankan secara efektif dan efisien, tidak ada pengecualian dalam pelaksanaan prosedur pengawasan serta senantiasa menjaga lingkungan yang menunjang upaya pengendalian internal. Secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah berjalan dengan baik. Permasalahan yang timbul karena kelemahan pengendalian internal dilaporkan kepada Direksi dan ditindaklanjuti secara konsisten untuk meminimalkan risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dewan Komisaris, melalui komite-komite yang telah dibentuk melakukan pengkajian atas lingkungan pengendalian dan melakukan penilaian secara independen yang dikomunikasikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti.

b. Identifikasi, Penilaian serta Pengelolaan Risiko

Penilaian risiko merupakan suatu serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi Bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran Bank diidentifikasi, dinilai, dipantau dan dikendalikan secara terus-menerus. Dalam penerapannya telah tersedia prosedur untuk mengantisipasi, mengidentifikasi dan merespon kejadian dan kendala yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran.

Dewan Komisaris dan Direksi, melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko, memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilaksanakan dengan baik.

c. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Kegiatan pengendalian melibatkan seluruh karyawan Bank, termasuk Direksi. Kegiatan pengendalian direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari.

Main Elements in Bank's Internal Control System

a. Monitoring by Management and Control Culture

Internal Control System is implemented effectively and efficiently without any exceptions in implementation of monitoring procedures, and with an environment where internal control efforts are maintained at all times. In general, the quality of Internal Control System is already on good level. The problems arising due to a weakness in the internal control is reported to the BOD and consistently followed up to minimize risks based on prevailing regulations.

The BOC through committees that are established, conduct reviews on control environment and independent assessments, which are reported to the BOD to be followed-up.

b. Identification, Assessment and Risk Management

Risk management is a series of action taken by BOD to identify, analyze and assess risks that the Bank might encounter to achieve the set business objectives. Risks that can affect the Bank's target achievements are identified, assessed, monitored and controlled continuously. Procedures are set in the implementation phase to anticipate, identify and respond to incidents and obstacles that might affect target achievement.

The BOC and BOD through Risk Oversight Committee and Risk Management Committee, ensure risk management is performed appropriately.

c. Control Activities and Segregation of Duties

Control activities involve all employees, including the BOD. Control activities are planned and implemented to control identified risks. Control activities include the establishment of policies and control procedures and earlier verification process to ensure policies and procedures have been consistently complied with, and serve as integral part of the Bank's daily functions and activities.

Sistem Pengendalian Intern Internal Control System

Kegiatan dan prosedur pengendalian risiko dilaksanakan oleh unit pendukung yang telah dibentuk oleh Bank antara lain yaitu Komite Manajemen Risiko dan Komite Audit. Unit Kerja Kepatuhan bertanggung jawab untuk mensosialisasikan ketentuan perbankan yang berlaku, melakukan uji kepatuhan atas kebijakan internal baru dan melakukan *review* atas usulan produk/aktivitas baru, menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) serta memonitor pelaksanaan kepatuhan melalui *Compliance Plan Self Assessment*.

Unit Kerja terkait melakukan *review* data secara berkala atas keberadaan dan efektivitas pengendalian, pembagian tugas yang memadai, dan verifikasi rutin atas akurasi. Aktivitas, tugas dan tanggung jawab unit kerja terkait diuraikan pada bagian lain dari laporan GCG ini.

d. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi

Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang memadai dilakukan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Telah tersedia prosedur pengumpulan data dan teknologi informasi yang dapat menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pemenuhan tugas Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi mengidentifikasi informasi penting yang diperlukan Perusahaan, merangkum, dan mengkomunikasikannya dalam bentuk dan waktu yang tepat sehingga karyawan dapat menjalankan kewajibannya dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat mengetahui kondisi Bank.

e. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Direksi, Unit Kerja terkait, dan Audit Internal melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan terhadap risiko utama telah diprioritaskan dan menjadi bagian kegiatan sehari-hari, termasuk evaluasi secara berkala.

Audit Internal didukung oleh sumber daya yang memiliki kompetensi dan jumlah yang memadai untuk mengevaluasi keseluruhan sistem pengendalian internal atas strategi, kegiatan operasional dan metode pemrosesan informasi keuangan. Audit

The activities and procedures in risk control are performed by support units which have been established by the Bank such as Risk Management and Audit Committee. The Compliance Unit is responsible for socializing the prevailing banking regulations, performing compliance tests of new internal policies and reviewing newly proposed products/activities, implement Anti Money Laundering (AML), Combating Financing for Terrorism (CFT) and monitoring the compliance through Compliance Plan Self-Assessment.

The relevant Business Units carry out periodical data review on the availability and effectiveness of control, proper duties segregation and routine verification on accuracy. Activities, duties and responsibilities of relevant business unit are described in other sections of this GCG report.

d. Accounting, Information and Communication System

Adequate accounting, information and communication system are implemented to identify potential problems and are used as information exchange tools for the purpose of performing tasks based on their respective responsibilities. Data collection procedures and information technology are available to generate business activities reports, financial conditions, risk management implementation, and regulation fulfillment that support task completions of the Board of Directors and Board of Commissioners. The Board of Directors identifies important information required by Bank, summarizes and communicate them in timely and correct manner so that employees can perform their roles and relevant external parties can have information on the condition of the Bank.

e. Monitoring Activities and Corrective Actions on Deviations

Board of Directors, relevant Business Units and Internal Audit perform continuous monitoring on the effectiveness of all internal control implementation. Monitoring of the major risks are prioritized and become part of daily activities including periodic evaluation.

Internal Audit is supported by human resources with adequate competence and number to evaluate the overall internal control system on strategies, operational activities and financial information processing methods. Internal Audit always submit

Sistem Pengendalian Intern Internal Control System

Internal senantiasa menyampaikan hasil temuan audit kepada Komite Audit dan Direksi agar kelemahan atau kekurangan yang ada dapat segera diperbaiki.

Direksi dan Pejabat Bank memiliki komitmen dan telah melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan yang telah dilakukan maupun rekomendasi Audit internal.

Penilaian atas efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) melakukan penilaian hasil audit atas kantor cabang/unit kerja berdasarkan sistem peringkat ROCAM (*Risk Management, Operational Control, Compliance, Asset Quality dan Management*). Sejalan dengan perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko Bank, maka SKAI memandang perlu dilakukan penyesuaian proses dan metodologi penilaian hasil audit berbasis risiko yang sejalan dengan Group Internal Audit Maybank. Sejalan dengan Standar sistem pengendalian intern bagi Bank Umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui SE No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003, SKAI telah menyempurnakan penilaian hasil audit dengan mengevaluasi kecukupan serta efektivitas desain dan implementasi pengendalian intern Bank dengan pendekatan kerangka pengendalian intern yang disusun oleh *Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO)*. COSO adalah suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk di Amerika pada tahun 1985 dan disponsori oleh lima lembaga akuntansi profesional, yaitu *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)*, *American Accounting Association (AAA)*, *Financial Executives Institute (FEI)*, *The Institute of Internal Auditors (IIA)* dan *The Institute of Management Accountants (IMA)*. Tujuan utama COSO adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud* dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. COSO telah menyusun suatu definisi umum untuk pengendalian, standar, dan kriteria intern yang dapat digunakan perusahaan untuk menilai suatu sistem pengendalian.

Sesuai dengan revisi dokumen Internal Control - Integrated Framework yang diterbitkan oleh COSO pada tahun 2013, kerangka pengendalian intern dijabarkan dalam 3 objectives, 5 components, 17 principles, dan points of focus, yang penjelasannya dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Tujuan COSO

COSO mendefinisikan kerangka pengendalian intern sebagai proses yang dipengaruhi oleh Direksi, Manajemen, dan pelaku organisasi lainnya untuk memberikan keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan organisasi, yang dikelompokkan dalam kategori berikut:

their audit findings to Audit Committee and Board of Directors so that any weaknesses or deficiency can be immediately improved.

The Board of Directors and Bank Officers have commitment and have conducted follow-ups on the results of the monitoring process and on the recommendations of Internal Audit.

Internal Control System Effectiveness Assessment

Internal Audit Unit (SKAI) performs assessment of audit results of the branches/business units based on ROCAM rating system (*Risk Management, Operational Control, Compliance, Asset Quality and Management*). In line with the changes of business complexity and the Bank's risk profile, SKAI deems it necessary to adjust process and methodology of risk-based audit result assessment, which is in line with Maybank Internal Audit Group. In line with Internal Control System Standards for Commercial Banks, as regulated by Bank Indonesian through SE No. 5/22/DPNP dated 29 September 2003, SKAI has refined the assessment process of audit results by evaluating adequacy and effectiveness of design and implementation of the Bank's internal control using internal control framework approach, as established by Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission (COSO). COSO is an initiative from the private sector that was established in the United States in 1985 and sponsored by five professional accounting institutions, namely American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), American Accounting Association (AAA), Financial Executives Institute (FEI), The Institute of Internal Auditors (IIA) and The Institute of Management Accountants (IMA). Main objectives of COSO are to identify factors that cause fraud and compose recommendations to reduce these events. COSO had created a general description for internal control, standards and criteria that can be used by the Bank to assess a control system.

Per Internal Control - Integrated Framework document revision that was published by COSO in 2013, internal control framework is described in 3 objectives, 5 components, 17 principles and points of focus, with the following descriptions:

1. COSO Objectives

COSO defines internal control framework as process that is affected by BOD, Management and other organization actors to give proper confidence on achieving organization's objectives, which are categorized as follows:

Sistem Pengendalian Intern

Internal Control System

- a) Operations, yaitu efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.
- b) Reporting, yaitu kehandalan pelaporan yang digunakan oleh organisasi dan stakeholders.
- c) Compliance, yaitu kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan eksternal yang berlaku.

2. Komponen COSO

Dalam sistem pengendalian intern yang efektif, terdapat lima komponen yang diperlukan untuk mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, yaitu:

- a) *Control Environment* (CE), merupakan serangkaian standar, proses, dan struktur yang menyediakan dasar untuk penerapan pengendalian intern di seluruh organisasi.
- b) *Risk Assessment* (RA), merupakan proses identifikasi dan pengukuran risiko yang dapat mempengaruhi upaya pencapaian tujuan organisasi.
- c) *Control Activities* (CA), merupakan serangkaian kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa arahan Manajemen telah dijalankan.
- d) *Information & Communication* (IC), merupakan komponen yang mendukung kemampuan organisasi untuk menggunakan informasi yang tepat dalam sistem pengendalian intern dan untuk menerapkan tanggung jawab pengendalian intern.
- e) *Monitoring Activities* (MA), merupakan aktivitas pengawasan yang bertujuan untuk menilai komponen-komponen pengendalian intern.

3. Prinsip COSO

COSO principles disusun sebagai penjabaran prinsip-prinsip dalam penerapan COSO components, yaitu sebagai berikut:

- a) Operations, which is effectiveness and efficiency of operation activities to support organization's objective achievements.
- b) Reporting, which is the reliability of reporting used by organization and stakeholders.
- c) Compliance, which is compliance to the prevailing law and external regulations.

2. COSO Components

In an effective internal control system, there are five components required to support the achievement of vision, mission and objectives of organization, namely:

- a) *Control Environment* (CE) – a series of standards, processes and structures that provide foundations in implementing internal control in the organization.
- b) *Risk Assessment* (RA) – identification process and risk measurement that might affect the efforts to achieve organization's objectives.
- c) *Control Activities* (CA) – a series of policies and procedures that will help ensure that the Management's directives have been implemented.
- d) *Information & Communication* (IC) – a component that supports the organization's abilities to utilize correct information in the internal control system and to implement internal control responsibilities.
- e) *Monitoring Activities* (MA) – monitoring activities that aim to assess internal control components.

3. COSO principles

COSO principles elaborate the COSO components as follows:

Sistem Pengendalian Intern Internal Control System

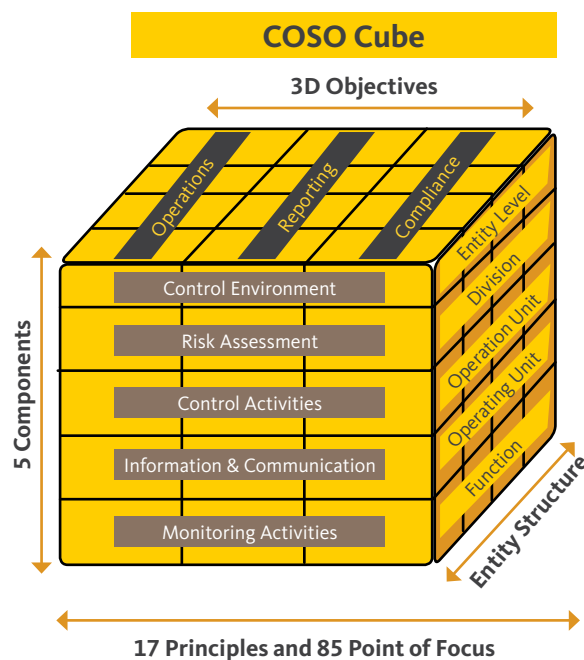
COSO Components	COSO Principles
1. Control Environment (CE)	1. Demonstrate Commitment to Integrity and Ethical Values. 2. Exercises Oversight Responsibility. 3. Establishes Structure, Authority, and Responsibility 4. Demonstrates Commitment to Competence. 5. Enforces Accountability.
2. Risk Assessment (RA)	6. Specifies Suitable Objectives. 7. Identifies and Analyzes Risk. 8. Assesses Fraud Risk. 9. Identifies and Analyzes Significant Change.
3. Control Activities (CA)	10. Selects and Develops Control Activities. 11. Selects and Develops General Controls over Technology 12. Deploys through Policies and Procedures.
4. Information & Communication (IC)	13. Use Relevant Information. 14. Communicates Internally. 15. Communicates Externally.
5. Monitoring Activities (MA)	16. Conducts Ongoing and/or Separate Evaluations. 17. Evaluates and Communicates Deficiencies.

4. COSO Points of Focus

Untuk membantu dalam mengevaluasi kecukupan dan efektivitas COSO *principles*, COSO memberikan arahan berupa *points of focus*. Pada dasarnya sifat *points of focus* adalah dinamis dan jumlahnya dapat disesuaikan. Dengan tetap mempertimbangkan kesesuaiannya, SKAI akan senantiasa mengkinikan struktur dan kerangka kerja penilaian sistem pengendalian intern menurut pengembangan COSO terkini.

4. COSO Points of Focus

COSO points of focus assist in the evaluation of the adequacy and effectiveness of COSO principles. Points of focus are dynamic and can be modified. SKAI continually updates the structure and framework of internal control system assessment according to their adequacy and latest COSO developments.



PERMASALAHAN HUKUM/LITIGASI

Legal Matters/Litigation

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Maybank menghadapi beberapa perselisihan atau gugatan hukum perdata maupun pidana yang dihadapi Bank selama tahun 2016 di seluruh tingkatan pengadilan.

Maybank melakukan analisa risiko hukum yang dihadapi, analisa hukum dilakukan berdasarkan berbagai parameter, hasil evaluasi risiko hukum secara bulanan sebagai bagian dari pengelolaan risiko hukum sebagai bagian dari pengelolaan manajemen risiko.

In 2016, Maybank, with respect to its business activities, was involved in a number of disputes or civil and criminal claims across all judiciary levels.

Legal risk is part of the Bank's business risks that Maybank regularly analyzes. Legal risk analysis takes into account several parameters and is done on monthly basis as part of the risk management process.

Maybank sebagai Tergugat/Terlapor

Maybank Indonesia as Defendant

(satuan) | (unit)

Permasalahan Hukum Legal Matters	Jumlah Total	
	Perdata Civil	Pidana Criminal
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Resolved (cases have received legally binding decisions)	15	-
Dalam proses penyelesaian In settlement process	81	2
Total	96	2

Keterangan :

- Untuk Perkara Perdata :
 - Terdapat 29 perkara baru sampai dengan bulan Desember 2016.
 - Terdapat 56 perkara yang belum selesai di tahun 2015.
- Untuk Perkara Pidana :
 - Terdapat 1 perkara baru sampai dengan bulan Desember 2016
 - Terdapat 1 perkara belum selesai di tahun 2015.

Note:

- Civil Case:
 - There were 29 new claims until December 2016
 - 56 cases were still ongoing from 2015
- Criminal Case:
 - There was 1 new case until December 2016
 - 1 case was still ongoing in from 2015.

Maybank sebagai Penggugat/Pemohon/ Pelapor

Maybank as Plaintiff/Claimant/Complainant

(satuan) | (unit)

No	Permasalahan Hukum Legal Matters	Jumlah	
		Perdata Civil	Pidana Criminal
1	Perkara berkaitan dengan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Claims related to mortgage loans (KPR) Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Resolved (cases have received legally binding decisions)	1	-
	Dalam proses penyelesaian In settlement process	1	-
	Total	-	-
2	Perkara berkaitan dengan pemberian kredit lainnya Claims related to other loans Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Resolved (cases have received legally binding decisions)	14	-
	Dalam proses penyelesaian In settlement process	112	3
	Total	126	3

Permasalahan Hukum/Litigasi Legal Matters/Litigation

No	Permasalahan Hukum Legal Matters	Jumlah	
		Perdata Civil	Pidana Criminal
3	Perkara Kepailitan dan PKPU Insolvency and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Resolved (cases have received legally binding decisions) Dalam proses penyelesaian In settlement process	-	-
	Total	-	-
4	Perkara Lainnya Other Claims Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Resolved (cases have received legally binding decisions) Dalam proses penyelesaian In settlement process	-	-
	Total	1	14

Perkara-Perkara Penting Yang Dihadapi Maybank

Di sepanjang tahun 2016, perkara yang dihadapi Maybank tersebut pada umumnya adalah perlawanan atas pelaksanaan eksekusi jaminan yang dipegang Maybank selaku kreditur preferen. Apabila dari perkara-perkara yang dihadapi Maybank ada yang diputuskan kalah oleh Pengadilan, maka putusan tersebut tidak memberikan dampak negatif dan material terhadap keadaan keuangan maupun kelangsungan usaha Maybank.

Database perkara yang memuat seluruh daftar perkara yang dihadapi Perseroan dimonitor dan dievaluasi oleh Unit Kerja Litigasi. Unit Kerja Litigasi merupakan salah satu unit kerja direktorat dalam struktur organisasi Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Perkara-perkara Penting yang sedang Dihadapi oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang Menjabat

Selama tahun 2016 masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak pernah tersangkut atau terlibat dalam suatu perkara perdata dan/atau pidana.

Perkara-perkara Penting yang Dihadapi Anak Perusahaan Maybank

Selama tahun 2016 tidak terdapat perkara yang berkategori penting/material dan/atau yang dapat mempengaruhi kinerja Maybank yang dihadapi oleh PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) dan PT Maybank Indonesia Finance.

Significant Cases Involving Maybank

In 2016, legal claims involving Maybank were largely claims to contest the execution of encumbrance held by Maybank as the preferred creditor. In cases where the court decided against Maybank, the ruling did not render negative and material impacts to the Bank's financial condition or business continuity.

The database of cases that lists all cases involving the Bank is monitored and evaluated by the Litigation Unit, one of the directorates in the organizational structure under the Director in charge of compliance function.

Significant Cases Involving Active Members of the Board of Commissioners and Board of Directors

In 2016, there were no legal cases, civil and/or criminal, that involved any of the members of the BOC and BOD.

Significant Cases Involving Maybank Subsidiaries

In 2016, there were no significant/material and/or major cases that impacted the performance of Maybank that involved PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) and PT Maybank Indonesia Finance.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA

Transparency of Financial and Non-Financial Conditions That Have Not Been Disclosed in Other Reports

Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank. Informasi kondisi keuangan Bank telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

Transparansi Kondisi Keuangan

Laporan Publikasi Tahunan

Laporan Publikasi Tahunan adalah laporan keuangan yang menggambarkan kinerja bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan informasi lain yang diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tahunan. Laporan Publikasi Tahunan biasa dikenal dengan Laporan Tahunan Bank.

Laporan Tahunan adalah laporan untuk posisi akhir bulan Desember, antara lain mencakup:

- a. Informasi umum.
- b. Laporan keuangan.
- c. Informasi kinerja keuangan.
- d. Pengungkapan permodalan dan praktik manajemen risiko yang diterapkan Bank.
- e. Pengungkapan lain sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan.
- f. Informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bank wajib mengumumkan Laporan Tahunan pada situs web Bank paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun buku dan wajib memelihara pengumuman laporan tersebut paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir. Bank wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun buku.

Opini Akuntan Publik atas laporan keuangan wajib dikemukakan dalam Laporan Tahunan. Laporan keuangan pada Laporan Tahunan wajib disusun untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan paling sedikit dalam bentuk perbandingan dengan Laporan periode pembanding sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

The Bank maintains policies and procedures on disclosing the Bank's financial and non-financial conditions. All information pertaining the Bank's financial condition are clearly and transparently set forth in a number of reports, among others:

Financial Condition Transparency

Annual Report

Annual report contains financial statements that describe the Bank's performance in 1 (one) year and other information. It is published for the public and is submitted annually to OJK. Annual publication is also known as the Bank's Annual Report.

Annual Report presents the Bank's position as at December and covers among others:

- a. General information
- b. Financial statements
- c. Financial performance
- d. Disclosure of capital and risk management practices
- e. Other disclosures as stipulated financial accounting standards
- f. Other information stipulated by OJK.

The Bank is required to announce its Annual Report on the Bank's website and to submit it to OJK no later than 4 (four) months after the closing of the financial year. The website must also provide annual reports for at least the last five financial years.

The opinion of the public accountant for the financial statements must be disclosed in the Annual Report. Financial statements attached to the annual report must be composed for 1 (one) financial year and presented at minimum as comparison with the previous period according to financial accounting standards.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya

Transparency of Financial and Non-Financial Conditions That Have Not Been Disclosed in Other Reports

Laporan Publikasi Triwulanan

Laporan Publikasi Triwulanan adalah laporan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September dan bulan Desember.

Laporan Publikasi Triwulanan meliputi:

- a. Laporan keuangan.
- b. Informasi kinerja keuangan.
- c. Informasi susunan dan komposisi pemegang saham, susunan Direksi dan susunan Dewan Komisaris serta susunan Dewan Pengawas Syariah untuk Bank Umum Syariah.
- d. Informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan disajikan dalam bentuk:

- a. Laporan keuangan individual; dan
- b. Laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan wajib disajikan paling sedikit dalam bentuk perbandingan dengan Laporan periode pembandingan sesuai standar akuntansi keuangan.

Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha, wajib menambahkan Laporan Publikasi Triwulanan dengan:

- a. Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan; atau
- b. Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan.

Untuk memenuhi ketentuan publikasi, Laporan Keuangan posisi akhir bulan Maret, Juni dan September 2016 telah dipublikasikan melalui surat kabar Media Indonesia dan untuk posisi akhir Desember 2016 telah dipublikasikan melalui surat kabar Bisnis Indonesia. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tersebut dan Laporan Keuangan Konsolidasian telah disampaikan kepada:

- a. Bank Indonesia
- b. Otoritas Jasa Keuangan
- c. Bursa Efek Indonesia

Selain itu, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Laporan Keuangan Konsolidasian posisi akhir bulan Desember 2016 telah disampaikan juga kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Publikasi Triwulanan juga telah diumumkan melalui

Quarterly Publication Report

Quarterly Publication Report is interim reports for the positions as at the end of March, June, September, and December.

It consists:

- a. Financial statements
- b. Financial performance information
- c. Information on shareholding composition and compositions of the BOD, BOC, and SSB for Shariah Commercial Bank.
- d. Other information required by OJK.

Financial statements in Quarterly Publication Reports are presented as:

- a. Bank only (individual) financial statements; and
- b. Consolidated financial statements

Financial statements in Quarterly Publication Reports must be presented at least in comparison with the previous period according to financial accounting standards.

A bank that is part of a business group must complement its Quarterly Publication Reports with:

- a. Consolidated financial statements of Parent Entity that cover the financial statements of all financial business entities under the group; or
- b. Consolidated financial statements of Parent Entity that cover the financial statements of all financial and non-financial business entities under the group.

To comply with the publication provisions, the interim Financial Statements position at the end of March, June and September 2016 have been published in Media Indonesia and in Bisnis Indonesia for year-end position as at December 2016. In addition, the Quarterly Financial Report and the Consolidated Financial Statements have also been submitted to:

- a. Bank Indonesia
- b. Otoritas Jasa Keuangan
- c. Indonesia Stock Exchange

The Bank has also published the Quarterly Publication Reports and Consolidated Financial Statements for December 2016 position to Depository Securities Agency. The Bank has announced Quarterly Publication Reports in accordance with the applicable regulations. The Quarterly Publication Report has also been published through the

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya

Transparency of Financial and Non-Financial Conditions That Have Not Been Disclosed in Other Reports

situs website perusahaan. Laporan Publikasi Triwulanan ditandatangani paling sedikit oleh Presiden Direktur dan 1 (satu) orang anggota Direksi Bank.

Laporan Publikasi Bulanan

Laporan Publikasi Bulanan meliputi laporan keuangan bulanan yang terdiri atas:

- Laporan Posisi Keuangan (Neraca).
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.
- Laporan Komitmen dan Kontinjensi.

Laporan Publikasi Bulanan yang meliputi laporan keuangan bulanan disajikan secara individu. Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank. Pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi akhir bulan laporan. Bank wajib memelihara pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank paling kurang untuk 2 (dua) Tahun Buku terakhir. Bank menyampaikan Laporan Publikasi Bulanan secara online melalui system pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal penyampaian laporan belum dapat dilakukan, Bank menyampaikan Laporan Publikasi Bulanan secara online melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU). Penyampaian Laporan Publikasi Bulanan secara online melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan atau sistem LKPBU dilakukan sesuai tata cara, format, dan jangka waktu dalam ketentuan mengenai sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan atau LKPBU. Bank mempublikasikan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dalam format Laporan Bulanan setiap bulannya dalam format sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun Amount of Severance Payment of Each Person in 1 (one) year	2016
	Jumlah Pegawai Number of Employees
Di atas Rp1 miliar Above Rp1 billion	0
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Above Rp500 million Up to 1 billion	3
Rp500 juta ke bawah Rp500 million and below	43

Company's website and are signed by at least the President Director and 1 (one) member of the Board of Directors of the Bank.

Monthly Publication Report

The Monthly Publication Report covers the monthly financial statements which include:

- Statement of Financial Position (Balance Sheet).
- Income Statement and Other Comprehensive Income.
- Commitment and Contingency Report.

The Monthly Publication Report that includes the monthly financial statements is presented individually. The Bank publishes the Monthly Publication Report on the Bank's website. The publication of the Monthly Publication Report on the Bank's website is carried out no later than at the end of the following month, following the end of the month's report. Banks are required to maintain the publication of the Monthly Publication Reports on the Bank's Website for at least the last 2 (two) Financial Years. The Bank submits reports online through the reporting system of the Financial Services Authority. In the event the report cannot be submitted, the Bank submits the Monthly Publication Report online through the system of Commercial Bank Head Office Report (LKPBU). Submission of online Monthly Publication Report through the LKPBU system is conducted in accordance with the procedure, format, and time periods in the provisions of LKPBU system. Banks publish the Monthly Publication Reports in the Monthly Report format each month in a format that is in accordance with regulation of the Financial Services Authority.

Number of employee terminated and total of severance payment:

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DENGAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Provision of Funds to Related Parties and Large Exposures

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/group inti per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Provision of funds to related parties and core debtors/group as of 31 December 2016, are as follows:

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait:

Provision of Funds to Related Parties:

No	Penyediaan Dana Provision of Funds	Debitur Debtors	Nominal (jutaan rupiah) Nominal (million Rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait*) To Related Party*)	199	972,845
2	Kepada Debitur Inti To Core Debtor		
	- Perorangan Individual	13	12,477,499
	- Group Group	12	12,192,791

Penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank (*related party*) dan kepada debitur/group inti telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan tidak terdapat pelampauan maupun pelanggaran BMPK sepanjang tahun 2016.

Provision of funds to the Bank's related parties and to core debtors/group complies with Regulation of Bank Indonesia on Legal Lending Limit (LLL) and without any breaches or excess of LLL throughout 2016.

Secara berkala bank menyampaikan laporan kepada Regulator meliputi:

The Bank periodically submits reports to Regulator which cover:

- Laporan Bulanan Pihak Terkait dengan Bank (*related party*) untuk Individual
 - Laporan Triwulanan Pihak Terkait Bank (*related party*) untuk konsolidasi dengan Perusahaan Anak
 - Laporan Enam Bulanan Daftar Rincian Pihak Terkait dengan Bank (*related party*)
 - Laporan Bulanan Debitur Inti Bank
- Untuk laporan tersebut diatas Bank telah memiliki otomasi pelaporan untuk Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait Bank (*related party*) baik Individual Bank maupun Konsolidasi dengan Perusahaan Anak, serta penyediaan Dana kepada Debitur Inti.

- Monthly Report on Related Party to the Bank for Individual
 - Quarterly Report on Related Parties to the Bank for consolidation with Subsidiaries
 - Bi-annual Report on Details of Related Parties to the Bank
 - Monthly Report on the Bank's Core Debtors
- For the respective reports, the Bank has automated reporting system for Provision of Funds to the Bank's Related Parties, for Bank's Individuals and for Consolidation with Subsidiaries and Fund provision to Core Debtors.

Bank telah memiliki kebijakan internal mengenai mekanisme pemantauan penyediaan dana dengan memperhatikan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan dan Bank telah menetapkan kebijakan internal mengenai limit penyediaan dana, seperti diantaranya adalah penetapan limit internal penyediaan dana besar untuk debitur dan obligor.

The Bank has internal policy on funds provision monitoring mechanism by observing distribution/diversification funds provision portfolio provided and the Bank has established internal policy of lending limit, such as large exposure internal limit for debtors.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dengan Penyediaan Dana Besar

Provision of Funds to Related Parties and Large Exposures

Di bawah ini disampaikan laporan yang dimaksud di atas untuk posisi per 31 Desember 2016:

The above-stated reports can be found below for the position as of 31 December 2016:

Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dengan Bank (*related party*) sebagai berikut:

Funds provision to Related Parties to the Bank are as follows:

Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dengan Bank (*related party*) sebagai berikut:

Funds provision to Related Parties to the Bank are as follows:

No	Nama Perusahaan Company Name	Total Saldo/Pihak Terkait (Jutaan Rupiah) Total Balance/Related Party (million Rupiah)	Keterangan Description
1	USB AG	1,200	Pengendali Bank Bank's controlling interest
2	Malayan Banking Berhad	36,918	Pemegang saham akhir Ultimate shareholder
3	Maybank Kim Eng Securities	4	Mempunyai induk perusahaan yang sama dengan Bank Has the same shareholder with the Bank
4	PT Bank Maybank Syariah Indonesia	44	Mempunyai induk perusahaan yang sama dengan Bank Has the same shareholder with the Bank
5	PT Maybank Indonesia Finance	159,615	Perusahaan/badan dimana Bank bertindak sebagai pengendali Company/institution in which Bank acts as controller
6	PT Wahana Ottomitra Multiartha	100,880	Perusahaan/badan dimana Bank bertindak sebagai pengendali Company/institution in which Bank acts as controller
7	Komisaris, Direksi, DPS, Pejabat Eksekutif & hubungan karena keluarga Commissioner, Directors, Sharia Monitoring Board (DPS), Executive Officer & family relationship	86,427	Pengurus Bank dan pengurus perusahaan dimana Bank bertindak sebagai pengendali Management and key management personnel of Bank as controlling interest
8	PT Bramanta Wana Parahita	3,611	Perusahaan dimana Komisarisnya memiliki hubungan keluarga dengan salah satu komisaris Bank Company in which the Commissioner has family relations with one of the Commissioner of the Bank
9	Penyertaan Pada Perusahaan Anak Investment in Subsidiaries:		
	- PT Maybank Indonesia Finance	32,370	Perusahaan/badan dimana Bank bertindak sebagai pengendali Company/institution in which Bank acts as controller
	- PT Wahana Ottomitra Multiartha	551,776	Perusahaan/badan dimana Bank bertindak sebagai pengendali Company/institution in which Bank acts as controller
	TOTAL	972,845	

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dengan Penyediaan Dana Besar Provision of Funds to Related Parties and Large Exposures

Penyediaan dana kepada 10 debitur terbesar (*Large Exposure*) sebagai berikut:

Large exposures to 10 largest debtors are as follows:

Penyediaan dana kepada 10 debitur terbesar (*Large Exposure*) sebagai berikut

Large exposures to 10 largest debtors are as follows

No	Nama Debitur Name of Debtor	Kolektibilitas Collectability	Saldo (jutaan Rp) Balance (million Rp)
1	A	1	2,134,180
2	B	1	2,066,345
3	C	1	1,814,940
4	D	1	1,647,720
5	E	1	1,369,751
6	F	1	1,313,569
7	g	1	1,273,315
8	H	1	1,147,636
9	I	1	1,064,010
10	J	1	1,000,000

Seleksi dan Kriteria Rekanan

Selama tahun 2016, proses pemilihan dan kriteria calon rekanan dilakukan dengan memperhatikan persyaratan legalitas, kualitas, kelayakan serta reputasi dari perusahaan calon rekanan tersebut dalam menyediakan barang/jasa ataupun pelaksanaan suatu proyek yang diberikan oleh Maybank Indonesia. Rekanan yang lulus seleksi oleh Vendor Relation Maybank Indonesia (ditunjuk Maybank Indonesia), wajib mematuhi dan memahami ketentuan yang telah disampaikan oleh pihak Bank terkait Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Maybank Indonesia serta bersikap profesional dalam menyediakan barang/jasa ataupun melaksanakan kerjasama suatu proyek yang diberikan Maybank Indonesia.

Maybank Indonesia menetapkan kebijakan untuk membeli barang/jasa atas dasar harga, mutu, ketersediaan, syarat-syarat/kriteria dan layanan yang wajar. Maybank Indonesia berkomitmen untuk memperlakukan rekanan secara wajar, obyektif, fair dan tidak seorang pun boleh mengambil keuntungan secara tidak jujur baik dengan cara memanipulasi, menyembunyikan, menyalahgunakan informasi yang rahasia, menyajikan secara keliru fakta-fakta penting maupun melakukan praktik-praktik curang lainnya. Dimana hal ini disampaikan pada setiap Vendor Registration dan Tender proses di tahun 2016.

Dalam hal operational procurement, Maybank Indonesia telah didukung dengan Procurement Management System.

Partners Selection and Criteria

During 2016, the selection process and criteria for prospective business partners were conducted with due regard to the requirements of legality, quality, feasibility, as well as reputation of the prospective partner in providing goods/services, or the execution of a project given by Maybank Indonesia. Partners passing the selection by the Vendor Relation of Maybank Indonesia (appointed by Maybank Indonesia), shall comply with and understand the provisions which have been conveyed by the Bank related to the Code of Ethics and the Code of Conduct of Maybank Indonesia as well as to be professional in providing goods/services or carrying out cooperation in a project that is given by Maybank Indonesia.

Maybank Indonesia established the policy to purchase goods/services based on the price, quality, availability, terms/criteria, and services in a reasonable manner. Maybank Indonesia is committed to treating partners in a fair and objective manner, and no one shall take advantage in a dishonest manner through manipulations, concealment, abuse of confidential information, misrepresenting key facts, or other fraudulent practices. This was conveyed in each Vendor Registration and Bidding process in 2016.

In terms of operational procurement, Maybank Indonesia is supported with a Procurement Management System.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Provision of Funds for Social and Political Activities

Di tengah perekonomian yang penuh dengan tantangan selama tahun 2016, Maybank Indonesia tidak mengendurkan semangatnya untuk semakin menjalin kedekatan dengan masyarakat Indonesia, menyentuh berbagai komunitas, mendorong kemandirian serta memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pemberian dana untuk kegiatan sosial. Pemberian dana untuk kegiatan sosial tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan Program Tanggung Jawab Sosial Maybank Indonesia (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Sejalan dengan misi Maybank Indonesia, yakni *humanising financial services*, khususnya untuk selalu berada di tengah masyarakat untuk memfasilitasi pertumbuhan, mencerahkan pemahaman tentang keuangan serta memberi manfaat melalui kegiatan-kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat.

Maybank Indonesia hadir di tengah masyarakat tersebut, baik melalui produk dan layanan perbankan maupun melalui program CSR yang dilaksanakan Maybank Indonesia, dimana program CSR Maybank Indonesia fokus pada empat pilar, yaitu pendidikan, kegiatan mendukung hidup sehat, pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Maybank Indonesia percaya bahwa kegiatan sosial memberi dampak positif kepada khalayak yang lebih luas untuk jangka panjang.

Selama tahun 2016, Maybank Indonesia telah melaksanakan beberapa Program CSR diantaranya Dukungan Peningkatan Kualitas Pendidikan anak-anak Nelayan di Karangsong, Program Pemberdayaan Perempuan dalam Program Maybank Woman Eco Weave, dan Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Penyandang Disabilitas dalam Program Reach Independence & Sustainable Entrepreneurship (RISE).

Informasi kegiatan sosial akan dilaporkan dalam bagian khusus Program Tanggung Jawab Sosial Maybank Indonesia dalam Laporan Tahunan ini.

Bank memegang teguh kode etik dan pedoman tingkah laku dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kebijakan internal Maybank Indonesia melarang keterlibatan karyawan maupun Maybank Indonesia dalam kegiatan politik, termasuk memberikan dana untuk kepentingan politik. Selama tahun 2016, Bank tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.

Amidst a challenging economy in 2016, Maybank Indonesia remained resolute to nurture a close relationship with the Indonesian people, worked with various communities, promoted independency and self-reliance, and supported those in need through social activities that the Bank funded. Provision of funds for social activities was one of Maybank Indonesia's Corporate Social Responsibility/CSR programs. In line with Maybank Indonesia's mission of humanizing financial services, especially to be in the heart of communities to make growth possible, to spread financial knowledge, and to distribute benefits through social activities for the communities.

Maybank Indonesia is present through its banking products and services and through its CSR programs. Maybank Indonesia focuses on four pillars: education, healthy life, community empowerment, and environmental conservation. The Bank believes that social activities will bring positive impacts to many beneficiaries for many years ahead.

In 2016, Maybank Indonesia implemented a number of CSR programs, including in education for fishermen's children in Karangsong; women's empowerment through Maybank Woman Eco Weave; and economic empowerment for persons with disabilities through Reach Independence & Sustainable Entrepreneurship (RISE) program.

Information on social activities are presented in a dedicated sub-chapter for Corporate Social Responsibility in this Annual Report.

The Bank maintains strict code of ethics and code of conduct in running its business activities. Maybank Indonesia's internal policy prohibits the Bank and its employees' involvement in political activism, including in provisioning funds for political activities. In 2016, the Bank did not provide any funds for political activities.

ESOP DAN MSOP

ESOP and MSOP

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM BAGI KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN

Hingga akhir Desember 2016, tidak terdapat Program Kepemilikan Saham Bagi Karyawan dan/atau Manajemen Bank.

SHARES OPTION

Shares option adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank dan telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

Selama 2016, Bank tidak memiliki program pemberian opsi saham baik kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun kepada Pejabat Eksekutif.

SHARE OWNERSHIP PROGRAM FOR EMPLOYEES AND/OR MANAGEMENT

Until the end of December 2016, there was no share ownership program for employees and/or Management.

SHARES OPTION

Shares option is to buy shares by Board of Commissioners members and Board of Directors and Executive Management conducted through shares offering or shares option offering in order to provide compensation to Board of Commissioners members and Board of Directors and Executive Management which had been decided within GMS and/or Company's Articles of Association.

In 2016, Bank did not conduct shares option program to Board of Commissioners members and Board of Directors and Executive Management.

BUY BACK SAHAM DAN OBLIGASI

Shares and Obligation Buy Back

BUY BACK SAHAM DAN/ATAU OBLIGASI

Buy back saham dan/atau *buy back* obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan oleh Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pelaksanaan atau mekanismenya telah diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang berlaku atau perjanjian yang disepakati.

Selama tahun 2016, Bank tidak melakukan *buy back* saham maupun obligasi.

SHARES AND/OR OBLIGATION BUY BACK

Buyback of shares or bonds refers to the Bank's effort to reduce the volume of outstanding stocks or bonds by purchasing the issued stocks and bonds. The mechanism of share buyback is regulated by applicable terms and provisions or agreed contract.

In 2016, the Bank did not exercise share or bonds buyback.

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH SERTA REMUNERASI VARIABEL YANG DITERIMA PEGAWAI

Maximum and Minimum Salary Ratio

Ilustrasi perbandingan gaji dalam rasio gaji yang meliputi imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Tetap Bank per bulan:

Illustration of salary comparison in salary ratio including salary received by Board of Commissioners, Board of Directors and Permanent Employees each month:

Jenis Rasio	Besarnya Rasio
2016	
Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah Highest and lowest salary of the employees	62,38 x
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah Highest and lowest salary of the Board of Directors	2,98 x
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah Highest and lowest salary of the Board of Commissioners	1,27 x
Rasio gaji Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi Highest salary of the Board of Directors and highest of the employees	2,86 x

Jumlah Pegawai yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Number of Employees and total amount of variable remuneration in 1 (one) year are as follow:

Remunerasi yang Bersifat Variabel Total Amount of Variable Remuneration	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun	
	Pegawai Employees	
	Orang Person	Juta Rp Million Rp
Total	7,386	160,079

SANKSI ADMINISTRATIF

Administrative Sanction

Pelanggaran terhadap kebijakan Benturan Kepentingan dapat dikategorikan sebagai kelalaian dalam melaksanakan operasional perusahaan dan memberikan keterangan yang tidak benar yang berkaitan dengan pekerjaannya dan dapat berakibat kepada pemberian sanksi mulai dari teguran langsung, tindakan skorsing sampai dengan Surat Peringatan.

Selama 2016, tidak terdapat pengungkapan transaksi benturan kepentingan yang terjadi.

Violation of Conflict of Interests Policy is classified as operational negligence and attempt of providing false information on business activities. This violation carries sanctions of from direct reprimand, suspension, to Warning Letter.

In 2016, there was no case of Conflict of Interests disclosed.

KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU

Code of Ethics and Code of Conduct

Integritas merupakan salah satu nilai Bank yang dijunjung tinggi. Untuk mendukung hal tersebut maka dalam pelaksanaannya Bank memiliki dan menerapkan pedoman standar mengenai tata cara perilaku yaitu Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang mengatur standar dan perilaku bisnis serta tingkah laku pribadi yang etis yang merupakan bagian dari budaya Bank dalam pengelolaan tata perusahaan yang baik.

Merupakan komitmen Bank untuk menerapkan standar yang tinggi tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang dapat menggambarkan praktik-praktik bisnis yang sehat serta penerapan prinsip GCG. Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku merupakan acuan bagi karyawan dan seluruh *stakeholder* yang lain dalam berperilaku di lingkungan kerjanya.

Bank mewajibkan seluruh karyawan, pejabat, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh mitra kerja Bank untuk membaca dan memahami Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku serta menerapkannya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya masing-masing.

Pembaharuan terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank telah dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan kondisi dunia bisnis. Sebagai upaya penerapannya maka proses yang wajib dijalankan sebagai berikut:

Sosialisasi

Seluruh karyawan, baik karyawan tetap, karyawan tidak tetap, karyawan dalam masa pendidikan (*trainee*), maupun karyawan dengan ikatan kerja melalui pihak ketiga, wajib mengikuti sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank yang dibuktikan dengan daftar absensi. Pimpinan unit kerja serta pejabat tinggi di regional bertanggung jawab atas terlaksananya sosialisasi di dalam lingkungannya. *Random checking* akan dilakukan oleh Direktorat Human Capital terhadap terlaksananya sosialisasi kode etik dan pedoman tingkah laku dengan hasil laporannya diberikan langsung kepada Presiden Direktur dan Direktur Kepatuhan.

Pengelolaan Buku Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Serta Komitmen Terhadap Pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank.

Direktorat *Human Capital* bertanggung jawab untuk mendistribusikan Buku Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku secara elektronik melalui portal Maybank Indonesia kepada semua karyawan. Setiap terdapat perubahan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku, Direktorat *Human Capital* wajib melakukan pengkajian ulang dan pendistribusian Buku Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku tersebut.

Integrity is one of the values of the Bank that is highly important. To maintain integrity, the Bank has and implements standard guidelines on behavior, which is the Code of Ethics and Code of Conduct that regulates the business standards and behaviors, as well as ethical personal behavior that are integrated as part of the Bank's culture in its management of good corporate governance.

It is the Bank's commitment to apply high standards on Code of Ethics and Code of Conduct that can represent healthy business practices and implementation of GCG principles. The Code of Ethics and Code of Conduct are to be used as guidelines by employees and all other stakeholders to behave in the work environment.

The Bank's requires its employees, officers, BOC, BOD, and all business partners to read and understand the Code of Ethics and Code of Conduct, and applies them in their respective roles and responsibilities.

Update on Code of Ethics and Code of Conduct has been carried out to comply with the condition of the business environment. Therefore, these following efforts must be implemented:

Policy Communication

All employees, either permanent and non-permanent employees, employees in training (*trainee*), and employees with working agreement through third party, are obliged to attend the Bank's Code of Ethics and Code of Conduct dissemination. Their attendance is certified by the attendance list. Regional unit leaders and high-ranking officials are responsible for the communicating these policies in their work environment. *Random checking* will be done by Human Capital Directorate on the socialization implementation of Code of Ethics and Code of Conduct, and the reports will be directly sent to President Director and Director of Compliance.

Management of the Code of Ethics and Code of Conduct Book and Commitment to the Implementation of the Bank's Code of Ethics and Code of Conduct.

Human Capital Directorate is responsible for the distribution of the Code of Ethics and Code of Conduct Book electronically through Maybank Indonesian Portal to all employees. For every change in Code of Ethics and Code of Conduct, Human Capital Directorate shall conduct a review and re-distribute the Code of Ethics and Code of Conduct Book.

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Code of Ethics and Code of Conduct

Pimpinan Unit Kerja serta pejabat tertinggi di regional wajib memastikan Buku Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku diterima dan dibaca oleh seluruh karyawan, baik karyawan tetap, karyawan tidak tetap, karyawan dalam masa pendidikan (*trainee*), maupun karyawan dengan ikatan kerja melalui pihak ketiga, di lingkungan kerjanya. Selain itu wajib memastikan seluruh karyawan di lingkungan kerjanya menyerahkan Pernyataan Komitmen Pribadi atas Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank melalui media *online* MyHR2u (sistem informasi yang dikelola Direktorat *Human Capital*). Dalam hal karyawan tidak memiliki akses ke MyHR2u, maka karyawan wajib menandatangani dan menyerahkan Pernyataan Komitmen Pribadi atas Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank dalam bentuk *hardcopy* kepada Pimpinan Unit Kerja serta pejabat tertinggi di regional yang kemudian akan memberikan laporan rekapitulasi kepada Direktorat *Human Capital*. Pimpinan Unit Kerja serta pejabat tertinggi di regional harus memastikan seluruh mitra kerja Bank di lingkungan kerjanya menandatangani dan menyerahkan Pernyataan Komitmen Pribadi atas Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank dalam bentuk *hardcopy* sebelum menjalani proses tender dan kerjasama. Pernyataan Komitmen Pribadi diserahkan kepada unit kerja yang bertanggung jawab atas mitra kerja tersebut.

Direktorat *Human Capital* wajib memberikan laporan perihal proses pengumpulan Komitmen Pribadi atas Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank tersebut kepada Direktur *Human Capital* dan Presiden Direktur.

Proses pengumpulan Komitmen Pribadi untuk menjalankan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank wajib diulangi setiap tahun dan Direktur *Human Capital* bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proses ini setiap tahunnya. Komitmen terhadap Pelaksana Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank ini berlaku untuk pihak yang mewakili Bank dan semua anak perusahaannya, termasuk namun tidak terbatas pada Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan, dan pihak ketiga yang mempunyai kontrak dengan Perusahaan.

Pelanggaran

Segala pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku akan dikenakan sanksi sebagaimana diuraikan dalam ketentuan internal perihal Pemberian Sanksi yang ditetapkan dari waktu ke waktu.

Regional Unit Leader and high-ranking officials are obliged to ensure that the Code of Ethics and Code of Conduct Book are received and read by all employees, starting from permanent and non-permanent employees, employees in training (*trainee*), even to employees under contract with third parties, in their work environment. Additionally, they must ensure that all employees in their work environment have submitted Personal Commitment Statement on the Code of Ethics and Code of Conduct through online media MyHR2 (information system managed by Human Capital Directorate). If the employee has no access to MyHR2u, then that employee must sign and submit the hard copy of his Personal Commitment Statement on the Code of Ethics and Code of Conduct to regional Unit Leader and high-ranking officials, who will then send the recapitulation report to Human Capital Directorate. Regional Unit Leader and highest-ranking official must ensure that all the Bank's business partners in their work environment sign and submit Personal Commitment Statement on Code of Ethics and Code of Conduct in the form of hard copy before commencing the bidding and cooperation process. Personal Commitment Statement is submitted to work unit that are responsible for that business partner.

Human Capital Directorate shall submit reports on the process of collecting the Personal Commitment Statement on the Bank's Code of Ethics and Code of Conduct to the Human Capital Director and President Director.

The process of collecting the Personal Commitment Statement on implementation of the Bank's Code of Ethics and Code of Conduct shall be repeated yearly and Human Capital Director is responsible for the implementation of this process every year. Commitment on the person in charge for the Bank's Code of Ethics and Code of Conduct implementation also applies to the parties that represent the Bank and its subsidiaries, including but not limited to BOC, BOD, Employees, and third parties that have contracts with the Company.

Violation

Any type of breach of the Code of Ethics and Code of Conduct will be sanctioned as described in the internal regulation on Administration of Sanctions as determined from time to time.

WHISTLEBLOWING & ANTI FRAUD

Whistleblowing & Anti Fraud

Pelaksanaan Penerapan Kebijakan Strategi Anti Fraud

Sejalan dengan SE BI No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum, selama 2016 telah dijalankan program penerapan strategi anti fraud sebagai berikut:

1. Pencegahan

Untuk mengendalikan risiko terjadinya fraud, unit kerja Anti Fraud telah melakukan langkah-langkah pencegahan untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan fraud oleh seluruh pihak terkait, antara lain sbb:

a. Anti fraud statement & awareness

1) Mengkomunikasikan *anti fraud awareness* kepada nasabah melalui media :

ATM *message*, *Cardlink News*, edukasi Kartu Kredit melalui *Billing Statement*, *SMS Message* terkait dengan penggunaan kartu kredit/debit serta keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi.

2) Menumbuhkan *program awareness* kepada seluruh karyawan :

- Mengkomunikasikan mengenai segala bentuk pencegahan fraud antara lain melalui *desktop wallpaper* dan *email blast* maupun majalah internal Maybank.
- Meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan penerapan strategi anti fraud melalui pelatihan karyawan:
- Pelatihan *induction* dan *Management Development Program (MDP)* yang diselenggarakan oleh *Organization Learning – Human Capital*
- Program Compliance dan *Anti Fraud Awareness* di kantor-kantor cabang.
- Program *Focus Group Discussion* terkait dengan program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT)

Implementation of Anti-Fraud Strategy Policies

In line with SE BI No. 13/28/DPNP dated 9 December 2011 on Anti-Fraud Strategy Implementation for Commercial Banks, the following anti-fraud strategy implementation programs have been carried out throughout 2016, namely:

1. Prevention

To control the risk of fraud, Anti-Fraud work unit have taken preventive steps to develop awareness on the importance of fraud prevention by all related parties, such as:

a. Anti-fraud statements & awareness

1) Communicate anti-fraud awareness to customers through media:

ATM *message*, *Cardlink News*, Credit Card learning through *Billing Statement*, *SMS* related with usage of credit/debit cards and transaction security and convenience.

2) To promote awareness program to all employees:

- Communicate all types of fraud prevention, for example, through *desktop wallpaper* and *email blast* and internal Maybank magazine.
- Improve comprehension on anti-fraud strategy implementation policy through employees training:
- Induction and *Management Development Program (MDP)* training conducted by *Organization Learning - Human Capital*
- Compliance and Anti-Fraud Awareness Program in the branch offices.
- *Focus Group Discussion* program related with Anti Money Laundering & Terrorism Funding Prevention (APU/PPT)

Whistleblowing & Anti Fraud

Whistleblowing & Anti Fraud

- b. Identifikasi Kerawanan
Telah dilakukan langkah-langkah tindak lanjut identifikasi dan analisis kerawanan untuk mengantisipasi risiko kejadian *fraud* baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank, antara lain dengan menerbitkan kebijakan dan ketentuan yang ditujukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan prosedur yang ada dan memperkuat sistem pengendalian internal.
- c. *Know Your Customer* (KYC) dan *Know Your Employee* (KYE)
Salah satu upaya pengendalian risiko fraud dari aspek nasabah dan sumber daya manusia, telah dijalankan proses penerapan :
- Prinsip Mengenal Nasabah
 - Proses penerapan KYC dari sisi penerimaan, pemantauan profil dan transaksi serta pelaporan transaksi yang mencurigakan, khususnya pemantauan transaksi yang diindikasikan fraud dan dilakukan oleh pihak eksternal, antara lain rekening yang dibuka untuk menampung transaksi yang diindikasikan untuk penipuan.
 - Prinsip Mengenal Karyawan
 - Pemantauan transaksi di rekening karyawan yang tidak sesuai dengan profilnya.
2. Deteksi
Perangkat ini ditujukan untuk mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dengan mekanisme, antara lain mencakup:
- a. *Whistleblowing*
Mekanisme ini ditujukan untuk meningkatkan efektifitas penerapan system pengendalian fraud dengan menitikberatkan pada pengungkapan laporan pengaduan. Laporan pengaduan dapat disampaikan melalui beberapa saluran antara lain melalui surat elektronik, SMS, layanan pesan online, dan surat tertulis. Setiap pelapor dilindungi kerahasiaannya dan mendapatkan jaminan perlindungan hukum oleh perusahaan yang telah diatur dalam surat Edaran Direksi. Laporan pengaduan diterima oleh Kepala Unit Kerja Anti Fraud dan Kepala Unit Kerja Compliance. Selama tahun 2016 terdapat 8 (delapan) laporan pengaduan dari pihak internal dan eksternal, semua laporan telah disampaikan dan ditindaklanjuti oleh unit kerja/kantor cabang terkait.
- b. Risk Identification
Follow-up identification measures and risk analysis have been conducted to anticipate risks of frauds, internally or externally, such as publication of policies and regulation for the intent to improve the weaknesses of existing procedures and to strengthen internal control system.
- c. Know Your Customer (KYC) and Know Your Employee (KYE)
One of the measures in fraud risk control from customer and human resources aspect has been implemented:
- Know Your Customer Principle
 - KYC implementation starting from acquisition, profile and transaction monitoring, and suspicious transaction reporting, particularly in monitoring transactions that have indication of fraud made by external parties, such as accounts opened for fraud-suspected transactions.
 - Know Your Employees Principle
 - Monitoring transactions in employee's accounts that do not match their profiles.
2. Detection
These mechanisms are designed to identify and discover fraud events, namely:
- a. *Whistleblowing*
This mechanism is designed to improve effectiveness of fraud control system implementation by focusing on whistleblowing disclosures. Whistleblowing reports can be submitted through various channels, such as electronic mail, SMS, online message service, and written letter. Every whistleblower secrecy is protected and legal protection will be provided by the company as stipulated in the BOD Letter. Whistleblowing reports are received by Head of Anti-Fraud Work Unit and Head of Compliance Work Unit. During 2016 there were 8 (eight) whistleblowing reports from internal and external parties, all reports have been submitted and followed-up by related work unit/branch office.

Whistleblowing & Anti Fraud

Whistleblowing & Anti Fraud

b. Surprise audit

Selama periode pelaporan, SKAI telah melaksanakan surprise audit tematik terhadap pengelolaan uang tunai terhadap 248 kantor cabang.

3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

Perangkat ini ditujukan untuk menggali informasi, sistem pelaporan termasuk pengenaan sanksi atas kejadian fraud. Selama periode pelaporan terdapat kejadian internal fraud sebanyak 11 (sebelas) kejadian. Internal *fraud* dimaksud telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak lanjut

Selama periode pelaporan telah dilakukan proses pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut sbb:

- a. Penerapan strategi anti *fraud* selama periode pelaporan telah disampaikan di dalam Forum Direksi dan Komite Audit.
- b. Untuk mengantisipasi risiko kejadian *fraud* baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank, manajemen telah melakukan tindak lanjut dan perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang ada dan memperkuat sistem pengendalian internal.

b. Surprise Audit

During reporting period, SKAI have conducted thematic surprise audit on cash management at 248 branch offices.

3. Investigation, Reporting and Sanctions

This mechanism is designed to obtain information, reporting system including sanctions given on fraud events. During reporting period, there were 11 (eleven) internal fraud events. These internal fraud events have been followed-up as necessary based on the regulations.

4. Monitoring, Evaluation and Follow-Up

During reporting period, monitoring, evaluation and follow-up actions that have been conducted are as follows:

- a. Anti-fraud strategy implementation during reporting period have been reported in BOD Forum and Audit Committee.
- b. To anticipate fraud event risks either from internal or external parties of the Bank, management have taken follow-up actions and improvements on existing weaknesses and strengthened internal control system.

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

GCG Guidelines

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Corporate Governance Guidelines for Public Companies	Penerapan di PT Bank Maybank Indonesia Tbk The implementation in PT Bank Maybank Indonesia Tbk
A. HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM RELATIONSHIP OF THE PUBLIC COMPANY WITH THE SHAREHOLDERS IN ENSURING THE SHAREHOLDERS' RIGHTS	
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Principle 1 Improving the Value of General Meeting of Shareholders (GMS)	
a.1 Perusahaan terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham Public company has technical procedures for opened or closed voting that promote independency and shareholders' interest	Bank telah memenuhi rekomendasi ini. Tata cara mengenai pengambilan suara telah diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dalam pelaksanaan setiap Rapat Umum Pemegang Saham, mekanisme pengambilan suara merupakan bagian dari tata tertib rapat yang diinformasikan kepada para pemegang saham di awal rapat. The Bank has complied with this recommendation. Procedures on voting, whether opened or closed voting, are regulated under the Company's Articles of Association. Voting mechanism is part of the meeting procedures informed to the shareholders at the beginning of any General Meeting of Shareholders
a.2 Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perusahaan terbuka hadir dalam RUPS tahunan All members of the Board of Directors (BOD) and the Board of Commissioners are present at Annual GMS	Bank telah memenuhi rekomendasi ini Semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris menghadiri RUPST 2016. The Bank has complied with this recommendation. All members of the BOD and the BOC were present at the AGMS year 2016.
a.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web perusahaan terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun Summary of GMS minutes is available on public company's website by no less than 1 (one) year	Bank telah memenuhi rekomendasi ini. The Bank has complied with this recommendation.
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor Principle 2 Improving Communication Quality of Public Company with Shareholders or Investors	
2.1 Perusahaan terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor Public company has a communication policy with shareholders or investors	Bank telah menyusun suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham dan investor sebagaimana direkomendasikan. The Bank has prepared a communication policy with shareholders or investors as recommended.
2.2 Perusahaan terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs web Public company discloses its communication policy with shareholders or investors in website	Bank telah memenuhi rekomendasi ini. The Bank has complied with this recommendation.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan

GCG Guidelines

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Corporate Governance Guidelines for Public Companies	Penerapan di PT Bank Maybank Indonesia Tbk The implementation in PT Bank Maybank Indonesia Tbk
B. FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS FUNCTION AND ROLE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS	
Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris Principle 3 Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners	
3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka Determination of number of the BoC members shall consider the condition of the public company	Bank telah memenuhi rekomendasi ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan regulator yang berlaku. The Bank has complied with this recommendation in accordance with the provision regulated in the Company's Articles of Association also with regulatory requirement.
3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan Determination of composition of the BOC members considers the variety of expertise, knowledge and experiences required	Bank telah memenuhi rekomendasi ini dengan mengacu kepada peraturan yang terkait. The Bank has complied with this recommendation by referring to the relevant regulations.
Prinsip 4 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris Principle 4 Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners	
4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris The BOC has self-assessment policy to assess the performance of the BOC	Bank telah memenuhi rekomendasi ini. The Bank has complied with this recommendation.
4.2 Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka Self-assessment policy to assess the performance of the BOC is disclosed in annual report of public company	Bank telah memenuhi rekomendasi ini. The Bank has complied with this recommendation.
4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan The BOC has a policy with respect to the resignation of the BOC members if such member involved in financial crime	Bank sedang menyusun suatu kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana direkomendasikan The Bank is preparing a policy with respect to the resignation of the BOC members is such member involved in financial crime as recommended
4.4 Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota direksi The BOC or Committee that conducts nomination and remuneration function shall arrange succession policy in nomination process of the BOD members	Bank telah memenuhi rekomendasi ini. The Bank has complied with this recommendation.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan

GCG Guidelines

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Corporate Governance Guidelines for Public Companies	Penerapan di PT Bank Maybank Indonesia Tbk The implementation in PT Bank Maybank Indonesia Tbk
C. FUNGSI DAN PERAN DIREKSI FUNCTION AND ROLE OF THE BOARD OF DIRECTORS	
Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi Principle 5 Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors	
5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan Determination of number of the BOD members considers the condition of the public company and the effectiveness of decision-making	Bank telah memenuhi rekomendasi ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan regulator yang berlaku. The Bank has complied with this recommendation in accordance with the provision regulated in the Company's Articles of Association and also with regulatory requirement.
5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan Determination of composition of the BOD members considers the variety of expertise, knowledge and experience required	Bank telah memenuhi rekomendasi ini dengan mengacu kepada peraturan yang terkait. The Bank has complied with this recommendation by referring to the relevant regulations.
5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi Member of the BOD who is liable for accounting or finance has accounting expertise and/or knowledge	Bank telah memenuhi rekomendasi ini. The Bank has complied with this recommendation.
Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Principle 6 Improving the Quality of Job and Responsibility Performance of Board of Directors	
6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi The BOD has self-assessment policy to assess performance of BOD	Mekanisme penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui perbandingan antara target dan pencapaian Perseroan secara actual, sesuai dengan bidang tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sesuai dengan Balance Scorecard yang telah ditetapkan. Mechanism for performance assessment of the Board of Directors is conducted by comparing the targets against the actual achievements of the Company, in accordance with area of responsibility for each member of the Board of Directors, referring to defined Balance Scorecards.
6.2 Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka Self-assessment policy to assess the performance of the BOD is disclosed in the annual report of the public company	Bank telah memenuhi rekomendasi ini The Bank has complied with this recommendation
6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan The BOD has a policy related to resignation of the BOD members if involved in financial crime	Bank sedang menyusun suatu kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana direkomendasikan The Bank is preparing a policy with respect to the resignation of the BOD members if such member involved in financial crime as recommended

Pedoman Tata Kelola Perusahaan

GCG Guidelines

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Corporate Governance Guidelines for Public Companies	Penerapan di PT Bank Maybank Indonesia Tbk The implementation in PT Bank Maybank Indonesia Tbk
D. PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN STAKEHOLDERS PARTICIPATION	
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan Principle 7 Improving Corporate Governance Aspect through Participation of Stakeholders	
7.1 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading Public company has a policy to prevent insider trading	Kebijakan Perdagangan Efek saat ini sedang dalam proses persetujuan Securities Trading Policy is currently in approval process
7.2 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan anti-korupsi dan anti-fraud Public company has anti-corruption and anti-fraud policy	Perseroan telah memenuhi rekomendasi ini dengan memiliki Pedoman Kepatuhan Anti-Korupsi The Company has complied with this recommendation by having Anti-Corruption Compliance Manual
7.3 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor Public company has policies concerning selection and capability improvement of supplies and vendors	Bank telah memenuhi rekomendasi ini The Bank has complied with this recommendation
7.4 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur Public company has a policy concerning the fulfillment of creditor's right	Bank telah memenuhi rekomendasi ini The Bank has complied with this recommendation
7.5 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan sistem whistle blowing Public company has a policy of whistleblowing system	Perseroan telah memiliki sistem whistle blowing sebagaimana telah diungkapkan di dalam laporan tahunan Perseroan. The Company has established a whistle blowing policy as disclosed in the Company's annual report
7.6 Perusahaan memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan Public company has long-term incentive policy for the BOD and employees	Perseroan telah memiliki suatu kebijakan insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan sebagai bagian dari program retensi.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan GCG Guidelines

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Corporate Governance Guidelines for Public Companies	Penerapan di PT Bank Maybank Indonesia Tbk The implementation in PT Bank Maybank Indonesia Tbk
E. KETERBUKAAN INFORMASI DISCLOSURE OF INFORMATION	
Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Principle 8 Improving the Implementation of Information Disclosure	
8.1 Perusahaan terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi Public company takes benefit from the application of a broader information technology other than website as an information disclosure media	Bank telah memenuhi rekomendasi ini The Bank has complied with this recommendation.
8.2 Laporan tahunan perusahaan terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali Annual report of public company discloses beneficial owner in share ownership of public company of at least 5%, other than disclosure of beneficial owner in share ownership of public company through major and controlling shareholders	Perseroan telah memenuhi rekomendasi ini dengan mengungkapkan struktur pemegang saham utama dan pengendali di dalam laporan tahunan. The Company has complied with this recommendation by disclosing the structure of majority and controlling shareholders in the annual report.

RENCANA STRATEGIS BANK

Bank's Strategic Plan

Review Visi dan Misi Serta Strategi Oleh Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melakukan *review* terhadap Visi dan Misi Bank secara berkala bersamaan dengan penyusunan Rencana Jangka Panjang Bank. Untuk review Rencana Strategis Bank dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB). Manajemen Bank juga telah merumuskan fokus strategis yang akan diterapkan untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Fokus strategis tersebut telah dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) 2017, yang mencantumkan rencana kerja dan inisiatif yang akan dijalankan serta target yang akan dicapai di tahun 2017.

Rencana Strategis Bank

Rencana strategis Bank disusun berdasarkan Visi Bank yaitu "Menjadi penyedia layanan keuangan terkemuka di Indonesia, yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkomitmen penuh dan inovatif untuk menciptakan nilai tambah dan melayani komunitas" (*To be a leading financial services provider in Indonesia, driven by passionately committed and innovative people, creating value and serving communities*). Sedangkan Misi Bank adalah sebagai "Penyedia jasa keuangan yang humanis (*Humanising Financial Services*), yang senantiasa berada di tengah-tengah komunitas untuk mendukung pertumbuhan usaha nasabah". Sebagai acuan dalam mewujudkan Visi dan Misi Bank dan Bank tetap dapat menjaga momentum pertumbuhan secara berkelanjutan. Bank senantiasa berupaya untuk meningkatkan kapabilitas seluruh organ dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Manajemen Bank telah menetapkan 4 pilar aspirasi arah kebijakan dan langkah strategis Bank yang berfokus pada:

1. Memberikan layanan berkualitas tinggi (*High Quality Service*),
2. Mengembangkan inovasi produk yang menarik (*Product Innovation*),
3. Penyederhanaan proses (*Process Simplification*),
4. Konektivitas secara regional (*Regional Connectivity*).

Selaras dengan arah kebijakan Manajemen Bank tersebut dan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi perekonomian terkini, Manajemen Bank telah merumuskan fokus strategis yang akan diterapkan untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan sebagai berikut :

1. Peningkatan pendapatan *fee based income* melalui intensifikasi penjualan produk *bancassurance*, meningkatkan kolaborasi dengan perusahaan Maybank Group lainnya di Indonesia sehingga dapat memberikan solusi yang komprehensif kepada nasabah korporasi dan intensifikasi sumber pendapatan dari transaksi treasury.

Vision, Mission, and Strategy Review by the Board of Commissioners

The BOC reviews the Bank's vision and mission periodically in conjunction with the process of preparing the Bank's Long-Term Plan. It also reviews the Bank's Strategic Plan in parallel with the development of the Bank's Business Plan (RBB). The Bank's management also defines the strategic focus areas of implementation to ensure sustainable business growth, which are set out in the RBB of 2017. The document lists the work plans and initiatives that the Bank will carry out and targets for 2017.

Bank's Strategic Plan

The Bank's strategic plan derives from the Bank's vision "To be a leading financial services provider in Indonesia, driven by passionately committed and innovative people, creating value and serving communities" and mission "of Humanising Financial Services, being in the heart of the community to support customers' growth." The strategic plan guides the Bank in pursuing its vision and mission whilst sustaining the growth momentum. The Bank continuously endeavors to enhance the capabilities of all of its organs in carrying out business activities. The Bank has identified 4 pillars of policies and strategic measures that are focusing on:

1. High Quality Service
2. Product Innovation
3. Process Simplification
4. Regional Connectivity

In line with the policies of the Bank and taking into account current economic environment, the Bank's management has formulated strategic focus areas to implement towards achieving sustainable growth:

1. Increasing fee-based income by intensifying the sales of bancassurance, building closer collaboration with other Maybank Group companies in Indonesia in order to provide comprehensive financial solutions to corporate customers, and intensifying revenue stream from treasury transactions.

Rencana Strategis Bank Bank's Strategic Plan

2. Peningkatan aktivitas *cross selling* untuk produk dan layanan dengan peningkatan penetrasi *e-channel*. Meningkatkan kolaborasi dan sinergi antar lini bisnis yang dimulai dari dengan proses pembukaan rekening nasabah serta peningkatan pemanfaatan CRM (*Customer Relationship Management*).
3. Melanjutkan proses penyalarsan target segmen pada nasabah korporasi papan atas dengan tetap memperhatikan *risk appetite* bank dan segmen CFS akan fokus pada bisnis dengan tingkat profitabilitas yang tinggi
4. Melanjutkan proses transformasi kantor wilayah :
 - Penyalarsan model bisnis dikantor cabang dengan target segmen Bank dan Maybank Group
 - Melanjutkan proses percepatan inisiatif transformasi untuk peningkatan produktifitas
 - Menyempurnakan aktivitas *sales planning* di tingkat wilayah dan cabang
5. Berupaya mempertahankan tingkat margin bunga bersih (NIM) dengan memastikan *re-pricing* portofolio kredit dilakukan secara benar dan tepat waktu. Selain itu akan dilakukan kajian ulang terhadap model bisnis yang ada untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi industri terkini.
6. Memperketat prosedur persetujuan kredit serta menerapkan batas dan matriks persetujuan baru untuk memastikan pengendalian yang lebih ketat serta melakukan pemantauan intensif atas portofolio yang ada, serta mengintensifkan pelaksanaan peringatan dini (*Early Alert Mechanism and Watchlist Policy*) pada portofolio kredit, yaitu sebuah sistem peringatan dini dengan meningkatkan standar peringatan dini sebagai mekanisme pertahanan utama.
7. Pemantauan ketat terhadap program restrukturisasi kredit bermasalah dan kinerja program *recovery*
8. Penyempurnaan dan percepatan pemrosesan kredit.

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan melakukan evaluasi kinerja Bank secara rutin setiap bulannya. Laporan hasil pengawasan Dewan Komisaris telah disampaikan ke regulator sesuai ketentuan yang berlaku. Bank juga telah menyampaikan laporan realisasi kinerja keuangan Bank dengan tepat waktu kepada regulator setiap kuartal selama tahun 2016. Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2016-2018 beserta revisinya telah dipresentasikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan telah mendapat persetujuan melalui Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 27 November 2015 dan tanggal 24 Juni 2016.

The BOC supervises the implementation of the Bank's Business Plan (RBB) by conducting monthly bank performance evaluation. The BOC submits its oversight report to the regulators according to existing regulations. The Bank also reported its financial performance realization in timely manner to the regulators i.e. on quarterly basis in 2016. The Bank's 2016-2018 RBB and the revised version of the document had been presented by the BOD and BOC. BOC meetings on 27 November 2015 and 24 June 2016 approved the Bank's RBB.

Rencana Strategis Bank

Bank's Strategic Plan

Pada akhir tahun 2016, Bank juga telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) 2017-2019 yang telah dipresentasikan oleh Direksi Bank kepada Dewan Komisaris dan telah mendapat persetujuan melalui Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 25 November 2016 serta telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tepat waktu. Direksi Bank telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank serta perkembangan kinerja Bank kepada Pemegang Saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank, melalui :

- Update perkembangan kinerja dan rencana Bank tahun 2016 pada Maybank Board Meeting
- Menyelenggarakan Maybank Indonesia Townhall Meeting dan Maybank Townhall Meeting yang diadakan pada setiap kuartal sebagai sarana komunikasi internal untuk menyampaikan kinerja yang telah dicapai, kebijakan dan langkah-langkah strategi manajemen Townhall Meeting merupakan forum komunikasi yang dihadiri oleh manajemen, senior manajemen, pimpinan regional dan pimpinan cabang serta Serikat Pekerja yang ada di Bank untuk menginformasikan kinerja perusahaan serta inisiatif-inisiatif yang sedang dan akan dilaksanakan.
- Menyelenggarakan *Public Expose* pada tanggal 22 April 2016
- Menyelenggarakan *Analyst Briefing* pada tanggal 23 Februari 2016 untuk menjelaskan hasil kinerja bank selama tahun 2016. Briefing ini dihadiri analis di Indonesia dan juga dari berbagai negara melalui fasilitas teleconference. Melakukan *update* perkembangan kinerja melalui publikasi *Analyst presentation* secara berkala pada *Website* perusahaan

Direksi Bank telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank secara efektif melalui hal-hal sebagai berikut:

- Menetapkan sasaran yang tercantum dalam Rencana Bisnis Bank sebagai KPI (*Key Performance Indicator*) masing-masing unit kerja. Pencapaian kinerja dievaluasi dari waktu ke waktu untuk memastikan agar target tahunan dapat tercapai.
- Membuat proyeksi secara berkala berdasarkan pencapaian terakhir, melakukan monitoring secara intensif dan menetapkan *action plan* serta langkah-langkah yang tepat untuk mencapai target tahunan yang telah ditetapkan.
- Membentuk *task force* untuk memonitor pengimplementasian rencana bisnis sehingga pencapaian kinerja dapat tercapai.

At the end of 2016, the Bank prepared RBB for 2017-2019 that the BOD had presented to the BOC and approved by the BOC in the meeting on 25 November 2016. The Bank has submitted the approved RBB to the Financial Services Authority in timely manner. The BOD has communicated the RBB and the Bank's performance progress to shareholders and bank-wide across all organizational levels through:

- Maybank Board Meeting, discussing update on the Bank's performance and plan in 2016
- Quarterly Maybank Indonesia Townhall Meeting and Maybank Townhall Meeting, internal communications forum that presented performance progress, policies, and the management's strategic steps. Townhall Meeting is a forum for the management, senior management, regional leaders, branch managers, and Trade Union of the Bank to communicate the Bank's performance and ongoing initiatives.
- Public Expose on 22 April 2016
- Analyst Briefing on 23 February 2016 where the Bank explained its performance in 2016. The briefing was attended by analysts in Indonesia and abroad who joined via teleconference. In addition, the Bank regularly updates its performance data by publishing analyst presentation on the Bank's website.

The Bank's BOD has effectively implemented RBB by:

- Identifying targets in the RBB as KPI (*Key Performance indicator*) of each work units. Target achievement was evaluated from time to time to ensure full realization by the end of the year.
- Regularly formulation performance projection based on last position; intensively monitoring and identifying action plan as well as suitable actions to attain the identified targets
- Establishing a task force to monitor the implementation of the business plan and ensure that performance targets were realized.

Rencana Strategis Bank Bank's Strategic Plan

Maybank Indonesia berhasil mencatatkan laba bersih setelah tumbuh signifikan dengan capaian laba bersih setelah pajak dan kepentingan non pengendali sebesar Rp1,9 triliun, naik 71,0% dibandingkan periode sebelumnya, di tengah kondisi perekonomian yang masih belum pulih. Perolehan laba tertinggi ini menunjukkan kemampuan Bank dalam menjalankan strategi yang ditetapkan dengan baik dan serta didukung oleh penguatan kapabilitas organisasi yang berkesinambungan. Disamping itu, terdapat juga beberapa perkembangan usaha dan inisiatif penting yang berhasil dicapai oleh Bank selama tahun 2016, diantaranya:

- Asset Bank mencapai Rp166.7 triliun pada akhir tahun 2016 (tumbuh sebesar 5.7% yoy) didukung oleh pertumbuhan kredit sebesar 2.9% (yoy). Bank terus berupaya mengelola pertumbuhan pinjaman secara konservatif sekaligus meningkatkan disiplin dalam pengelolaan modal dan likuiditas. Kedepannya, Bank akan fokus terhadap pengembangan pada dua segmen utama yakni Korporasi Besar (termasuk BUMN) dan segmen UMKM.
- Selama tahun 2016, Pertumbuhan kredit Bank didukung oleh perkembangan yang positif pada segmen Global Banking sejalan dengan program prioritas pemerintah terkait dengan pembiayaan pada proyek-proyek infrastruktur serta perusahaan top tier dan BUMN. Lini bisnis Community Financial Services (CFS) melalui Perbankan Bisnis terus menunjukkan komitmen untuk pertumbuhan sektor UKM (SME) dengan menyediakan produk-produk yang sesuai untuk nasabah disegmen ini. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi yang masih lambat, kebijakan *internal risk appetite* dan penerapan program efisiensi modal (*capital efficiency*) secara terus menerus telah berkontribusi terhadap portofolio kredit Bank.
- Usaha Unit Syariah Maybank Indonesia juga terus menunjukkan kinerja yang membanggakan. Kami menilai bahwa inisiatif 'Sharia First' yaitu dengan menempatkan produk dan solusi keuangan Syariah di semua lini usaha dan segmen nasabah Bank merupakan strategi yang tepat. Pada akhir Desember 2016, Aset Syariah telah mencapai Rp23,2 triliun dengan kontribusi sebesar 14% (yoy) terhadap total Aset Bank. Pembiayaan dan Simpanan Syariah juga tumbuh signifikan masing-masing sebesar 61% dan 71% (yoy).
- Pada sektor UMKM, Bank mencatat pertumbuhan dengan kualitas kredit yang tetap terjaga dengan baik. Komposisi pembiayaan sektor UMKM terhadap total kredit Bank pada 31 Desember 2016 telah mencapai 23,74% dan telah melampaui target yang ditetapkan Regulator sebesar minimum 20% di tahun 2018.

Despite a tough economic situation where recovery was slow, Maybank Indonesia successfully posted net income growth after it recorded Rp1.9 trillion of net profit after tax and non-controlling interests, or 71.0% surge compared to the preceding period. This all-time high achievement evidenced the Bank's ability in executing its strategies and the acuity of those strategies supported by organizational capabilities that grew stronger by the day. In addition to that the Bank also recognized a number of important growth achievements and initiatives:

- The Bank posted Rp166.7 trillion in assets at the end of 2016 (5.7% growth year-on-year) supported by 2.9% (yoy) credit growth. The Bank has continued to manage loan growth through conservative approach and at the same time building the discipline in capital and liquidity management. Going forward, the Bank will focus on developing two key segments, i.e. Large Corporates (including SOEs) and MSME.
- In 2016, the Bank's credit growth was propped by significant development in the Global Banking segment, which corresponded with the government's priority in infrastructure projects and the Bank's financing to top-tier companies and SOEs. Community Financial Services (CFS) business through Business Banking also continued to show its commitment to the SME sector by offering products tailored to this segment. Overall, slow economic growth, internal risk appetite policy, and continuous capital efficiency contributed to the Bank's credit portfolio.
- The performance of Maybank Indonesia Shariah Business Unit was continuously delivering exceptional performance. The 'Sharia First' strategy, which embeds Shariah products and financial solutions across all business lines and the Bank's customer segments, has been a highly effective and suitable strategy. By the end of December 2016, Shariah assets have reached Rp23.2 trillion and contributed 14% (yoy) to the Bank's total assets. Shariah banking also posted significant growth of financing and deposit by 61% and 71% (yoy), respectively.
- In the MSME sector, the Bank booked loan growth and controlled credit quality. As at 31 December 2016, the MSME sector contributed 23.74% of the Bank's total credit or exceeded regulator's target of minimum 20% by 2018.

Rencana Strategis Bank

Bank's Strategic Plan

- Selain itu, Bank juga berperan aktif dalam program pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti program **JARING** (**J**angkau, **S**inergi dan **G**uideline) dan penyaluran kredit **KUR** (**K**redit **U**saha **R**akyat).
- Upaya perbaikan kualitas kredit terus menjadi fokus utama Bank terutama dalam mengelola eksposur dari beberapa debitur yang terkena dampak pelemahan ekonomi dan secara aktif terus mengupayakan percepatan program restrukturisasi pada debitur-debitur NPL tersebut.
- Selain itu, Program transformasi dan integrasi yang dilakukan di tahun 2016 telah semakin memperkuat fondasi usaha Bank bagi terciptanya pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Bank akan melanjutkan fokus terutama kepada *transactional banking*, *financial supply chain solutions* dan perbankan elektronik (termasuk internet Banking M2U). Melalui segmen CFS Bank ingin berkontribusi dalam pemberdayaan komunitas. Maybank Indonesia akan terus berperan aktif mendukung pembiayaan proyek infrastruktur untuk mendukung agenda pembangunan perekonomian Pemerintah. Kerjasama strategis dengan perusahaan BUMN akan terus dilanjutkan sebagai upaya Bank untuk terus berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian bangsa.
- Pencapaian inisiatif penting lainnya ditahun 2016, Bank berhasil merealisasikan penerbitan obligasi subordinasi dan Obligasi berbasis Syariah SUKUK yang masing-masing sebesar Rp 800 miliar dan Rp 700 miliar.
- The Bank also took active part in the government's national development projects, such as the JARING program (**J**angkau, **S**inergi and **G**uideline/Reach, Synergy, Guideline) and financing program for small businesses (KUR).
- Credit quality improvement was also the Bank's main focus, especially in managing exposure deriving from several debtors that were adversely affected by the weak economy. The Bank actively initiated accelerated restructuring program on debtors with NPL.
- In terms of transformation and integration program, these initiatives in 2016 had strengthened the Bank's foundation and created stronger platform for sustainable growth. The Bank will continue its focus on transactional banking, financial supply chain solutions, electronic banking (including M2U internet banking). Through the CFS segment, the Bank seeks to contribute to community financing. Maybank Indonesia will continue to play an active role in supporting infrastructure projects and national development agenda. Strategic cooperation with SOEs will continue to allow the Bank to take part in the nation's economic development.
- The Bank also achieved another milestone in 2016: the Bank issued subordinated bonds and Shariah bonds, SUKUK, in total amount of Rp800 billion and Rp700 billion, respectively.

Untuk kedepannya momentum pertumbuhan yang telah berhasil dicapai Bank diharapkan dapat terjaga baik dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan pangsa pasar dengan kualitas aset yang baik.

The Bank is looking forward to keep this growth momentum and to sustainably improve its achievements, thereby expanding its market share and maintaining healthy asset quality.

AKSES INFORMASI BANK

Corporate Information Access

Bank senantiasa memberikan kemudahan informasi kepada stakeholders untuk mengakses informasi mengenai keuangan dan perusahaan melalui jalur-jalur komunikasi seperti siaran pers dan paparan publik. Bank secara aktif juga menyebarkan informasi ke media cetak dan elektronik.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, nasabah ataupun calon nasabah dapat menghubungi akses sebagai berikut:

- Layanan *Call Center* melalui ponsel: 69811 dan juga melalui telepon: 021 - 1500 611
- Layanan *e-mail* ke customercare@maybank.co.id.
- Menghubungi layanan Bank pada cabang terdekat.

Bagi investor dapat langsung menghubungi Layanan Investor Relations Perusahaan melalui *e-mail*: InvestorRelations@maybank.co.id

Website Maybank Indonesia

Informasi mengenai produk dan layanan, kegiatan, aksi korporasi dan lain-lainnya disajikan melalui website Bank: <http://www.maybank.co.id>.

Kehadiran website Bank didukung fitur pencarian (*search engine*) untuk memudahkan nasabah dan calon nasabah mencari berbagai informasi produk dan layanan Bank.

Komunikasi Eksternal

Hubungan Media Massa | Mass Media Relations

No	Kegiatan Activity	2016
1	Konferensi Pers Press conference	10
2	Siaran Pers Press release	36
3	Ulasan Media Media Coverage	3408
4	Pelatihan untuk Media Journalist Training	1
5	Pertemuan dengan Media Media Gathering	2*
6	Kunjungan Media Media Visit	2**

*c.o.: *Iftar with Media & PCEO Meeting w/ Editors*

**c.o.: *Maybank Bali Marathon & CSR Eco Weaver Lombok*

Berita yang Disampaikan | News Coverage

No	Berita yang disampaikan	Jumlah Total	Persentase Percent
1	Berita Netral & Positif Neutral & Positive	3,338	98%
2	Berita negatif Negative	70	2%

The Bank provides easy information access for the stakeholders to obtain financial and other corporate information through various communication channels, such as press release and public exposé. The Bank also disseminates information to the media outlets both print and electronic.

For further information, customers and prospective customers may contact the following:

- Call Center service, by cellular: 69811 and land line: 021 - 1500 611
- E-mail to customercare@maybank.co.id.
- Nearest Bank's branches

The Bank has also set up Investor Relations to respond to investors' inquiries: e-mail: InvestorRelations@maybank.co.id

Maybank Indonesia Website

Product and services, activities, corporate actions, and other information are accessible via the Bank's website: <http://www.maybank.co.id>.

The Bank's website has been equipped with a search engine feature for easy and convenient navigation to locate certain information on the Bank's products and services.

External Communication

Akses Informasi Bank

Corporate Information Access

Media Coverage | Media Coverage

No	Bulan Month	Jumlah Total
1	Januari January	300
2	Februari February	303
3	Maret March	147
4	April	317
5	Mei May	241
6	Juni June	274
7	Juli July	246
8	Agustus August	538
9	September	351
10	Oktober October	252
11	November	181
12	Desember December	258
TOTAL		3408

Daftar Press Release Tahun 2016 | List of Press Release 2016

No	Press Release	Published Press Release
1	Identitas Maybank Indonesia Berikan Nilai Tambah Bagi Nasabah	22-Jan-2016
2	Maybank Indonesia Perkenalkan Identitas Baru di Surabaya	27-Jan-2016
3	Maybank Indonesia Buka Kantor Cabang Baru di Semarang	28-Jan-2016
4	Maybank Indonesia Perkenalkan Identitas Baru di Medan	29-Jan-2016
8	Memasuki Tahun Kelima 'Maybank Bali Marathon' Tumbuh Berkembang Bersama Komunitas Pehobi Lari Tanah Air	16-Feb-2016
9	Maybank Serahkan Grand Prize 'Bingkisan Beruntun' Mini Cooper Countryman di Semarang	19-Feb-2016
10	Laba Bersih Maybank Indonesia Melesat 61% pada Tahun 2015 di Tengah Kondisi Pasar yang Penuh Tantangan	23-Feb-2016
12	Program Bingkisan Beruntun Dukung Peningkatan Nasabah	23-Mar-2016
13	Pendaftaran Maybank Bali Marathon 2016 Resmi Dibuka	11-Apr-2016
14	Maybank Indonesia Umumkan Hasil RUPST & Paparan Publik	21-Apr-2016
15	Maybank Indonesia Catat Peningkatan Laba Bersih Pada Kuartal Pertama 2016	25-Apr-2016
16	Maybank Indonesia Laksanakan CSR Pendidikan Bagi Penyandang Kebutuhan Khusus di Gunung Kidul	23-May-2016
17	Peserta Maybank Bali Marathon 2016 Telah Capai Kuota	3-Jun-2016
18	Penawaran Awal Sukuk Mudharabah Maybank Indonesia Raih Minat Positif Pasar *Ditutup 2X Oversubscribed	7-Jun-2016
19	Maybank Indonesia dan Maybank Foundation Kembangkan Pemberdayaan Ekonomi untuk Komunitas Penyandang Disabilitas	26-Jul-2016
20	Laba Bersih Maybank Indonesia Meroket 121% pada Semester Pertama	28-Jul-2016
21	Maybank Bali Marathon Kelima Siap Digelar dengan Peserta <i>Full Marathon</i> yang Terus Meningkat	5-Aug-2016
22	Maybank Indonesia dan Maybank Foundation Kembangkan Pemberdayaan Ekonomi untuk Komunitas Penyandang Disabilitas di Yogyakarta	9-Aug-2016
23	Maybank Indonesia Resmikan Lokasi Baru KCP Banjarn	15-Aug-2016

Akses Informasi Bank

Corporate Information Access

Daftar Press Release Tahun 2016 | List of Press Release 2016

No	Press Release	Published Press Release
24	Lebih dari 18.000 Karyawan Maybank Berpartisipasi dalam <i>Global CR Day</i> (Karyawan Maybank Indonesia Laksanakan Edukasi Keuangan)	19-Aug-2016
25	Allianz Life Indonesia dan Maybank Indonesia Jalin Kerja Sama Jangka Panjang <i>Bancassurance</i>	22-Aug-2016
26	Maybank Laksanakan Program Tanggung Jawab Perusahaan Berkelanjutan bagi Masyarakat Gianyar	26-Aug-2016
27	Pengumuman Pemenang Maybank Bali Marathon 2016	28-Aug-2016
28	Maybank Indonesia dan JETRO Selenggarakan Seminar Bisnis	6-Sep-2016
29	Maybank Prediksi Belanja Modal Infrastruktur di Indonesia Capai USD264 Miliar dalam Lima Tahun ke Depan	14-Sep-2016
30	Maybank Indonesia Resmikan Kantor Cabang Syariah Banda Aceh	23-Sep-2016
31	Peringati HUT ke-57, Maybank Indonesia Lanjutkan Program CR Pemberdayaan Perempuan melalui Micro Financing	26-Sep-2016
32	Maybank Indonesia Terus Mencatat Pertumbuhan Laba yang Kuat. Laba Bersih Meroket 118% dalam Sembilan Bulan 2016	23-Oct-2016
33	Maybank Indonesia Dukung Pembangunan Infrastruktur Nasional, Sediakan Fasilitas Pembiayaan Syariah Rp950 Miliar kepada Waskita Karya	26-Oct-2016
34	Maybank Indonesia Sediakan Fasilitas Pembiayaan Investasi Berbasis Syariah sebesar Rp1.1 triliun kepada Jasa Marga	7-Dec-2016
35	Maybank Tidak Pernah Mengajukan Pailit Terhadap PT Meranti Maritime	14-Dec-2016
36	RUPSLB Ubah Susunan Direksi Maybank Indonesia	23-Dec-2016

Month	Total Release	Achievement
January	4	100%
February	3	100%
March	1	100%
April	3	100%
May	1	100%
June	2	100%
July	2	100%
August	7	100%
September	4	100%
October	3	100%
November	1	100%
December	2	100%

Akses Informasi Bank

Corporate Information Access

KOMUNIKASI INTERNAL

Komunikasi Internal kepada seluruh karyawan dilakukan melalui saluran komunikasi media internal sebagai berikut:

1. Majalah Internal (*Kabar Maybank*)

Terbit setiap bulan (12 edisi) sebanyak 32 halaman, dengan rubrikasi diantaranya:

- a) Salam Redaksi: Rubrik yang berisi pengantar Redaksi berupa ringkasan topik-topik yang terangkum dalam Majalah Internal pada setiap edisinya.
- b) Fokus: Rubrik yang berisi berita-berita yang mencerminkan tema/topik utama *Kabar Maybank* pada setiap edisi.
- c) Peristiwa: Rubrik yang berisi berita tentang aksi korporasi/kegiatan yang dilakukan Maybank secara *bank-wide* atau Maybank bersama dengan institusi/perusahaan lain serta kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja.
- d) Maybank Group: Rubrik yang berisi berita-berita tentang aksi korporasi/ kegiatan yang dilakukan oleh Grup Maybank.
- e) Apresiasi: Rubrik yang berisi tentang penghargaan yang diberikan Maybank kepada individu dan unit kerja yang memberikan pencapaian terbaik.
- f) Transformasi: Rubrik yang berisi informasi terkait aktivitas transformasi yang sedang berlangsung di perusahaan.
- g) Khasanah Syariah: Rubrik yang berisi informasi terkait aktivitas perbankan syariah guna mendukung implementasi strategi "Syariah First".
- h) Kabar Unit kerja: Rubrik yang berisi tentang kegiatan yang dilakukan oleh cabang dan anak perusahaan.
- i) Pojok Maybank Berbagi: Rubrik yang berisi berita tentang kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/ CSR*) "Maybank Berbagi")
- j) Inspirasi: Rubrik yang berisikan artikel untuk memberikan inspirasi kepada karyawan dan menanamkan budaya kerja serta core values perusahaan.
- k) Info: Rubrik yang berisi tentang informasi ringkas tentang hal-hal yang terkait dengan operasional Maybank dan pengembangan budaya kerja.

INTERNAL COMMUNICATIONS

The Bank uses the following internal media channels to communicate with its employees:

1. Internal Magazine (*Kabar Maybank*)

A 32-page monthly publication (12 editions annually) that contains the following sections:

- a) Regards from the Editor: introduction from the editor, highlighting some main topics in the edition
- b) Focus: news that are relevant to the magazine's main topic/theme
- c) Events: news of corporate actions/Maybank activities bank-wide or Maybank's cooperation with other institutions/companies as well as units' activities
- d) Maybank Group: Articles on corporate actions/ activities of the Maybank Group
- e) Appreciation: Maybank appreciation to individual employees and units for their outstanding performance
- f) Transformation: News on transformation activities that are underway in the Bank
- g) Khasanah Syariah: News on Shariah banking activities in support of 'Shariah First' strategy
- h) Unit News: Activities of branch offices and subsidiaries
- i) Maybank Sharing Corner: News on corporate social responsibility activities ("Maybank Berbagi")
- j) Inspiration: Inspirational articles for employees, focusing on work culture and core values of the Bank
- k) Info: Short articles on Maybank's operations and work culture

Akses Informasi Bank Corporate Information Access

- l) Info Sehat: Rubrik yang berisi tentang informasi seputar kesehatan dan kebugaran.
- m) Engagement: Rubrik yang berisi tentang kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan engagement karyawan
- n) Wisata: Rubrik yang berisi tentang informasi seputar tempat-tempat wisata yang layak dikunjungi oleh karyawan
- o) Intermezzo: Rubrik yang berisi tentang kuis berhadiah bagi para pembaca.

Email blast

Penyampaian informasi kepada seluruh karyawan melalui email Presiden Direktur Maybank dan Corporate Communication diantaranya berupa

- a) Pesan Manajemen: 22 pesan
- b) Ucapan Selamat Hari Raya dan pesan pada perayaan keagamaan: 7 ucapan
- c) Sosialisasi aktivitas/kegiatan perusahaan: 430 info
- d) *Sharing session*: 56 info

Townhall Meeting

Forum komunikasi yang dihadiri oleh manajemen, senior manajemen, pimpinan regional dan pimpinan cabang untuk menginformasikan kinerja perusahaan periode tertentu serta inisiatif-inisiatif yang sedang dan akan dilaksanakan. Selama 2016, *townhall meeting* telah diselenggarakan pada 25 Februari, 18 Maret, 27 Mei, 10 Agustus, 25 Agustus, 24 November.

Maybank Corporate University

Mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan perihal pesan manajemen, kegiatan perusahaan, dan lain-lain melalui portal Maybank Corporate University <http://biportal/>

- a) Pesan Manajemen: 5 pesan
- b) Ucapan Selamat Hari Raya dan pesan pada perayaan keagamaan: 7 ucapan
- c) Sosialisasi Aktivitas/kegiatan perusahaan: 26 Berita

- l) Health info: Health and fitness articles
- m) Engagement: News on activities to improve employee engagement
- n) Tourism: News on tourism objects that are worth visiting
- o) Intermezzo: Quiz for readers with prizes

Email blast

Maybank President Director and Corporate Communication can disseminate information to all employees by way of:

- a) Management's messages: 22 messages
- b) Eid greetings and greetings for other religious celebrations: 7 messages
- c) Information on the Bank's activities: 430 messages
- d) *Sharing session*: 56 messages

Townhall Meeting

Town hall meeting is a communication forum attended by the management, regional management, and branch managers to communicate the Bank's performance during a certain period and ongoing and future initiatives. In 2016, town hall meeting was held on 25 February, 18 March, 27 May, 10 August, 25 August, and 24 November.

Maybank Corporate University

Communications to all employees on the management's message, business activities, and others via Maybank Corporate University <http://biportal/>

- a) Management's message: 5 messages
- b) Ucapan Selamat Hari Raya dan pesan pada perayaan kea Eid greetings and greetings for other religious celebrations: 7 messages
- c) Business activities information: 26 news

Lembar Persetujuan

Approval Sheet

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) 2016

Good Corporate Governance (GCG) Report 2016

Direksi

Board of Directors



Taswin Zakaria

Presiden Direktur

President Director



Thilagavathy Nadason

Direktur

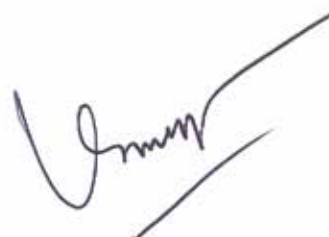
Director



Ghazali Bin Mohd Rasad

Direktur

Director



Jenny Wiriyanto

Direktur

Director



Dhien Tjahajani

Direktur

Director



Eri Budiono

Direktur

Director



Irvandi Ferizal

Direktur

Director



Henky Sulisty*)

Direktur

Director

*) Mengundurkan diri dari jabatan Direktur Maybank Indonesia pada RUPSLB 1 Desember 2016 dan efektif 31 Desember 2016

Resigned from the position of Director of Maybank Indonesia in the EGMS on December 1, 2016, effective as of December 31, 2016

Dewan Komisaris

Board of Commissioners



Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor

Presiden Komisaris

President Commissioner



Datuk Abdul Farid Bin Alias

Komisaris

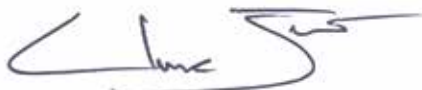
Commissioner



Spencer Lee Tien Chye

Komisaris

Commissioner



Umar Juoro

Komisaris Independen

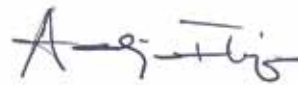
Independent Commissioner



Budhi Dyah Sitawati

Komisaris Independen

Independent Commissioner



Achjar Iljas

Komisaris Independen

Independent Commissioner